

**DISERTASI**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI MISKIN  
DI SULAWESI SELATAN**

***AN ANALYSIS INCOME OF POOR PADDY FARMERS  
IN SOUTH SULAWESI***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan diajukan oleh

**MISBAHUDDIN  
P0500310003**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

**DISERTASI**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI MISKIN  
DI SULAWESI SELATAN**

***AN ANALYSIS INCOME OF POOR PADDY FARMERS  
IN SOUTH SULAWESI***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan diajukan oleh

**MISBAHUDDIN  
P0500310003**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**DISERTASI**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI MISKIN  
DI SULAWESI SELATAN**

***AN ANALYSIS INCOME OF POOR PADDY FARMERS  
IN SOUTH SULAWESI***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan diajukan oleh

**MISBAHUDDIN  
P0500310003**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**DISERTASI**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI MISKIN  
DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**MISBAHUDDIN  
P0500310003**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi  
pada tanggal, **21 Januari 2016** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Promotor

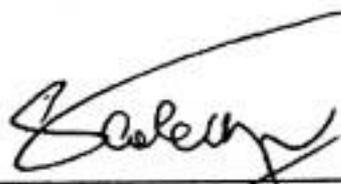


**Prof. Dr. I Made Benyamin, M. Ec**

Kopromotor



**Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si**  
Kopromotor I



**Dr. Muh. Syarkawi Rauf, S.E, M.E**  
Kopromotor II

Ketua Program Studi  
Ilmu Ekonomi



**Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si**



Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Syamsu Bachri, SH., MS.**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBAHUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : P0500310003  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

### ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI MISKIN DI SULAWESI SELATAN

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2015

Yang membuat pernyataan,



MISBAHUDDIN

## ABSTRAK

**MISBAHUDDIN.** *Analisis Pendapatan Petani Padi Miskin di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh I Made Benyamin, Sanusi Fattah dan Muhammad Syarkawi Rauf)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pendapatan petani miskin di Sulawesi Selatan.

Pendekatan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan metode gabungan (mixed method) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Populasi target adalah sentra produksi padi di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang. Penentuan sampel penelitian digunakan rumus Slovin, dengan jumlah sampel 400 orang. Adapun alat analisis yang digunakan sebagai berikut : Analisis Rasio Penerimaan dan Biaya (R/C ratio), Analisis Konsumsi Petani, Z Score dan analisis Nilai Tukar Petani.

Hasil penelitian, implikasi yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pendapatan petani padi sejahtera dan terpenuhi kebutuhan layak minimumnya adalah dengan meningkatkan luas lahan garapannya. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani tidak bisa disamaratakan dengan semua kabupaten, perlu diadakan perhitungan dan analisis tersendiri karena ada daerah yang kapasitas produksinya meningkat bahkan ada yang mengalami penurunan.

Kata kunci : *Pendapatan Petani Padi Miskin, Standar Luas Lahan Minimum dan Nilai Tukar Petani*



## ABSTRACT

**MISBAHUDDIN.** *An Analysis of the Income of Poor Paddy Farmers in South Sulawesi* (Supervised by **I Made Benyamin, Sanusi Fattah, and Muhammad Syarkawi Rauf**)

This study aims to find out and analyse the income of poor paddy farmers in South Sulawesi.

The research used the mixed method, a combination between quantitative and qualitative methods. The target population covered the centres of rice production in South Sulawesi: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, and Pinrang regencies. The samples were selected using the Slovin formula. There were 400 samples. The tools of analysis were the analysis of revenue and cost (R/C ratio), the analysis of farmers' consumption, Z score, and the analysis of farmers' exchange rate.

The implication of this study is that to achieve prosperity with good income and to fulfil the minimum standard necessities, the farmers need to increase the size of the land used for rice cultivation. The policy to increase the farmers' income cannot be the same in all regencies. It is necessary to conduct calculation and specific analysis because the increase of production occurs only in some areas. In some other areas, the production decreases.

Keywords: income of poor paddy farmers, minimum standard of rice field size, farmers' exchange rate



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Disertasi dengan judul "*Analisis Pendapatan Petani Padi Miskin di Sulawesi Selatan*" di bawah bimbingan dan arahan Komisi Pembimbing, telah dapat penulis selesaikan.

Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi, namun kemiskinan petani padi yang tinggi, harga yang rendah, biaya yang tinggi sehingga sangat mempengaruhi pendapatan petani padi. Produksi petani padi tidak mampu memenuhi kebutuhan Konsumsinya yang cenderung lebih tinggi daripada hasil produksinya. Kondisi ini menyebabkan petani padi miskin, Produksi meningkat akan tetapi petani padi tetap miskin telah menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut di atas. Penelitian ini penulis lakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian, keikutsertaan serta sumbang pemikiran terhadap isu strategis dan realitas yang terjadi saat ini maupun solusi alternatif dan langkah antisipatif terhadap kondisi yang terjadi pada petani padi di Sulawesi Selatan khususnya berdasarkan pendekatan ilmiah.

Atas tersusunnya Disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. I **Made Berlyamin, M.Ec** (Promotor), Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si dan Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE, M.E (Ko Promotor) atas curahan waktu dan pikirannya dalam memberikan arahan dan petunjuk yang komprehensif serta motivasi yang sangat berharga sejak penyusunan proposal, kegiatan penelitian hingga penyusunan dan selesainya disertasi ini; terimakasih pula kepada para penguji ; 1. Prof. Dr. H. Salamun Pasda, M.Si Prof. H. A. Karim Saleh, Prof. Dr. Rahmatia Yunus. Dr. Madris, DPS, SE, M.Si, Dr, Agus Salim, SE, M.Si dan Dr. Nursini, SE, MA.
2. Kedua Orang Tua saya termakasih yang tak terhingga atas pengorbanaannya selama ini, yang tak dapat dinilai dengan apapun,
3. Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Sekretaris Program beserta staf, yang senantiasa memberikan motivasi dan layanan administrasi yang baik selama ini;
4. Terimakasih juga para dosen PPS Ilmu Ekonomi Unhas dan para guru – guru saya yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menggapai cita cita ini.
5. Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
6. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan beserta stafnya.
8. Kepala Biro Pusat Statistik.
9. Pimpinan dan Staf P2E LIPI.
10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Bupati, Sekretaris Kabupaten, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap dan Pinrang.
12. Direktur dan Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Pare Pare.
13. Ketua dan Direktur Pasca Sarjana serta civitas akademika STIM LPI Makassar.
14. Ketua Yayasan BAP OMPO dan Lembaga Pendidikan Indonesia.
15. Direktur dan civitas akademika AMP - API Makassar
12. Dekan dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar.
13. Ketua dan Pengurus Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan.



14. Kepada Keluarga, mertua, istri, anak – anakku, saudara dan handaitauland terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
15. Semua pihak yang telah berkontribusi langsung ataupun tidak langsung, baik moril maupun materil sejak kuliah, penyusunan proposal, dan selama kegiatan penelitian di lapangan hingga penyusunan dan selesainya Disertasi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, motivasi dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan dalam Disertasi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan, serta memperoleh imbalan yang terbaik disisi Allah SWT. Amin.

Makassar, Januari 2016

MISBAHUDDIN

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	26
1.3. Tujuan Penelitian	28
1.4. Kegunaan Penelitian	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>31</b>
2.1. Hubungan Produksi, Konsumsi dan Kemiskinan Petani	31
2.1.1. Pertanian, dan Kemiskinan Petani	31
2.1.2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	34
2.1.4. Penyebab Kemiskinan	36
2.1.5. Teori Anne Both	38
2.2. Klasifikasi Petani Padi Miskin Berdasarkan Kegiatan Usaha Tani	39
2.3. Kajian Tentang Ekonomi dan Kemiskinan Rumah Tangga Petani Padi	42
2.3.1. Kajian tentang Teori Ekonomi Petani (Chayanov)	42
2.3.2. kajian tentang teori Ekonomi Petani oleh Becker	49
2.3.3. Teori Ekonomi Petani Miskin	56
2.3.4. Teori dan Konsep Tentang Produksi dan Konsumsi	64
2.3.5. Kajian Model Produksi pada Dimensi Jangka Pendek dan Jangka Panjang	66
2.3.6. Model Produksi Hubungan dengan Satu Faktor Produksi Variabel	66
2.3.7. Analisis Model Produksi Total, Produksi Marjinal, dan Produksi Rata – Rata	69
2.3.8. Analisis kebutuhan Pangan Dengan Teori Konsumsi Rumah Tangga Petani Padi	
2.3.9. Konsep dan Implikasi Model Ekonomi RumahTangga Pertanian	65
2.3.10. Analisis Hubungan Teori Pendapatan dan Rumah Tangga Petani dan Model Empiris Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Petani Padi dalam Berusaha Tani	76

2.3.11. Analisis Pendapatan Terhadap Konsumsi Petani dan RumahTangga Petani Padi	80
2.4. Posisi Penelitian.	
2.4.1. Sistem Pertanian, Petani dan Kemiskinan	82
2.4.2. Analisis Kemampuan Ekonomi Petani	87
2.4.3. Hubungan harga Beras/gabah Terhadap Nilai Tukar Petani(NTP)	89
2.4.4. Penelitian Model Ekonomi Petani Padi dan Dampak Kebijakan Pemerintah	90
2.4.5. Studi Masri Singarimbun	103
<b>BAB. III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	<b>135</b>
3.1. Kerangka Konseptual	135
3.2. Hipotesis	146
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>148</b>
4.1. Jenis dan Rancangan Penelitian	148
4.2. Instrumen Penelitian	148
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian	149
4.4. Jenis dan Sumber Data	152
4.5. Teknik pengumpulan data	153
4.5.1. Observasi	153
4.5.2. Kuesioner	153
4.5.3. Dokumentasi	154
4.6. Metode dan Alat Analisis	154
4.7. Definisi Operasional	161
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	<b>164</b>
5.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	164
5.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	164
5.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	165
5.1.3. Penggunaan Lahan	165
5.2. Karakteristik Wilayah Penelitian	166
5.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	166
5.2.1. a. Potensi Pengembangan Wilayah	167
b. Kawasan Pertanian	167
c. Demografi	169
d. Kondisi Jaringan Irigasi	171
5.3. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang	171
5.3.1. Keadaan Geografis	171
5.3.2. Kependudukan	171
5.3.3. Gambaran Umum Usaha Pertanian di Kabupaten Pinrang	173
5.4. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	175
5.4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah	175
5.4.2. Luas Wilayah	175

2.3.11. Analisis Pendapatan Terhadap Konsumsi Petani dan RumahTangga Petani Padi	80
2.4. Posisi Penelitian.	
2.4.1. Sistem Pertanian, Petani dan Kemiskinan	82
2.4.2. Analisis Kemampuan Ekonomi Petani	87
2.4.3. Hubungan harga Beras/gabah Terhadap Nilai Tukar Petani(NTP)	89
2.4.4. Penelitian Model Ekonomi Petani Padi dan Dampak Kebijakan Pemerintah	90
2.4.5. Studi Masri Singarimbun	103
<b>BAB. III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	<b>135</b>
3.1. Kerangka Konseptual	135
3.2. Hipotesis	146
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>148</b>
4.1. Jenis dan Rancangan Penelitian	148
4.2. Instrumen Penelitian	148
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian	149
4.4. Jenis dan Sumber Data	152
4.5. Teknik pengumpulan data	153
4.5.1. Observasi	153
4.5.2. Kuesioner	153
4.5.3. Dokumentasi	154
4.6. Metode dan Alat Analisis	154
4.7. Definisi Operasional	161
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	<b>164</b>
5.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	164
5.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	164
5.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	165
5.1.3. Penggunaan Lahan	165
5.2. Karakteristik Wilayah Penelitian	166
5.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	166
5.2.1. a. Potensi Pengembangan Wilayah	167
b. Kawasan Pertanian	167
c. Demografi	169
d. Kondisi Jaringan Irigasi	171
5.3. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang	171
5.3.1. Keadaan Geografis	171
5.3.2. Kependudukan	171
5.3.3. Gambaran Umum Usaha Pertanian di Kabupaten Pinrang	173
5.4. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	175
5.4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah	175
5.4.2. Luas Wilayah	175



5.4.3. Kependudukan	176
5.4.4. Penggunaan Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	178
5.4.5. Pertanian Tanaman Padi	178
5.5. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng	180
5.5.1. Aspek Geografi dan Demografi	180
5.5.2. Ketahanan Pangan	182
5.5.3. Pertanian	182
5.6. Gambaran Umum Kabupaten Wajo	183
5.6.1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah	183
5.7. Karakteristik Rumah Tangga Petani	185
5.7.1. Umur dan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	185
5.8. Karakteristik Rumah Tangga Petani Sampel	185
5.9. Keragaman Usaha Tani Padi Sawah	186
5.10. Analisis Konsumsi Petani di Sulsel	192
5.11. Penetapan Luas Lahan Minimum	195
5.12. Penetapan Man Ekuivalen Unit Petani Padi Miskin	196
5.13. Penyusunan Rekomendasi Untuk Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah	200
5.14. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi	205
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b>	<b>213</b>
6.1. Pendapatan Usaha Tani Padi	216
6.2. Pembahasan Luas Lahan Minimum	217
6.3. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Petani (petani pemilik dan penggarap lahannya Sendiri, Pemilik saja atau penggarap saja dan buruh tani	219
6.4. Man Ekuivalen Unit Petani Padi Miskin (petani pemilik dan penggarap lahannya Sendiri, Pemilik saja atau penggarap saja dan Buruh tani	220
6.5. Pembahasan Peningkatan Usaha Tani padi	224
6.6. Pembahasan Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi	226
6.7. Pembahasan Garis batas Kemiskinan dan Land Operation Usaha Tani Petani Padi Miskin	232
6.8. Kapasitas Produksi dan Kebutuhan Konsumsi	233
6.9. Pembahasan Strategi Peningkatan Pendapatan Petani padi Miskin	236
6.9.1. Peningkatan Efisiensi Usaha Tani Padi	236
6.9.2. Pemberian Insentif	238
6.10. Pembahasan Kebutuhan Lahan Petani Padi Miskin	240
<b>BAB VII SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>242</b>
7.1. Simpulan	241
7.2. Implikasi Teoritis dan Empiris Hasil Penelitian	242
7.3. Keterbatasan Penelitian	243
7.4. Saran	244

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Penduduk Miskin menurut sekor di Provinsi Sulawesi Selatan	7
1.2. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Priode 2007 – 2013	8
1.3. Pertumbuhan Rill setiap sub sektor pada sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 – 2011	9
1.4. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan Provinsi Sulawesi Selatan Proide 2008 - 2012	10
2.2 Perkembangan Penelitian - Penelitian Yang Berkaitan dengan Aspek petani padi dan Ekonomi Rumah Tangga	85
2.3 Tinjauan Empiris	97
4.1 Jumlah Populasi Petani Beras	130
5.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012	141
5.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011	143
5.3 Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian Produksi Berdasarkan Kecamatan kabupaten Bone	145
5.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2012	147
5.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Bone Tahun 2011	148
5.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (7 Tahun ke atas) di Kabupaten Bone Tahun 2010	149
5.11 Kondisi Jaringan Irigasi	150
5.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang, menurut jenis kelamin berdasarkan sensus penduduk tahun 2010	152
5.13 Banyaknya Usaha Pertanian Kabupaten Pinrang Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 Menurut Kecamatan dan Cakupan Usaha	153

5.14 Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan (Ha), 2013	155
5.15 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013	156
5.16 Jumlah Desa/Kelurahan, Luas, Rumah Tangga, Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013	156
5.17 Penggunaan Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupten Sidenreng Rappang (Ha2)	157
5.18 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Ha) pada tahun 2013	158
5.19 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2007-2012	161
5.23 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2012	162
5.24 Jumlah penduduk Kabupaten Wajo dan kepadatannya Tahun 2012	163
5.25 Rata-Rata Distribusi Umur Kepala Keluarga (KK) Petani	164
5.26. Rata-Rata Distribusi Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga (KK) Petani	165
5.27 Hasil analisis usaha tani padi pada dua topologi lahan sawah di lima kabupaten wilayah penelitian (ha tahun-1) Tahun 2014	166
5.28 Rasio Lahan Terhadap Petani Dan Penduduk	167
5.29 Rincian biaya usaha tani pada lima kabupaten di Sulsel	169
5.30 Konsumsi Petani Padi Sawah	172
5.31 Analisis Pendapatan dan Konsumsi Petani di Sulsel	173
5.32 Perhitungan Z skore di lima kabupaten di SulSel	174
5.33 Matriks input-output program linier usaha tani padi sawah irigasi teknis	180
5.34. Matriks Input – Output program Linear Usaha Tani Padi Sawah Tadah Hujan	180
5.35 Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulsel	186

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2013	4
1.2. Relevansi dengan Tingkat Kemiskinan Nasional 2008 – 2013	5
1.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002 – 2013	5
1.4 Kondisi Kemiskinan menurut Pendudukan Kota dan Desa Di Sulawesi Selatan	6
2.3 Skematis Multidimensional Keterbelakangan	27
2.4. Beberapa Faktor Utama yang Mempengaruhi Kemiskinan Pedesaan	29
3.1. Kerangka Konseptual	124

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Secara nasional berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan telah dilakukan, dimana kemiskinan tertinggi berada di perdesaaan, pada umumnya penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi. Sejatinnya pembangunan pertanian diperdesaan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sesuai tujuan pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, penanganan masalah pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pembangunan yang dikemukakan oleh Romer, pembangunan negara tidak hanya membutuhkan investasi atau modal fisik saja namun perlu adanya *technologycal progress* agar masalah ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran dapat terselesaikan. Sejatinnya tujuan pembangunan suatu negara adalah kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat (Yustika, 2002).

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sektor pertanian memegang peranan penting sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto dan penyumbang devisa. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua (14,7%) setelah industri (24,3%) dalam Produk Domestik Bruto

Indonesia tahun 2011. Dari 112,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada tahun 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak (36,52%). Lebih dari itu sektor pertanian memiliki keunggulan khas dari sektor-sektor lain dalam perekonomian, antara lain, produksi pertanian berbasis pada sumberdaya domestik, kandungan impornya rendah dan relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian eksternal, dengan demikian upaya mempertahankan dan meningkatkan peranan sektor pertanian merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini terbukti dari fakta empiris, di saat Indonesia menghadapi krisis dan secara nasional mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif yaitu berkisar -13,6% menurut perhitungan BPS pada tahun 1998, hanya sektor pertanian yang tumbuh positif yaitu 5,32% pada triwulan I tahun 1998. (Solahuddin, 2009). Pelaksanaan pembangunan subsector tanaman pangan sebagai hasil pemanfaatan sumber-sumber dalam rangka otonomi daerah harus dapat memperkuat posisi petani, pelaku agribisnis lainnya serta aparaturnya pertanian.

Pembangunan pertanian tanaman pangan padi secara khusus dipandang sebagai rangkaian berbagai kegiatan yang mengimplementasikan konsep agribisnis secara utuh dan terkait erat dengan pembangunan wilayah pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, yang jika dikelola dengan baik dan benar sudah tentu akan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi negara. Perwujudan konsep dasar ini diperlukan penajaman pendekatan dan arah

pembangunan dengan melakukan reorientasi dan reposisi subsector tanaman pangan dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional.

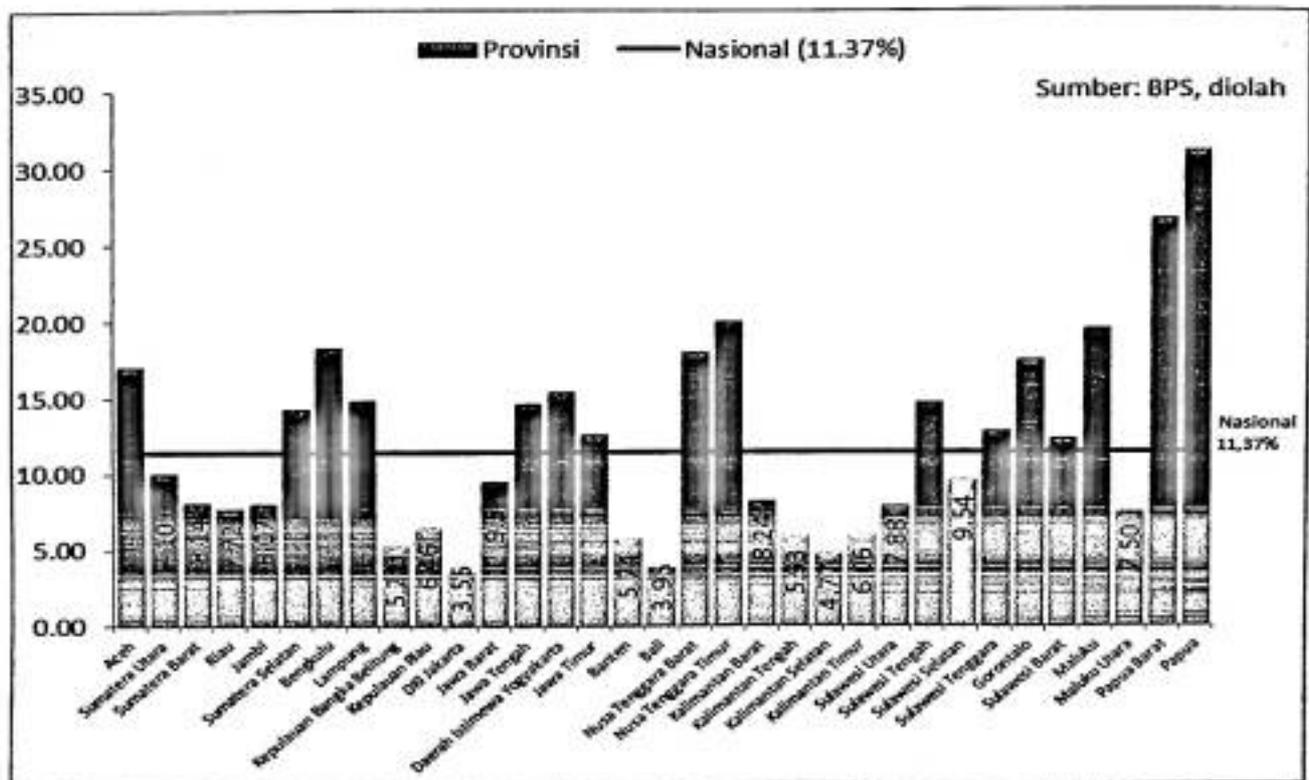
Tanaman pangan padi merupakan komoditas strategis nasional dan memiliki sensitivitas yang tinggi ditinjau dari aspek politis, ekonomi, dan kerawanan sosial. Peran strategis padi dalam perekonomian nasional adalah: (1) merupakan bahan pangan pokok bagi 95% lebih penduduk Indonesia dengan pangsa konsumsi energy dan protein yang berasal dari beras lebih dari 55%; (2) sekitar 30% total pengeluaran rumah tangga miskin di alokasikan untuk beras; dan (3) usahatani padi menyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi lebih dari 25,6 juta rumah tangga petani (Suryana, 2005).

Pencapaian hasil sektor pertanian dibuktikan dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2007 - 2008 mengalami pertumbuhan yang mengesankan, yaitu sekitar 4.41 persen. Selain itu berdasarkan data kemiskinan tahun 2005-2008, kesejahteraan penduduk perdesaan dan perkotaan membaik secara berkelanjutan. Berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa yang paling besar kontribusinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan sector pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam menurunkan jumlah penduduk miskin mencapai 66%, dengan rincian 74% di pedesaan dan 55% di perkotaan (Munif, 2009).



Masalah kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan saat ini khususnya pembangunan pertanian. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras utama di Indonesia tingkat kemiskinannya sekalipun relatif menurun, tetapi persentasenya cenderung masih cukup tinggi. Kondisi dan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dapat di lihat dalam gambar sebagai berikut

**Gambar 1.1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2013**

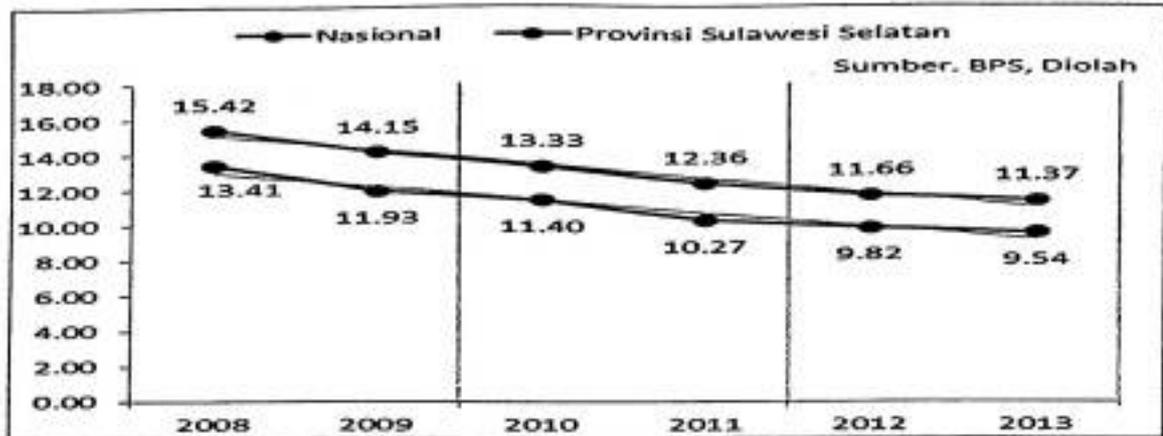


Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, tampak bahwa tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2013 sebesar 9.54 % yang berada di bawah prosentase rata-rata nasional 11.37 %. Adapun relevansi kemiskinan

di Sulawesi Selatan dengan tingkat kemiskinan secara nasional periode 2008  
2013 tergambar sebagai berikut:



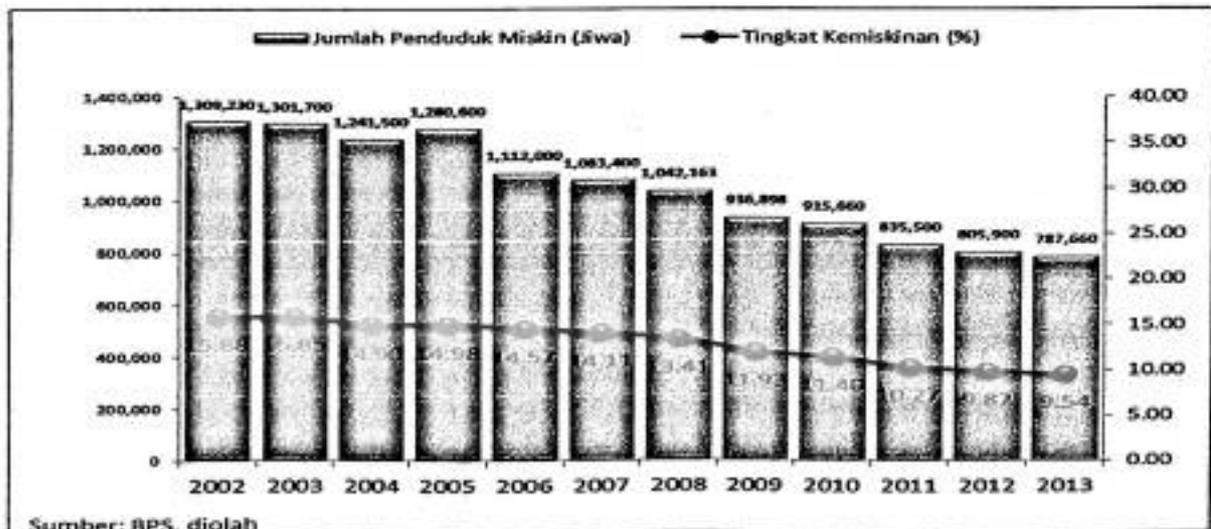
**Gambar 1.2. Relevansi dengan Tingkat Kemiskinan Nasional 2008 – 2013**



Sumber : Bappeda Prov. Sulsel, 2014

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, tampak bahwa selama kurun waktu 6 tahun prosentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dan masih di bawah dari rata - rata prosentase nasional, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.3 di bawah ini:

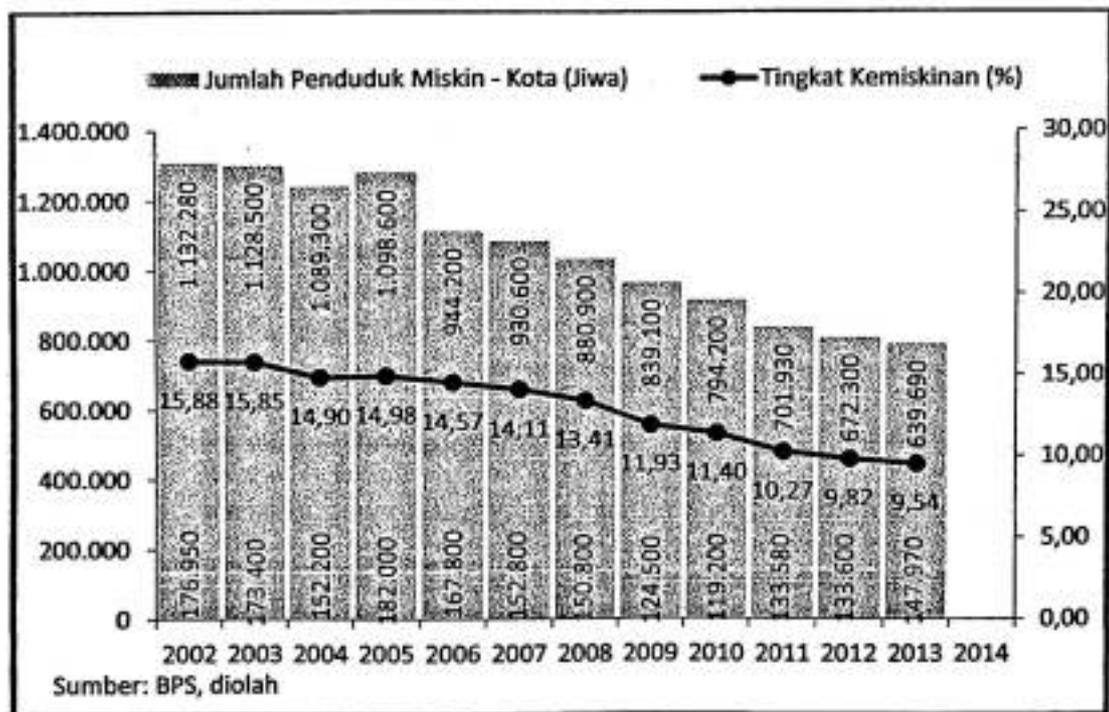
**Gambar 1.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002 – 2013**



Sumber : BPS, 2014

Pada Gambar 1.3 di atas, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan perubahannya. Adapun jumlah penduduk miskin tahun 2002 yaitu 1.309.230 jiwa dan di tahun 2013 jumlah penduduk miskin telah menjadi 787.660 jiwa. Dari jumlah penduduk miskin tersebut ternyata komposisi penduduk miskin di desapada umumnya petani lebih tinggi dibanding penduduk kota. Untuk jelasnya di ditampilkan pada Gambar 1.4 berikut.

**Gambar 1.4. Kondisi Kemiskinan menurut Pendudukan Kota dan Desa Di Sulawesi Selatan**



Pada Gambar 1.4 di atas, tampak bahwa jumlah proporsi penduduk miskin di desalebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin di kota di Sulsel. Untuk tahun 2013 saja jumlah penduduk miskin di kota hanya

147.970 jiwa sementara di desa jumlahnya mencapai 639.690 jiwa, jadi lebih dari 4 kali lipat jumlah orang miskin desa dibanding kota.

Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin menurut sektor ekonomi berdasarkan data statistik 2013 diperoleh bahwa dari semua lini sektor ekonomi, jumlah penduduk miskin terbesar berada di sektor pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan), dan kecenderungannya meningkat selama periode 2007 - 2012. Dari proporsi penduduk miskin di sektor pertanian di atas menunjukkan, kantong kemiskinan di Sulawesi Selatan masih terdapat pada mereka yang bekerja di sektor pertanian, yaitu mereka yang bergantung pada pekerjaan sebagai petani gurem, nelayan, buruh tani/perkebunan serta; pencari kayu atau pemungutan hasil hutan. Sekalipun dari jumlah penduduk miskin di sektor ini mengalami penurunan, kontribusi sektor pertanian dalam penciptaan kemiskinan di Sulawesi Selatan masih cukup besar.

Jika dibandingkan dengan struktur ekonomi Sulawesi Selatan, maka sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar di antara sektor lainnya pada PDRB. Lebih jelas ditampilkan pada Tabel 2. berikut.



**Tabel 1.3. Pertumbuhan Riil Setiap Sub-sektor pada Sektor Pertanian Sulsel, Tahun 2007 – 2011 (dalam persen)**

Sub-Sektor	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tabama	6,78	8,21	6,19	1,21	5,33
2. Perkebunan	-4,00	0,53	3,13	-0,19	5,62
3. Peternakan	6,03	6,50	5,93	6,81	9,31
4. Kehutanan	0,46	-1,55	0,50	1,80	3,26
5. Perikanan	3,47	7,33	2,97	6,11	8,87
Sektor Pertanian	3,21	6,09	4,68	2,34	6,45

Sumber : PDRB Sulawesi Selatan tahun 2012

Mencermati Tabel 1.3. di atas, tampak bahwa khusus PDRB sektor pertanian yang memegang peranan besar dalam aktivitas konsumsi rumah tangga pertumbuhannya sangat fluktuatif. Dimana tahun 2011 hanya mengalami peningkatan sebesar 5.33 persen dan yang sangat memprihatinkan bahwa di tahun 2010 peningkatannya hanya 1,21 persen. Sedangkan sub sektor peternakan dan perikanan pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus tanaman bahan makanan (tabama) pada tiga jenis komoditas yaitu padi, jagung dan kedelai, produksi terbesar masih komoditas padi di mana dari tahun 2008 – 2012 terus mengalami kenaikan, kemudian diikuti oleh produksi jagung yang juga secara umum meningkat. Lebih jelas ditampilkan pada Tabel 1.4. Berikut.



**Tabel 1.4. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan Priode 2008- 2012**

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	PADI (ton)	4,083,354	4,324,178	4,382,443	4,511,704	5,003,010
	Nilai Produksi (Rp. juta)	11,637,559	12,972,534	14,242,940	17,031,683	21,012,642
2	JAGUNG (ton)	1,195,064	1,395,742	1,343,043	1,420,154	1,515,330
	Nilai Produksi (Rp. juta)	2,091,362	2,651,910	2,652,510	2,840,308	4,015,625
3	KEDELAI (ton)	29,125	41,279	35,710	33,716	29,938
	Nilai Produksi (Rp. juta)	174,750	247,674	221,402	219,154	229,026

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2013

Pada Tabel 1.4. di atas tampak bahwa produksi padi di tahun 2012 mencapai 5 juta ton sedangkan kebutuhan konsumsi beras untuk rumah tangga Sulsel hanya 800.000 Ton sehingga terjadi surplus beras. Adapun sumbangsih stok beras Sulawesi Selatan adalah dari 11 kabupaten dan kota yang menjadi penghasil dari beras serta gabah kering giling (GKG) diantaranya Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Pinrang, Palopo, Luwu dan Bulukumba yang menjadi daerah paling banyak menyuplai beras.

Jika melihat hasil produksi padi yang meningkat ternyata tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan taraf ekonomi rumah tangga petani. Jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik, tampak jelas bahwa, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2011, meningkat menjadi 835.910 orang atau meningkat 0,31 persen dari Maret 2011. Meskipun peningkatannya relatif kecil, namun peningkatan tersebut telah memberi citra dan persepsi kurang

baik bagi efektifitas penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peningkatan ini juga berpotensi memunculkan kesangsian atas berbagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah (Agussalim, 2012).

Sumber penyebab utama kemiskinan pedesaan di Sulawesi Selatan yang sebagian besar berpenghasilan utama sebagai petani padi adalah karena sebagian besar petani tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Jumlah petani kecil secara nasional menurut Sensus Pertanian 2003 mencapai 56,4 persen (BPS, 20011), sedangkan data penelitian tahun 2011 penguasaan lahan petani padi miskin semakin menurun hanya sekitar 0,3 hektar (Deptan, Susenas 2012).

Jika angka kemiskinan di Sulawesi Selatan dikomparasikan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan menempati urutan teratas, meskipun dari segi persentase menempati urutan kedua sesudah Sulawesi Utara. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dua kali lipat lebih besar dari Sulawesi Tengah dan empat kali lipat dari Sulawesi Utara dan Gorontalo. Namun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan hanya setengah dari Gorontalo, dimana Gorontalo merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi.(Agussalim, 2012).

Jika diamati lebih lanjut dalam perspektif wilayah (kota-desa), tampak jelas bahwa wilayah perdesaan merupakan tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin, yaitu mencapai 84,01 persen dari total

penduduk miskin. Artinya, setiap 10 orang penduduk miskin di Sulawesi Selatan, lebih dari 8 orang bermukim di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan juga relatif cukup besar, yaitu mencapai 13,63 persen dari total penduduk perdesaan. Bandingkan dengan perkotaan yang hanya mencatat angka 4.48 persen. (Agussalim, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2011 yang dilakukan di desa – desadi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa usahatani padi sawah yang dilakukan oleh rumah tangga petani pemilik dan sekaliguspenggarap menguntungkan. Dengan memperhitungkan seluruh biaya riil yang dikeluarkan dan telah memperhitungkan sewa lahan maka keuntungan usahatani padi sawah didesa-desa rata-rata mencapai Rp. 7,4juta/ hektar per musim tanah(nilai *Revenue/Cost*atau *R/C* adalah 1.97). Luas lahan usaha tani setiap rumah tangga yang diperlukan untuk mencapai *Break event point (BEP)* usahatani padi secara rata-rata sebesar 0.51 hektar, (Susenas, BPS, Deptan, 2012).

Jika dibandingkan dengan struktur ekonomi Sulawesi Selatan, maka sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar di antara sektor lainnya pada PDRB. Lebih jelas ditampilkan pada Tabel 2. berikut.

**Tabel 1.2. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2007 – 2011 (dalam persen)**

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011	Nas. 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	30,17	29,45	28,02	25,83	25,32	14,72
2. Pertambangan/Penggalian	8,51	7,28	5,51	6,04	6,07	11,93
3. Industri Pengolahan	13,22	12,99	12,52	12,27	12,22	24,28
4. Listrik, Gas, dan Air	1,04	0,98	0,95	0,92	0,91	0,75
5. Bangunan	4,63	5,00	5,39	5,54	5,65	10,19
6. Perdagangan	15,86	16,34	16,70	17,34	17,64	13,76
7. Angkutan dan Komunikasi	8,33	8,19	7,96	8,01	7,90	6,61
8. Lembaga Keuangan	6,19	6,11	6,24	6,63	6,92	7,20
9. Jasa-jasa	12,06	13,66	16,71	17,42	17,37	10,55

Sumber : PDRB Sulsel tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas tampak bahwa struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2007 – 2011 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian masih cukup besar meskipun terjadi penurunan di tahun 2011. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata - rata 12.29 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumahtangga perekonomiannya masih mengandalkan pertanian tanaman pangan. Subsektor tanaman bahan makanan mencakup komoditas tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur sayuran dan buah-buahan serta tanaman bahan makanan lainnya. Sedangkan selebihnya adalah perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Adapun pertumbuhan riil setiap sub sektor pada sektor pertanian ditampilkan pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3. Pertumbuhan Riil Setiap Sub-sektor pada Sektor Pertanian Sulsel, Tahun 2007 – 2011 (dalam persen)**

Sub-Sektor	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tabama	6,78	8,21	6,19	1,21	5,33
2. Perkebunan	-4,00	0,53	3,13	-0,19	5,62
3. Peternakan	6,03	6,50	5,93	6,81	9,31
4. Kehutanan	0,46	-1,55	0,50	1,80	3,26
5. Perikanan	3,47	7,33	2,97	6,11	8,87
Sektor Pertanian	3,21	6,09	4,68	2,34	6,45

Sumber : PDRB Sulawesi Selatan tahun 2012

Mencermati Tabel 1.3. di atas, tampak bahwa khusus PDRB sektor pertanian yang memegang peranan besar dalam aktivitas konsumsi rumah tangga pertumbuhannya sangat fluktuatif. Dimana tahun 2011 hanya mengalami peningkatan sebesar 5.33 persen dan yang sangat memprihatinkan bahwa di tahun 2010 peningkatannya hanya 1,21 persen. Sedangkan sub sektor peternakan dan perikanan pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus tanaman bahan makanan (tabama) pada tiga jenis komoditas yaitu padi, jagung dan kedelai, produksi terbesar masih komoditas padi di mana dari tahun 2008 – 2012 terus mengalami kenaikan, kemudian diikuti oleh produksi jagung yang juga secara umum meningkat. Lebih jelas ditampilkan pada Tabel 1.4. Berikut.

**Tabel 1.4. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan Priode 2008- 2012**

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	PADI (ton)	4,083,354	4,324,178	4,382,443	4,511,704	5,003,010
	Nilai Produksi (Rp. juta)	11,637,559	12,972,534	14,242,940	17,031,683	21,012,642
2	JAGUNG (ton)	1,195,064	1,395,742	1,343,043	1,420,154	1,515,330
	Nilai Produksi (Rp. juta)	2,091,362	2,651,910	2,652,510	2,840,308	4,015,625
3	KEDELAI (ton)	29,125	41,279	35,710	33,716	29,938
	Nilai Produksi (Rp. juta)	174,750	247,674	221,402	219,154	229,026

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2013

Pada Tabel 1.4. di atas tampak bahwa produksi padi di tahun 2012 mencapai 5 juta ton sedangkan kebutuhan konsumsi beras untuk rumah tangga Sulsel hanya 800.000 Ton sehingga terjadi surplus beras. Adapun sumbangsih stok beras Sulawesi Selatan adalah dari 11 kabupaten dan kota yang menjadi penghasil dari beras serta gabah kering giling (GKG) diantaranya Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Pinrang, Palopo, Luwu dan Bulukumba yang menjadi daerah paling banyak menyuplai beras.

Jika melihat hasil produksi padi yang meningkat ternyata tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan taraf ekonomi rumah tangga petani. Jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik, tampak jelas bahwa, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2011, meningkat menjadi 835.910 orang atau meningkat 0,31 persen dari Maret 2011. Meskipun peningkatannya relatif kecil, namun peningkatan tersebut telah memberi citra dan persepsi kurang

baik bagi efektifitas penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peningkatan ini juga berpotensi memunculkan kesangsian atas berbagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah (Agussalim, 2012).

Jika dibandingkan dengan struktur ekonomi Sulawesi Selatan, maka sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar di antara sektor lainnya pada PDRB. Lebih jelas ditampilkan pada Tabel 2. berikut.

**Tabel 1.2. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2007 – 2011 (dalam persen)**

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011	Nas. 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	30,17	29,45	28,02	25,83	25,32	14,72
2. Pertambangan/Penggalian	8,51	7,28	5,51	6,04	6,07	11,93
3. Industri Pengolahan	13,22	12,99	12,52	12,27	12,22	24,28
4. Listrik, Gas, dan Air	1,04	0,98	0,95	0,92	0,91	0,75
5. Bangunan	4,63	5,00	5,39	5,54	5,65	10,19
6. Perdagangan	15,86	16,34	16,70	17,34	17,64	13,76
7. Angkutan dan Komunikasi	8,33	8,19	7,96	8,01	7,90	6,61
8. Lembaga Keuangan	6,19	6,11	6,24	6,63	6,92	7,20
9. Jasa-jasa	12,06	13,66	16,71	17,42	17,37	10,55

Sumber : PDRB Sulsel tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas tampak bahwa struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2007 – 2011 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian masih cukup besar meskipun terjadi penurunan di tahun 2011. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata - rata 12.29 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga perekonomiannya masih mengandalkan pertanian

tanaman pangan. Subsektor tanaman bahan makanan mencakup komoditas tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur sayuran dan buah-buahan serta tanaman bahan makanan lainnya. Sedangkan selebihnya adalah perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Adapun pertumbuhan riil setiap sub sektor pada sektor pertanian ditampilkan pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3. Pertumbuhan Riil Setiap Sub-sektor pada Sektor Pertanian Sulsel, Tahun 2007 – 2011 (dalam persen)**

Sub-Sektor	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tabama	6,78	8,21	6,19	1,21	5,33
2. Perkebunan	-4,00	0,53	3,13	-0,19	5,62
3. Peternakan	6,03	6,50	5,93	6,81	9,31
4. Kehutanan	0,46	-1,55	0,50	1,80	3,26
5. Perikanan	3,47	7,33	2,97	6,11	8,87
Sektor Pertanian	3,21	6,09	4,68	2,34	6,45

Sumber : PDRB Sulawesi Selatan tahun 2012

Mencermati Tabel 1.3. di atas, tampak bahwa khusus PDRB sektor pertanian yang memegang peranan besar dalam aktivitas konsumsi rumah tangga pertumbuhannya sangat fluktuatif. Dimana tahun 2011 hanya mengalami peningkatan sebesar 5.33 persen dan yang sangat memprihatinkan bahwa di tahun 2010 peningkatannya hanya 1,21 persen. Sedangkan sub sektor peternakan dan perikanan pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus tanaman bahan makanan (tabama) pada tiga jenis komoditas yaitu padi, jagung dan kedelai, produksi terbesar masih komoditas padi di mana dari tahun 2008 – 2012 terus mengalami kenaikan, kemudian diikuti oleh produksi jagung yang juga secara umum meningkat. Lebih jelas ditampilkan pada Tabel 1.4. Berikut.

**Tabel 1.4. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan Priode 2008- 2012**

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	PADI (ton)	4,083,354	4,324,178	4,382,443	4,511,704	5,003,010
	Nilai Produksi (Rp. juta)	11,637,559	12,972,534	14,242,940	17,031,683	21,012,642
2	JAGUNG (ton)	1,195,064	1,395,742	1,343,043	1,420,154	1,515,330
	Nilai Produksi (Rp. juta)	2,091,362	2,651,910	2,652,510	2,840,308	4,015,625
3	KEDELAI (ton)	29,125	41,279	35,710	33,716	29,938
	Nilai Produksi (Rp. juta)	174,750	247,674	221,402	219,154	229,026

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2013

Pada Tabel 1.4. di atas tampak bahwa produksi padi di tahun 2012 mencapai 5 juta ton sedangkan kebutuhan konsumsi beras untuk rumah tangga Sulsel hanya 800.000 Ton sehingga terjadi surplus beras. Adapun sumbangsih stok beras Sulawesi Selatan adalah dari 11 kabupaten dan kota yang menjadi penghasil dari beras serta gabah kering giling (GKG) diantaranya Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Pinrang, Palopo, Luwu dan Bulukumba yang menjadi daerah paling banyak menyuplai beras.

Jika melihat hasil produksi padi yang meningkat ternyata tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan taraf ekonomi rumah

tangga petani. Jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik, tampak jelas bahwa, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2011, meningkat menjadi 835.910 orang atau meningkat 0,31 persen dari Maret 2011. Meskipun peningkatannya relatif kecil, namun peningkatan tersebut telah memberi citra dan persepsi kurang baik bagi efektifitas penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peningkatan ini juga berpotensi memunculkan kesangsian atas berbagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah (Agussalim, 2012).

Kebutuhan luas lahan ini dapat berkurang karena pada kenyataannya rumahtangga petani tidak hanya menggantungkan pendapatan mereka dari sektor pertanian saja tetapi juga dari sektor non pertanian. Dari hasil penelitian tahun 2010 ini yang dilakukan oleh Departemen Pertanian diketahui bahwa kontribusi pendapatan rumahtangga dari sektor pertanian hanya 59.5 persen, selebihnya sebesar 40,5 persen adalah kontribusi dari sektor non pertanian. Sebagai ilustrasi, rumahtangga pemilik penggarap usahatani padi. Dengan rata-rata luas lahan 0.44 hektar, rata-rata pendapatan total dari pertanian dan non pertanian mencapai Rp. 35,2 juta per tahun, atau Rp. 8,84 juta/kapita/tahun. Dengan mengacu pada total pendapatan rumahtangga dari sektor pertanian dan non pertanian tersebut, maka kebutuhan lahan minimal agar petani mencapai atau melewati Garis Kemiskinan akan dapat ditekan.

Terbatasnya kemampuan bertani bagi petani penggarap sebagaimana yang di alami di Sulawesi Selatan khususnya di Sentra produksi padi lebih disebabkan oleh:

1. Petani menganggap lahan garapan mereka sebagai sumber mata pencaharian turun temurun yang tetap dan tidak akan diganggu lagi.
2. Petani merasa puas dengan usaha yang dijalankan tanpa harus mencari atau memikirkan modal, karena telah ada pemodal dari luar petani.
3. Dari segi pemasaran hasil, masyarakat petani tidak terlalu memikirkan karena pemilik modal akan mengambil langsung ke petani.
4. Belum adanya lembaga atau instansi terkait yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada masyarakat petani untuk mengembangkan ke jenis komoditas lain.
5. Masyarakat petani penggarap lebih banyak menghabiskan waktu untuk tinggal di desa dan kurang menerima informasi pembangunan.

Terkait masalah lahan garapan persawahan, konversi lahan pertanian yang patut diwaspadai adalah bila terjadi pada lahan sawah padi. Lahan sawah sebagai penghasil utama padi dan sumber penghidupan utama bagi rumah tangga pertanian sawah. Hasil analisis Barus *et.al*(2009) mengindikasikan kecepatan pencetakan sawah baru yang masih timpang dan lebih rendah dari laju konversi. Sejalan dengan itu, hasil Sensus Pertanian 2003 menyatakan bahwa selama tahun 2000-2002 total luas lahan sawah di Indonesia yang dikonversi ke penggunaan lain rata-rata 187,7 ribu hektar per tahun, sedangkan luas pencetakan sawah baru hanya 46,4 ribu

hektar per tahun, sehingga luas lahan sawah rata-rata berkurang 141,3 ribu hektar per tahun (Sutomo 2004 dalam Irawan 2005).

Selain menurunnya jumlah sawah sebagai dampak konversi lahan pertanian, kepemilikan sawah oleh petani juga semakin menurun. Banyak di antara petani yang sebelumnya memiliki lahan, karena desakan kebutuhan hidup terpaksa menjual lahan yang menjadi tumpuan kehidupannya. Mereka beralih menjadi penyewa atau bahkan penyakap atau sebatas menjadi buruh tani dan akibat dari seluruh permasalahan tersebut adalah kemiskinan. Proses munculnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat tani semacam itu tidak jarang dilator belakangi pula oleh kelemahan kultural lemah karsa dan atau tuna mentalitas produktif.

Dari sisi lahan, penguasaannya yang sempit pada lahan padi sawah mengakibatkan *return on investment* di kalangan para petani tidak menghasilkan surplus yang memadai dan masyarakatnya terperangkap hanya untuk bertahanhidup (*bare of survival*). Permasalahan yang muncul lebih diwarnai oleh semakin besarnya kebutuhan akan garapan untuk memenuhi pertambahan kebutuhan akibat pertambahan penduduk, sehingga walaupun perluasan itu terjadi bersifat perluasan statis dan kehidupan petaninya tetap miskin. Menurut Witoro (2005), sistem pertanian masyarakat desa yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsistence*) secara berlanjut berabad-abad menjadi basis kehidupan mereka. Manakala kemudian dilenyapkan oleh konsentrasi pemilikan tanah, penguasaan benih, dan alat-alat produksi lainnya ke tangan segelintir perusahaan transnasional

maka petani tidak lagi memiliki lahan untuk memproduksi, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk membeli makanan bahkan bila harga pangan impor itu murah sekalipun.

Sutomo (1997) dalam bukunya "Kekalahan Manusia Petani", mengungkapkan massa petani adalah bagian dari kaum yang kalah. Kekalahan petani tercermin antara lain dari kualitas hidupnya yang tidak beranjak naik dari generasi ke generasi, serta dari nilai tukar produk pertaniannya yang makin menurun terhadap barang-barang kebutuhan lain, seperti sembako dan sarana produksi pertanian pupuk, benih, atau alat/mesin pertanian. Kekalahan yang paling mengesankan tercermin dari harapan petani, agar anaknya jangan bekerja sebagai petani seperti dirinya. Di tengah kekalahan itu, petani (peasant) cenderung bersikap "diam", mengeluh dan tak berdaya. Situasi ketidak berdayaan ini berakar dari persoalan struktural (sistemik). Dalam sistem sosial misalnya, petan cenderung menjadi elemen yang (dibuat) tak berdaya, bergantung pada kekuatan kekuatan di luar dirinya. Bahkan, petani dibuat tersisihkan dari jaringan atau akses organisasi, informasi, permodalan, serta sistem transportasi. Dalam interaksi di pasar pun, petani selalu berada dalam posisi lemah.

Menurut Geertz (1966), pada masyarakat padi sawah yang terinvolusi sudah ditandai dengan kondisi mekanisme kalahkan diri (*self defeating mechanism*) yang mengarah pada bentuk kehidupan yang statis dengan beban kemiskinan yang dipikul bersama (*shared poverty*).

Berkaitan dengan ekonomi rumah tangga dan pendapatan petani miskin, model ekonomi pengambilan keputusan pertama kali dikembangkan oleh Chayanov (1920), yaitu teori maksimasi utilitas rumah tangga (*Theory of household utility maximization*). Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan subyektif dari rumah tangga berkenaan dengan jumlah tenaga kerja rumah tangga yang melakukan produksi usaha tani dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan subyektif ini menimbulkan **trade off** antara pekerjaan yang membosankan dipertanian (*disubrity of work*) dan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga (*utility income*).

Becker (1965), mengembangkan teori ekonomi rumah tangga petani yang dikenal dengan teori alokasi waktu, dengan menyatakan bahwa terdapat dua proses dalam pendapatan rumah tangga, yaitu proses produksi dan proses konsumsi untuk memiliki barang dan waktu santai yang di konsumsi. Bekcer, mengembangkan teori ekonomi rumah tangga dengan asumsi, bahwa alokasi waktu rumah tangga terdiri atas waktu kerja dirumah, kerja diluar dan waktu santai. Becker (1979), melakukan pendekatan ekonomi untuk mengembangkan teorinya tentang prilaku manusia. Nakajima (1986) mengembangkan teori rumah tangga yaitu adanya pasar tenaga kerja dan pasar input lainnya. Selanjutnya **Singh et.,al** (1986), mengembangkan model ekonomi rumah tangga dengan unit analisisnya di sektor pertanian.

Umumnya rumahtangga miskin menerapkan strategi nafkah ganda, tergantung musim dan kesempatan (Sitorus, 1994). Meskipun terdapat



beberapa tujuan, akan tetapi tujuan utama rumahtangga adalah memaksimumkan kepuasan (*satisfaction*) atau kegunaan (*utility*), dapat berupa materi dan non materi (Bryant, 1990). Oleh karena itu peneliti melihat konsep rumahtangga petani sebagai suatu unit ekonomi yang kompleks, yaitu sebagai perusahaan usaha tani yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan (petani), tenaga kerja keluarga (rumah tangga) dan konsumen yang memaksimumkan utilitas (Nakajima, 1986).

Sejalan dengan ini uraian teori diatas, penerapan dan kebijakan pembangunan dalam usaha tani padi di Sulawesi Selatan yang berjalan selama ini belum mampu mengurangi angka kemiskinan petani padi secara signifikan hal disebabkan karena instrument kebijakan pemerintah masih bersifat subsistem yang dicirikan dengan tidak terpisahnya antara keputusan kegiatan produksi dengan konsumsi (pengeluaran rumah tangga) petani.

Berkaitan dengan gambaran dan uraian tersebut diatas dalam kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terdapat surplus produksi beras 2 (dua) juta ton di Sulawesi Selatan namun tingkat kemiskinan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan padi yang dilaksanakan pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena hanya memperhatikan aspek produksi (penawaran) / aspek makro saja tanpa memperhatikan pada aspek konsumsi petani padi.

Dalam konteks karakteristik kemiskinan petani padi terdapat korelasi dan keterkaitan dengan penguasaan lahan (Petani sebagai pemilik sekaligus

penggarap lahanannya, petani pemilik lahan sawah saja atau penggarap saja dan buruh tani) dengan indeks kemiskinan dan indeks rumpang kemiskinan (poverty gap). Makin luas penguasaan lahan petani padi, kian rendah tingkat kemiskinaaan petani padi.

Dalam kaitan kajian ini penulis ingin menekankan kajiannya dan fokus pada aspek pendapatan petani padi miskin sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen sejalan model ekonomi dan pendapatanpetani dan pendapatan rumah tangga yang di gagas oleh Chayanov (1920) kemudian dikembangkan oleh Becker (1979), Singh (1986) dan Maxwell (2007) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan pendapatan dan konsumsi .

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis menganggap perlu dilakukan kajian disertasi ini tentang analisis pendapatan petani padi dan penyebab utama kemiskinan petani padi di Sulawesi Selatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam upaya pengembangan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus meningkatkan produksi padi/beras, pemerintah melakukan berbagai bentuk dan ragam bantuan kebijakan maupun dukungan kepada petani padi berupa subsidi bunga atau kredit usaha tani, bantuan sarana produksi (saprodi), penyuluhan, irigasi, pemasaran serta usaha pengolahan hasil dan lain-lain. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah walaupun telah banyak, namun hasil yang



diperoleh masih belum menunjukkan hasil yang menunjukkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani padi.

Berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan, namun tingkat kemiskinan saat ini masih cukup tinggi. Angka kemiskinan tahun 2008 adalah sekitar 15,1 persen dan angka untuk tahun 2009 sekitar 14,2 persen. Jika tidak ada terobosan khusus diperkirakan angka kemiskinan tahun 2015 masih akan mencapai sekitar 10,6 persen atau 26,3 juta orang dimana 18,1 juta diantaranya adalah penduduk pedesaan. Dengan tingkat kemiskinan tersebut, jumlah penduduk yang kurang mampu mengakses pangan masih sangat banyak. Pada tahun 2008, jumlah penduduk yang masih termasuk kategori sangat rawan pangan masih sekitar 25,1 juta orang atau sekitar 11,1 persen (LP2E LIPI, 2013).

Rumah tangga pertanian khususnya petani padi yang masih terbelenggu kemiskinan harus menjadi fokus dari arah kebijakan ekonomi. Bagaimanapun keberadaan sektor pertanian padi sangat penting peranannya dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan komoditi primer yang dapat dikonsumsi langsung ataupun menjadi input kegiatan produksi sektor manufaktur. Penurunan output pertanian padi karena itu dapat mengganggu kegiatan konsumsi dan produksi agregat.

Agar petani padi dapat dikatakan sejahtera, indikator yang digunakan adalah rumah tangga petani tidak tergolong sebagai rumah tangga miskin atau dengan kata lain pendapatan dari usahatani berada diatas garis batas kemiskinan. Garis Batas Kemiskinan (GBK) di wilayah pedesaan yang telah

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika tahun 2010 berbeda-beda untuk setiap provinsi. Besar GK di daerah desa-desa berkisar Rp. 151.879 – Rp. 201.810,-/kapital/bulan atau Rp. 1,8 juta-Rp. 2,5 juta/kapita/tahun dengan nilai rata-rata Rp. 2,26 juta/kapital/tahun (BPS, 2013).

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah dimana hasil produksi dari *land operation* petani padi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga meenyebabkan petani padi miskin. Sedangkan fokus masalah dalam penelitian ini ;

1. Berapakah standar minimum luas lahan (*land operation*) petani padi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) dengan fokus pada posisi petani sebagai pemilik dan penggarap lahannya sendiri, petani pemilik lahan atau penggarap saja, dan petani penyakap pada sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan.
2. Seberapa besar kontibusi pendapatan usaha tani padi terhadap kebutuhan hidup layak di Sulawesi Selatan.
3. Bagaimanakah kondisi kapasitas produksi usaha tani padi di Sulawesi Selatan.
4. Berapakah kekurangan luas lahan yang harus di garap perorangan petani padi agar kebutuhan hidup layak petani padi sawah dapat terpenuhi.
5. Apakah tingkat pendapatan petani padi miskin dalam usaha tani padi dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan hidup layak petani di Sulawesi Selatan.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam kajian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ukuran standar minimum luas lahan optimum (land operation) petani padi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) dengan fokus pada posisi petani sebagai pemilik dan penggarap lahannya sendiri, petani pemilik lahan atau penggarap saja, dan petani penyakap pada sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan.
2. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan usaha tani padi terhadap kebutuhan hidup layak petani padi di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui kondisi kapasitas produksi usaha tani padi di Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui kekurangan luas lahan yang harus di garap perorangan petani padi agar kebutuhan hidup layak petani padi sawah dapat terpenuhi.
5. Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani padi miskin dalam usaha tani padi dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan hidup layak petani di Sulawesi Selatan.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori ekonomi pertanian padi khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan.

2. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat petani ditinjau dari aspek pendapatan petani padi yang tergolong miskin.
3. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan obyek yang sama.

## BAB.II

### TINJAUAN PUSTAKA



#### 2.1. Hubungan Produksi, Konsumsi dan Kemiskinan Petani

##### 2.1.1. Pertanian dan Kemiskinan Petani

Semakin marginalnya peran sektor pertanian dalam perekonomian membuat upaya menekan kemiskinan di sektor ini menjadi sulit untuk dilakukan. Informasi statistik yang tersedia memperlihatkan berdasarkan jenis pekerjaannya, rumah tangga miskin dan individu petani (head count index) miskin, lebih banyak terkonsentrasi di sektor pertanian. Misalnya, pada tahun 2011, sekitar 63,6% dari Rumah tangga miskin terkonsentrasi di sektor pertanian, (BPS, 2011)

Kemiskinan adalah konsep yang abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang atau ideologi yang dianut (Darwin, 2005). Menurut (Seebom Rowntree dalam Indra Mapita, 2013) Kemiskinan adalah ketidakcukupan sandang, pangan dan papan. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai "*Poverty is lack of shelter*". Pendekatan dalam memahami kemiskinan telah banyak mengalami kemajuan. Bila semula pengertian kemiskinan hanya ditekankan pada kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kini kemiskinan telah mengalami perluasan arti dengan menyentuh posisi individu dalam proses-proses perubahan sosial ekonomi serta akses dalam politik.

Miskin adalah keadaan kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Ciri-ciri penduduk miskin didasarkan pada keterbatasan kebutuhan hidup, yang mencakup : (1) Keterbatasan penghasilan; (2) Keterbatasan pemilikan; (3) Keterbatasan tempat tinggal; (4) Keterbatasan ketrampilan; (5) Keterbatasan pendidikan; (6) Tingkat kesehatan yang rendah; (7) Kehidupan normatif yang kurang dihargai; (8) Keterbatasan lingkungan sosial; (9) Keterbatasan dalam melaksanakan hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya; (10) Keterbatasan dalam melaksanakan hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih luas.

Ada berbagai cara pengukuran kemiskinan, karena kemiskinan dilihat sebagai fenomena yang multidimensi (Chambers, 1995). Kemiskinan dapat diukur secara absolut ataupun secara relatif. Kemiskinan absolut terlihat dari kehidupan yang dibawah minimum, atau dibawah standar yang diterima secara sosial, dan adanya kekurangan nutrisi. Kemiskinan relative dilihat dalam perbandingannya dengan segmen yang lebih atas minimum..

Kemiskinan juga dapat didekati dari sisi obyektif dan subyektif. Obyektif merupakan pendekatan tradisional ilmiah didasarkan kepada pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*), sedangkan pendekatan subyektif tergantung pada penilaian masyarakat setempat. Bank Dunia memberi batasan bahwa "*extreme poverty*" adalah kondisi jika seseorang hidup dengan biaya kurang dari 1 dollar AS hari<sup>-1</sup>, dan "*poverty*" jika kurang

dari 2 dollar AS hari<sup>-1</sup>. Penilaian Bank Dunia ini hanya melihat kemiskinan pada tingkat individual saja.

Kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan pengeluaran kapita<sup>-1</sup>tahun<sup>-1</sup> setara dengan nilai tukar beras. Standar kebutuhan beras yang dipakai adalah standar kemiskinan diperdesaan 320 kg kapita<sup>-1</sup>tahun<sup>-1</sup>(Sajogjo,1997). Sajogjo membagi menjadi tiga kelompok kemiskinan berdasarkan pengeluaran kapita<sup>-1</sup> tahun<sup>-1</sup> setara dengan nilai tukar beras untuk wilayah desa dan kota, yaitu miskin: desa 320 kg dan kota 480 kg; sangat miskin: desa 240 kg dan kota 360 kg; melarat: desa 180 kg dan kota 270 kg. Keluarga tani dinyatakan hidup layak apabila telah terpenuhi pangan, papan, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan kegiatan sosial.

Data kemiskinan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu data makro dan data mikro. Data kemiskinan secara makro dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan hasil Susenas Modul Konsumsi. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh Biro Pusat Statistik biasanya digunakan pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Data kemiskinan mikro didasarkan pada indikator - indikator penentuan Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yaitu : (1) Melaksanakan ibadah; (2) Makan  $\geq$  2 kali sehari; (3) Punya pakaian yang berbeda; (4) Lantai bukan dari tanah; (5) Anak sakit/PUS diberi obat/KB modern. Data kemiskinan mikro kemudian dikembangkan oleh BPS dengan

menggunakan variabel - variabel rumahtangga seperti yang digunakan dalam Pendataan Sosial ekonomi (PSE) 2005 dan Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) 2008 yang menjadi dasar dalam penyediaan data rumah tangga miskin untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), Beras miskin (Raskin) serta bantuan program anti kemiskinan lainnya.

Hasil kajian P2E LIPI (2012) kemiskinan petani padi dapat diidentifikasi melalui tiga aspek yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Selanjut kemiskinan dipengaruhi oleh dibagi pada dua aspek yaitu internal dan eksternal petani miskin. Faktor internal seperti tingkat pendidikan, umur, skill dan faktor eksternal dipengaruhi oleh norma, budaya, adat istiadat dan sebagainya.

Surplus produksi petani padi hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (konsumsi), maka petani hanya akan mampu melakukan produksi stagnan. Artinya, petani tidak mampu melakukan reproduksi kapital atau gagal dalam melakukan akumulasi kapital. Kapital ini digunakan untuk menambah lahan. Konsekuensinya dalam jangka panjang pemiskinan petani padi akan secara alamiah terjadi akibat kepemilikan lahan yang cenderung meningkat. (Nugroho, 2009, P2E LIPI, 2012).

### **2.1.2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan**

Menurut Keynes dalam Indra Maipita (2013), mengemukakan terdapat hubungan pendapatan dengan konsumsi. Konsumsi dipengaruhi pendapatan disposabel (siapa pakai). Haughton dan Sahidur,(2010) Maipita, (2013) menjelaskan kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan. Biro Pusat Statistik

dan beberapa negara (Armenia, Sinegal, Pakisatan, Bangladesh, Vietnam, Sierra dan Gambia) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan (BPS, 2012).

Menurut Kartasasmita (1996) ada 4 faktor penyebab kemiskinan antara lain:

1. Rendahnya taraf pendidikan,
2. Rendahnya taraf kesehatan,
3. Terbatasnya lapangan kerja, dan
4. Kondisi keterisolasian.

Menurut Salim (1984) bahwa kemiskinan tersebut melekat pada diri penduduk miskin. Mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjat dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung dan pangkal.

Pendapat Hadiwegono dan Pakpahan (1993) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sumber daya alam yang rendah,
2. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah,
3. Sumber daya manusia yang rendah, dan
4. Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Kurangnya efektifnya penggunaan anggaran terindikasi dari semakin mahalnya biaya untuk mengentaskan satu orang penduduk miskin. Misinya, pada tahun 2000, anggaran kemiskinan sebesar Rp 18 trillium mampu mengurangi penduduk miskin sebanyak 800.000 orang. Dengan demikian,

biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi satu orang penduduk miskin pada tahun 2000 adalah Rp 22,5 juta<sup>1</sup>. Sementara itu, pada tahun 2010, anggaran kemiskinan sebesar Rp 80,1 triliun berhasil mengurangi kemiskinan sebanyak 1,51 juta orang, ini berarti bahwa pada tahun 2010 dibutuhkan biaya Rp 53 juta untuk mengurangi satu orang penduduk miskin (P2E LIPI, 2013).

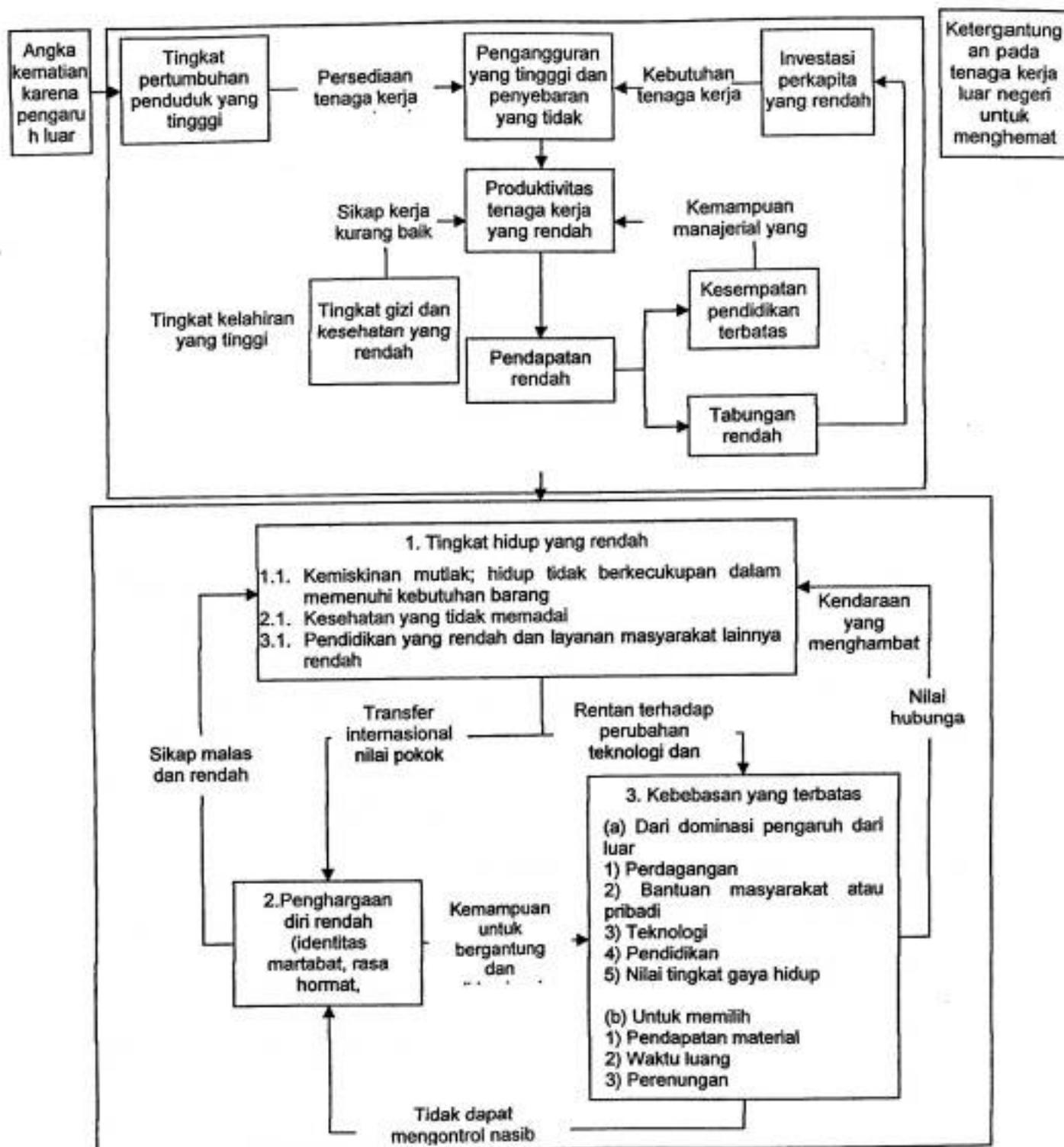
Selanjutnya Purwanto (P2E LPI, 2013) menjelaskan Untuk bisa mengurangi kemiskinan sesuai target seperti telah ditetapkan sebelumnya (8-10% pada tahun 2014), dibutuhkan kemauan politik dan komitmen yang lebih tegas dari pemerintah untuk bisa menggunakan secara lebih produktif dan efektif sumber daya yang dimilikinya.

### **2.1.3. Penyebab Kemiskinan**

Todaro (1989) mengemukakan bahwa keterbelakangan penduduk negara berkembang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang rendah. Kedua hal tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Oleh karena produktivitasnya rendah, maka pendapatan menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat hidup.

Selanjutnya Todaro (1989) juga menunjukkan adanya jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek nonekonomi. Ada tiga komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat yaitu rendahnya taraf hidup, rendahnya percaya diri, dan terbatasnya kebebasan. Ketiganya memiliki hubungan timbal balik.

---



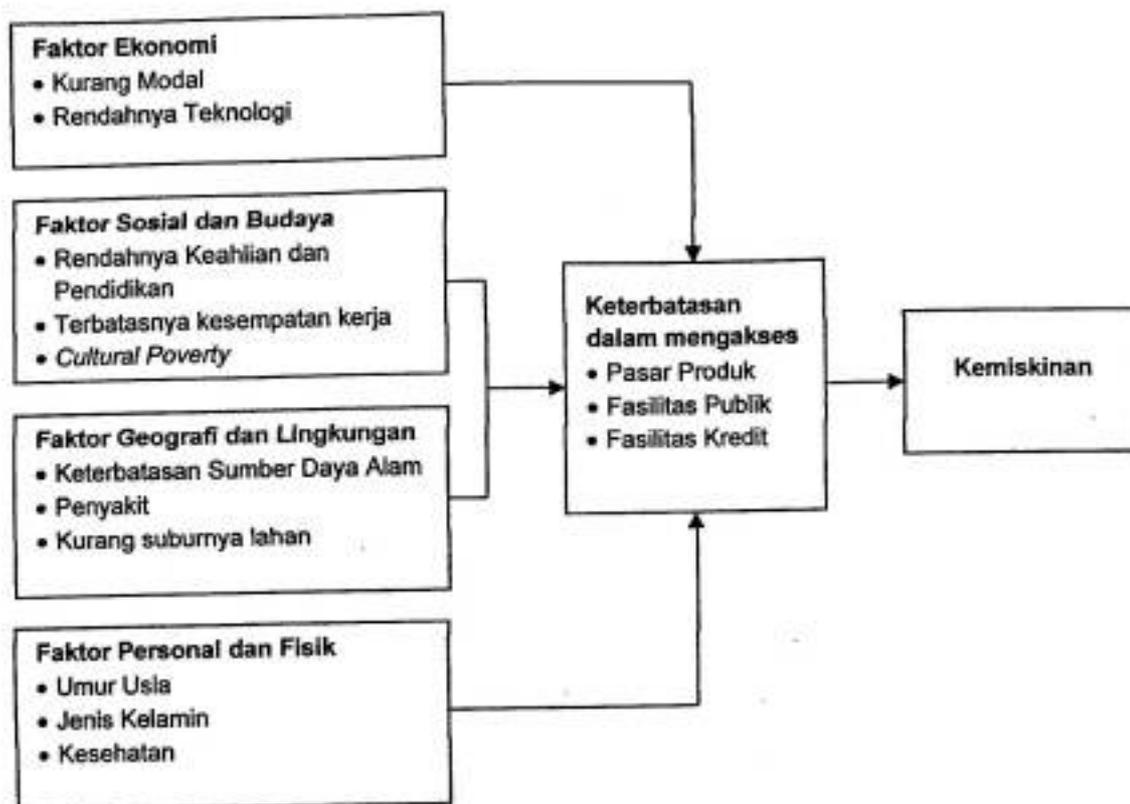
Sumber: Todaro (1985, p. 65)

Gambar 2.3 Skematis Multidimensional Keterbelakangan

Pola pikir Todaro tentang keterbelakangan masyarakat yang dapat menggambarkan terjadinya kemiskinan digambarkan pada Gambar 2.3 dimana tingkat hidup yang rendah yang mencerminkan kemiskinan disebabkan karena pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, tingkat gizi dan kesehatan yang rendah serta kesempatan pendidikan yang terbatas. Pendapatan yang rendah berakibat pula pada penghargaan diri yang rendah (martabat, rasa hormat dan pengakuannya). Hal ini juga mengakibatkan kebebasan yang terbatas, kebebasan untuk menggunakan teknologi, bantuan dan anggota masyarakat lainnya dan pendidikan.

#### **2.1.4. Teori Anne Booth**

Anne Booth dan Firdaus (1996) dalam *papernya* yang berjudul ***“Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural communities and Firm Families”*** menyatakan bahwa penyebab dari kemiskinan adalah keterbatasan penduduk di dalam mengakses pasar produk, fasilitas publik dan fasilitas kredit. Selanjutnya Booth menyatakan keterbatasan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografi dan lingkungan, dan faktor personal dan fisik. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4



Sumber: Booth, A. dan Firdaus (1996, p. 7)

**Gambar 2.4 Beberapa Faktor Utama yang Mempengaruhi Kemiskinan Pedesaan**

## 2.2. Klasifikasi Petani Miskin Berdasarkan Kegiatan Usaha Tani

Klasifikasi Petani padi miskin dapat di kelompokkan sebagai berikut :

### 1. Petani Pemilik Lahan

Petani pemilik saja dan tidak menggarap lahan miliknya ialah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta tidak menggarap lahannya tersebut dan memberikan kepada orang lain untuk menggarapnya dengan cara bagi hasil akan status lahannya disebut lahan milik sendiri. Status lahan tersebut umumnya diperoleh dari warisan atau dibeli sendiri.

### 2. Petani Pemilik sekaligus Penggarap Lahan Sendiri

Petani pemilik sekaligus penggarap ialah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta menggarap lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri dan status lahannya disebut lahan milik. Status lahan tersebut umumnya diperoleh dari warisan atau dibeli sendiri.

### **3. Petani Penyewa**

Petani penyewa ialah petani yang menggarap tanah orang lain atau petani lain dengan status sewa. Alasan pemilik lahan menyewakan lahan miliknya karena membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat, atau lahan yang dimilikinya itu terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Besarnya nilai sewa lahan biasanya ada hubungan dengan tingkat produktivitas lahan usaha yang bersangkutan, makin tinggi produktivitas lahan tersebut makin tinggi pula nilai sewanya. Namun, dalam prakteknya nilai sewa lahan usaha tani sawah berkisar antara 50 – 60% dari produktivitasnya, misalnya apabila per hektar hasilnya sebesar 1 – 1,2 ton gabah kering per tahun, maka nilai sewanya harus senilai gabah tersebut pada waktu terjadi transaksi. Lamanya waktu sewa biasanya minimal satu tahun untuk selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa.

### **4. Petani Penyakap (Penggarap)**

Petani penyakap (penggarap) ialah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil. Produksi yang diberikan penyakap kepada pemilik tanah ada yang setengahnya atau sepertiga dari hasil

padi yang diperoleh dari hasil lahan digarapnya. Biaya produksi usaha tani dalam sistem sakap ada yang dibagi dua dan ada pula yang seluruhnya ditanggung penyakap, kecuali pajak tanah dibayar oleh pemilik tanah.

#### **5. Petani Penggadai**

Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai. Adanya petani yang menggadaikan lahan miliknya, karena petani pemilik lahan tersebut membutuhkan uang tunai yang cukup besar dalam waktu mendesak, tanah miliknya tersebut tidak mau pindah ke tangan orang lain secara mutlak. Namun, adanya hak gadai tersebut secara berangsur-angsur pindah haknya menjadi milik penggadai. Hal ini terjadi apabila uang gadai yang pertama tidak dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan atau uang gadainya terlalu besar, sehingga tidak mungkin lagi untuk dikembalikan. Dalam keadaan demikian biasanya penggadai menambah uang gadainya sesuai dengan nilai atau harga tanah pada saat masa gadainya berakhir. Menurut Undang- Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH, 1960) dalam suatu pasalnya tercantum bahwa apabila masa gadai telah melewati tujuh tahun, secara otomatis penggadai harus menyerahkan kembali tanah yang digadai kepada pemiliknya tanpa meminta uang gadaianya. Besarnya uang gadai per tahun untuk luas lahan tertentu tidak ada ketentuan yang pasti, tetapi bergantung kepada si pemilik tanah berapa besar yang diperlukannya. Lamanya masa gadai tergantung pada

kesanggupan yang menggadaikan lahan biasanya yang menentukan masa gadai itu adalah penggadai sendiri.

## **6. Buruh Tani**

Buruh tani ialah petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri yang biasa bekerja di lahan usaha tani petani pemilik atau penyewa dengan mendapat upah, berupa uang atau barang hasil usaha tani, seperti beras atau makanan lainnya. Hubungan kerja di dalam usaha tani tidak diatur oleh suatu perundang-undangan perburuhan sehingga sifat hubungannya bebas sehingga kontinuitas kerja bagi buruh tani yang bersangkutan tidak terjamin.

### **2.3. Kajian Tentang Tentang Ekonomi dan Kemiskinan RumahTangga Petani Padi**

#### **2.3.1. Kajian Tentang Teori Ekonomi Petani Chayanov**

Teori ekonomi petani dalam kenyataanya mempunyai karakter sebagai produsen dan konsumen. Bagaimanapun interaksi kegiatan konsumsi dan produksi berdampak pada bentuk pengambilan keputusan yang unik dibandingkan jenis unit produksi yang lebih kapitalistik. Secara sederhana pilihan konsumen terkait dengan waktu luang/ menganggur (*leisure time*) dan pendapatan (*income*) dimana keduanya memiliki kontribusi dalam memberikan nilai kepuasan pada individu. Kombinasi antara *leisure-income* yang merupakan pilihan kombinasi yang optimal adalah serupa dengan pemilihan kombinasi optimal untuk dua input sedemikian hingga meminimalkan biaya dalam produksi. Dalam teori konsumen menggunakan

konsep *indifferent curve* untuk menggambarkan tingkat utilitas yang dapat dipilih terkait dengan kombinasi antara *leisure* dan pendapatan.

Masalah ekonomi pada RT *peasant (petani kecil)* dapat diformulasikan dalam model Chayanov adalah memaksimalkan utilitas dengan 3 (tiga) *constrain* : (1) Fungsi produksi, (2) Tingkat *income* minimum yang dapat diterima, (3) Jumlah hari kerja maksimum yang tersedia.

$$\text{Max} \quad U = f(Y, H)$$

$$\text{Kendala} \quad Y = P_y \cdot f(L); Y \geq Y_{\min}; L \leq L_{\max}$$

Solusi atas masalah ini akan terjadi ketika MRTS dari *leisure* untuk *income* adalah sama dengan nilai produk marginal dari TK :

$$MU_H / MU_Y = dY / dH = MVP_L \quad (1)$$

Ukuran keluarga dan komposisinya untuk teori ini dalam pengambilan keputusan adalah sangat berarti. Penentuan bobot relaw antara *leisure* dan *income* pada utilitas RT sangat ditentukan oleh upah. Dan dalam hal keseimbangan mikroekonomi RT, Chayanov mendeteksi apa yang dipandang sebagai "*Unique Economic Calculus*" pada RT *peasant (petani kecil)* dimana menjadikan berbeda dengan perusahaan kapitalis umumnya.

Model ini dimaksudkan bahwa marginal produk dari Tenaga Kerja dalam produksi adalah bergantung pada struktur demografinya. Dan hal ini berbeda dengan profit *priorimization* dalam perusahaan kapitalis, dimana tentunya marginal produk dari Tenaga Kerja harus sama dengan tingkat upahnya.

Karakter demografi pada model Chayanov juga penting jika kita memperhitungkan dampak perubahan equilibrium output dan input Tenaga Kerja dan fungsi produksi. Fungsi produksi atau kurva income keluarga dimungkinkan dapat berubah dengan:

1. Perubahan Sumber Daya yang lain dimana dapat dikombinasikan dengan Tenaga Kerja (TK) untuk memproduksi output.
2. Perubahan dalam teknologi produksi
3. Perubahan dalam harga pasar dari output

**Model Chayanov** tidak memiliki kekuatan prediksi mengenai respon Rumah Tangga berkenaan dengan faktor yang akan berdampak pada fungsi produksi. Tetapi model ini telah memiliki daya prediksi mengenai dampak faktor ukuran keluarga dan komposisinya yang mana berdampak pada slope dan posisi kurva indifferen. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan penelitian ini maka model tersebut dikembangkan. Pengembangan model mengadopsi model Backer, model ini mengasumsikan petani kecil kelebihan penawaran tenaga kerja untuk usahatannya sehingga dialokasikan pada sektor non usahatani dan atau sektor non pertanian.

Singh et al (1986) menyatakan bahwa rumah tangga adalah pengambil keputusan dalam menjalankan produksi dan konsumsi serta hubungannya dengan alokasi waktu. Dalam memahami proses pengambilan keputusan di rumah tangga petani terutama dalam kegiatan produksi dan konsumsinya, dapat digunakan model yang menganalisis kegiatan atau perilaku rumah tangga petani. Model tersebut yaitu *Agriculture Household*

*Model..* Kepuasannya rumah tangga (U) adalah fungsi dari konsumsi barang yang dihasilkan rumah tangga (X<sub>a</sub>), konsumsi barang yang dibeli pasar (X<sub>m</sub>) dan konsumsi waktu santai (x<sub>1</sub>).

Maksimalkan :

$$U = U(X_a, X_m, X_1) \dots\dots\dots (2)$$

Kendala :

$$P_m X_m = P_m(Q - X_a) - w(L - F) \dots\dots\dots (3)$$

$$X_1 + F = T \dots\dots\dots (4)$$

$$Q = Q(1, A) \dots\dots\dots (5)$$

Dimana

P = Harga barang dan jasa yang dibeli di pasar

P<sub>a</sub> = Harga barang yang dihasilkan oleh rumahtangga

(Q - X<sub>a</sub>) = Surplus produksi untuk di pasarkan

w = Upah pasar

L = Total input tenaga kerja

F = Input tenaga kerja rumah tangga

Bila dalam persamaan (3) jumlah  $L > F$ , maka rumahtangga akan menyewa tenaga kerja untuk menjalankan usahanya, tetapi bila  $L < F$  maka rumahtangga akan menggunakan kelebihan tenaga kerja yang ada dalam keluarga tersebut untuk mencari pekerjaan atau kegiatan lain.

Kendala-kendala yang dihadapi rumahtangga tersebut, dapat dijadikan satu dengan mensubstitusikan kendala produksi dan waktu

kedalam kendala pendapatan, sehingga akan menghasilkan bentuk kendala tunggal seperti pada persamaan (6).

$$P_m X_m + P_a X_a + w X_1 = w T + \pi \dots\dots\dots (6)$$

Dimana :

$$\pi = P_a Q(L, A) - wL \quad (\pi \text{ merupakan ukuran dari keuntungan})$$

Persamaan (6) menunjukkan bahwa sisi kiri merupakan pengeluaran total rumah tangga untuk barang ( $X_m$  dan  $X_a$ ) dan waktu ( $X_1$ ) yang dikonsumsi. Sedangkan sisi kanannya adalah pengembangan dari konsep pendapatan penuh Becker (1965), dimana nilai waktu yang tersedia dicatat secara eksplisit.

Selain itu, pengembangan yang dilakukan, adalah memasukkan pengukuran keuntungan ( $P_a Q - w.L$ ) dimana semua tenaga kerja dihitung berdasarkan upah pasar. Rumah tangga dapat memilih tingkat konsumsi dari ketiga komoditi di atas dan total input tenaga kerja yang digunakan untuk kegiatan produksi. First order condition untuk memaksimumkan keuntungan produksi adalah:

$$P_a \cdot (\partial Q / \partial L) = w \dots\dots\dots (7)$$

Rumah tangga akan menyamakan penerimaan marginal produk dari tenaga kerja dengan upah pasar. Karena persamaan ini hanya terdiri dari satu peubah endogen  $L$ . maka persamannya (7) dapat diuraikan atas  $L$  sebagai fungsi dari harga ( $P_a$  dan  $w$ ), sehingga terjadi:

$$L^* = L^*(w, P_a, A) \dots\dots\dots (8)$$

Persamaan (10) adalah permintaan tetap tenaga kerja total yang selanjutnya dapat disubstitusikan ke dalam sisi kanan dari (10) untuk menghasilkan nilai pendapatan penuh pada saat keuntungan produksi maksimum. Persamaannya dapat ditulis menjadi:

$$P_m X_m + p_a X_a + w X_l = Y^* \quad \dots\dots\dots (9)$$

dimana  $Y^*$  adalah nilai dari pendapatan penuh pada saat keuntungan produksi maksimum. , Maksimum kepuasan dibatasi oleh kendala yang baril dan membedakan first order condition sebagai berikut:

$$\partial U / \partial X_m = \lambda P_m \quad \dots\dots\dots (10)$$

$$\partial U / \partial X_a = \lambda P_a \quad \dots\dots\dots (11)$$

$$\partial U / \partial X_c = \lambda P_w \quad \dots\dots\dots (12)$$

$$P_m X_m + P_a X_a + w X_l = Y^* \quad \dots\dots\dots (13)$$

dari persamaan 10, 11, 12, 13 dapat diturunkan, fungsi permintaan terhadap barang  $X_m$  dan  $X_a$  Berta waktu santai  $X_l$  sebagai berikut:

$$X_m : F(P_m, P_a, W, Y^*) \quad \dots\dots\dots (14)$$

$$X_a : G(P_a, P_m, W, Y^*) \quad \dots\dots\dots (15)$$

$$X_l : L(w, P_m, P_a, Y^*) \quad \dots\dots\dots (16)$$

Dalam kenyataannya model ekonomi rumah tangga petani tidak sesederhana model dasar tersebut. Sistem usahatani merupakan suatu stem yang kompleks, dimana produksi dan pendapatan petani hanyalah merupakan bagian dari sistem tersebut. Menurut Byerlee (1977), produksi dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang bersumber dari internal petani, eksternal petani dan lingkungan alam.

Faktor internal petani di antaranya tujuan petani, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan modal. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa struktur masyarakat dan kelembagaan petani (pasar, penyuluhan, kredit dan lain-lain). Adapun faktor lingkungan alam dapat berupa lingkungan fisik (ketinggian lahan, curah hujan dan lain-lain) dan biologi (varietas, hama penyakit, dan lain-lain).

Semua faktor tersebut akan menentukan proses produksi yang akan menghasilkan output berupa produksi dan pendapatan. Kemudian di antara faktor-faktor yang mempengaruhi produksi juga akan saling berinteraksi, di mana jika terjadi perubahan pada satu faktor baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang lainnya.

Selanjutnya produksi dan pendapatan sendiri juga berpengaruh terhadap keputusan petani untuk mengalokasikan sumber daya dalam pengelolaan usahatannya, kelestarian lingkungan dan bahkan arah kebijakan pemerintah. Jadi sistem usahatani merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait, yang terdiri dari lima subsistem.

Subsistem produksi, terdiri dari proses produksi dan rumah tangga petani, dimana rumah tangga petani berperan sebagai pemasok input dan pengelola proses produksi. Subsistem pasar lokal berkaitan dengan pasar nasional yang berada di luar sistem usahatani. Kebijakan pemerintah dapat berupa masukan langsung maupun tidak langsung melalui manajemen

kontrol, baik terhadap sub sistem produksi, sub sistem pasar lokal ataupun sub sistem lingkungan.

Dari kelima sub-sistem tersebut, sub-sistem produksi merupakan sub sistem terpenting dalam sistem usahatani. Menurut Ellis (1986), pada umumnya kegiatan produksi di negara-negara berkembang dilakukan oleh petani secara semi sub-sisten yang mempunyai ciri-ciri: (1) tidak terpisahnya antara kegiatan produksi dengan rumah tangga petani, (2) tujuan produksi tidak semata-mata untuk dipasarkan, tetapi juga untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya, (3) penggunaan tenaga kerja keluarga lebih diutamakan, (4) terbatasnya ketersediaan tenaga kerja keluarga, dan (5) petani lebih banyak berperilaku sebagai penerima harga input dan harga output.

### **2.3.2. Kajian Tentang Teori Ekonomi Petani oleh Becker**

Becker (1965) melakukan revisi terhadap teori ekonomi neo-klasik, khususnya yang berpangkal pada Marshallian. Ia membangun model ekonomi rumahtangga dimana pendapatan bersifat endogen, sedangkan dalam model Marshallian pendapatan bersifat eksogen. Asumsi dalam ciri pendapatan ini memiliki implikasi penting terhadap teori permintaan dan teori penawaran yang telah dikembangkan oleh Neo-Klasik (Pollak, 2002).

Singh et al., (1986) melihat bahwa anggaran rumahtangga bersifat endogeneous, sedangkan di dalam model Marshall anggaran dianggap bersifat eksogen. Singh et al., (1986) mengembangkan model ekonomi rumahtangga Becker (1965) dengan unit analisisnya di sektor pertanian. Becker (1965) membangun teori ekonomi rumahtangga secara umum tanpa

aplikasi kegiatan rumahtangga secara spesifik. Teori tersebut pada dasarnya merelaksasi model Marshall yang menganggap pendapatan rumahtangga bersifat endogen (*money income held constant*).

Seperti dalam model Marshall, rumahtangga dianggap meningkatkan kesejahteraannya melalui maksimisasi kegunaan atau utilitas yang mereka peroleh dari konsumsi beragam komoditi. Dalam model Bekcer (1965) dan Singh et al., (1986) waktu santai dianggap sebagai bentuk konsumsi. Karenanya, rumahtangga tidak hanya mengkonsumsi komoditi fisik, tapi ia juga mengkonsumsi waktu seperti mengkonsumsi komoditi fisik lainnya. Fungsi kegunaan ini dinyatakan secara matematis pada persamaan (17).

$$U(X_a, X_m, X_i), \text{ untuk } a, m, i = 1, \dots, n \quad (17)$$

Fungsi kegunaan tersebut memiliki *property* atau sifat-sifat seperti biasanya. Sifat seolah cekung diterapkan terhadap fungsi kegunaan, dimana kegunaan meningkat seiring dengan bertambahnya konsumsi atas komoditi tersebut, namun dengan tingkat perubahan yang menurun. Persamaan (17) menyederhanakan bahwa kegunaan rumahtangga,  $U$ , diperoleh dari konsumsi komoditi yang diproduksi sendiri,  $X_a$ , komoditi yang dibeli dari pasar,  $X_m$  (selanjutnya disebut dengan komoditi pasar), dan waktu santai,  $X_i$ . Kendala yang dihadapi rumahtangga untuk tujuan memaksimisasi fungsi kegunaannya berupa pendapatan potensial, sumberdaya waktu dan fungsi produksi. Pendapatan potensial ini bersifat endogen, seperti dinyatakan secara matematis pada persamaan (18).

$$P_m \cdot X_m = Y = P_a(Q_a - X_a) + W(L - F) - V \cdot Z + E \quad (18).$$

Persamaan (18) menjelaskan keseimbangan anggaran rumahtangga, pengeluaran sama setara (*equivalent*) dengan pendapatan.  $P_m$ ,  $P_a$  dan  $W$  masing-masing adalah harga komoditi pasar, harga komoditi sendiri dan tingkat upah.  $Q_a$ ,  $L$ ,  $F$ , dan  $Z$  masing-masing adalah jumlah produksi rumahtangga, tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga dan input produksi variabel non tenaga kerja (selanjutnya disebut input produksi lain). Rumahtangga disebut sebagai unit yang menawarkan tenaga kerja jika  $L > F$ , kondisi sebaliknya menyatakan bahwa rumahtangga sebagai unit pengguna tenaga kerja dari luar (*hired labor*). Rumahtangga termasuk kategori komersial jika,  $X_a=0$ , semi komersial jika  $Q_a > X_a$ , dan susbsistem jika  $Q_a = X_a$ . Term "E" dalam sisi kanan persamaan (18) menunjukkan pendapatan lain yang diterima secara eksogen di luar aktivitas produksi rumahtangga.

Kendala kedua adalah kendala sumberdaya waktu. Kendala ini merupakan persamaan identitas, bentuknya dinyatakan pada persamaan (19).

$$T = L + X_i \quad (19)$$

Persamaan (19) menyatakan bahwa waktu yang dialokasikan untuk santai dan bekerja, sama dengan total sumberdaya waktu yang dimiliki oleh rumahtangga. Identitas ini dapat disubstitusikan ke dalam persamaan (20), sehingga diperoleh persamaan (20a) berikut,

$$P_m \cdot X_m = Y = P_a(Q_a - X_a) \\ \hat{A} + W(T - X_i \hat{A} - F) - V \cdot Z + E \quad (20a)$$

Dengan mengaturnya kembali maka diperoleh identitas pendapatan potensial yang lebih eksplisit seperti dinyatakan pada persamaan (20b).

$$P_m.X_m + P_a.X_a + W.X_l = Y = P_a.Q_a - V.Z - W.F + W.T + E \quad (20b)$$

Istilah "potensial", muncul dari diinkorporasikannya nilai total sumberdaya waktu yang dievaluasi dengan besaran upah pada pasar kerja ( $W.T$ ). Oleh karena itu, pendapatan potensial dapat diartikan sebagai penjumlahan dari keuntungan rumahtangga,  $\bar{Y}$ , nilai total sumberdaya waktu dan pendapatan eksogen. *Term* keuntungan ditunjukkan pada persamaan [2.b], yaitu  $\bar{Y} = P_a.Q_a - V.Z - W.F$ .

Kendala ketiga bagi rumahtangga adalah kendala fungsi produksi. Dalam bentuk yang implisit fungsi produksi ini dinyatakan pada persamaan (21).

$$G(Q_a; L, Z) \quad (21)$$

Dalam hal ini rumahtangga dianggap hanya menghasilkan satu komoditi,  $Q_a$ , yang bergantung pada penggunaan secara intensif atas dua jenis input,  $L$  dan  $Z$ . Fungsi produksi implisit tersebut,  $G$ , dianggap memiliki properti yang serupa dengan teori ekonomi produksi biasanya.

Model dasar ekonomi rumahtangga tersebut menunjukkan sifat *separable* atau rekursif, walaupun bersifat simultan dalam penggunaan sumberdaya waktunya. Secara rekursif, tahap pertama, rumahtangga menentukan terlebih dahulu penggunaan inputnya yang optimal,  $L$  dan  $Z$  dengan keputusan rasional, yaitu memaksimisasi pendapatannya (20b)

dengan syarat ikatan fungsi produksi (21), dan tahap kedua, rumahtangga memaksimalkan fungsi kegunaannya dengan syarat ikatan pendapatan potensialnya (20b).

Keputusan penggunaan input yang optimal diperoleh dari upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan syarat ikatan fungsi produksi, sehingga melahirkan kondisi dimana rumahtangga akan menggunakan tenaga kerja dalam proses produksinya pada saat nilai tambahan produk fisik tenaga kerjanya (*value marginal physical product of labor*) setara dengan tingkat upah di pasar kerja (*equimarginal principle*). Keputusan penggunaan input lainnya serupa dengan keputusan penggunaan tenaga kerja.

$$P_a(\hat{a}, Q_a/\hat{a}, L) = W$$

$$P_a(\hat{a}, Q_a/\hat{a}, Z) = V \quad (22)$$

Berdasarkan pada turunan parsial fungsi keuntungan rumahtangga, maka dideterminasi bahwa penawaran produk rumahtangga dan alokasi penggunaan input yang optimal ditentukan oleh variabel eksogenya, yaitu harga output, tingkat upah dan harga input lain.

$$Q_a(P_a, W, V) \quad (23)$$

$$L^*(P_a, W, V) \text{ dan } Z^*(P_a, W, V) \quad (24)$$

Setelah rumahtangga membentuk pendapatan potensialnya, maka ia dapat mencapai kesejahteraannya melalui maksimisasi fungsi kegunaan dengan properti tertentu. Maksimisasi fungsi kegunaan (19) dengan syarat ikatan pendapatan potensialnya (20b), memberikan determinan permintaan

rumahtangga atas komoditi konsumsi, seperti disajikan pada persamaan (25).

$$X_i(P_m, P_a, W, Y^*), \text{ untuk } i = a, m, l \quad (25)$$

Permintaan rumahtangga atas komoditi konsumsi ditentukan oleh harga komoditi, tingkat upah dan pendapatan potensial.

Rumahtangga memperoleh pendapatan dari penjualan surplus produksinya (*marketed surplus*, MS). Surplus produksi merupakan selisih antara banyaknya produksi rumahtangga,  $Q_a$ , dengan banyaknya konsumsi rumahtangga atas produknya sendiri,  $X_a$ . Oleh karena itu, penjualan surplus produksinya dideterminasi oleh seluruh harga output, harga input dan pendapatan.

$$MS_a = Q_a - X_a, \quad (26)$$

sehingga  $MS_a(P_m, P_a, W, V, Y^*)$

Selanjutnya bisa dipertimbangkan, bagaimana jika terjadi guncangan (*shock*) terhadap harga produk rumahtangga. Ini dapat dipelajari dari persamaan (26). Persamaan tersebut merupakan hasil differensiasi persamaan (24) dalam menanggapi perubahan harga produk petani padi miskin. Sebagai penyederhaan dianggap bahwa produk rumahtangga termasuk kategori barang normal. Dalam kasus usaha tani, guncangan ini bisa ditimbulkan oleh kebijakan operasi pasar untuk memberikan harga patokan minimum dan maksimum. Dari sisi produksi, perubahan produksi searah dengan perubahan harga. Kenaikan harga misalnya memberikan dorongan kepada rumahtangga untuk meningkatkan produksinya. Dari sisi

permintaan, melalui statika komparatif, guncangan tersebut memberikan efek substitusi (*direct*) dan efek keuntungan (*indirect*). Karena itu, besar dan arah perubahan permintaan tidak bisa dipastikan (tentatif). Efek substitusi, seperti biasanya memiliki pengaruh negatif, sedangkan efek keuntungan bisa memiliki efek negatif atau positif. Efek positif dalam efek keuntungan terjadi bila rumahtangga memiliki surplus produksi,  $Q_a > X_a$ , sedangkan efek negatif terjadi bila rumahtangga tersebut tidak memiliki surplus produksi,  $Q_a = X_a$  atau  $Q_a < X_a$ .

$$dX_a/dP_a = \hat{a}_{X_a/P_a}$$

$$\hat{A} + (\hat{a}_{X_a/Y^*}) \cdot (\hat{Y^*/X_a}) =$$

$$\hat{a}_{X_a/P_a} + (Q_a - X_a) \cdot (\hat{a}_{X_a/Y^*}) \quad (27)$$

Efek total perubahan harga tersebut terhadap rumahtangga dapat dikaji dari perubahan surplus produksi, seperti disajikan pada persamaan (28).

$$dMS_a/dP_a = \hat{a}_{Q_a/P_a} +$$

$$\hat{a}_{X_a/P_a} + (Q_a -$$

$$X_a) \cdot (\hat{a}_{X_a/Y^*}) \quad (28)$$

Persamaan (27) menjelaskan bahwa penjualan surplus produksi sebagai sumber pendapatan rumahtangga sangat tergantung pada kepekaan output dan permintaan terhadap harga dan efek keuntungan rumahtangga.

Model ekonomi rumahtangga pertanian tersebut, pertama kali diintroduksi untuk menjelaskan temuan empiris yang bersifat *counterintuitive*, dimana kenaikan harga bahan makanan pokok tidak secara

signifikan meningkatkan surplus pasar di sektor pertanian Jepang (Kuroda dan Yotopoulos, 1978). Model ini menjelaskan keterkaitan antara keputusan produksi dan konsumsi. Dari sisi produsen, rumahtangga pertanian harus memilih alokasi tenaga kerja dan beragam input produksi lainnya, dan dari sisi konsumen, rumahtangga harus menentukan alokasi pendapatan dari keuntungan pertanian dan partisipasi kerja pada pekerjaan lain untuk barang dan jasa konsumsi. Keuntungan pertanian mencakup keuntungan yang melekat pada barang yang diproduksi dan dikonsumsi oleh rumahtangga yang sama, dan konsumsi mencakup barang yang dibeli serta diproduksi sendiri. Sepanjang pasar barang dialokasikan pada pasar yang bersaing sempurna, termasuk tenaga kerja, maka rumahtangga akan *indifferent* antara mengkonsumsi barang yang diproduksi sendiri dan barang yang dibeli melalui mekanisme pasar. Dengan mengkonsumsi seluruh atau sebagian output yang dapat dijual pada harga pasar tertentu, rumahtangga secara melekat membeli barang dari dirinya sendiri. Kemudian, dengan mengalokasikan waktu untuk istirahat atau kegiatan produksi, rumahtangga secara melekat membeli sumber daya waktunya sendiri, yang dinilai dengan upah pasar. Model ini diterapkan terhadap sektor pertanian yang mengkonsumsi sebagian outputnya atau sebagian inputnya, yaitu pertanian tanaman pangan.

### **2.3.3. Teori Ekonomi Petani Miskin**

Pengertian kemiskinan tidak memiliki pengertian tunggal. Tapi bagaimanapun, menurut Glewwe (2003) pengertian umumnya adalah

standar hidup layak minimal yang harus diperoleh individu petani dan rumahtangga petani jika mereka memiliki kesempatan hidup. Di dalam mereplikasi fitur ekonomi petani miskin, kebutuhan dasar (subsisten) perlu diinkorporasikan ke dalam fungsi utilitas mereka. Belajar dari, Chayanov (1920), Becker (1965), Henderson dan Quandt (1980) fungsi utilitas Stone-Geary karenanya cocok untuk menangkap ciri petani (individu) dan rumah tangga petani miskin ini. Relaksasi model ekonomi petani dan rumahtangga petani untuk membuat model ekonomi rumahtangga pertanian miskin dan petani miskin, dilakukan dengan menginkorporasikan fungsi utilitas tersebut ke dalam fungsi utilitas yang dijelaskan pada model dasar. Fungsi utilitas Rumah Tangga Petani Miskin dan Petani Miskin disajikan pada persamaan [12].

Dimana  $U$  adalah utilitas rumah tangga petani padi miskin.  $X_m, X_s, X_i, X_h,$  dan  $X_w$  secara berurutan adalah jumlah konsumsi komoditi yang tersedia di pasar, komoditi yang dihasilkan suami, komoditi yang dihasilkan istri, waktu senggang suami dan waktu senggang istri.  $C_m, C_s, C_i, C_h,$  dan  $C_w$  adalah jumlah konsumsi subsisten (kebutuhan dasar) dari setiap komoditi yang dijelaskan sebelumnya.

Fungsi utilitas Stone-Geary menunjukkan tingkat pengembalian yang konstan (*constan return to scale*) atau mirip dengan properti fungsi Cobb-Douglass, dimana  $\hat{a}^z = 1$ , untuk  $z = m, s, i, h, w$ . Rumah tangga yang pas-pasan atau subsisten dicirikan oleh  $X_i = C_i$ , untuk  $i = m, s, i, h, w$ , dan untuk RTPM dicirikan oleh  $X_i < C_i$ , untuk  $i = m, s, i, h, w$ . Kesejahteraan

rumah tangga subsisten bersifat konstan, hal ini disebabkan karena mereka tidak menerima utilitas dari konsumsi komoditas yang setara dengan jumlah kebutuhan dasar setiap komoditinya.

Anggaran Petani dan rumah tangga petani miskin dispesifikasi melalui persamaan (29).

$$P_m \cdot X_m = Y = P_s(Q_s - X_s) + P_i(Q_i - X_i) + P_h \cdot T_{oh} + P_w \cdot T_{ow} - V_s \cdot K_s - V_i \cdot K_i + E \quad (29)$$

Persamaan (29) menjelaskan bahwa sumber pengeluaran petani dan rumah tangga petani padi miskin untuk membeli komoditi konsumsi yang tersedia di pasar bersumber dari pendapatan petanidan rumah tangga petani padi miskin yang diperoleh dari penjualan surplus produksi (*marketed surplus*) suami dan istri ditambah dengan pendapatan suami dan istri dari pekerjaan sambilannya, dikurangi dengan biaya produksi dalam kegiatan produksi suami dan istri dan ditambah pendapatan eksogen.

Kendala kedua adalah kendala sumberdaya waktu yang dimiliki oleh suami dan istri, dinyatakan pada persamaan (30).

$$\begin{aligned} T_h &= X_h + T_{ws} + T_{oh} \\ T_w &= X_w + T_{wi} + T_{ow} \end{aligned} \quad (30)$$

Notasi  $T_h$  dan  $T_w$  adalah total sumberdaya waktu yang masing-masing dimiliki oleh suami (*husband*) dan istri (*wife*). Suami dan istri secara umum mengalokasikan sumberdaya waktunya untuk waktu santai ( $X_h$  dan  $X_w$ ), kegiatan produksi mereka ( $T_{ws}$  dan  $T_{wi}$ ), serta alokasi waktu untuk pekerjaan lain sebagai pekerjaan sambilan misalnya ( $T_{oh}$  dan  $T_{ww}$ ).

Kendala kedua dapat *dicolapse* menjadi kendala tunggal, yaitu dengan cara mensubstitusikan identitas variabel waktu untuk pekerjaan sambilan suami dan istri, masing-masing pada persamaan (30) ke dalam persamaan (30), dan dengan menyusunnya kembali menurut komponen pengeluaran konsumsi, pendapatan dan pengeluaran produksi diperoleh,

$$P_m.X_m + P_h.X_h + P_w.X_w = P_s(Q_s - X_s) + P_i(Q_i - X_i) + P_h.T_h + P_w.T_w - E \\ (P_h.T_{ws} + P_w.T_{wi} + V_s.K_s + V_i.K_i) + E \quad (31)$$

Persamaan (31) menyatakan pendapatan potensial petani miskin dan rumah tangga petani padi miskin, atau menurut Becker (1965) disebut dengan "*full income*". Istilah "potensial" muncul karena diinkorporasikannya nilai sumberdaya waktu suami dan istri ( $P_h.T_h + P_w.T_w$ ). Pendapatan potensial berikutnya dapat didefinisikan sebagai pendapatan petani miskin atau rumah tangga petani padi miskin seandainya seluruh waktu digunakan untuk kegiatan produktif. Sisi kiri persamaan tersebut menunjukkan pengeluaran petani miskin dan atau rumah tangga petani padi miskin untuk komoditi konsumsi, *term* pertama dan kedua sisi kanan persamaan tersebut menyatakan pendapatan petani padi miskin dan rumah tangga petani padi miskin dari penjualan surplus produksi yang dihasilkan suami dan istri. Dan *term* kelima (persamaan dalam tanda kurung) menyatakan pengeluaran atau biaya produksi petani padi dan rumah tangga petani padi miskin. Persamaan (32) menegaskan bahwa pendapatan petani padi miskin dan rumah tangga petani padi miskin bersifat endogeneous. Untuk penyederhanaan, kita

ringkas seluruh *term* sisi kanan persamaan (32) dengan  $Y^*$ , seperti dinyatakan pada persamaan (32).

$$Y^* = P_m \cdot X_m + P_h \cdot X_h + P_w \cdot X_w \quad (32)$$

Kendala terakhir yang dihadapi petani padi miskin dan rumah tangga petani padi miskin dalam upaya memaksimalkan kesejahteraannya adalah kendala fungsi produksi suami dan istri. Untuk penyederhanaan kendala ini dinyatakan secara implisit (*implicit joint production function*).

$$G(Q_s, Q_i; K_{ks}, K_{ki}, F) \quad (33)$$

Berikutnya dianggap bahwa petani miskin dan rumah tangga petani padi miskin (RTPM) berperilaku rasional(22), sehingga konsekuensinya penentuan jumlah komoditi yang mesti diproduksi dan dikonsumsi berbasis pada *equimarginal principle*. *Equimarginal principle* dapat kita tentukan dengan cara memaksimalkan fungsi utilitas petani miskin dan rumah tangga petani padi miskin (RTPM) dengan syarat ikatan fungsi pendapatan potensial (33) dan fungsi produksi gabungan (34). Dalam bentuk fungsi Lagrangean, perilaku maksimisasi ini disimplifikasi pada persamaan (34).

$$\hat{\Lambda} = \Lambda - \lambda_1 [P_s(Q_s - X_s) + P_i(Q_i - X_i) + P_h \cdot T_h$$

$$+ P_w \cdot T_w - (P_h \cdot T_{ws} + P_w \cdot T_{wi} + V_s \cdot K_s + V_i \cdot K_i)$$

$$- (P_m \cdot X_m + P_h \cdot L_h + P_w \cdot L_w) + E \}$$

$$\hat{\Lambda} + \lambda_2 G(Q_s, Q_i; T_{ws}, T_{wi}, K_{ks}, K_{ki}, F) \quad (34)$$

Turunan parsial dari persamaan (34) disajikan sebagai pada persamaan (35).

$$\frac{\partial \lambda}{\partial X_z} = \frac{\partial L}{\partial X_z} = 0 \quad (35a)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial Y^*} = Y^* - P_m X_m - P_h L_h - P_w L_w = 0 \quad (35b)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial Q_n} = P_n \bar{A} + \bar{I} / G_n = 0 \quad (35d)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial T_{ws}} = -P_n \bar{A} + \bar{A} \bar{I} / G_{ws} = 0 \quad (35e)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial T_{wi}} = -P_w \bar{A} + \bar{A} \bar{I} / G_{wi} = 0 \quad (35f)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial K_{ks}} = -V_s \bar{A} + \bar{A} \bar{I} / G_{ks} = 0 \quad (35g)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial K_{ki}} = -V_i \bar{A} + \bar{A} \bar{I} / G_{ki} = 0 \quad (35h)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \bar{I}} = G(Q_s, Q_i, T_{ws}, T_{wi}, K_{ks}, K_{ki}, F) = 0 \quad (35i)$$

Disini diasumsikan bahwa keputusan ekonomi petani padi miskin dan Rumah Tangga Petani padi Miskin ditentukan secara rekursif atau separabel, meski keduanya simultan dalam variabel waktu. Persamaan menunjukkan bahwa kombinasi jumlah produksi suami dan istri ketika kurva *isorevenue* menyinggung di satu titik pada kurva tingkat pergantian produk (*rate of product transformation*, rumah tangga petani). Dimana kemiringan *isorevenue* ditunjukkan oleh kemiringan rasio harga produk suami dan istri. Bagi rumahtangga subsisten, harga tidak menjadi insentif dalam keputusan produksinya. Alokasi waktu kerja suami-istri petani miskin dan rumah tangga petani padi miskin dalam penggunaan input variabel lainnya yang optimal ditentukan dengan *equimarginal principle*. Waktu kerja yang dialokasikan oleh Rumah Tangga Petani Miskin dalam garapan produksinya masing-

masing ditentukan ketika tambahan penerimaan atas tambahan waktu kerja,  $G_{kn}$  (untuk  $n = h, w$ ), sama dengan tambahan pengeluaran atas tambahan waktu kerja, dimana mereka menyetarakannya dengan tingkat upah pada pekerjaan sambilan. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan sambilan, maka alokasi waktu kerja itu ditentukan secara subyektif yang bisa dipastikan menjadi penyebab inefisiensi produksinya. Penentuan jumlah input variabel lainnya serupa dengan keputusan alokasi waktu kerja. Dengan memecahkan persamaan (38b), maka kita dapat memperoleh determinan dalam penawaran produk dan permintaan input rumah tangga petani padi miskin, hasilnya disajikan pada persamaan (36).

$$\dot{A} Q_n(P_s, P_l, P_h, P_w, V_s, V_l), \quad (36a)$$

untuk  $n = s$  dan  $l$

$$T_{wn}(P_s, P_l, P_h, P_w, V_s, V_l), \quad (36b)$$

untuk  $n = h$  dan  $w$

$$K_{kn}(P_s, P_l, P_h, P_w, V_s, V_l), \quad (36c)$$

untuk  $n = s$  dan  $l$

Hasil dari proses pengambilan keputusan produksi rumah tangga petani padi miskin menentukan besarnya pendapatan potensial mereka. Keputusan produksi sebelumnya menentukan keuntungan melalui hasil produksi aktual,  $Q_s$  dan  $Q_l$ , serta menentukan biaya produksi melalui penentuan alokasi waktu kerja dan input variabel lainnya. Besarnya pendapatan potensial ini selanjutnya menjadi kendala rumah tangga petani padi miskin dalam mencapai tingkat kesejahteraannya melalui keputusan konsumsi yang

menentukan tingkat utilitasnya. Dengan memecahkan persamaan (37a) dan (37b), maka kita dapat memperoleh determinan fungsi permintaan rumah tangga dan petani padi miskin, seperti disajikan pada persamaan (38).

$$X_z = C_z + a_z/P_z(Y^* - P_m.C_m - P_s.C_s - P_l.C_l - P_h.C_h - P_w.C_w),$$

untuk  $z = m, s, i, h, w$  (38)

Model rumahtangga miskin petani yang dibangun ini dapat menjadi kerangka kerja untuk menggali alternatif kebijakan dalam rangka mengatasi kemiskinan petani. Dengan mempertimbangkan properti ekonomi petani padi dan rumah tanagga petani padi miskin yang disajikan sebelumnya, kita dapat membuat simplifikasi berikutnya dalam wujud grafis yang disajikan pada Gambar. Gambar tersebut menjamin konsistensi dengan penjelasan secara matematis. Gambar tersebut terdiri dari empat kuadran. Ada tiga kuadran yang penting untuk dipahami dalam memprediksi dampak kebijakan ekonomi terhadap rumahtangga petani padi miskin pertanian. Kuadran pertama menjelaskan fungsi produksi pertanian yang dikerjakan oleh istri petani. Disamping kanannya, kuadran dua, menjelaskan batas kemungkinan produksi rumahtangga pertanian. Garis vertikal pada kuadran ini menunjukkan besarnya jumlah produksi istri petani secara neto, dan garis horisontal menunjukkan besarnya jumlah produksi suami yang dihasilkan suami secara neto. Istilah neto tersebut menjelaskan keputusan produksi dan konsumsi secara simultan. Produksi neto tersebut menunjukkan selisih antara jumlah komoditi tanaman pangan yang diproduksi dengan yang

dikonsumsi. Kuadran di bawahnya, kuadran keempat, menunjukkan fungsi produksi yang dikerjakan oleh suami. Notasi pada gambar tersebut konsisten dengan notasi yang digunakan dalam penjelasan matematis.

#### **2.3.4. Teori dan Konsep Tentang Produksi dan Konsumsi**

Produksi adalah tindakan dalam membuat komoditi, baik berupa barang maupun jasa (Lipsey, 1993). Sedangkan menurut Putong (2003), produksi atau proses memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Suatu proses produksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat dan sarana untuk melakukan proses produksi. Proses produksi juga melibatkan suatu hubungan yang erat antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan. Menurut Joesron dan Fathorrozi (2003), produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Lebih spesifik lagi produksi adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimum. Produksi juga merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaatnya atau penciptaan faedah baru. Faedah atau manfaat ini dapat terdiri dari beberapa macam, misalnya faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, serta kombinasi dari beberapa faedah tersebut di atas.

Menurut Salvatore (2001), fungsi produksi merupakan hubungan matematis antara input dan output. Menurut Doll dan Orazem (1984), fungsi

produksi selain menggambarkan hubungan erat antara input dan output juga menggambarkan tingkat dimana sumberdaya diubah menjadi produk. Sedangkan menurut Putong (2003) fungsi produksi adalah hubungan teknis bahwa produksi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan faktor produksi. Bila faktor produksi tidak ada, maka produksi juga tidak ada. Dalam pertanian, proses produksi sangat kompleks dan terus-menerus berubah seiring dengan kemajuan teknologi.

Produksi pertanian tidak terlepas dari pengaruh kondisi alam setempat yang merupakan salah satu faktor pendukung produksi. Selain keadaan tanah yang cocok untuk kondisi tanaman tertentu, iklim juga sangat menentukan apakah suatu komoditi pertanian cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Seperti halnya tanaman pertanian padi. Hanya pada kondisi tanah dan iklim tertentu dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.

Keadaan tanah dapat diatasi dengan penggunaan pupuk. Oleh karena itu salah satu faktor produksi padi adalah harga pupuk, selain dari harga output padi sendiri. Iklim yang mendukung dengan curah hujan yang tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan padi, karena tanaman padi terkait dengan ketersediaan air. Jika curah hujan tinggi, maka ketersediaan air juga akan meningkat. Akan tetapi perlu adanya faktor pendukung lain diantara dibangunnya sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi agar kondisi air tetap terjaga dengan baik. Selain itu juga perlu adanya perluasan areal sawah yang terintensifikasi yaitu dengan adanya program-program tertentu seperti melalui kegiatan (i) intensifikasi; seperti program Bimbingan Massal

(Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas), Intensifikasi Khusus (Insus), (ii) ekstensifikasi; seperti program percontakan sawah baru, perluasan areal pertanian di luar Pulau Jawa, (iii) diversifikasi; seperti usaha campuran antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya (tumpang sari, tumpang gilir dan sebagainya), dan (iv) rehabilitasi; yaitu meningkatkan produksi dengan cara merehabilitasi faktor pendukung yang menentukan produksi (Soekartawi, 2002).

### **2.3.5. Kajian Model Produksi Pada Dimensi Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Dalam aktivitas produksinya, produsen (perusahaan) mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (*fixed input*) dan faktor produksi variabel (*variable input*). Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Misalnya mesin-mesin pabrik. Sampai tingkat interval produksi tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai nol unit (tidak berproduksi), jumlah mesin tidak bisa dikurangi.

### **2.3.6. Model Produksi Hubungan Dengan Satu Faktor Produksi Variabel**

Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, dimana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal

(*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). Secara umum bentuk fungsi Cobb Douglas yang menyatakan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan adalah sebagai berikut (Algifari, 2003):  $Q = A K^a L^b$

Dimana Q adalah jumlah output yang dihasilkan. K adalah jumlah input K, L adalah jumlah input L yang digunakan dan A, a dan b adalah suatu konstanta. Analisis terhadap hubungan antara input dan output dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dapat memberikan banyak informasi mengenai karakteristik proses produksi yang dianalisis. Karakteristik proses produksi yang dapat diketahui dari persamaan produksi  $Q = A K^a L^b$  adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta A, a dan b dapat membedakan antara proses produksi satu dengan proses produksi yang lain.
2. Nilai konstanta A menunjukkan tingkat Teknologi yang digunakan dalam proses produksi saat itu
3. Nilai konstanta a menunjukkan elastisitas input K. Jika teknologi dan jumlah L yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, maka a menunjukkan besarnya presentase perubahan jumlah output setiap perubahan 1 % jumlah input K yang digunakan dalam proses produksi.
4. Nilai konstanta b menunjukkan elastisitas input L. Jika teknologi dan jumlah K yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, maka b menunjukkan besarnya presentase perubahan jumlah output setiap perubahan 1 % jumlah input L yang digunakan dalam proses produksi.

5. Berdasarkan nilai konstanta  $a$  dan konstanta  $b$  dapat diketahui skala produksi suatu proses produksi. Jika  $a + b > 1$  maka skala produksi tersebut adalah *increasing return to scale*. Proses produksi yang memiliki karakteristik *increasing return to scale* berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input  $K$  dan input  $L$  masing masing ditambah 1 % maka output akan meningkat lebih dari 1 %. Jika  $a + b = 1$  maka skala produksi tersebut adalah *constant return to scale*. Proses produksi yang memiliki karakteristik *constant return to scale* berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input  $K$  dan input  $L$  masing masing ditambah 1 % maka output akan meningkat sebesar 1 %. Proses produksi yang memiliki karakteristik *increasing return to scale* berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input  $K$  dan input  $L$  masing masing ditambah 1 % maka output akan meningkat lebih dari 1 %. Jika  $a + b < 1$  maka skala produksi tersebut adalah *decreasing return to scale*. Proses produksi yang memiliki karakteristik *decreasing return to scale* berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input  $K$  dan input  $L$  masing masing ditambah 1 % maka output akan meningkat kurang dari 1 %.
6. Nilai konstanta  $a$  dan konstanta  $b$  dapat diketahui perbandingan input yang digunakan dalam proses produksi. Jika pada suatu proses produksi  $a > b$  maka proses produksi tersebut lebih banyak menggunakan input  $K$  (*capital intensive*). Sedangkan jika pada suatu proses produksi di mana  $a < b$  maka proses produksi tersebut lebih banyak menggunakan input  $L$  (*labor intensive*).

### 2.3.7. Analisis Model Produksi Total, Produksi Marjinal, dan Produksi Rata-Rata

Produksi total (total product) adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marjinal (*marginal product*) adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata (*average product*) adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi.

$$\text{Produksi Total: TP} = f(K, L) \quad (40)$$

Secara matematis TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan nol. Produksi Marjinal (MP):  $MP = TP$

Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama  $MP > 0$ . Jika MP sudah  $< 0$ , penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum Pertambahan Hasil Yang Semakin Menurun atau The Law of Diminishing Return (LDR). Produksi Rata-Rata (AP): AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 ( $AP' = 0$ ). Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat  $AP = MP$ , dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum

Produksi hasil komoditas pertanian (*on - farm*) sering disebut korban produksi karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu produk diperlukan hubungan antara faktor produksi (*input*) dan komoditas (*output*). Menurut Soekartawi (1994: 3), hubungan antara input dan output disebut

dengan faktor relationship (fr). Secara matematik, dapat dituliskan dengan menggunakan analisis fungsi produksi Coob Douglas seperti berikut:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} X_4^{\beta_4} e \quad (41)$$

Untuk menaksir parameter-parameter yang harus ditransformasikan dalam bentuk double logaritma natural (ln) sehingga merupakan bentuk linier berganda (*multiple linier*) yang kemudian dianalisis dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square*).

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + e \quad (42)$$

Di mana:

Y	= Produksi komoditas pertanian
$\beta_0$	= intersep / konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= koefisien arah regresi masing-masing variabel bebas $X_1-X_4$
$X_1$	= Lahan pertanian
$X_2$	= Modal
$X_3$	= Tenaga Kerja
$X_4$	= Input lain
e	= Gangguan stokhostik atau kesalahan pengganggu

Mempelajari model ekonomi suatu hasil pertanian pada dasarnya adalah mempelajari produksi, konsumsi dan harga yang terkandung dalam hubungan permintaan dan penawaran produk tertentu. Harga yang terjadi di pasar adalah karena pertemuan antara penawaran dan permintaan atau pertemuan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Teori permintaan diperoleh dari konsep kepuasan yang maksimum (*Maximum Utility*), dengan keterbatasan anggaran belanja yang tersedia. Sedangkan

teori penawaran diturunkan dari perilaku produsen dalam menghadapi harga output dan harga-harga input di pasar (Hartono, 2002).

Secara umum bentuk kurva penawaran untuk produk tertentu ditentukan oleh bentuk kurva biaya marginal (*marginal cost*). Dengan anggapan bahwa produsen akan berusaha pada tingkat laba maksimum, produk yang optimal akan dicapai pada marginal revenue sama dengan marginal cost ( $MR=MC$ ). Hal ini menunjukkan bahwa syarat laba maksimum akan dicapai bila setiap tambahan unit biaya dalam menghasilkan setiap tambahan dalam unit output atau produk, sama dengan tambahan pendapatan karena tambahan penjualan satu unit produk.

Fungsi produksi *Cobb-Douglas* tersebut dapat pula ditransformasikan menjadi fungsi biaya (*cost function*) dan fungsi laba untuk konsep fungsi biaya-biaya harus diminimalkan untuk mendapatkan sejumlah input dan output tertentu. Dari hasil proses minimisasi biaya total akan didapatkan nilai-nilai optimal pemakaian faktor-faktor input. Nilai optimal ini merupakan permintaan (*demand*) dari petani terhadap faktor-faktor input. Nilai optimal faktor-faktor input ini tergantung dari harga input dan tingkat produksinya. Dengan demikian fungsi permintaan faktor-faktor input adalah fungsi dari harga input dan tingkat produksinya.

David Lim Lin Shu (1975) dan Askari (1976) mengintrodusir *Dynamic Nerlovian Supply Model* yang dipublikasikan Meril Bateman dan Behrman (1965) untuk tanaman coklat yaitu tanaman yang mendominasi ekspor Ghana. Dikatakannya bahwa keputusan petani untuk mengusahakan

tanaman tersebut didasarkan pada pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari tanaman tersebut di dalam model Batemen dipusatkan pada kekuatan-kekuatan motivasi untuk mengusahakan tanaman yang dipanen.

Selanjutnya Bateman mengatakan bahwa output yang akan dihasilkan sangat tergantung dari jumlah pohon dalam areal yang diusahakan. Dengan demikian output untuk periode  $t$  ( $Q_t$ ) tergantung pada stok tanaman yang ditanam antara 6 sampai dengan 10 tahun yang lalu.

### **2.3.8. Analisis Kebutuhan Pangan Dengan Teori Konsumsi Rumah Tangga Petani Padi**

BPS (2010) mendefinisikan pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk konsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang-barang dan jasa. Barang-barang yang memiliki kegunaan ganda, yaitu selain untuk keperluan rumahtangga juga digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha, pembelian dan biaya-biayanya harus dialokasikan secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Nicholson (1995), menjelaskan mengenai perilaku konsumen: proporsi pengeluaran total yang ditujukan untuk makanan menurun sementara pendapatan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa, makanan merupakan bahan kebutuhan pokok konsumsi yang meningkat lebih lambat daripada pendapatan. Hipotesis ini dikenal sebagai "Hukum Engel". Perbandingan antar negara memperlihatkan bahwa, secara rata-rata, para individu di negara berkembang menggunakan presentase yang lebih besar

dari pendapatan mereka untuk makanan daripada para individu dalam perekonomian industri. Presentase pendapatan yang dipergunakan untuk makanan cenderung menurun ketika pendapatn meningkat (Nicholson, 1995).

Permintaan terhadap beras sendiri secara umum dibagi kedalam permintaan untuk tujuan pangan dan non pangan (Benu, 1996). Permintaan beras untuk tujuan pangan adalah untuk benih, makanan, pakan, dan industri. Secara keseluruhan di Indonesia permintaan beras untuk tujuan pangan menempati posisi yang lebih besar daripada untuk tujuan nonpangan. Salah satu faktor yang langsung mempengaruhi permintaan terhadap beras adalah jumlah penduduk. Menurut Mangahas (dalam Benu, 1996), bahwa terdapat kenyataan dimana jumlah penduduk merupakan determinan utama dari kenaikan dalam permintaan produk pertanian. Sehingga jika suatu wilayah dengan kebutuhan pangan pokoknya adalah beras, maka peningkatan jumlah penduduk akan semakin meningkatkan permintaan terhadap beras.

Kebutuhan terhadap bahan pangan merupakan salah satu diantaradiantara barang - barang primer. Bagi penduduk Indonesia, beras merupakan bahan makanan yang lebih superior daripada bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi, sagu dan lainnya. Sehingga bagi masyarakat yang berpendapatan rendah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, terutama pangan beras. Oleh karena itu, konsumsi pangan sangat terkait erat dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat (Irawan, 2009). Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat, sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi per kapita sehari. Kecukupan gizi yang dianjurkan per kapita per hari adalah penyediaan energi 2.500 kalori dan protein 55 gram (Sayogyo, 2000)

### **2.3.9. Konsep dan Implikasi Model Ekonomi RumahTangga Pertanian**

Model ekonomi rumahtangga pertanian (*agricultural huosehold economics model*) lahir dari pemikiran bahwa di dalam satu unit rumahtangga pertanian terdapat keputusan produksi yang tidak terpisahkan dengan keputusan konsumsi. Pada rumahtangga pertanian seperti ini dalam mengambil keputusan produksi, maka hasil, produksi ada yang dikonsumsi maupun dijual. Apabila hasil produksinya sebagian besar atau seluruhnya dijual, maka keputusan yang diambil oleh rumahtangga pertanian tersebut adalah respon terhadap signal pasar. Tetapi apabila sebaliknya hasil produksinya sebagian kecil atau seluruhnya tidak dijual, maka keputusan produksi yang diambil oleh rumahtangga petani tidak respon terhadap signal pasar. Sehingga untuk mempelajari bagaimana rumahtangga petani untuk merespon signal pasar sangat tepat menggunakan pendekatan dengan model ekonomi rumahtangga.

Pengembangan teoritik terhadap adanya saling ketergantungan konsumsi dan produksi di dalam model ekonomi rumahtangga pertanian, melahirkan dua kelompok model yaitu model rekursif (*recursive model*) dan model *non-rekursif* (*non-recursive model*). Model rekursif dibangun

berdasarkan asumsi bahwa antara keputusan konsumsi dan produksi terjadi ketergantungan yang saling sekuensial. Di dalam hal ini di asumsikan bahwa keputusan konsumsi dipengaruhi oleh keputusan produksi, tetapi tidak berlaku sebaliknya (Singh, et al, 1986; Coyle, 1994).

Model non-rekursif mencoba menangkap adanya saling ketergantungan antara produksi dan konsumsi. Keputusan produksi mempengaruhi pendapatan rumahtangga. Demikian sebaliknya, keputusan konsumsi mempengaruhi keputusan produksi (Kusnadi, 2000). Studi mengenai rumahtangga petani dilakukan oleh Becker (1965) dengan menerapkan fungsi kepuasan sederhana dari konsumsi barang-barang dalam ekonomi rumahtangga. Becker dalam formulasinya menyatakan bahwa ada dua proses dalam perilaku rumahtangga yaitu proses produksi rumahtangga dan proses konsumsi rumahtangga. Selanjutnya dalam analisis Becker lebih menekankan pada alokasi waktu. Karena terdapat saling keterkaitan antara proses produksi dan proses konsumsi rumahtangga, maka dalam menganalisisnya tidak dapat disamakan dengan model konvensional yang biasa diterapkan pada perilaku ekonomi perusahaan. Kondisi ini menghasitkan pengembangan model khusus ekonomi rumahtangga pertanian atau sering disebut *agricultural household model*.

Selanjutnya Bagi dan Singh (1974), menyatakan bahwa keputusan usaha tani adalah saling tergantung, dinamik dan kompleks, saling mempengaruhi secara simultan. Bagi dan Singh merumuskan enam kategori dari persamaan secara simultan dari perilaku usaha tanirumahtangga raihr :

(1) keputusan produksi, (2) keputusan konsumsi, (3) surplus pasar, (4) keputusan penggunaan tenaga kerja, (5) keputusan investasi, dan (6) keputusan finansial.

Secara teoritis, model ekonomi rumahtangga pertanian mempunyai kekhususan pada hubungan antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Secara empiris, analisis hubungan antara produksi dan konsumsi dilakukan secara simultan menggunakan teori ekonomika dengan model ekonometrika serta uji statistika. Rumahtangga pertanian diperlakukan sebagai perusahaan, yaitu bertujuan memaksimalkan keuntungan. Analisis Kusnadi (2005), membedakan antara pengertian model rekursif dan model non-rekursif, serta model separable dan model *non-separable*. Model rekursif menunjukkan hubungan simultan satu arah, dari produksi ke konsumsi, dan tidak sebaliknya, sedangkan model non - rekursif adalah hubungan simultan timbal balik antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi, dengan asumsi pasar yang dilonggarkan yaitu pada pasar persaingan tidak sempurna. Kebanyakan model penelitian ekonomi rumahtangga pertanian, kajiannya menggunakan persamaan tunggal dengan segala kesederhanaannya, sehingga perlu metode pendugaan yang lebih kompleks untuk memecahkan hubungan antar peubah yang semakin kompleks.

#### **2.3.10. Analisis Hubungan Teori Pendapatan dan Rumah Tangga Petani dan Model Empiris Pengambilan Keputusan Petani Padi Dalam Berusaha Tani.**

Dalam kondisi akhir akhir ini telah berkembang teori ekonomi rumahtangga yang mempelajari perilaku rumahtangga sebagai pengambil

keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi, yang berhubungan dengan alokasi waktu dan pendapatan, dimana analisisnya dilakukan dengan pendekatan secara simultan. Bagi dan Singh (1974) menemukan rumusan model ekonomi mikro pengambilan keputusan tersebut untuk kasus di negara berkembang. Bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rumahtangga petani terbagi atas keputusan produksi, konsumsi, *marketed surplus*, penggunaan tenaga kerja dalam dan luar keluarga, investasi dan finansial.

Yotopoulos dan Lau (1974) juga menganalisis produksi dan konsumsi petani dan rumahtangga petani dengan menggunakan pendekatan mikro-ekonomi serta fungsiproduksi Cobb-Douglas, dengan mengasumsikan bahwa: (1) rumahtangga sebagai konsumen akan memaksimalkan kepuasannya, yang merupakan fungsi dari waktu santai dan konsumsi komoditas lain dengan kendala sumberdaya, (2) rumahtangga sebagai produsen akan memaksimalkan keuntungan dengan kendala teknologi sumberdaya dan harga sarana produksi, (3) tenaga kerja dalam dan luar keluarga bersubstitusi sempurna, dan (4) partisipasi rumahtangga dalam pasar tenaga kerja. Barnum dan Squire (1978) menganalisis perilaku produksi usahatani, konsumsi, dan penawaran tenaga kerja, pada pertanian semi-komersial di pasar tenaga kerja yang bersaing. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan erat antara keputusan produksi dan konsumsi dalam berusaha tani bagi petani padi.

Petani dan Rumahtangga petani khususnya petani padi sebagai suatu unit ekonomi yang kompleks adalah usahatani dengan tenaga kerja keluarga dan konsumen yang memaksimumkan utilitasnya untuk mencapai kepuasan. Rumahtangga petani memaksimumkan fungsi kegunaan atau utilitas dengan sumberdaya terbatas, yang secara rasional menuju pada titik keseimbangan. Sebagai unit ekonomi, rumahtangga petani mempunyai hubungan simultan antara perilaku produksi dan perilaku konsumsi, yang tidak terjadi pada organisasi perusahaan. Perusahaan hanya melakukan kegiatan produksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan maksimisasi keuntungan. Konsumsi diturunkan dari perilaku individu yang secara rasional berusaha memaksimumkan kepuasan dengan kendala anggaran tertentu, sehingga merupakan sebuah fungsi permintaan rumahtangga. Hubungan simultan antara perilaku produksi dan konsumsi dalam rumahtangga petani, menyebabkan perilaku rumahtangga petani memerlukan landasan teori ekonomi yang unik.

Pada dasarnya arus pemikiran tentang rumahtangga petani adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan kondisi dalam rumahtangga dalam rangka pengambilan keputusan di tingkat rumahtangga. Bukti yang dikemukakan oleh Haddad et.al.(1994) adalah tentang kasus konsumsi kalori dan pengeluaran energi di Philipina. Rumahtangga sebagai suatu unit keluarga mempunyai anggota keluarga yang menyumbang pendapatan dan hidup secara bersama dalam satu atap rumah. Berarti, anggota keluarga melakukan fungsi produksi,

konsumsi, dan kepemilikan, yang berhubungan antar anggota keluarganya, baik suami, istri, anak, dan anggota keluarga lain, dengan berbagai tingkatan umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman dan keahlian serta peranan yang berbeda dalam keluarga. Hal ini digambarkan oleh Schultz (1999) tentang peranan perempuan dalam rumahtangga yang mempunyai posisi tawar tertentu dalam usaha tani padi.

Penyederhanaan pada rumahtangga berperan tunggal adalah tidak realistis, karena rumahtangga petani umumnya berperan ganda sebagai produsen dan konsumen sekaligus, dan terdiri dari banyak anggota keluarga yang mempunyai preferensi berbeda, dimana rumahtangga sebagai sebuah organisasi ekonomi. Perilaku ekonomi rumahtangga uniter atau unifikasi dalam pengambilan keputusan rumahtangga dilakukan oleh kepala rumahtangga tunggal, yang dikenal sebagai model Becker (1979) tentang pendekatan ekonomi untuk perilaku manusia, dan menjadi model dasar untuk teori, bukti empiris, dan kebijakan, dalam model ekonomi rumahtangga pertanian (Singh et.al., 1986).

Model ekonomi yang kemudian berkembang adalah menitikberatkan pada fungsi utilitas rumahtangga, dengan preferensi individu (petani) anggota keluarga yang berbeda, dan mengasumsikan alokasi sumberdaya untuk menghasilkan Pareto optimal atau Pareto efisien, seperti yang dikembangkan oleh Chiappori (1988) tentang penawaran tenaga kerja rumahtangga yang rasional, dan penawaran tenaga kerja kolektif serta kesejahteraan keluarga, dimana terdapat peran yang berbeda dalam

distribusi dan alokasi sumberdaya (Chiappori, 1992). Model kolektif yang dikembangkan Pitt et.al.(1990) adalah dengan menganalisis produktivitas, kesehatan, dan ketidak-samaan distribusi pangan dalam rumahtangga di negara berpendapatan rendah, yang kemudian oleh Haddad et.al.(1997) ditambahkan tentang alokasi sumberdaya pada rumahtangga di negara sedang berkembang, sebagai model, metode dan kebijakan yang berdampak luas. Pokok bahasannya juga memasukkan analisis tentang komposisi gender dan umur petani.

### **2.3.11. Analisis Pendapatan Terhadap Konsumsi Petani dan Rumah Tangga Petani Padi.**

Menurut BPS (2010), pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk konsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang-barang dan jasa. Barang-barang yang memiliki kegunaan ganda, yaitu selain untuk keperluan rumah tangga juga digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha, pembelian dan biaya-biaya harus dialokasikan secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Menurut Gilarso (1992), beberapa penentu seseorang melakukan konsumsi atau permintaan adalah sebagai berikut :

1. Harga barang
2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut
3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat

4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat
5. Cita rasa masyarakat
6. Jumlah penduduk
7. Ramalan keadaan di masa yang akan datang

Nicholson (1995), memberi penjelasan mengenai perilaku konsumen yaitu proporsi pengeluaran total yang ditujukan untuk makanan menurun sementara pendapatan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa, makanan merupakan bahan kebutuhan pokok konsumsi yang meningkat lebih lambat daripada pendapatan. Hipotesis ini dikenal sebagai "Hukum Engel". Perbandingan antar negara memperlihatkan bahwa, secara rata-rata, para individu di negara berkembang menggunakan presentase yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk makanan daripada para individu dalam perekonomian industri. Presentase pendapatan yang dipergunakan untuk makanan cenderung menurun ketika pendapatn meningkat (Nicholson, 1995).

Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume/APC*) adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan mengalami penurunan ketika pendapatannya meningkat. Orang kaya akan menyisihkan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk menabung dibandingkan untuk konsumsi (Mankiw, 2000).Ketiga dugaan tersebut kemudian dirumuskan menjadi fungsi matematis sebagai berikut :

$$C = a + bYd$$

(43)

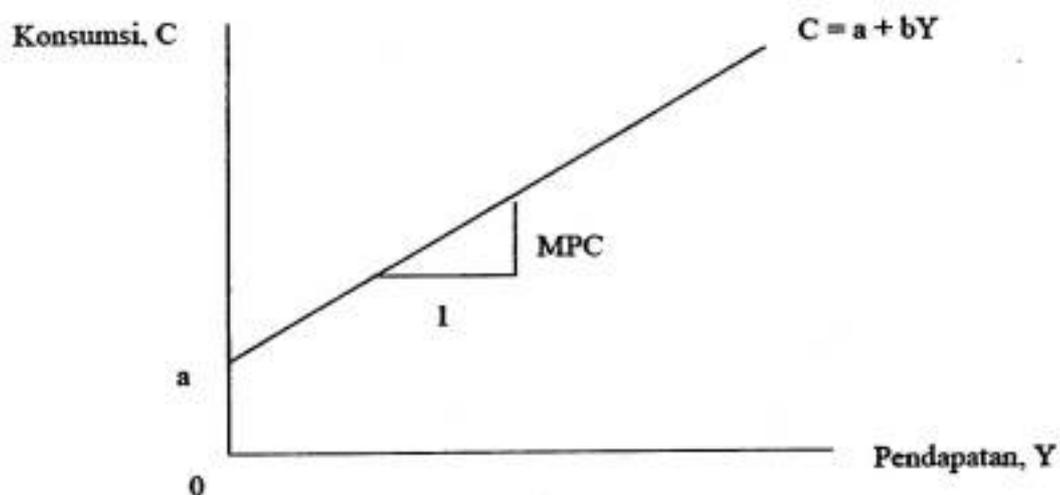
Dimana

C : nilai konsumsi yang dilakukan oleh semua rumah tangga dalam perekonomian

A : konsumsi otonom, yaitu tingkat konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nilai  $a > 0$

B : kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC). Nilai  $0 < b < 1$

Y : Pendapatan disposebel



Sumber : Mankiw, 2000

Gambar 2.1 Fungsi Konsumsi Keynes

## 2.4. Posisi Penelitian

### 2.4.1. Sistem Pertanian, Petani dan Kemiskinan

Masalah kemiskinan perlu didefinisikan secara jelas, meski ada pembatasan, agar memudahkan di dalam memahaminya dan sekurang-kurangnya dapat dimodelkan. Melalui cara ini, kita dapat menganalisa sebab kemiskinan dan merumuskan pendekatan untuk meredamnya. Menurut *Encyclopedia Americana*, kemiskinan (*poverty*) adalah insufficiency atau

ketidacukupan barang secara relatif terhadap kebutuhan manusia. Dalam ensiklopedi tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan biasanya dipandang dalam dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai kekurangan uang (*moneylessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Kekurangan tersebut tidak selalu berarti kekurangan kas melainkan kekurangan kronis atas semua jenis sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti nutrisi, istirahat, ketentraman hati, kesehatan jasmani. Kebanyakan ahli ekonomi merepresentasikan masalah kemiskinan dengan tingkat pendapatan, dengan perkataan lain masalah tersebut didekati dengan secara moneter. Bank Dunia, *Assian Development Bank* (ADB), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) menitik beratkan indikator pendapatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan (P2E LPI, 2008), (Nazam, 2010).

Analisa masalah kemiskinan juga perlu dibatasi dari jenis aktivitas ekonominya. Menurut ADB kemiskinan merupakan kelompok yang heterogen. Sifat kemiskinan bermacam-macam, ada yang timbul karena sebab dan korban (*victim*). Kemiskinan bisa timbul dari sebuah keterbatasan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan yang rendah. Pelaku ekonomi produktif namun miskin secara ekonomi perlu menjadi fokus kebijakan ekonomi. Informasi dari Arifin (2006), lebih dari 55 persen jumlah penduduk miskin adalah petani, dan 75 persen dari petani miskin adalah petani tanaman pangan. Di sektor pertanian inilah, permasalahan menjadi semakin pelik, karena Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan bahwa

jumlah rumah tangga pertanian meningkat menjadi 25,4 juta dari sekitar 20,8 juta pada tahun 1993 atau meningkat sebesar 2,2 persen per tahun. Jumlah petani gurem pun ikut meningkat dari 10,8 juta (52,7 persen) menjadi 13,7 juta (56,5 persen) rumah tangga. (Arifin, 2006), (BPS, 2012) Boleh jadi, kondisi kemiskinan tersebut yang menjadi penyebab turunnya produksi pertanian dari tahun ke tahun.

Dari sisi praktis, terdapat beberapa gagasan kebijakan untuk meredam kemiskinan rumahtangga pertanian. Eskola (2004) merekomendasikan kebijakan komersialisasi pertanian, sedangkan de Janvry dan Sadoulet (1996) merekomendasikan program transfer kekayaan masing - masing untuk meredam kemiskinan. Eskola (2004) berpendapat bahwa pembangunan fasilitas pasar yang dekat dengan kegiatan pertanian serta kemudahan petani untuk mengakses informasi pasar dapat meningkatkan derajat komersialisasi rumahtangga pertanian. Partisipasi pasar akan terbuka lebar bagi petani, dan dengan cara demikian hambatan penjualan mengecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga petani. Argumentasi mereka didasarkan pada analisa empiris yang berbasis pada kerangka kerja ekonomi rumahtangga pertanian. Kerangka kerja tersebut telah menjadi *benchmark* atau model dasar dalam menganalisis ekonomi rumahtangga (Singh et al., (1986), Taylor dan Adelman (2002)).

Kedua, simulasi kebijakan berbasis pendekatan statistik seolah memperlakukan rumahtangga miskin sebagai korban yang pasif (*passive*

*victims*) dan tidak menunjukkan pelaku yang adaptif. Contoh penelitian kemiskinan dengan pendekatan statistik dilakukan oleh Datt dan Joliffe (2005) dan de Janvry et al., (2005), Martin & Taylor (2007).

De Janvry et al., (2005) menganalisis kemiskinan rumahtangga pertanian di China. Menurut mereka, dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi negara lain. Kesempatan kerja di luar pertanian dapat menjadi penyumbang utama pendapatan rumahtangga pertanian. Dengan menggunakan data hasil survey dari Provinsi Hubei, mereka melakukan simulasi yang sifatnya *counterfactual* terhadap rumahtangga pertanian yang tidak mengakses sumber pendapatan dari kegiatan *off-farm*. Simulasi mereka lakukan dengan menggunakan model ekonometrika probit. Persamaannya menjelaskan bahwa perubahan pendapatan dua jenis petani : petani yang tidak memiliki pekerjaan lain di luar pertanian dan petani yang terlibat dalam kegiatan *off-farm*. Pendapatan tersebut dijelaskan oleh alokasi input tenaga kerja, lahan, jarak rumahtangga terhadap daerah kabupaten, dan lamanya pendidikan. Variabel eksogen ini mereka sebut dengan karakteristik rumahtangga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tanpa ada kesempatan kerja *off-farm* kemiskinan pedesaan akan lebih tinggi dan mendalam, dan hasilnya kesenjangan pendapatan akan makin tinggi. Mereka menemukan bahwa pendidikan, kedekatan lokasi terhadap kota, efek tetangga dan efek desa terlihat krusial dalam menolong rumahtangga tertentu untuk memperoleh akses terhadap kesempatan itu. Lebih lanjut mereka menyimpulkan bahwa

partisipasi dalam kegiatan *off-farm* dapat memberikan efek limpahan yang positif terhadap produksi rumahtangga pertanian.

Datt dan Joliffe (2005) membangun model empiris kemiskinan di Mesir. Mereka memusatkan perhatian untuk menggali determinan kemiskinan disana. Dengan menggunakan metodologi ekonometrika, mereka merepresentasikan kemiskinan dengan konsumsi per kapita. Model ekonominya menjelaskan perubahan konsumsi per kapita yang dideterminasi oleh karakteristik rumahtangga. Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik rumahtangga yang menjelaskan perubahan pengeluaran per kapita tersebut mencakup ukuran rumahtangga, lama pendidikan primer yang ditempuh oleh suami dan istri, luas lahan olahan yang dimiliki, jarak sekolah dari rumah, dan jarak rumah sakit dari rumah.

De Janvry dan Sadoulet (1996) merekomendasikan implementasi program transfer kekayaan untuk memecahkan masalah kemiskinan. Program ini mesti didukung oleh fleksibilitas dalam merealokasi sumber daya. Mereka memandang bahwa terbatasnya akses terhadap kekayaan (*asset*) merupakan determinan utama masalah kemiskinan. Pandangan ini selaras dengan definisi kemiskinan menurut ADB. Hanya saja dalam definisi ADB, *asset* tersebut tidak terbatas fisik, lebih dari itu aspek pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai *asset*. de Janvry dan Sadoulet (1996) menganalisis peranan kekayaan dalam menjelaskan strategi alokasi tenaga kerja rumahtangga, sumber pendapatan, tingkat pendapatan yang dicapai dan kemiskinan per kapita diantara kelas rumahtangga pertanian di Meksiko.

Mereka menggunakan model ekonomi rumahtangga *non separable* untuk menjelaskan redistribusi kekayaan melalui efek pendapatan langsung dan efek keseimbangan umum. Hasilnya menunjukkan bahwa redistribusi lahan memberikan manfaat pemerataan dan efisiensi. Mereka berpendapat bahwa terdapat skala ekonomi dalam penggunaan tenaga kerja sendiri (*self-employment*) dalam usaha kecil, modal manusia untuk partisipasi pasar tenaga kerja, dan modal sosial untuk migrasi internasional yang menimbulkan konflik antara pemerataan dan efisiensi sosial dalam meredistribusi kekayaan. Mereka mempertimbangkan bahwa pembuat kebijakan harus memahami derajat heterogenitas yang menjadi ciri penduduk desa.

Bermula dari definisi kemiskinan, Dari hasil studi literatur karakteristik ini belum terinternalisasikan secara eksplisit ke dalam model yang digunakan para ahli ekonomi untuk menganalisis masalah tersebut. Ini memotivasi penulis untuk berpartisipasi dengan para ahli ekonomi lain dalam membangun model ekonomi rumahtangga miskin.

#### **2.4.2. Analisis Tingkat Kemampuan Ekonomi Petani**

Pada umumnya masyarakat diluar Sektor pertanian dimana tingkat hidupnya sedikit di atas tingkat hidupnya masyarakat petani. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, maka masyarakat tidak dapat mengalihkan penggunaan tenaga kerjanya dari usaha yang berorientasi pada konsumsi ke usaha pembentukan modal (Heilborner, 1982). Kawano dalam Suminartika (1997), menyatakan umumnya kegiatan berinvestasi yang

dilakukan petani masih berkisar pada lingkup pembelian sarana produksi pertanian, seperti: alat usahatani, pupuk, insektisida, bibit, upah tenaga kerja dan lain-lain. Adapun kegiatan investasi dalam bentuk sarana yang bersifat jangka panjang seperti: bangunan gudang dan alat-alat pengolahan masih terbatas sekali.

Penelitian Harris (1981) di Tamil Nadu India menunjukkan bahwa usaha pertanian cenderung menanamkan kembali surplusnya kedalam *agro-commerce* yang berarti adanya upaya bagi pengembangan usaha semula, namun konsumsi keluarga merupakan penyerap utama. Kecenderungan kedua, surplus tersebut ditanamkan (diinvestasikan) dalam usahatani. Ada juga kecenderungan investasi dalam pertokoan atau warung, tetapi kurang dibandingkan dengan dua kecenderungan di atas.

Suminartika (1997) yang meneliti kemampuan ekonomi rumah tangga dalam peremajaan tanaman teh dan kelapa sawit, menyimpulkan petani PIR teh kurang memiliki kemampuan untuk meremajakan tanaman teh, disebabkan usahatani teh merupakan usaha sampingan yang tidak menguntungkan. Berbeda dengan petani PIR teh, petani PIR kelapa sawit mempunyai kemampuan dalam meremajakan tanamannya, karena usahatani kelapa sawit merupakan usaha pokok yang menguntungkan. Demikian pula temuan Sumana (1994), pendapatan petani karet di PIR Air Molek, Riau sebesar Rp. 3.098.000,- sedangkan pengeluarannya Rp. 2.438.000,- sehingga surplus petani padi hanya 21% dari total pendapatan petani padi.

### **2.4.3. Hubungan Harga Beras / Gabah terhadap Nilai Tukar Petani**

Melalui program supra Insus diharapkan, pendapatan petani akan mencapai 1.500 dollar AS per hektar per tahun pada tahun 2000 dan 2.500 dollar AS 2010. Berarti meningkat 171,7 persen – 180,3 persen dibandingkan tahun anggaran 1985/1986 yang hanya 552 dollar AS, namun harapan dan usaha tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang. (Deptan, 2013)

Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh harga-harga komoditas pertanian yang diproduksi atau dijual petani dan harga-harga yang dibeli atau dibayar petani. Secara relatif harga-harga produk konsumsi (makanan dan non makanan) telah berperan lebih besar dalam pembentukan NTP dibandingkan dengan peran harga komoditas pertanian. Ini berarti bahwa peningkatan dan upaya peningkatan harga produk pertanian tidak akan meningkatkan NTP sebagaimana mestinya tanpa memperhatikan atau mengendalikan harga produk konsumsi (Rachmat *et al.*, 2000 dalam Soeharto, 2010).

Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks harga yang diterima petani atas hasil produksi usahataniannya ditambah dengan penerimaan lain diluar usahataniannya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang dibayar petani merupakan indeks yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian yang dinyatakan dalam persentase.

Selanjutnya Soeharto (2010) yang melakukan penelitian di Desa Wijirejo kabupaten Bantul menemukan bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut : Variabel produksi, Variabel biaya produksi, Variabel harga masing-masing menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai sig. 0,000 dengan masing-masing koefisien regresi sebesar 5,032, -5,978E-06 dan 0,1511 ini berarti bahwa setiap penambahan produksi sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai tukar petani sebesar 0,01305. Untuk biaya produksi adanya kenaikan harga beras maka setiap penambahan biaya produksi sebesar satu satuan akan menurunkan nilai tukar petani sebesar 0,000005978 serta untuk harga menunjukkan adanya kenaikan harga beras maka setiap peningkatan harga beras sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai tukar petani sebesar 0,01511. Kesimpulannya, Kenaikan harga beras berpengaruh terhadap nilai tukar petani. Dengan adanya kenaikan harga beras maka produksi, biaya produksi, dan harga beras berpengaruh terhadap nilai tukar petani.

#### **2.4.4. Penelitian Model Ekonomi Petani padi dan Dampak Kebijakan Pemerintah**

Penelitian mengenai pendapatan petani padi dan perilaku ekonomi rumah tangga mulai mendapat perhatian dalam kurun waktu terakhir ini, khususnya perilaku ekonomi rumah tangga petani pedesaan. Penelitian ekonomi rumah tangga begitu gencar dilakukan setelah Gary Becker memformulasikan teori baru yang selanjutnya disebut "*new home economics*". (Sadoulet dan Janvry, 1994).

Teori ini menempatkan rumah tangga sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi, serta kaitannya dengan alokasi waktu dan pendapatan rumah tangga yang dianalisis secara simultan. Becker (1965) mengembangkan teori *household* dengan menerapkan fungsi kepuasan (utilitas) dari konsumsi barang-barang ke dalam *New Household Economics*. Becker dalam rumusnya menyatakan bahwa terdapat dua proses perilaku rumah tangga. Pertama proses produksi rumah tangga yang digambarkan oleh fungsi produksi dan kedua, proses konsumsi rumah tangga yang merupakan preferensi atau pemilihan terhadap barang yang dikonsumsi. Kemudian dalam analisisnya lebih ditekankan pada alokasi waktu rumah tangga yang dibagi ke dalam waktu bekerja atau produktif dan waktu santai atau *leisure*.

Model pendekatan ekonomi tersebut, selanjutnya banyak diaplikasikan di negara-negara sedang berkembang khususnya penelitian-penelitian tentang usahatani. Bagi dan Singh (1974) memformulasikan model ekonomi mikro dalam pengambilan keputusan rumah tangga, di mana bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rumah tangga dibagi dalam enam kelompok, yaitu keputusan produksi, keputusan konsumsi, marketed *surplus*, penggunaan tenaga kerja, keputusan investasi dan keputusan finansial.

Barnum dan Squire (1978), dengan menggunakan model ekonometrika mencoba mengkaitkan perilaku produksi usahatani, konsumsi dan suplai tenaga kerja untuk menelaah pertanian semi-komersial pada

situasi pasar tenaga kerja yang bersaing. Model ini diaplikasikan dengan data *cross section* di Malaysia dengan tujuan menganalisa dampak migrasi, intervensi harga dan perubahan teknologi rektor pertanian. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang adanya saling keterkaitan yang erat antara produksi dan keputusan konsumsi dalam rumahtangga usahatani. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan harga output tidak efektif dalam meningkatkan jumlah produksi yang dapat dijual ke pasar, sebab tambahan manfaat akibat kenaikan harga output pertanian dan perbaikan teknologi lebih banyak terdistribusi atau dialokasikan untuk upah biaya tenaga kerja.

Singh dan Subramaniam dalam Singh, *et al.* (1986), menggunakan data Korea dan Nigeria untuk menelaah faktor yang mempengaruhi alokasi sumber daya antar komoditi. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik pemrograman linier dalam kegiatan produksi, dimana kerangka hubungan berbagai peubah yang digunakan dalam penelitian dibuat atas dasar model rumah tangga usahatani.

Smith dan Strauss dalam Singh, *et al.* (1986), dengan menggunakan data Sierra Leone membuat simulasi mikro untuk mengetahui dampak kebijakan Pemerintah terhadap berbagai tipe rumah tangga. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya kebijakan kenaikan harga padi dapat meniadakan perbaikan konsumsi pangan penduduk pedesaan secara keseluruhan, tetapi sebaliknya bagi rumah tangga miskin mengakibatkan dampak yang positif. Rumah tangga berpendapatan rendah yang umumnya

mempunyai persediaan yang lebih besar dalam jumlah padi untuk dijual, sehingga dapat memperoleh tambahan keuntungan..

Pitt dan Rosenzweig dalam Singh, *et al.* (1986), dengan melakukan modifikasi terhadap bentuk umum model pertanian rumah tangga dan petani padi menelaah hubungan antara konsumsi pangan dan kesehatan serta antara kesehatan dengan keuntungan usahatani padi di Indonesia. Modifikasi yang dilakukan dengan menambah peubah eksogen kesehatan sebagai faktor yang menentukan keputusan rumah tangga dan petani padi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keuntungan usahatani padi relatif dapat mempertahankan status kesehatan petani. Status kesehatan petani juga dipengaruhi oleh harga dimana (sebagai contoh) penurunan harga gula dapat menyebabkan peningkatan jumlah petani yang menderita sakit. Sedangkan penurunan harga sayuran dan minyak sayur dapat mengurangi jumlah petani penderita sakit.

Benyamin Guyomard dalam Caillavet, *et al.* (1994) melakukan penelitian mengenai keputusan kerja pada sektor off-farm pada rumah tangga petani di Perancis dengan menggunakan teori keseimbangan subjektive menemukan bahwa perilaku bekerja suami dipengaruhi oleh karakteristik usahatani sementara perilaku bekerja istri dipengaruhi oleh karakteristik umum individu seperti umur, pendidikan dan ukuran keluarga seperti jumlah anak.

De Janvry, Alain, *et al.* dalam de Janvry, (1995) melakukan penelitian di Maroko dengan menggunakan *A Computable Household model* untuk

mengetahui pengaruh kebijaksanaan penyesuaian struktural terhadap ekonomi rumah tangga petani menemukan bahwa jika tidak terjadi kegagalan pasar peningkatan 10 persen harga produk pertanian akan meningkatkan 9,9 % produksi *cash crop*, meningkatkan pendapat riil, dan meningkatkan waktu bersantai rumah tangga petani.

Briere, dalam Heerink, *et al.* (2001) melakukan penelitian di Republik Dominika dengan menggunakan *householdmodel* untuk mengetahui praktek rumah tangga dalam mengadopsi usaha tani pada tanah lokasi tanah kritis pada kondisi pasar makanan yang tidak sempurna menemukan bahwa subsidi bahan pangan mampu membantu rumah tangga miskin untuk melakukan usaha tani padi sawah. Sementara itu, rumah tangga petani yang menghadapi *return* yang tinggi dipasar tenaga kerja akan cenderung mengabaikan usaha tani padi jika subsidi dihentikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengadopsi usaha tani padi sawah yang utama adalah rumah tangga petani yang memiliki perhatian dan ketergantungan produksi serta konsumsi pada usahatani padi.

Di Indonesia penelitian-penelitian yang didasari oleh model ekonomi petani padi dikaitkan dengan perilaku rumah tangga khususnya penelitian-penelitian pertanian di pedesaan relative belum banyak dilakukan. Beberapa peneliti diantaranya Mangkuprawira (1985), menggunakan model ekonomi rumah tangga dalam menelaah alokasi waktu dan kontribusi kerja anggota keluarga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perilaku pembagian kerja antara anggota keluarga beserta

faktor-faktor yang berpengaruh dan melihat perilaku keluarga dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Hasil penelitian memperlihatkan ada tiga faktor yang mempengaruhi alokasi waktu suami dan istri yaitu imbalan kerja, pendapatan rumah tangga, dan jumlah anggota keluarga (usia kerja dan bukan usia kerja). Respon suplai tenaga kerja suami dan istri terhadap imbalan kerja mempunyai *slope* yang positif. Ada kecenderungan makin rendah lapisan ekonomi rumah tangga makin tinggi respon suami dan istri mencari nafkah.

Penelitian yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan konsumsi petani juga dilakukan oleh Susetyanto (1994), dengan menganalisis dampak alternatif kebijakan pemerintah terhadap produksi, pendapatan, dan konsumsi rumah tangga petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan menaikkan harga kedelai, kombinasi harga kedelai dengan pupuk ataupun kombinasi harga kedelai dengan sarana produksi yang lain, akan berdampak positif pada peningkatan penggunaan tenaga kerja, produksi kedelai dan pendapatan petani dan kontribusi pendapatan rumah tangga. Kebijakan pemerintah dalam penentuan **harga dasar padi** dan palawijaya serta penghapusan subsidi pupuk sesuai dengan harapan pemerintah yakni dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produksi kedelai dan pendapatan petani.

Basit (1995), juga menggunakan *agricultural household model* dalam studinya yang berjudul : Analisa Ekonomi Penerapan Teknologi Usahatani Sawah pada Lahan sawah Belereng di Wilayah Hulu Das Jratunsluna Jawa

Tengah. Tujuan dari studi ini diantaranya mempelajari keterkaitan serta besarnya pengaruh berbagai faktor yang menentukan keragaan usahatani sawah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keragaan usahatani padi adalah pengaruh perubahan kualitas penerapan teknologi terhadap produksi pangan, pendapatan luar usahatani terhadap penggunaan pupuk, harga padi terhadap penggunaan benih padi, harga jagung terhadap penggunaan benih jagung, harga benih kedelai terhadap penggunaan benih kedelai, harga kacang tanah terhadap penggunaan benih kacang tanah, harga ubi kayu terhadap penggunaan bibit ubi kayu, upah tenaga kerja terhadap penggunaan tenaga kerja, dan produksi tanaman keras terhadap penggunaan tenaga kerja tanaman keras.

Mila rasmiati (2012) juga menggunakan Agriculture Household model) model chayanov dengan menggunakan aplikasi Model Ekonomi Dalam Usaha Tani dan Rumah Tangga Usaha Tani, menganalisis tentang "Pengaruh kredit terhadap Perilaku Ekonomi Petani dan Rumah Tangga Petani Padi Sawah.

Secara ringkas perkembangan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan aspek petani padi dan ekonomi rumah tangga petani khususnya kemiskinan petani padi diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Perkembangan Penelitian-Penelitian Yang Berkaitan dengan Aspek Petani Padi Miskin dan Ekonomi Rumah Tangga Petani.**

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitiannya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuhka	Perluasan Model	Dengan menggunakan model analisis

	Sundaya (2010)	Ekonomi Rumah Tangga Usaha Tani	statistika komparatif menunjukkan bahwa efek perubahan harga tidak memberikan dorongan yang kuat terhadap perubahan produksi. Rumah tangga petani miskin diperkirakan sulit untuk melepas surplus produksinya ke pasar tanaman pangan karena terdesak oleh pemenuhan kebutuhan subsisten.
2.	Wayan, R. Susila, 2010	Kebijakan Subsidi Pupuk : Di tinjau Kembali	Dampak Negatif Kebijakan Subsidi pupuk antara lain : (1) Distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, (2) Dualisme pasar,(3) Penggunaan pupuk yang berlebihan, serta (4) menghambat pengembangan industri pupuk nasional, Sedangkan dampak positifnya : (1) meningkatkan modal petani, (2) Mendorong adopsi teknologi, serta (3) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
3.	Earle, Rose dan Brownlea (1979)	Socioeconomic predictors of intention towards soil conservation and their implications in environmental management	Penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan, skala usaha, pendapatan berpengaruh positif terhadap praktek Lahan Konservasi diantara petani di Australia.
4.	Featherstone and Goodwin (1997)	Factors Influencing a Farmer's Decision to Invest in Long-term Conservation Improvements	Penelitian ini dilakukan di negara bagian Kansas Amerika Serikat dengan menggunakan tobit model menemukan bahwa besarnya subsidi pemerintah, jumlah hutang, besarnya modal, skala usaha, serta jenis usaha berpengaruh positif terhadap perilaku petani lahan konservasi dalam mengadopsi investasi teknologi petani jangka panjang, sementara tersedianya irigasi, umur, pendapatan, dan proporsi tanah yang disewakan berpengaruh negative terhadap perilaku adopsi.
5.	Okeye (1999)	Comparative analysis of factors in the adoption of traditional and	Penelitian ini menemukan bahwa umur, tingkat pendapatan, harga input berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi petani lahan kritis,

		recommended soil erosion control practices in Nigeria	sementara harga output, pekerjaan off-farm berpengaruh negative terhadap perilaku adopsi teknologi petani.
6.	Kasijadi (1993)	Peranan Pengembangan Usahatani buah buahan Dalam pembangunan Sumberdaya Lahan Kering di Daerah Aliran Sungai Brantas hulu	Dalam penelitian di lahan konservasi, menyimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peluang ketersediaan petani mengusahakan tanaman buah-buahan adalah besarnya pendapatan petani, tersedianya tenaga kerja, luas penguasaan lahan, pendidikan petani, tersedianya penyuluhan, kredit usahatani, pasar output dan input untuk buah-buahan, sedangkan umur petani berpengaruh negative.
7.	Bagi dan Singh (1974)	A Microeconomic Model of Farm Decisions in LDC: A Simultaneous Equation Approach	Penelitian ini berhasil memformulasikan model ekonomi mikro dalam pengambilan keputusan rumah tangga, di mana bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rumah tangga dibagi dalam enam kelompok, yaitu keputusan produksi, keputusan konsumsi, marketed surplus, penggunaan tenaga kerja, keputusan investasi dan keputusan finansial.
8.	Barnum dan Squire (1978)	An Econometric Application of the Theory of the Farm-Household. Journal of Development Economic	Penelitian ini menggunakan model ekonometrika mencoba mengkaitkan perilaku produksi usahatani, konsumsi dan suplai tenaga kerja untuk menelaah pertanian semi-komersial pada situasi pasar tenaga kerja yang bersaing. Model ini diaplikasikan dengan data <i>cross section</i> di Malaysia dengan tujuan menganalisa dampak migrasi, intervensi harga dan perubahan teknologi sektor pertanian.  Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang adanya saling keterkaitan yang erat antara produksi dan keputusan konsumsi dalam rumah

			tangga usahatani. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan harga output tidak efektif dalam meningkatkan jumlah produksi yang dapat dijual ke pasar, sebab tambahan manfaat akibat kenaikan harga output pertanian dan perbaikan teknologi lebih banyak terdistribusi atau dialokasikan untuk upah/biaya tenaga kerja.
9.	Benyamin and Guyomard dalam Caillavet <i>et al</i> , (1994)	Agricultural household Modelling and Family Economics	Melakukan penelitian mengenai keputusan kerja pada sektor off-farm pada rumah tangga petani di Perancis menemukan bahwa perilaku bekerja suami dipengaruhi oleh karakteristik usahatani sementara perilaku bekerja istri dipengaruhi oleh karakteristik umum individu seperti umur, pendidikan dan ukuran keluarga (jumlah anak).
10.	Susetyanto (1994)	Analisis Dampak Alternatif Kebijakan terhadap Produksi, Pendapatan dan Konsumsi Rumahtangga Petani Kedelai di Kabupaten Subang Jawa Barat	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan menaikkan harga kedelai, kombinasi harga kedelai dengan pupuk atau pun kombinasi harga kedelai dengan sarana produksi yang lain, akan berdampak positif pada peningkatan penggunaan tenaga kerja, produksi kedelai dan pendapatan rumah tangga. Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga dasar padi dan palawijaya serta penghapusan subsidi pupuk sesuai dengan harapan pemerintah yakni dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produksi kedelai dan pendapatan petani.
11.	Mangkuprawira (1985)	Alokasi Waktu dan Kontribusi Kerja Anggota Keluarga dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga	Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perilaku pembagian kerja antara anggota keluarga beserta faktor-faktor yang berpengaruh dan melihat perilaku keluarga memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Hasil penelitian memperlihatkan ada tiga faktor yang mempengaruhi alokasi waktusuami

			<p>dan istri yaitu imbalan kerja pendapatan rumah tangga, dan jumlah anggota keluarga (usia kerja dan bukan usia kerja). Respon suplai tenaga kerja suami dan istri terhadap imbalan kerja mempunyai <i>slope</i> yang positif. Ada kecenderungan makin rendah lapisan ekonomi rumah tangga makin tinggi respon suami dan istri mencari nafkah.</p>
12.	Basit (1995)	Analisa Ekonomi Penerapan Teknologi Usahatani Sawah pada Lahan sawah Berlereng di Wilayah Hulu Das Jratunsluna Jawa Tengah	<p>Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keragaan usahatani adalah perubahan kualitas penerapan teknologi terhadap produksi pangan, pendapatan luar usahatani terhadap penggunaan pupuk, harga padi terhadap penggunaan benih padi, harga jagung terhadap penggunaan benih jagung, harga benih kedelai terhadap penggunaan benih kedelai, harga kacang tanah terhadap penggunaan benih kacang tanah, harga ubikayu terhadap penggunaan bibit ubikayu, upah tenaga kerja terhadap penggunaan tenaga kerja, dan produksi tanaman keras terhadap penggunaan tenaga kerja tanaman keras.</p>
13.	Briere, dalam Heerink, <i>et al</i> , (2001)	Imperfect Food Markets and Household Adoption of Soil Conservation Practices in the Domician Repeblic Highland: Household Probit and Duration Models	<p>Penelitian di Republik Dominika dengan menggunakan household model untuk mengetahui praktek rumahtangga dalam mengadopsi usaha konservasi tanah pada kondisi pasar makanan yang tidak sempurna menemukan bahwa subsidi bahan pangan mampu membantu rumahtangga miskin untuk melakukan usaha konservasi tanah. Sementara itu, rumahtangga petani yang menghadapi <i>return</i> yang tinggi dipasar tenaga kerja akan cenderung mengabaikan usaha konservasi jika subsidi dihentikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengadopsi usaha</p>

			tani yang utama adalah rumahtangga petani yang memiliki perhatian dan ketergantungan produksi serta konsumsi pada usahatani.
14.	Djoko Koestiono (2004)	Analisis Ekonomi Rumah Tangga Petani dalam Sistem Usahatani Sawah	Penelitian ini mengembangkan temuan Brire (2001) yang mengaitkan antara aspek kebijakan konsumsi pangan dengan adopsi teknologi konservasi lahan kering. Sedangkan penelitian ini mencoba mengembangkan lebih lanjut model ekonomi rumah tangga petani di lahan sawah dalam usahatani padi melalui keterkaitan aspek konsumsi non pangan (pendidikan, energi, kesehatan) dengan aspek penerapan teknologi konservasi lahan kering
15.	Eskola, E (2005)	Comercialisation and Poverty in Tanzania	Berpendapat bahwa pembangunan fasilitas pasar yang dekat dengan kegiatan pertanian serta kemudahan petani untuk mengakses informasi pasar dapat meningkatkan derajat komersialisasi rumah tangga pertanian. Partisipasi pasar akan terbuka lebar bagi petani dan pendapatan rumah tangga petani dengan demikian hambatan penjualan mengecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.
16	Arifin, Bustanul. (2006)	Refleksi Strategi Pengentasan kemiskinan	Lebih dari 55 persen jumlah penduduk miskin adalah petani, dan 75 persen dari petani miskin adalah petani tanaman pangan. Kondisi Kemiskinan ini kemungkinan yang menjadi penyebab turunnya produksi pertanian dari tahun ke tahun.
17	Becker., Gary, S.A. (1976)	A Theory of the Allocation Of Time	Dengan model ekonomi rumah tangga dimana pendapatan bersifat endogen, sedangkan dalam model marshallian pendapatan bersifat eksogen. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika pendapatan bersifat endogen maka keputusan konsumsi tidak bisa dilepaskan dengan keputusan

			produksi. Selanjutnya Becker berpendapat bahwa waktu santai dianggap sebagai bentuk konsumsi. Rumah Tangga tidak hanya mengkonsumsi komoditi fisik, tetapi ia juga mengkonsumsi waktu seperti mengkonsumsi komoditi fisik lainnya.
18	Datt, G and D. Jolliffe (2005)	Poverty in Egypt : Modelling and Policy Simulation	Dengan methodologi ekonometrika menjelaskan perubahan konsumsi perkapita yang dideterminasi oleh karakteristik rumah tangga yang menjelaskan perubahan pengeluaran perkapita tersebut mencakup ukuran rumah tangga, lama pendidikan primernya ditempuh oleh suami dan istri, luas lahan olahan yang dimiliki, jarak sekolah dari rumah, dan jarak rumah sakit dari rumah. Kesimpulannya : Pentingnya pendidikan orang tua di dalam meredam masalah kemiskinan
19	De Jan Vary, A Sadoulet, E and Zhu, N (2005)	The Role of Non-Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequaty in China	Dengan menggunakan simulasi "counterfactual" model ekonometrika probit terhadap rumah tangga pertanian yang tidak mengakses sumber pendapatan dari kegiatan off farm, hasil simulasi menunjukkan bahwa tanpa ada kesempatan kerja off farm kemiskinan pedesaan akan lebih tinggi dan mendalam, dan hasilnya kesenjangan pendapatan akan makin tinggi. Selanjutnya mereka menemukan bahwa pendidikan, kedekatan lokasi dengan kota, efek tetangga dan efek desa terlihat krusial dalam menolong rumah tangga tertentu untuk memperoleh akses terhadap kesempatan memperoleh tambahan pendapatan. Lebih lanjut menyimpulkan bahwa partisipasi dalam kegiatan off-farm dapat memberikan efek limpahan yang positif terhadap produksi rumah tangga pertanian.

20	De January A. And Sadulet E (1996)	Household Modelling For Design of Poverty	Program transfer kekayaan (asset) masing - masing meredam kemiskinan.
----	---	---	---

Selain ditunjukkan dengan menggunakan tabel di atas, posisi penelitian dapat juga digambarkan dengan menggunakan *flow chart* (gambar 1). Penelitian ini mempertimbangkan keterkaitan antara kegiatan produksi Usahatani padi di lahan sawah dengan aspek selain Usahatani lainnya baik berupa usaha ternak, usaha pekarangan, usaha non pertanian dan juga aspek konsumsi rumah tangga petani padi padalahan sawah. Aspek konsumsi ini mempertimbangkan baik konsumsi pangan maupun non pangan yaitu konsumsi untuk **kesehatan, pendidikan dan energi.**

#### **2.4.4. Studi Masri Singarimbun, 1986**

Masri Singarimbun dalam studinya di Desa Sriharjo, Yogyakarta pada tahun 1983, menyatakan bahwa kurang lebih 8,3% penduduk Desa Sriharjo hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk desa ini (68,70%) adalah petani padi, 13% adalah pedagang, 7% bekerja di Kota Yogyakarta dengan "nglajo" (pulang pergi) dan sisanya bekerja apa adanya (serabutan).

Hasil studinya menyatakan bahwa penyebab dari kemiskinan penduduk Desa Sriharjo adalah pemilihan luas lahan yang dimiliki sangat sempit (0,37 ha per keluarga), kekurangan modal dan terbatasnya lapangan kerja.

Taylor dan Adelman (2003) menjabarkan dan mengulas mengenai evolusi dan perkembangan penggunaan model ekonomi rumahtangga pada 196 petani di Michoacan, Meksiko. Metode estimasi yang digunakan yaitu General Algebraic Modeling System (GAMS) untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan NAFTA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efek pendapatan petani karena perubahan kebijakan tidak didistribusi secara merata diantara rumahtangga petani di pedesaan. Transfer pendapatan pada keluarga petani Subsisten diwilayah perdesaan Meksiko memberi hasil terbaik dan berpotensi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Studi di Indonesia dengan baik topik pendapatan petani maupun model ekonomi rumah tangga petani lebih banyak dilakukan untuk komoditas tanaman pangan. Secara "kasar" data 1975 dibanding 1993 menunjukkan jumlah petani turun dari 48% ke 30%, buruh tani turun sedikit saja (dari 12% ke 10%) sebaliknya bukan-petani di desa naik dari 18% ke 22% dimana jumlah golongan atas diantara bukan-petani menjadi lebih besar dari bukan-petani golongan rendah. Thorbecke (1993) memberi tafsiran data Sistem Neraca Sosial-Ekonomi itu dalam rangka terjadinya penyesuaian struktural. Di dalam proses pembangunan titik berat beralih dari pertanian ke sektor industri dan jasa-jasa (di Indonesia lebih tepat: jasa-jasa lebih dulu). Peralihan itu dimungkinkan surplus pertanian yang terjadi. Pengalihan tenaga kerja pertanian ke sektor "informal" (di kota) terjadi berupa migrasi musiman (dari desa ke wilayah dekat, desa lain atau kota kecil) atau migrasi

permanen. Gejala gerak tenaga kerja ini mencakup proses migrasi antar-sektor : hal yang positif.

Hasil penelitian Sawit (2003) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras akan meningkatkan pendapatan petani padi, penyerapan tenaga kerja dan jumlah beras yang dijual di pasar. Khusus untuk aspek tenaga kerja dinyatakan bahwa penawaran tenaga kerja laki - laki dan perempuan dalam usahatani padi di Jawa Barat adalah elastis terhadap upahnya sendiri, sedangkan hal tersebut pada usaha non pertanian adalah mendekati nol.

Model ekonomi petani juga telah digunakan oleh Heatubun (2001) dalam studinya untuk mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan petani multikomoditi di Propinsi Maluku. Model analisis yang digunakan adalah model persamaan simultan dengan metode *two stage leastsquares* (2 SLS) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan petani multikomoditi dinyatakan berhasil dan sisi tepat sasaran, sesuai agro ekosistem setempat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Produksi usahatani di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Jratunseluna, Jawa Tengah juga telah diduga dengan menggunakan bentuk umum model ekonomi petani dan rumahtangga petani, dimana produksi ditentukan oleh tingkat penggunaan variabel input, tingkat penggunaan tenaga kerja dan karakteristik proses produksi (Basit,1996), dengan menggunakan persamaan simultan dan metode pendugaan 3SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan **petani padi miskin** untuk

mengadopsi teknologi sangat ditentukan oleh luas lahan yang dikuasai, tenaga kerja, status penguasaan lahan, frekuensi penyuluhan dan keikutsertaan petani dalam program tersebut. Petani berlahan sempit lebih responsif terhadap teknologi usahatani yang diterapkan dibandingkan dengan petani dengan lahan lebih luas. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang terlibat, semakin kuat status penguasaan lahan dan semakin tinggi frekuensi penyuluhan berdampak pada semakin besarnya peluang petani padi miskin untuk mengadopsi teknologi. Keragaan usahatani ditentukan oleh kualitas penemuan teknologi, pendapatan non usahatani, harga output dan upah tenaga kerja. Kualitas penerapan teknologi merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap keragaan usahatani, khususnya terhadap produksi dan pendapatan, dimana kualitas penerapan teknologi sangat ditentukan oleh intensitas penyuluhan dan ketersediaan modal.

Kusnadi (2005), dengan menggunakan model ekonomi petani dikaitkan dengan lingkup rumah tangga untuk mengidentifikasi adanya interaksi yang kompleks antara **keputusan produksi dan konsumsi**. Model persamaan simultan digunakan dalam penelitian ini, dimana harga bayangan input diperoleh dan bentuk fungsi produksi translog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna, perubahan harga input atau harga produk menghasilkan efek artikulasi pada ekonomi petani dan rumahtangga petani padi miskin yang mengindikasikan adanya hubungan simultan yang kompleks antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi. Pada kondisi ini, perilaku ekonomi petani padi miskin

lebih responsive pada perubahan harga produk dibandingkan terhadap perubahan harga input.

Program peningkatan produktivitas padi terpadu yang dicanangkan oleh Departemen Pertanian menunjukkan bahwa introduksi teknologi pertanian terpadu tanaman - ternak mampu meningkatkan produktivitas padi sawah sekitar 1 ton per ha dan pendapatan petani meningkat antara Rp. 900 ribu -Rp. 1 juta per ha per musim tanam (Zaini et al., 2003). Pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan efisiensi usahatani padi sawah melalui penerapan komponen teknologi yang memiliki efek sinergistik.

Budianto (2003), menyatakan bahwa secara rata-rata, dan 28 lokasi di Indonesia yang menerapkan program pengelolaan tanaman terpadu, produktivitas tanaman padi meningkat rata-rata 18 persen dibandingkan dengan pola tradisional. Biaya produksi dari sistem usahatani ini adalah Rp. 3,9 juta/ha dibandingkan dengan pola tradisional yang sebesar Rp. 3,6 juta/ha. Peningkatan biaya ini disebabkan karena adanya introduksi penggunaan pupuk organik sebesar 0,90 ton/ha, namun rataan hasil gabah yang diperoleh 1,03 ton lebih tinggi pada program pengelolaan tanaman terpadu dibandingkan dengan pola tradisional, sehingga pendapatan petani rata-rata masih meningkat sebesar 33 persen.

Suatu penelitian di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menunjukkan bahwa petani padi pada sistem usahatani terpadu dengan menggunakan pupuk organik menghasilkan pendapatan Rp. 1,45 juta per musim tanam

lebih tinggi dibandingkan dengan petani padi yang tidak menggunakan pupuk organik (Howara,2004). Hal ini sependapat juga telah dilaporkan oleh Syam dan Sariubang (2004) yang menyatakan bahwa penggunaan pupuk organik sebanyak 2 ton per ha diimbangi dengan pupuk urea, Za dan KCl pada sistem usahatani padi sawah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, memberikan pendapatan petani sebesar Rp. 3.376.878 per ha per musim tanam. Lebih lanjut dinyatakan bahwa karena harga pupuk anorganik yang semakin mahal, maka disarankan bagi petani dalam penggunaan kombinasi pupuk organik dengan pupuk anorganik secara berimbang.

Pada sistem usahatani di lahan kering, respon penggunaan pupuk organik terhadap pendapatan petani juga telah dilaporkan oleh Piriyanthi *et al.* (2004). Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa dengan penggunaan kompos yang dibuat oleh petani dengan proses fermentasi, penerimaan dan hasil produksi kacang tanah memberikan hasil yang paling tinggi dibandingkan dengan penggunaan kompos komersial dan kotoran ternak yang telah dikeringkan. Perbedaan tersebut untuk setiap ha mencapai Rp. 624.937 dan Rp. 724.333 masing - masing untuk penggunaan kompos komersial dan kotoran ternak yang telah dikeringkan.

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada alokasi penggunaan tenaga kerja petani dan rumahtangga petani pada waktu sebelum dan sesudah mengikuti program pertanian terpadu. Kegiatan rumah tangga yang awalnya mencapai 22,4 HOK per bulan berkurang menjadi 17,3 HOK per bulan pada alokasi

penggunaan tenaga kerja wanita (Prasetyo *et al*, 2002). Dalam kasus di Jawa, migrasi keluar (netto) dari pertanian telah terjadi disertai kenaikan jumlah hari (jam) kerja per orang, dimana pendapatan meningkat karena curahan tenaga yang meningkat, bukan oleh kenaikan upah. Jelas waktu itu bahwa di Jawa kapasitas serap tenaga kerja di pertanian sudah terbatas sekali, maka peluang lain dicari di luar pertanian.

Selanjutnya Studi Dinamika Pedesaan (Proyek Survey Agro-Ekonomi, Departemen Pertanian) menghasilkan analisa satu kasus, wilayah utama padi sawah di Jawa dan Sulawesi Selatan : cakupan masa 1979-1980, di desa-desa sampel yang sudah dikenal SAE sejak tahun 1969. Kasryno penyunting buku "Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia" (Yayasan Obor Indonesia, 1984), juga penulis 3 bab di buku itu mendalami ekonomi kelembagaan, khususnya penguasaan tanah, kesempatan kerja (dalam usaha tani dan di luar pertanian) dan perkreditan desa, peranan teknologi, dan tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Dalam penelitian tentang analisa perkembangan ekonomi pedesaan di Jawa dan Sulawesi Selatan, wilayah utama padi sawah yang telah memasuki "revolusi hijau", menyimpulkan dalam hal ; Kelembagaan penguasaan tanah : telah terjadi "differensiasi kelas" petani. Dengan menyisihkan peluang reformasi agraria (sikon masa itu) peluang kerja makin banyak ditemukan di luar pertanian. Ada juga usulan hal "tenancy reform"

mengingat ketentuan UU Bagi Hasil tak diikuti di desa-desa itu. Penyerapan tenaga kerja dikaitkan tingkat upah, teknologi unggul bias pada pemilik tanah dan penggarap (persentase bagian untuk tenaga kerja bayaran menurun : dari 38% ke 28% nilai tambah). Peningkatan produktivitas tanah itu mendorong perluasan kepemilikan tanah. Perluasan kepemilikan tanah memperkecil peluang tenaga kerja, peningkatan produktivitas tanah sawah dan harga gabah yang lebih tinggi lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah pertanian didorong naiknya upah di luar pertanian. Perbaikan peluang kerja dan pendapatan ditemukan di luar pertanian dan dari pekerjaan berburuh tani pada golongan tanpa-tanah.

Perkembangan teknologi mekanisasi di Jawa : pemakaian bibit unggul (padi) dan pupuk pabrik mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja di desa. Mekanisasi terutama terjadi pada proses pengolahan gabah menjadi beras (mesin "huller"), sedangkan masuknya traktor pengolah tanah masih terbatas.

Penyerapan tenaga kerja luar pertanian di desa : industri rumah tangga memerlukan proses lama; dimulai dari pengalaman berburuh, berdagang, barulah meningkat menjadi pengusaha. Pembinaan usaha industri rumah tangga bisa merupakan pendidikan untuk menjadi pengusaha.

Perkreditan pertanian di desa : dalam masa 1972-1981, kredit perbankan untuk pertanian se-Indonesia tumbuh 28% per tahun. Namun porsi nilai kredit pertanian menurun, beralih ke bidang-bidang dagang,



industri, dan jasa. Sistem perbankan belum sesuai kebutuhan masyarakat desa. Di desa-desa sampel baru 15% rumah tangga yang terlibat dalam kredit formal, sedangkan 19% lainnya dari kredit informal. Sejumlah saran : perbaikan sistem informasi, memperkenalkan bentuk-bentuk baru kredit untuk golongan ekonomi lemah yang sesuai kebutuhan modal usaha rumah tangga.

Hal pola pengeluaran rumah tangga desa dan pemilikan modal bukan-tanah : saran pelatihan bagi rumah tangga miskin agar lebih terampil dan "berjiwa wiraswasta". Saran lain agar arus informasi dalam hal "konsumsi mewah" dihambat (mengingat dampaknya di desa).

Analisa data pendapatan rumah tangga di desa-desa wilayah utama padi sawah itu (1981) mengacu pelapisan yang menunjukkan keragaman sumber nafkah rumah tangga (beda dari data BPS) dan disertai data penguasaan tanah (38% tak-bertanah). Memakai ukuran garis kemiskinan (**ekuivalen nilai jual beras 240 kg/orang/tahun**) buruh tani, rumah tangga dan petani gurem (kurang 0,5 ha) tergolong "miskin" (54%). Luas lahan 0,68 ha, Di antara yang miskin itu sumber pendapatan dari usaha luar pertanian cenderung meningkatkan pendapatan. menunjukkan kasus desa dimana dari tiga sumber pendapatan itu, rumah tangga dengan luas tanah lebih yang selalu unggul. Sebaliknya rumah tangga tanpa-tanah memperoleh pendapatan terkecil, bahkan tergolong rumah tangga defisit bila dibandingkan tingkat pendapatan sebatas "biaya hidup" sebagai patokan.

Pembangunan pertanian selama tahun 1970-an dan 1980-an sudah cukup berhasil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB sektor pertanian rata-rata 3,2 % per tahun. Swasembada beras dapat dicapai pada tahun 1984, dan telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan tahun 1980-an. Swasembada beras ini hanya dapat dipertahankan sampai tahun 1993. Produktivitas padi Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan Asia Selatan, upah tenaga kerja pertanian dan harga pupuk terendah di Asia Tenggara, karenanya Indonesia memiliki keunggulan kompetitif beras sebagai substitusi impor. Dengan demikian adalah kurang beralasan secara ekonomis menetapkan harga beras (harga dasar) dalam negeri jauh di atas harga pasar dunia dan menetapkan pajak impor yang berlebihan.

Menurut data menunjukkan 71% petani produsen padi di Jawa adalah petani gurem (mengusahakan lahan <0,5 ha), yang juga sebagai konsumen beras. Proteksi harga beras lebih banyak menguntungkan petani berlahan luas (<30 % petani) dan pedagang beras. Dengan demikian kebijakan harga dasar mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Sebetulnya kebijakan yang diperlukan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi pada setiap mata rantai agrobisnis komoditi pertanian. Nilai ekspor hasil pertanian meningkat dengan laju rata-rata 11,5 % per tahun, dan menyumbang nilai ekspor Indonesia sebesar 21,4 % tahun 1996. tingkat kemiskinan pedesaan telah berhasil diturunkan dari 40 % tahun 1976 menjadi 14 % tahun 1990, walaupun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di perkotaan yang mencapai 10 % tahun 1990. (Nazam, 2010)

Keberhasilan pembangunan pertanian tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan ekonomi makro dan mikro yang sangat mendukung sektor pertanian. 1) Alokasi anggaran sektor pertanian yang rata-rata 9,6 % dari total pengeluaran negara ternyata masih lebih tinggi dari rata-rata negara berkembang sebesar 7,5 %. Di samping itu keberhasilan tersebut juga ditopang oleh adanya terobosan teknologi biologi dan kimia (revolusi hijau untuk padi sawah), perluasan areal beririgasi dan lahan pertanian, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Mulai tahun 1984 kebijakan pembangunan ekonomi meninggalkan sektor pertanian, dengan memacu pertumbuhan industri pengolahan, yang penuh ketergantungan pada impor. Di sektor pertanian diversifikasi dilaksanakan dengan mendorong pertumbuhan komoditi ekspor (terutama kelapa sawit, kakao, udang, tuna dan cakalang) dan ayam ras (konsumsi domestik). Kebijakan baru ini ditopang pula oleh kebijakan pembangunan yang bias perkotaan (urban bias development), termasuk kebijakan perdagangan dan nilai tukar yang sangat melindungi sektor industri. Alokasi anggaran untuk sektor pertanian menurun drastis. Pembangunan infrastruktur pedesaan dan di luar Jawa diabaikan demi memacu pembangunan infrastruktur perkotaan dan di Jawa. Pembangunan pertanian sendiri mulai dilepas untuk didominasi oleh perusahaan besar terutama di bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, dimana pembangunan pertanian harus melibatkan rakyat berupa PIR dengan ketentuan 60 % areal dimiliki oleh plasma. Pada paket deregulasi tahun 1990-an areal menjadi 100

% bisa dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan besar dan malah boleh 100 % modal asing. Kebijakan ini keliru, karena memarjinalisasi hak masyarakat dan menumbuhkan "enclave" kemakmuran warga perusahaan di tengah kemiskinan masyarakat pedesaan.

Selama dekade 1990-an jumlah petani gurem yang mengusahakan lahan <0,5 ha meningkat dengan laju 1,5 % dan jumlah buruh tani meningkat dengan laju hampir 5,0 % per tahun. Di lain pihak, 5 perusahaan perkebunan swasta besar menguasai lebih dari satu juta ha lahan perkebunan. Semua nilai tambah jatuh pada perusahaan besar di Jakarta, sedangkan masyarakat lainnya di daerah hanya menerima UMR dan pemerintah daerah menerima PBB yang sangat rendah. Kebijakan ini merupakan kesalahan strategi pembangunan, yang harus diubah dengan memberikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya domestik pada petani dan masyarakat pedesaan secara berkeadilan. Pertumbuhan pertanian mulai menurun yang mencapai puncaknya ketika impor beras menjadi 6 juta ton tahun 1998 (25 % beras yang ada di pasar dunia) terbesar dalam sejarah.

Dalam krisis ekonomi 1997-1999 pertumbuhan sektor pertanian masih positif dimana ekonomi nasional terjadi kontraksi yang cukup besar. Sektor pertanian dan pedesaan menjadi penyelamat kesempatan kerja dampak krisis ekonomi, disertai dengan menurunnya produktivitas tenaga kerja dan kembali membengkaknya kemiskinan pedesaan menjadi 27 % tahun 1998. Kontribusi sektor pertanian pada pendapatan devisa meningkat

dengan drastis. Krisis ekonomi menyadarkan akan berbagai kekeliruan pembangunan ekonomi nasional setelah tahun 1984. Ekonomi nasional harus dibangun dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya domestik (sumberdaya alam dan tenaga kerja) secara berkeadilan. Pembangunan tersebut harus melibatkan secara aktif masyarakat dalam perekonomian ("ekonomi kerakyatan") disertai desentralisasi manajemen pembangunan.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang besar. Kedua potensi ini harus dikombinasikan dengan memberikan hak penguasaan lahan dan sumberdaya alam bagi tenaga kerja yang kualitas dan kemampuan manajemennya ditingkatkan disertai pengembangan teknologi maju. Dengan strategi ini pertanian akan dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan.

Krisis ekonomi juga menumbuhkan kembali keyakinan bahwa sektor pertanian dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu paradigma pembangunan pertanian harus diubah menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan pembangunan pertanian baru antara lain: partisipasi aktif petani dan masyarakat pedesaan disertai pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan penguasaan lahan dan aset produktif per tenaga kerja pertanian dan pemerataan jangkauan pada aset produktif pertanian, teknologi, dan pembiayaan, diversifikasi pertanian dalam arti luas ("broad base agricultural diversification"), pengembangan

lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, pengembangan kelembagaan pertanian dan pedesaan dan pengembangan prasarana pertanian dan pedesaan, dan pengembangan basis sumberdaya pertanian. Kebijakan baru ini perlu didukung dengan pelaksanaan secara konsekuen "land reform" dan "agrarian reform", sehingga lahan pertanian hanya boleh dimiliki oleh petani Indonesia. Untuk paket deregulasi tahun 1993 yang membolehkan penguasaan lahan 100 % oleh perusahaan swasta dan bahkan swasta asing harus ditinjau kembali. Perusahaan swasta dan asing hanya boleh menguasai pabrik pengolahan, dan petani diberi hak untuk dapat membeli saham perusahaan pengolahan untuk membina keterkaitan dan kerja sama. Hanya dengan penerapan kebijakan ini kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan dan harus didukung oleh program jaring pengaman sosial. Untuk itu kita ikuti Kurtz (2000), dalam memahami upaya sejumlah pakar mengenali revolusi petani ("*peasant revolution*"), bermula dari konsepsi ke teori dan kasus kajian. Ditemukan olehnya 4 dimensi pokok yang diacu dalam beragam kombinasi oleh pakar berbeda-beda dalam upaya mendefinisikan arti "*peasant*".

Menurut Kurtz, empat dimensi itu adalah:

- 1) Definisi petani sebagai "pengolah tanah di pedesaan" ("rural cultivators"). Terbanyak pakar peneliti membatasi diri pada satu dimensi ini, mengabaikan lain dimensi. Mereka berpegang kuat pada teori "pilihan rasional" yang juga berlaku bagi "peasant", tak beda dari pelaku ekonomi lain (contoh: Popkin)

- 2) Kecuali pada dimensi pertama pakar antropolog cenderung juga mengacu pada dimensi "komunitas petani", yang bercirikan perilaku budaya yang jelas, membedakannya dari pola budaya "urban" (contoh: Redfield)
- 3). Pakar pengembang teori "ekonomi moral" masih menambahkan dimensi ketiga yaitu petani yang menghidupi komunitas desa yang tersubordinasi kuat oleh sesuatu kekuasaan luar (contoh: Scott)

Selanjutnya beberapa tinjauan berkaitan posisi penelitian dapat di sajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Posisi Penelitian

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
1	Gronau (1980) Leisure, home production, and work: the theory of the allocation of time revisited. rural household studies in Asia.	waktu santai, produksi rumahtangga, dan waktu bekerja	Asia	harga atau upah	Analisis komparatif statis	alokasi waktu rumahtangga (wanita) yang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, dan upah (laki-laki), karakter anak, dan karakter rumahtangga lain
2	Strauss (1984)	surplus pasar komoditas pangan pada rumahtangga pertanian	rumahtangga pertanian Siera Leone - Afrika	harga atau upah	Analisis komparatif statis	Elastisitasnya positif terhadap harga sendiri, dimana karakteristik rumahtangga dan pilihan terhadap teknologi produksi menyebabkan perbedaan surplus pasar, yang merupakan ciri khas perilaku rasional rumahtangga

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
3	Hardaker, J.B., T.G. McAulay, M. Soedjono, and CKG. Darkey (1985). A model of paddy farming household in Central Java	model ekonomi rumahtangga petani padi	rumahtangga petani padi di Jawa Tengah	Konsumsi	fungsi produksi Cobb-Douglass dan sistem pengeluaran linear	
4	Barnum dan Squire (1979)	teori ekonomi rumahtangga pertanian	rumahtangga petani padi di Jawa Barat		aplikasi ekonometrika	terdapat keterkaitan erat antara keputusan produksi dan keputusan konsumsi dalam rumahtangga petani
5	Sawit (1993)	membangun model ekonomi rumahtangga petani padi dan palawija di	rumahtangga petani padi dan palawija di pedesaan Jawa	produksi dan konsumsi	model SUR (Seemingly Unrelated Regression)	Perbedaan besaran dan tanda pada parameter dugaannya menghasilkan implikasi

**Disain Penelitian**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
6	Sawit dan O'Brien (1991) Applying agricultural household theory to the analysis of income and employment: a preliminary study for rural Java	pedesaan Jawa Barat, dengan penekanan pada model multi-input dan multi-output	Barat	Pendapatan, kesempatan kerja		kebijakan yang berbeda.
	Sonoda dan					

**Disain Penelitian**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
7	Maruyama (1999)	dampak tenaga kerja internal penawaran output, mengestimasi secara struktural petani padi di Jepang	petani padi di Jepang	tenaga kerja, penawaran		Adanya kendala upah tenaga kerja, dimana upah yang dibayarkan lebih rendah dari upah yang diminta tenaga kerja keluarga, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Hasilnya, respon penawaran padi terhadap harga sendiri secara total negatif, sedangkan efek langsungnya positif dan efek tidak langsungnya negatif.
8	Sadoulet et.al. (1996)  Lambert dan Magnac (1994)	perilaku rumahtangga dengan tenaga kerja yang tidak sempurna pasar	rumahtangga pertanian Meksiko	tenaga kerja, tingkat upah internal.		

Disain Penelitian

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	Hasil Temuan
10	Skoufias (1994)	penggunaan upah tenaga kerja bayangan, adalah untuk mengestimasi penawaran tenaga kerja rumahtangga pertanian, dengan mengukur utilitas tenaga kerja musiman pertanian	rumahtangga agraris di India	tenaga kerja,	Model non-rekursif dan non separable dengan pendekatan dualitas	model ekonomi rumahtangga tidak semua tenaga kerja bekerja di luar usahatani, sehingga opportunity-cost tenaga kerja keluarga tidak bisa diukur dengan upah yang berlaku di pasar, tetapi dengan produktivitas tenaga kerja.
	Bagi dan Singh (1974) A micro-					

**Disain Penelitian**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
11	economics model of farm decisions in an LDC: a simultaneous equation approach. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology.	pengambilan keputusan pertanian di negara berkembang		produksi, konsumsi, pemasaran, tenaga kerja dalam dan luar keluarga, investasi, dan finansial (kredit), serta surplus pasar	pendekatan persamaan simultan.	Bentuk pengambilan keputusan oleh rumahtangga petani, terbagi atas keputusan produksi, konsumsi, marketed-surplus, penggunaan tenaga kerja dalam dan luar keluarga, investasi, dan finansial
12	Singh dan Subramanian (1986)  Yotopoulos dan Lau (1974) On	menganalisis model ekonomi rumahtangga pertanian untuk lingkungan tanaman tumpangtarsi di Korea dan Nigeria	Korea dan Nigeria	tenaga kerja, modal, areal tanam, upah tenaga kerja, dan harga		Teori perilaku rumahtangga yang berkembang adalah berhubungan dengan kegiatan produksi dan konsumsi yang tidak terpisahkan di antara keduanya

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
13	modelling the agricultural sector in developing economies: an integrated approach of micro and macro economics.	membuat model di sektor pertanian negara sedang berkembang, mencoba mengintegrasikan antara pendekatan ekonomi mikro dan makro		tenaga kerja, modal, areal tanam, upah tenaga kerja, dan harga. Keputusan produksi, konsumsi, surplus pasar, tenaga kerja, upah, investasi, dan finansial perilaku produksi, konsumsi, dan penawaran tenaga kerja	fungsi produksi Cobb-Douglas	
14	Barnum dan Squire (1978) An econometric application of the theory of the farm-household. Journal of Development Economic.	menganalisis dampak migrasi, intervensi harga, dan perubahan teknologi sektor pertanian	usahatani padi semi komersial di Malaysia		fungsi produksi Cobb-Douglas	Kebijakan kenaikan harga output pertanian tidak efektif dalam meningkatkan jumlah produksi, karena

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
15	Smith dan Strauss (1986)	mensimulasikan perekonomian di pedesaan Sierra-Leone pada lingkungan subsistem, kemudian mengestimasi determinan konsumsi pangan dan ketersediaan kalori	pedesaan Sierra-Leone			terdistribusi pada upah tenaga kerja. Jika pendapatan petani naik, suplai tenaga kerja turun, dan permintaan tenaga kerja naik.  menunjukkan kebijakan kenaikan harga padi dapat meniadakan perbaikan gizi penduduk pedesaan secara keseluruhan, tetapi berdampak positif pada rumahtangga petani miskin, karena persediaan jumlah padinya lebih banyak dijual untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini untuk menutupi kenaikan harga pangan lain, sehingga konsumsi
	Iqbal (1986)					

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
16	Haddad et.al. (1994)	permintaan dan penawaran modal diantara rumahtangga pertanian di India	rumahtangga pertanian di India	perilaku meminjam atau kredit pertanian		<p>pangan atau status gizi bertambah baik</p> <p>Tingkat bunga yang berpengaruh terhadap jumlah pinjaman, dan akan mempengaruhi hutang rumahtangga petani</p> <p>Anggota keluarga melakukan fungsi produksi, konsumsi, dan kepemilikan, yang berhubungan antar anggota keluarganya, baik suami, istri, anak, dan anggota keluarga lain, dengan berbagai tingkatan umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman dan keahlian serta</p>
17	Anyani (1994)	Menganalisis ketidak-samaan antar rumahtangga pada rumahtangga yang baik, dengan pembuktian pada konsumsi kalori dan pengeluaran energi di Philipina	rumahtangga di Philipina			

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
18	Pakasi (1998)	menganalisis curahan kerja dari kontribusinya terhadap penerimaan keluarga nelayan dalam kegiatan ekonomi di desa pantai Sukabumi-Jawa Barat	desa pantai di Sukabumi-Jawa Barat			peranan yang berbeda dalam keluarga.  Faktor imbalan kerja, pendapatan rumahtangga, dan jumlah anggota keluarga, berpengaruh pada alokasi waktu suami dan istri (respon positif), dimana semakin rendah lapisan ekonomi rumahtangga semakin tinggi respon suami istri dalam mencari nafkah
19		Menganalisis ekonomi rumahtangga dan pengembangan industri kecil alkohol nira aren di	industri kecil alkohol nira aren di kabupaten Minahasa			terjadi interaksi antar komoditas saat dilakukan simulasi. Keputusan produksi

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
20	Basit (1995)	kabupaten Minahasa  menganalisis penerapan teknologi usahatani konservasi pada lahan kering berlereng di wilayah hulu DAS Jratunseluna-Jawa Tengah	wilayah DAS Jratunseluna-Jawa Tengah			terkait erat dengan keputusan konsumsi dan pendapatan, sehingga penerapan kebijakan untuk meningkatkan produksi adalah dengan meningkatkan harga input dan harga output produksi serta kombinasi keduanya  faktor yang menentukan keragaan usahatani konservasi adalah pendapatan luar usahatani, harga output, dan upah tenaga kerja, sebagai faktor yang ditentukan di luar sistem usahatani, sedangkan kualitas penerapan
	Hendratno (2006)					

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Disain Penelitian			Hasil Temuan
			Populasi & Sampel	Jenis & Pengukuran Variabel	Alat Analisis	
21		mengkompromikan secara kooperatif untuk alokasi sumberdaya intra rumahtangga petani karet di Sumatera Selatan	rumahtangga petani karet di Sumatera Selatan			<p>teknologi lebih banyak ditentukan dari dalam sistem usahatani</p> <p>rumahtangga dianggap sebagai produsen atau konsumen saja, sedangkan dalam model ekonomi uniter atau unifikasi maka rumahtangga berperan ganda sebagai produsen maupun konsumen sekaligus, dengan fungsi utilitas tunggal, kemudian berkembang kearah model kolektif</p>
22	Ambarsari, 2005	Kasus tanaman kakao di Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara		pendekatan ekonometrika dengan model persamaan simultan	

Menurut *Encyclopedia Americana*, kemiskinan (*poverty*) adalah insufficiency atau ketidakcukupan barang secara relatif terhadap kebutuhan manusia. Dalam ensiklopedi tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan biasanya dipandang dalam dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai kekurangan uang (*moneylessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Kekurangan tersebut tidak selalu berarti kekurangan kas melainkan kekurangan kronis atas semua jenis sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti nutrisi, istirahat, ketentraman hati, kesehatan jasmani. Kebanyakan ahli ekonomi merepresentasikan masalah kemiskinan dengan tingkat pendapatan, dengan perkataan lain masalah tersebut didekati dengan secara moneter. Bank Dunia, *Assian Development Bank* (ADB), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) menitik beratkan indikator pendapatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dari sisi praktis, terdapat beberapa gagasan kebijakan untuk meredam kemiskinan rumahtangga pertanian. Eskola (2004) merekomendasikan kebijakan komersialisasi pertanian, sedangkan de Janvry dan Sadoulet (1996) merekomendasikan program transfer kekayaan masing - masing untuk meredam kemiskinan. Eskola (2004) berpendapat bahwa pembangunan fasilitas pasar yang dekat dengan kegiatan pertanian serta kemudahan petani untuk mengakses informasi pasar dapat meningkatkan derajat komersialisasi rumahtangga pertanian. Partisipasi pasar akan terbuka lebar bagi petani, dan dengan cara demikian hambatan

penjualan mengecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga petani. Argumentasi mereka didasarkan pada analisa empiris yang berbasis pada kerangka kerja ekonomi rumahtangga pertanian. Kerangka kerja tersebut telah menjadi *benchmark* atau model dasar dalam menganalisis ekonomi rumahtangga (Singh et al., (1986), Taylor dan Adelman (2002)).

Pyatt (2003), mereka memandang bahwa pendekatan tersebut merupakan pendekatan statistik (*statistical approach*) yang bergantung pada kesimpulan statistik (*statistic inferential*). Pendekatan statistik memang berguna untuk mengidentifikasi variabel penting dalam meredam kemiskinan. Akan tetapi mereka mengevaluasi bahwa pendekatan tersebut memiliki dua kelemahan. *Pertama*, pendekatan statistik tidak membuka penjelasan detail mengenai peluang dan kendala orang miskin untuk mengembangkan lahan miliknya dan karena itu menghasilkan informasi yang terbatas untuk implementasi kebijakan.

De Janvry et al., (2005) menganalisis kemiskinan rumahtangga pertanian di China. Menurut mereka, dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Kesempatan kerja di luar pertanian dapat menjadi penyumbang utama pendapatan rumahtangga pertanian. Dengan menggunakan data hasil survey dari Provinsi Hubei, mereka melakukan simulasi yang sifatnya *counterfactual* terhadap rumahtangga pertanian yang tidak mengakses sumber pendapatan dari kegiatan *off-farm*. Mereka menemukan bahwa pendidikan, kedekatan lokasi terhadap kota, efek tetangga dan efek desa

terlihat krusial dalam menolong rumahtangga tertentu untuk memperoleh akses terhadap kesempatan itu. Lebih lanjut mereka menyimpulkan bahwa partisipasi dalam kegiatan *off-farm* dapat memberikan efek limpahan yang positif terhadap produksi rumahtangga pertanian.

Datt dan Joliffe (2005) membangun model empiris kemiskinan di Mesir. Mereka memusatkan perhatian untuk menggali determinan kemiskinan disana. Dengan menggunakan metodologi ekonometrika, mereka merepresentasikan kemiskinan dengan konsumsi per kapita. Model ekonominya menjelaskan perubahan konsumsi per kapita yang dideterminasi oleh karakteristik rumahtangga. Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik rumahtangga yang menjelaskan perubahan pengeluaran per kapita tersebut mencakup ukuran rumahtangga, lama pendidikan primer yang ditempuh oleh suami dan istri, luas lahan olahan yang dimiliki, jarak sekolah dari rumah, dan jarak rumah sakit dari rumah. Hasil estimasi dan hasil validasi variabel tersebut menjelaskan perubahan konsumsi per kapita rumahtangga di pedesaan dan perkotaan. Dikombinasikan dengan hasil simulasi terhadap model empiris tersebut, mereka menekankan pentingnya peningkatan pendidikan orang tua di dalam meredam masalah kemiskinan.

De Janvry dan Sadoulet (1996) merekomendasikan implementasi program transfer kekayaan untuk memecahkan masalah kemiskinan. Program ini mesti didukung oleh fleksibilitas dalam merealokasi sumber daya. Mereka memandang bahwa terbatasnya akses terhadap kekayaan (*asset*) merupakan determinan utama masalah kemiskinan. Pandangan ini

selaras dengan definisi kemiskinan menurut ADB. Hanya saja dalam definisi ADB, *asset* tersebut tidak terbatas fisik, lebih dari itu aspek pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai *asset*. de Janvry dan Sadoulet (1996) menganalisis peranan kekayaan dalam menjelaskan strategi alokasi tenaga kerja rumahtangga, sumber pendapatan, tingkat pendapatan yang dicapai dan kemiskinan per kapita diantara kelas rumahtangga pertanian di Meksiko. Mereka menggunakan model ekonomi rumahtangga *non separable* untuk menjelaskan redistribusi kekayaan melalui efek pendapatan langsung dan efek keseimbangan umum. Hasilnya menunjukkan bahwa redistribusi lahan memberikan manfaat pemerataan dan efisiensi. Mereka berpendapat bahwa terdapat skala ekonomi dalam penggunaan tenaga kerja sendiri (*self-employment*) dalam usaha kecil, modal manusia untuk partisipasi pasar tenaga kerja, dan modal sosial untuk migrasi internasional yang menimbulkan konflik antara pemerataan dan efisiensi sosial dalam meredistribusi kekayaan.

## BAB.III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1. Kerangka Konseptual

Pada tahun 2013, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,78% Sektor pertanian tumbuh 3,54% dan hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,45% .(sumber: BPS Np.16/02/Th.XVII, 5 Feb 2014). Pendapatan petani lebih rendah dibandingkan sektor lain. Usaha sektor pertanian didominasi oleh ciri –ciri : Skala kecil ,modal terbatas, Teknologi masih sederhana, Sangat dipengaruhi musim, akses terhadap kredit/pembiayaan rendah.

Pembangunan pertanian mampu menjadi pengganda pendapatan (*income multiplier*) dan pengganda lapangan kerja (*employment multiplier*) bagi sektor perekonomian secara umum, dan mampu menjadi stimulus bagi sektor-sektor lain dalam ekonomi untuk secara bersama-sama tumbuh dan berkembang sesuai dengan proporsi dan fase pembangunan ekonomi. Pemerintah Sulawesi Selatan juga memberi perhatian besar terhadap sektor pertanian, karena merupakan penyumbang terbesar dalam struktur PDRB dan turut memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.Struktur perekonomian Sul-Sel masih didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang 23,79 % terhadap total ekonomi. PDRB per capita tahun 2013 menembus Rp 22 juta.

Program pertanian dan ketahanan pangan diarahkan pada kemandirian masyarakat/petani yang berbasis sumberdaya lokal yang secara operasional dilakukan melalui program peningkatan produksi pangan dan menjaga ketersediaan pangan yang cukup dan beragam (diversifikasi pangan). Di tengah semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan khususnya pangan yang beragam dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, regional maupun nasional, tampak mulai terjadi gejala-gejala kejenuhan dari peningkatan produktivitas pangan khususnya padi. Hal ini salah satu disebabkan karena semakin menyusutnya sumberdaya lahan sawah produktif yang cukup luas dari tahun ke tahun sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan dari lahan sawah ke bukan lahan sawah.

Sempitnya penguasaan lahan mengakibatkan penghasilan dari usahatani tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumahtangga petani, apalagi harga-harga barang konsumsi melambung tinggi tidak sebanding dengan kenaikan harga komoditas pertanian. Jadi keputusan produksi pada tanaman pangan seperti beras merupakan unit rumahtangga pertanian yang berperan ganda sebagai produsen dan konsumen.

Jika mengacu pada data BPS, tampak jelas bahwa, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2011, meningkat menjadi 835.910 orang atau meningkat 0,31 persen dari Maret 2011. Meskipun peningkatannya relatif kecil, namun peningkatan tersebut telah memberi citra dan persepsi kurang baik bagi efektifitas penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peningkatan ini juga

berpotensi memunculkan kesangsian atas berbagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah (Agussalim, 2012).

Jika angka kemiskinan di Sulawesi Selatan dikomparasikan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan menempati urutan teratas, meskipun dari segi persentase menempati urutan kedua sesudah Sulawesi Utara. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dua kali lipat lebih besar dari Sulawesi Tengah dan empat kali lipat dari Sulawesi Utara dan Gorontalo. Namun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan hanya setengah dari Gorontalo, dimana Gorontalo merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi. (Agussalim, 2012).

Dalam kondisi saat – saat terakhir ini telah berkembang teori ekonomi rumahtangga yang mempelajari tingkat kemampuan produksi dan konsumsi rumahtangga sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi, yang berhubungan dengan alokasi waktu dan pendapatan, dimana analisisnya dilakukan dengan pendekatan secara simultan. Bagi dan Singh (1974) merumuskan model ekonomi mikro pengambilan keputusan tersebut untuk kasus di negara berkembang. Bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rumahtangga petani terbagi atas keputusan produksi, konsumsi, *marketed surplus*, penggunaan tenaga kerja dalam dan luar keluarga, investasi dan finansial. Yotopoulos dan Lau (1974) juga menganalisis produksi dan konsumsi rumahtangga dengan menggunakan pendekatan mikro-ekonomi serta fungsi produksi Cobb-Douglas, dengan

mengasumsikan bahwa: (1) rumahtangga sebagai konsumen akan memaksimumkan kepuasannya, yang merupakan fungsi dari waktu santai dan konsumsi komoditas lain dengan kendala sumberdaya, (2) rumahtangga sebagai produsen akan memaksimumkan keuntungan dengan kendala teknologi sumberdaya dan harga sarana produksi, (3) tenaga kerja dalam dan luar keluarga bersubstitusi sempurna, dan (4) partisipasi rumahtangga dalam pasar tenaga kerja.

Barnum dan Squire (1978) menganalisis kondisi produksi usahatani, konsumsi, dan penawaran tenaga kerja, pada pertanian semi-komersial di pasar tenaga kerja yang bersaing. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan erat antara keputusan produksi dan konsumsi dalam usaha tani bagi petani miskin. Menurut Singh et.al. (1986), *Agricultural Household Model* diturunkan dari teori perilaku konsumen. Model Bagi dan Singh (1974) adalah model analisis simultan pendapatan petani dan rumahtangga petani, dimana petani memaksimumkan utilitasnya dengan kendala produksi, pendapatan, dan waktu. Penurunan model ini adalah dalam bentuk keputusan produksi, tenaga kerja, konsumsi, investasi, kredit pertanian, dan surplus pasar.

Teori ekonomi pendapatan petani dan rumah tangga petani yang berkembang dewasa ini adalah hubungan antara kegiatan produksi dan konsumsi secara tidak terpisahkan (*non-separable*). Dalam *Agricultural/Farm Household Model*, Singh et.al. (1986), Barnum dan Squire (1978), serta Bagi dan Singh (1974), menganalisis pendapatan petani dengan model

persamaan simultan secara terpisah (*separabel*), dalam keputusan produksi, tenaga kerja dalam dan luar keluarga, konsumsi, investasi, finansial, dan surplus pasar.

Dalam model ekonomi petani dan rumahtangga petani dari Singh et.al. (1986), keputusan produksi diambil dari fungsi produksi pertanian, dimana jumlah produksi pertanian kotor ( $Q_i$ ) merupakan fungsi dari penggunaan lahan garapan ( $L$ ), persediaan modal usaha ( $K_t$ ), tenaga kerja dalam keluarga ( $N_f$ ), tenaga kerja luar keluarga ( $N_h$ ), biaya produksi tidak tetap ( $O$ ), serta perubahan teknologi dan kelembagaan ( $T$ ). Secara teoritis, Becker (1965) telah mengembangkan model dasar ekonomi rumahtangga yang mempelajari tentang tingkat dan kemampuan produksi dan konsumsi rumahtangga, yang kemudian oleh Evenson (1978) disebutnya *New Household Economics*. Kepala rumahtangga (Petani) dipandang sebagai pengambil keputusan dalam aktivitas produksi dan konsumsi serta berhubungan dengan alokasi waktu dan pendapatan petani (kepala keluarga) dan rumahtangga dengan analisis secara simultan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa dalam mengkonsumsi, kepuasan rumahtangga bukan hanya dari barang dan jasa yang diperoleh di pasar, melainkan juga dari berbagai komoditas yang dihasilkan rumahtangga. Beberapa asumsinya antara lain: (1) waktu dan barang atau jasa merupakan aspek kepuasan, (2) waktu dan barang atau jasa dapat dipakai sebagai input dalam fungsi produksi petani dan rumahtangga petani padi, dan (3) Petani (kepala keluarga) dan rumahtangga bertindak sebagai produsen dan konsumen.

Selain tingkat rasionalisasi petani padi miskin, pada penelitian ini yang ingin dicapai adalah adalah pencapaian pendapatan maksimum dari petani padi miskin yang mengalokasikan sumberdaya secara optimal. Untuk mengetahui tingkat optimal pemanfaatan lahan sawah dan input lainnya melalui sistem usahatani dalam upaya memaksimalkan pendapatan usahatani, maka perlu dilihat dengan beberapa analisis seperti analisis *gross margin* dan analisis optimasi melalui pendekatan *Linear Programming*. Analisis tersebut merupakan analisis ditingkat usahatani atau ditingkat petani, sesuai ketersediaan data dari usahatani tersebut. Hartono (1992) dan Kasryno (1979), dalam analisis linear programming diperlukan 3 komponen dasar, yakni: (1) fungsi tujuan ; memaksimalkan pendapatan rumah tangga dengan beberapa kendala yang dihadapi, (2) alternatif aktivitas ; dan (3) fungsi kendala.

Harga produk pertanian, khususnya komoditas pangan menjadi faktor yang sangat menentukan pendapatan petani dari usahatani. Dengan kondisi luasan lahan usahatani yang umumnya sempit dan given serta sulit untuk ditingkatkan skala usahanya, maka kebijakan penyesuaian harga produk untuk meningkatkan profitabilitas usahatani menjadi faktor penentu yang sangat penting guna meningkatkan pendapatan petani agar keluar dari kemiskinan.

Lahan menjadi faktor yang penting dan paling responsif dalam upaya peningkatan produksi. Pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan akses petani padi miskin terhadap pengusahaan lahan hingga

mencapai skala luasan ekonomi tertentu yang dapat meningkatkan pendapatan petani berada diatas Garis Kemiskinan atau dapat dikatakan sejahtera. Langkah kongkret yang dapat dilakukan adalah melalui pembaruan agraria. Selain itu, perlu kebijakan pemerintah untuk mengelola/membenahi tanah absentee dan pemberian kesempatan serta fasilitas kepada petani untuk pembelian lahan.

Saat ini tingkat Efisiensi teknis usahatani padi sawah sudah mencapai relatif tinggi. Dengan **teknologi** yang ada sekarang, peluang untuk meningkatkan produktivitas semakin kecil karena senjang antara tingkat produktivitas yang telah dicapai dengan tingkat produktivitas maksimum sudah relatif sempit. Guna meningkatkan lebih lanjut produktivitas dan produksi padi serta pendapatan petani, dibutuhkan terobosan **teknologi** khususnya dalam bentuk penemuan-penemuan varietas unggul baru dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kebijakan harga produk di tingkat petani untuk mencapai profitabilitas yang layak dan harga yang stabil perlu diupayakan dalam konteks peningkatan kesejahteraan rumahtangga petani.

Kesejahteraan petani padi akan tercapai apabila kebutuhan hidup layak nya dapat terpenuhi. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup layak petani padi akan dapat dicapai apabila luas lahan usaha tani yang dikelola mampu memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Oleh karena itu luas lahan dan tingkat pendapatan petani padi miskin menjadi faktor penentu kesejahteraan petani. Lahan sawah memegang peranan yang sangat strategis, karena lebih dari 90% produksi padi di Sulawesi Selatan

bersumber dari produksi padi sawah, dan usaha tani padi sawah mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 45%. (BPS SulSel, 2009, Susenas, 2012).

Apabila dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar petani padimiskin di perdesaan dengan matapencaharian bergantung pada sektor pertanian, maka hal ini berarti bahwa permasalahan kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam kerangka **MDGs** yang berkewajiban menurunkan angka kemiskinan sebesar 50% pada tahun 2015 dari kondisi tahun 1990.

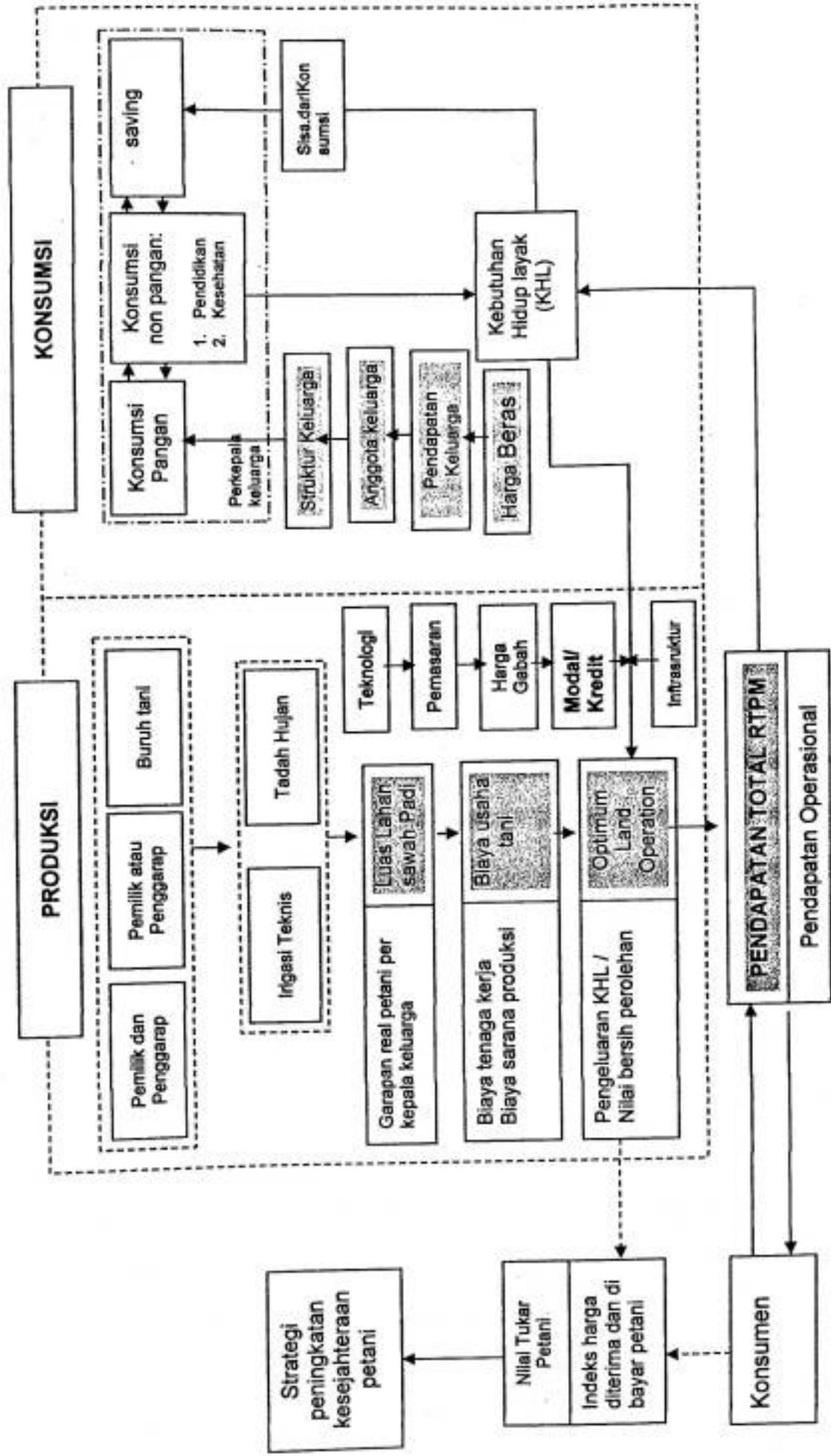
Sistem produksi dan hasil usaha petani padi sawah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi antara penyediaan sarana produksi (subsistem hulu), kegiatan usahatani (subsistem *on farm*), serta pemasaran dan pengolahan hasil (sub sistem hilir), sehingga diperlukan mekanisme subsistem pendukung yang memadai untuk mengaturnya. Hal ini mencerminkan peran dan keterlibatan berbagai sector dan stakeholders dalam mencapai hasil produksi padi sawah yang optimal. Sinergi lintas sector dan stakeholders baik horizontal maupun vertikal termasuk antara pusat dan daerah dalam era otonomi akan menentukan keberhasilan mencapai hasil produksi padi sesuai dengan kebutuhan. Pada sisi yang lain, keberlanjutan optimalisasi hasil produksi padi dipengaruhi oleh keberlanjutan dari aspek ekonomi, luas lahan, kebijakan dan aspek **teknologi**.

Pemahaman yang mendalam tentang setiap dimensi tersebut sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang kunci yang menjadi determinan utama keberlanjutan sistem usaha tani dengan untuk memproduksi padi. Apabila faktor-faktor kunci diketahui akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan, baik dalam hal perencanaan maupun implementasinya.

Sejalan dengan akselerasi diatas alur dan kerangka konseptual dalam penelitian ini menganalisis tingkat pendapatan petani padi miskin dari aspek petani padi sebagai pemilik sawah dan penggarapnya, petani padi sebagai pemilik saja atau penggarap saja serta buruh tani dengan tipologi sawah irigasi teknis, tadah hujan untuk menentukan lahan optimum yang harus digarap agar tidak miskin dan sisa kebutuhan lahan tambahan yang harus digarap agar petani sejahterah atau hidup layak/tidak dikategorikan miskin.

Secara jelas kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1 berikut :

# PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI MISKIN (RTPM)



3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konsep di atas tampak bahwa kegiatan produksi petani padi miskin yang dianalisis diklasifikasikan berdasarkan kepemilikannya yaitu petani pemilik sekaligus penggarap, petani pemilik saja atau penggarap saja dan buruh tani. Dari ke tiga topologi berbeda tersebut kemudian dipisahkan lagi berdasarkan irigasi teknis dan tadah hujan. Adapun tujuan pengklasifikasian atau pengelompokan tersebut untuk mendapatkan lebih terinci luas lahan minimum yang dibutuhkan oleh petani agar dapat hidup layak.

Sumber utama penyebab kemiskinan petani padi adalah karena sebagian petani tergolong petani kecil dengan luas garapan yang sempit dan dibawah standar minimum dari kelayakan satu usaha tani baik petani sebagai pemilik lahan sekaligus penggarapnya, pemilik saja/ penyakap/ penyewa, bagi hasil maupun sebagai buruh tani. Biro Pusat Statistik (BPS) standar luas lahan minimal 0,86 ha/petani sedang Kementerian menemukan standar minimal luas lahan yang layak atau mencapai break event point 0,50 ha/petani. Akan tetapi baik Biro Pusat Statistik maupun Kementerian Pertanian tidak mengklasifikasi dan membedakan tipologi lahan sawah yang digarap petani serta tidak spesifik mengakterikan temuannya pada petani padi miskin.

Setidaknya ada empat ciri utama mengapa petani padi miskin di Sulawesi Selatan, pertama rata – rata luas garapan sempit dimana lahan yang garapnya lebih luas miliki orang lain dibandingkan lahan miliki sendiri, kedua lebih 90 persen petani padi net consumer beras, ketiga

pendapatan rata – rata petani padi dari usaha tani padi hanya sekitar 30 persen dari total pendapatan keluarganya, keempat konsumsi beras perkapita penduduk Sulawesi Selatan termasuk tinggi 139 kg/kapita/tahun (BPS, 2013).

Kesejahteraan petani padi gurem (miskin) akan tercapai apabila tingkat pendapatan dengan kebutuhan hidup layak nya dapat terpenuhi. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup layak petani padi miskin akan dapat dicapai apabila luas lahan usaha tani yang dikelola mampu memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Oleh karena itu luas lahan, teknologi, harga gabah, harga beras, infrastruktur dan tingkat pendapatan petani menjadi faktor penentu tingkat pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

Pada analisis konsumsi diturunkan dari kebutuhan konsumsi yang secara rasional berusaha memaksimalkan pendapatan petani miskin dengan kendala anggaran atau biaya tertentu, struktur keluarga, anggota keluarga, pendapatan keluarga, harga beras, pasar (sisa dari konsumsi), pendidikan sehingga merupakan sebuah fungsi permintaan petani. Analisis ini memberikan informasi tentang kebutuhan minimum petani yang dibagi berdasarkan kebutuhan pangan/pokok, konsumsi non pangan serta saving sehingga mendapatkan informasi mengenai berapa kebutuhan konsumsi minimum.

### 3.2. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah ke 5, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

" Pendapatan usahatani petani padi miskin dalam usaha tani padi sebagai pemilik lahan sendiri sekaligus penggarap lahannya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak (KHL) atau kebutuhan operasionalnya di bandingkan petani miskin yang menggarap saja atau dengan petani miskin dengan pola bagi hasil dan buruh tani di Sulawesi Selatan "

## BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

### 4.1. Jenis dan Rancangan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Best, John W. (Sukmadinata, 2005) bahwa penelitian deskriptif tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi dilanjutkan dengan membandingkan, mencari kesamaan-perbedaan, dan hubungan kasual dalam berbagai hal. Penemuan makna adalah fokus dari keseluruhan proses yang dilakukan.

Pendekatan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode gabungan (*mixed methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif, dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian.

### 4.2. Instrumen Penelitian

Tahapan awal penyusunan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari penetapan variabel-variabel yang ditetapkan



untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi daftar / Tabel isian data, Sugiyono (2002). Daftar/tabel isian data tersebut menjadi instrumen penelitian sebagai media pengambilan data primer dari responden.

Selain instrumen pengumpulan data berupa daftar / Tabel isian data, pengambilan data juga dilakukan dengan *men-download* data sekunder berupa data profil daerah, jumlah pegawai dan lain-lainnya.

#### **4.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah seluruh petani padi yang tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang menjadi populasi target adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang menjadi sentra produksi beras di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Pinrang (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Selatan, 2012). Adapun alasan menggunakan wilayah tersebut sebagai populasi target adalah karena sekitar 95 ribu hektare lahan persawahan di Sulawesi Selatan berada pada wilayah tersebut sehingga sangat representatif untuk dijadikan perwakilan Sulawesi Selatan.

Adapun jumlah populasi berdasarkan kabupaten adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Populasi Petani Padi**

No	Kabupaten	Populasi	Sampel
1	Soppeng	11,287	48
2	Bone	39,324	152
3	Wajo	22,286	87
4	Sidrap	13,161	52
5	Pinrang	16,732	61
Jumlah		102,791	400

Sumber : BPS Sulsel 2013

Untuk mendapatkan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin (dalam Umar, 2004:108) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidak telitian sebesar 5 %, maka dengan menggunakan rumus di atas diperoleh sampel sebesar :

$$n = \frac{102.791}{1 + 102.791 (0.5)^2} = 399.90 = 400 \text{ orang}$$

Jumlah tersebut akan disebar ke lima kabupaten dengan perincian sebagai berikut : di kabupaten Bone petani pemilik saja atau penggarap

saja sebanyak 127 orang pada sawah tadah hujan dan buruh tani sebanyak 25 orang pada sawah irigasi teknis, Dikabupaten Soppeng responden terdiri dari Petani pemilik sekaligus menggarap lahan sawanya sendiri sebanyak 4 orang pada sawah irigasi teknis dan 7 orang pada sawah tadah hujan, Pemilik atau penggarap saja sebanyak 4 orang pada sawah irigasi teknis dan 12 orang pada sawah tadah hujan, buruh tani 21 orang pada irigasi teknis dikabupaten Wajo responden terdiri dari 8 petani pada swah irigasi teknis 8 orang pada saah tadah hujan petani pemilik sekaligus menggarap lahannya sendiri, petani pemilik atau penggarap saja sebnyaaak 8 orang petani pada sawah irigasi teknis dan 40 orang pada swah tadah hujan sedangkan buruh tadi 17 orang pada irigasi teknis dan 3 orang pada sawah tadah hujan. Dikabupaten Sidrap responden petani pemilik dan sekaligus penggarap swahnya sebanyak 7 orang pada irigasi teknis dan 5 orang petani padi sawah tadah hujan, petani pemilik atau penggarap saja sebanyak 9 orang pada sawah irigasi teknis dan 15 orang pada sawah tadah hujan.dan buruh tani sebanyak 6 orang pada sawah irigasi teknis dan 10 orang pada sawah tadah hujan. Dikabupaten Pinrang responden sampel terdiri dari petani pemilik sekaligus penggarap sawahnya sebanyak 3 orang pada sawah irigasi teknis dan tadah hujan tidak ada, petani pemilik atau penggarap saja sebanyak 9 orang pada sawah irigasi teknis dan 42 orang pada sawah tadah hujan.sedang buruh tani 6 orang pada sawah irigasi teknis dan 1 orang pada sawah tadah hujan.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam hal ini penelitian dilakukan. Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti adalah :

1. Petani yang telah menjalani profesinya sebagai petani padi minimal selama 5 tahun berturut-turut.
2. Petani yang pendapatannya murni dari hasil petani padi dan tidak memiliki pendapatan lain selain bertani padi.
3. Petani yang termasuk kategori petani miskin dengan ciri - ciri : penerima bantuan langsung tunai, beras raskin, jamkesmas dan ketarangan dari kepala desa serta pemerintah.

#### **4.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk wawancara dan angka - angka (*numeric*) dari hasil kuisioner.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Jenis data primer yang dikumpulkan mengenai produksi dan konsumsi mencakup jumlah dan harga output, harga bahan pangan, pemakaian dan harga input di tingkat petani, curahan waktu, pengeluaran rumah

tangga untuk pangan dan non pangan, data sosial-ekonomi rumahtangga petani serta data lainnya yang sesuai dengan kebutuhan analisis seperti yang tercantum dalam model.

Selain data primer data yang dikumpulkan juga dalam bentuk sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai terbitan atau instansi terkait, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi selatan terkait, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, BPS perkabupaten dan instansi lain yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

#### **4.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini teknik yang digunakan meliputi :

##### **4.5.1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh responden.

##### **4.5.2. Kuesioner**

Kuisisioner disusun dalam bentuk pertanyaan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Menurut Sugiyono (2006) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

### 4.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dibutuhkan adalah berbagai dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan atau menggambarkan data dan informasi penting yang berhubungan dengan penelitian.

### 4.6. Metode dan Alat Analisis

Dengan menggunakan metode kombinasi atau *mix method* maka analisis data yang pertama dilakukan adalah memberikan gambaran terhadap profil responden petani padi, setelah itu dilakukanlah pengolahan data berdasarkan rumusan masalah yang ingin dipecahkan.

Adapun alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pendapatan rumah tangga petani padi digunakan

a. Analisis Pendapatan dan Biaya Usaha Tani

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan usahatani terdiri dari pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. Pendapatan tunai merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya tunai. Sedangkan pendapatan yang diperhitungkan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya yang diperhitungkan. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual produk (Soekartawi, 2002).

Secara matematis penerimaan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TR = Y.Py$$

Keterangan:

TR = total penerimaan

Y = produksi yang diperoleh suatu usahatani

Py = Harga Y

Menurut Hernanto (1991), biaya usahatani terdiri dari biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai merupakan biaya yang dikeluarkan secara tunai. Sedangkan biaya yang diperhitungkan merupakan biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya tunai tetapi diperhitungkan dalam usahatani.

Rumus biaya usahatani dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TB = Bt + Bd$$

Dimana:

TB = total biaya

Bt = biaya tunai

Bd = biaya diperhitungkan

Jadi, perhitungan pendapatan usaha tani dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Pd \text{ tunai} = TR - Bt$$

$$Pd \text{ total} = TR - TB$$

Dimana:

Pd = pendapatan usahatani

TR = total penerimaan

TB = total biaya

b. Analisis Rasio Penerimaan dan Biaya (R/C ratio)

Analisis perbandingan antara penerimaan dan biaya dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan kelayakan usahatani (Soekartawi, 2002). Rasio R/C dapat diperhitungkan pada usahatani organik maupun usahatani anorganik. Rumus perhitungan R/C ratio adalah sebagai berikut:

$$R = \frac{c}{t}$$

Dimana:  $R = P_y \cdot Y$

$C_t = B_t + B_d$

$C_d = B_t$

R = penerimaan

C = biaya

$P_y$  = harga output

Y = output

$B_t$  = biaya tunai

$B_d$  = biaya diperhitungkan

Jika nilai R/C > 1 maka usahatani tersebut layak atau sudah efisien, sedangkan jika nilai R/C < 1 maka usahatani tersebut tidak layak atau tidak efisien.

#### c. Analisis Konsumsi Petani

Analisis ini menggunakan kebutuhan konsumsi minimum petani ditinjau dari kebutuhan pokok, kesehatan dan rekreasi, pendidikan dan kegiatan sosial serta asuransi dan tabungan.

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh



lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Analisis KHL yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada : Sinukaban (2007), bahwa jumlah pendapatan bersih yang harus diperoleh keluarga tani untuk dapat hidup layak minimal setara dengan  $320 \text{ kgberas/tahun} \times \text{harga beras (Rp/kg)} \times \text{jumlah anggota rumah tangga} \times 250\%$  atau setara  $800 \text{ kg beras/tahun} \times \text{harga beras (Rp/kg)} \times \text{jumlah anggota rumah tangga}$ . Nilai 250% terdiri atas kebutuhan fisik minimal (KFM) dihitung 100%, kesehatan dan rekreasi 50%, pendidikan 50% dan kebutuhan sosial, asuransi dan lainnya 50% sehingga total 250%.



## 2. Penetapan luas lahan minimum lahan untuk hidup layak per orang

Penetapan luas optimum usaha padi sawah pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu petani pemilik lahan saja, petani pemilik lahan sekaligusenggarapnya, Petani sakap, petani bagi hasil dan buruh tani. Perhitungan luas minimum usaha tani padi sawah yang miskin ini menggunakan nilai z score dengan membandingkan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk hidup layak oleh sebuah keluarga atau rumah tangga dengan nilai bersih yang diperoleh pada setiap 1 hektar tanah pertanian selama 1 tahun.

Untuk nilai Z diperoleh dengan membandingkan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk hidup layak oleh sebuah keluarga atau rumah

tangga, dengan nilai bersih yang diperoleh pada setiap 1 hektar tanah pertanian selama 1 tahun.

Menurut Sayogyo (1997) dan Sinukaban (2007) sebagai dasar IDT untuk mengukur kelayakan hidup digunakan ukuran beras, yaitu dua kali untuk hidup di atas garis kemiskinan atau sebesar  $2 \times 400 \text{ kg} = 800 \text{ kg}$  per kapita per tahun. Sedangkan nilai produksi yang diperoleh untuk setiap 1 hektar lahan pertanian diperoleh dari nilai rata-rata setiap jenis tanaman yang dihasilkan dari lahan di wilayah tersebut. Nilai Z dapat juga dihitung dengan kriteria UMK.

$$\text{Rumus Z score} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran (KHL)}}{\text{Pendapatan bersih hasil usaha tani}}$$

Z = luas minimum lahan untuk hidup layak per orang pada lahan datar  
Sedangkan pendapat bersih adalah nilai dibagi Luas lahan dikelola.

3. Untuk mengukur tingkat pendapatan tenaga kerja keluarga dalam usaha tani padi dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan hidup layak petani di Sulawesi Selatan digunakan analisis Nilai Tukar Petani (NTP). Perhitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam prosentase). NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Setelah Nilai Tukar petani (NTP) diketahui selanjutnya menyusun model rekomendasi peningkatan usaha tani padi sawah. Dalam penyusunan ini digunakan matriks input - output program linier usaha tani padi sawah.

a. *Linearity of Objective*

Fungsi tujuan dan faktor-faktor pembatasnya harus dinyatakan sebagai fungsi linier.

Skenario 1 :

*Goal* : Maksimisasi Pendapatan

Constrain (subject to) :

- 1) Biaya Tenaga Kerja (Minimisasi)
- 2) Biaya sarana Produksi (Minimisasi)
- 3) Biaya Obat-obatan (Minimisasi)

Max :  $F(X_1, X_2) = Y$

Kendala :  $C = W_1X_1 + W_2X_2 \dots$

Fungsi Langrange

$$\mathcal{L} = F(X_1, X_2) - \lambda (W_1X_1 + W_2X_2)$$

Analisis ini memberikan hasil rekomendasi wilayah kabupaten mana yang masih bisa dilakukan peningkatan pendapatan atas kendala biaya produksi.

Skenario 2 :

*Goal* : Minimisasi Biaya Produksi

Constrain (subject to) :

- 1) Produktivitas Pertanian (Maksimisasi)
- 2) Penerimaan (Maksimisasi)

Analisis ini memberikan hasil rekomendasi wilayah kabupaten mana yang masih bisa dilakukan efisiensi usaha tani atas peningkatan produktivitas dan penerimaan yang maksimum

Rumus yang digunakan

Tujuan

Min :  $C = W_1X_1 + W_2X_2$

Kendala :  $F(X_1, X_2) = Y$

Fungsi Langrange

$$\mathcal{L} = W_1X_1 + W_2X_2 - \lambda (Y - F(X_1, X_2))$$

Untuk memudahkan perhitungan di atas digunakan alat aplikasi POM for windows 3.0

#### 4.7. Definisi Operasional

1. Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan usahatani terdiri dari pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. Pendapatan tunai merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya tunai. Sedangkan pendapatan yang diperhitungkan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya yang diperhitungkan.
2. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual produk. Penerimaan terdiri dari penerimaan tunai dan penerimaan yang diperhitungkan. Penerimaan tunai merupakan penerimaan yang diterima petani dari hasil produksi yang benar-benar dijual. Sedangkan penerimaan yang diperhitungkan

merupakan penerimaan didapat dari hasil produksi yang digunakan sendiri oleh petani tetapi tetap diperhitungkan. Kepada orang lain.

3. Analisis R/C adalah Analisis perbandingan antara penerimaan dan biaya dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan kelayakan usahatani
4. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Analisis KHL yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada : Sinukaban (2007), bahwa jumlah pendapatan bersih yang harus diperoleh keluarga tani untuk dapat hidup layak minimal setara dengan  $320 \text{ kgberas/tahun} \times \text{harga beras (Rp/kg)} \times \text{jumlah anggota rumah tangga} \times 250\%$  atau setara  $800 \text{ kg beras/tahun} \times \text{harga beras (Rp/kg)} \times \text{jumlah anggota rumah tangga}$ . Nilai 250% terdiri atas kebutuhan fisik minimal (KFM) dihitung 100%, kesehatan dan rekreasi 50%, pendidikan 50% dan kebutuhan sosial, asuransi dan lainnya 50% sehingga total 250%.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi nilai tukar petani (NTP) relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.
6. Indikator batas garis kemiskinan (GBK) di desa yaitu Rp. 151 – Rp. 210.810 /kapita/bulan atau Rp. 1,8 juta – Rp. 2,5 juta /kapita/tahun atau nilai rata-rata Rp. 2,26 juta /kapita/tahun (800 kg beras).

7. Luas lahan Optimun yaitu luas lahan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah untuk mencapai tingkat pendapatan yang layak dalam usaha tani padi bagi petani padi miskin.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### 5.1 Gambaran Umum dan Perbandingan Topografi Lahan Sawah Provinsi Sulawesi Selatan

##### 5.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 45.764,53 km. persegi, memiliki daerah acministratif 21 kabupaten, tiga kota, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan Selat Makassar dan Laut Flores.

**Tabel 5.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan
1	Selayar	903,50	11	74
2	Bulukumba	1.154,67	10	126
3	Bantaeng	395,83	8	67
4	Jeneponto	903,35	11	113
5	Takalar	566,51	9	83
6	Gowa	1.883,32	18	167
7	Sinjai	819,96	9	80
8	Maros	1.619,12	14	103
9	Pangkep	1.112,29	13	102
10	Barru	1.174,71	7	54
11	Bone	4.559,00	27	372
12	Soppeng	1.359,44	8	70
13	Wajo	2.506,20	14	176
14	Sidrap	1.883,25	11	105
15	Sidrap	1.961,17	12	104
16	Pinrang	1.786,01	12	129
17	Enrekang	3.000,25	21	227
18	Luwu	2.054,30	19	159
18	Tana Toraja			

19	Luwu Utara	7.502,68	11	176
20	Luwu Timur	6.944,88	11	102
21	Toraja Utara	1.151,47	21	151
22	Makassar	175,77	14	143
23	Pare-Pare	99,33	4	22
24	Palopo	247,52	9	48
	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>45.764,53</b>	<b>304</b>	<b>2.953</b>

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013

### 5.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' -122°36' Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan,serta gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan Timur.

### 5.1.3. Penggunaan Lahan

Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Dalam Angka Tahun 2012 adalah 45.764,53 km<sup>2</sup>. Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai lugs Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi. Dari total luasan tersebut terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Hutan Primer, Hutan Sekunder, Kebun Campuran dan seterusnya. Penggolongan penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan utama yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.2. di bawah.

**Tabel 5.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.**

PenggunaanLahan	Luas (Ha)	Persentase
Awan/Tidak teridentifikasi	53,264	1.16
Hutan Primer	1,294,061	28.28
Hutan Sekunder	558,617	12.21
Kebun Campuran	1,329,302	29.05
Mangrove	7,090	0.15
Perkebunan	7,681	0.17
Pemukiman	32,676	0.71
Rawa	60,805	1.39
Sawah	154,959	3.39
Semak/Belukar	383,615	8.38
Tambak/Empang	79,784	1.74
Tanah Terbuka	259,873	5.68
Tegalan/Ladang	110,178	2.41
Tubuh Air	170,465	3.72
Lain-lain	74,084	1.62
<b>Total</b>	<b>4,502,369</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah, 2013

Berdasarkan data tersebut, penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kebun campuran, hutan primer, hutan sekunder, dan selebihnya penggunaan lahannya berada di bawah 10 (sepuluh) persen. Penggunaan lahan kebun campuran terluas di Kabupaten Bone, Luwu, dan Wajo, sedang penggunaan lahan hutan primer juga tersebar di Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan Bone. Selanjutnya penggunaan lahan hutan sekunder, terluas berada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara.

## 5.2.. KARAKTERISTIK WILAYAH PENELITIAN

### 5.2. 1, Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di

Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara.

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone berasal dari jenis Alluvial, Gleihumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Rasial dan Litosol, Mediteranian dan Latosol. Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Bone adalah jenis Mediteranian dan Latosol yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.

#### **5.2.1. Potensi Lahan dan Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012–2032 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan padi.

#### **5.2.2. Kawasan Pertanian**

Kawasan pengembangan untuk pertanian di Kabupaten Bone terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: 1) Pertanian tanaman pangan, 2) pertanian hortikultura, 3) perkebunan, dan 4) peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.5 Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bone**

NO.	KECAMATAN	PERTANIAN LAHAN BASAH LUAS (HA)	%	LUAS LAHAN TANAMAN HOLTIKULTURA (HA)	%
1	Kec. Ajangale	5,626.36	4.72	11,720.02	6.31
2	Kec. Awangpone	5,525.31	4.63	6,455.30	3.47
3	Kec. Barebbo	3,053.14	2.56	6,298.69	3.39
4	Kec. Bontocani	4,286.40	3.60	10,363.24	5.58
5	Kec. Cenrana	5,162.60	4.33	2,615.38	1.41
6	Kec. Cina	4,970.85	4.17	8,852.20	4.76
7	Kec. Duaboccoe	1,295.15	1.09	14,247.05	7.66
8	Kec. Kahu	9,767.08	8.19	7,358.54	3.96
9	Kec. Kajuara	4,026.44	3.38	4,125.58	2.22
10	Kec. Lamuru	6,341.08	5.32	19,524.29	10.50
11	Kec. Lappariaja	5,765.48	4.84	18,220.33	9.80
12	Kec. Libureng	19,731.70	16.55	8,524.18	4.59
13	Kec. Mare	3,884.50	3.26	9,438.67	5.08
14	Kec. Palakka	10,310.70	8.65	146.10	0.08
15	Kec. Ponre	1,700.02	1.43	8,824.40	4.75
16	Kec. Salomekko	8,915.28	7.48	3,730.98	2.01
17	Kec. Sibulue	6,009.37	5.04	4,682.12	2.52
18	Kec. Tanete Riattang	276.04	0.23	574.14	0.31
19	Kec. TR. Barat	908.28	0.76	1,507.82	0.81
20	Kec. TR. Timur	1,209.87	1.01	431.07	0.23
21	Kec. Tellusiattinge	1,915.77	1.61	12,963.93	6.97
22	Kec. Tonra	7,284.82	6.11	5,876.43	3.16
23	Kec. Ulaweng	1,249.96	1.05	19,400.73	10.44
<b>JUMLAH</b>		<b>119,216.19</b>	<b>100.00</b>	<b>185,881.18</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2013

Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone adalah seluas 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah



Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luasan 5.765 (lima ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dengan luasan 19.732 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mare dengan luasan 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dengan luasan 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ponre dengan luasan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko dengan luasan 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue dengan luasan 6.009 (enam ribu sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang dengan luasan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luasan 908 (sembilan ratus delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luasan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dengan luasan 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dengan luasan 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng dengan luasan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar.

### **5.2.2. Demografi**

Penduduk Kabupaten Bone menurut hasil Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2012

sebanyak 728.737 jiwa yang terdiri dari laki-laki 347.707 jiwa dan perempuan 381.030 jiwa. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan perbandingan 47,71% penduduk laki-laki dan 52,29 penduduk perempuan. Seluruh penduduk Kabupaten Bone terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 163.621 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4,43 jiwa, artinya setiap keluarga memiliki anggota rata-rata 4 jiwa.

Data keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut.

**Tabel 5.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (7 Tahun ke atas) di Kabupaten Bone Tahun 2010**

No	Tingkat Pendidikan Penduduk (7 tahun ke atas)	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Pernah Sekolah	82.709	13.35
2	Belum Tamat SD	99.861	16.12
3	Tamat SD/MI	191.853	30.97
4	Tamat SMP/MTs	78.688	12.70
5	Tamat SMA	52.274	9.24
6	Tamat SMK	11.043	1.78
7	Tamat Diploma I/II	16.709	2.70
8	Tamat Diploma III/Sarnud	6.195	1.00
9	Tamat Sarjana	20.259	3.27
10.	Tak Terjawab	54.549	8.87
	<b>Jumlah</b>	<b>619.540</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Kab. Bone, Tahun 2013

Tingkat pendidikan penduduk 7 tahun ke atas yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut; 1) belum pernah sekolah sebanyak 82.709 orang (13,35%), 2) belum tamat SD sebanyak 99.861 orang (16,12%), 3) Tamat SD/MI 191.853 orang (30,97%), 4) Tamat SMP/MTs sebanyak 76.688 orang (12,70%), 5) Tamat SMA sebanyak 52.274 orang (9,24%), 6) Tamat SMK sebanyak 11.043 orang (1,78%), 7)

Tamat Diploma I/II sebanyak 16.709 orang (2,70%), 8) Tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 6.195 orang (1,00%), 9) Tamat Sarjana sebanyak 20.259 orang (3,27%).

### 5.2.3. Kondisi Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.11 sebagai berikut :

**Tabel 5.11 Kondisi Jaringan Irigasi**

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Baik	73,00	5.679,58	71,00	3.295,00	16.691,00
2.	Sedang	19.863,00	14.253,70	19.865,00	16.592,00	3.206,00
3.	Rusak Ringan	124,00	126,74	124,00	173,00	163,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab Bone, 2013

## 5.3. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

### 5.3.1. Keadaan Geografis

#### 1. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km<sup>2</sup> ini terbagi menjadi 12 Kecamatan yang meliputi 104 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan dan 65 desa

### 5.3.2. Kependudukan

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sementara adalah 350.807 orang, yang terdiri atas 170.095 laki-laki dan 180.712 perempuan. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Pinrang bertumpu di Kecamatan Watang Sawitto yakni sebesar 14,5 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Duampanua sebesar 12,5

persen, Kecamatan Lembang sebesar 10,8 persen , Kecamatan Paleteang sebesar 10,5 persen dan kecamatan lainnya di bawah 10 persen.

Batulappa, Lanrisang, dan Cempa adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 9.653 orang, 17.137 orang, dan 17.213 orang. Sedangkan Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan-kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 50.974 orang dan 36.648 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut:

**Tabel 5.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang, Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Penduduk			Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Suppa	14.702	15.653	30.355	8,7
2.	Mattiro Sompe	13.247	14.170	27.417	7,9
3.	Lanrisang	8.119	9.018	17.137	4,9
4.	Mattiro Bulu	12.905	13.916	26.821	7,6
5.	Watang Sawitto	24.890	26.084	50.974	14,5
6.	Paleteang	17.951	18.697	36.648	10,4
7.	Tiroang	10.216	10.661	20.877	5,9
8.	Patampanua	15.308	16.310	31.618	9,0
9.	Cempa	8.364	8.849	17.213	4,9
10.	Duampanua	21.094	22.768	43.862	12,5
11.	Batulappa	4.709	4.944	9.653	2,8
12.	Lembang	18.590	19.642	38.232	10,8
<b>Jumlah</b>		<b>170.095</b>	<b>180.712</b>	<b>350.807</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2013

### 5.3.3. Gambaran Umum Usaha Pertanian di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan angka hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Pinrang sebanyak 47.743 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 4 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum (PT, CV, Yayasan). Lembang, Duampanua, dan Patampanua merupakan tiga kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing - masing 7.548 rumah tangga (15,81%), 6.749 rumah tangga (14,14%), dan 4.766 rumah tangga (9,98%). Sedangkan Batulappa merupakan kecamatan yang wilayahnya paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 1 909 rumah tangga (4,00%).

Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Kabupaten Pinrang sebanyak 4 unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tersebut tersebar di Kecamatan Suppa 2 unit, Paletiang 1 unit dan Watang Sawitto 1 unit. Sedangkan di Kabupaten Pinrang belum terdapat perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumahtangga usaha pertanian.



**Tabel 5.43. Banyaknya Usaha Pertanian Kabupaten Pinrang Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 Menurut Kecamatan dan Cakupan Usaha**

No.	Kecamatan	2003		2013		Pertumbuhan			
		RTP	Prshn	RTP	Prshn	RTP		Perusahaan	
						Absolut	%	Absolut	%
1	Suppa	4.606	5	4,355	2	251	5.45	-3	-
2	Mattiro Sompe	4.795	-	4,033	-	762	15.89	-	-
3	Lanrisang	3.280	-	2,940	-	340	10.37	-	-
4	Mattiro Bulu	4.838	-	4,095	-	743	15.36	-	-
5	Watang Sawitto	3.232	-	2,505	1	727	22.49	1	-
6	Paletang	3.069	-	2,547	1	522	17.01	1	-
7	Tiroang	3.709	-	3,471	-	238	6.42	-	-
8	Patampanua	5.032	-	4,766	-	266	5.29	-	-
9	Cempa	3.254	-	2,825	-	429	13.18	-	-
10	Duampanua	7.531	-	6,749	-	782	10.38	-	-
11	Batulappa	1.969	-	1,909	-	60	3.05	-	-
12	Lembang	7.740	-	7,548	-	192	2.48	-	-
<b>Total</b>		<b>53,055</b>	<b>5</b>	<b>47,743</b>	<b>4</b>	<b>5,312</b>	<b>10.01</b>	<b>-1</b>	<b>-20</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2013

Dari tabel 5.43 diatas dapat digambarkan usaha pertanian bahwa di kecamatan Suppa pada tahun 2003 terdapat 5 perusahaan pertanaian dengan jumlah rumahtangga pertanian 4.606. Rumah tanggapertanian mengalami peningkatan sebesar 251 rumah tangga atau sebesar 5,46 persen, sedangkan jumlah perusahaan pertanian justru mengalami penurunan. Pada tingkat kabupaten Pinrang tahun 2016 total rumahtangga pertanian meningkat sebesar 10,0 persen, sedangkan perusahaan pertanian mengalami penurunan sebesar 20 persen.

## **5.4. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang**

### **5.4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi yang terletak kira - kira 183 Km disebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara  $3^{\circ}43-4^{\circ}09$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}41-120^{\circ}10$  Bujur Timur,

### **5.4.2. Luas Wilayah**

Wilayah administrative Kabupaten Sidrap terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan dengan luas 1.883,25 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan kecamatan terluas dengan luas 844,77Km<sup>2</sup>.

Jumlah sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Sidrap sebanyak 38 aliran sungai dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu Sungai Bilokka dengan panjang sekitar 20.000 meter, disusul Sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan Sungai Rappang dengan panjang sekitar 15.000 meter.

Dari tabel 5.14 dibawah ini tergambar bahwa kecamatan Pitu Riase memiliki luas area paling luas dengan prosentase 44,85% dari seluruh luas kabupaten Sidenreng Rappang, disusul kecamatan Pituriawa, kecamatan Panca Lautang dan terkecil kecamatan Panca Rijang hanya 1,80 persen dari total luas kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 5.14 Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan (Ha), 2013**

No.	Kecamatan	Luas/ Total Area	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten
1	Panca Lautang	15.393	8,17
2	Tellu Limpoe	10.320	5,48
3	Watang Pulu	15.131	8,05
4	Baranti	5.389	2,86
5	Panca Rijang	3.402	1,80
6	Kulo	7.500	3,98
7	Maritengngae	6.59	3,52
8	Watang Sidenreng	12.081	6,40
9	Pitu Riawa	21.043	11,17
10	Dua Pitue	6.999	3,72
11	Pitu Riase	84.477	44,85
<b>Jumlah/Total</b>		<b>188.325</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sidenreng Rappang, 2013

#### 5.4.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebanyak 283.307 jiwa yang terdiri dari 138.126 jiwa penduduk laki-laki dan 145.181 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 48.197 jiwa. Rasio jenis kelamin (*sexratio*) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Sidenreng tahun 2013 sebesar 95,14. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sekitar 150

9	Pitu Riawa	12	210,43	6.033	26.210
10	Dua Pitue	10	69,99	6.553	28.252
11	Pitu Riase	12	844,77	4.957	20.745
<b>Jumlah/Total</b>		<b>106</b>	<b>883,25</b>	<b>67.382</b>	<b>283.307</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

#### 5.4.4. Penggunaan Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Penggunaan lahan pertanian menurut kecamatan di Kabupten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.17 Penggunaan Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupten Sidenreng Rappang (Ha<sup>2</sup>)**

No.	Kecamatan	Sawah	Kebun Campur	Ladang/ Tegalan	Kolam/ Tambak/ Rawa	Perkebunan
1	Panca Lautang	6.155,00	1.043,72	315,15	388,05	9.868,00
2	Tellu Limpoe	2.506,00	1.009,74	217,50	17,00	1.146,25
3	Watang Pulu	4.320,70	2.386,19	111,25	-	690,00
4	Baranti	2.782,46	2.155,27	15,10	-	-
5	Panca Rijang	2.083,62	520,00	57,20	-	340,20
6	Kulo	3.470,60	1.068,30	78,15	-	-
7	Maritengngae	5.711,24	425,46	-	-	-
8	Watang Sidenreng	6.117,08	1.339,16	234,75	-	1.292,00
9	Pitu Riawa	5.182,94	4.819,73	203,50	-	1.077,00
10	Dua Pitue	5.834,40	658,00	20,15	-	-
11	Pitu Riase	2.805,08	5.966,22	212,15	360,00	4.030,00
<b>Jumlah/Total</b>		<b>46.969,12</b>	<b>21.391,79</b>	<b>464,90</b>	<b>765,05</b>	<b>18.443,45</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

#### 5.4.5. Pertanian Tanaman Padi

Sektor Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB sebesar 44,69 persen. Beberapa komoditas tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Sidrap antara lain: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang - kacangan.

Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap pada tahun 2013 mencapai 463.001,20 ton yang dipanen dari areal seluas 82.915,57 Ha atau dengan produktivitas sebesar 55,84 Ku/Ha. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012, produksi tahun 2013 mengalami peningkatan sekitar 1,76 persen, dimana produksi tahun 2012 sebesar 454.988,93 ton dengan areal panen seluas 79.960,75 Ha atau dengan produktivitas sebesar 56,90 Ku/Ha.

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Ha) pada tahun 2013, terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.18 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Ha) pada tahun 2013**

No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Total
1	Panca Lautang	3.146	890	4.036
2	Tellu Limpoe	1.534	893	2.427
3	Watang Pulu	3.140	436	3.576
4	Baranti	2.897	616	3.514
5	Panca Rijang	1.861	370	2.231
6	Kulo	946	2.170	3.116
7	Maritengngae	5.241	110	5.351
8	Watang Sidenreng	6.342	290	6.632
9	Pitu Riawa	5.675	946	6.621
10	Dua Pitue	5.281	-	5.281
11	Pitu Riase	2.062	111	2.173
<b>Jumlah/Total</b>		<b>38.125</b>	<b>6.832</b>	<b>44.958</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sidenreng Rappang, 2013

## 5.5. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng

### 5.5.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Soppeng terletak antara 4°06' Lintang Selatan dan 4°32' Lintang Selatan dan antara 119°47' 18" Bujur Timur dan 120°06' 13" Bujur Timur . Kabupaten Soppeng dibagi menjadi 8 Kecamatan terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 Dusun, dan 39 Lingkungan.

Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Km<sup>2</sup>. Dengan luas daratan 700 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M di atas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata 200 M di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 M di atas permukaan laut.

Curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan. Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 km persegi yang terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebanyak 30 anggota dengan jumlah laki - laki sebanyak 26 orang dan perempuan 4 orang.

Luas wilayah 1.500 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas daratan ± 700 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata ± 60 meter di

atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya  $\pm 800$  Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata  $\pm 200$  meter di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian  $\pm 120$  meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran  $\pm 24^\circ$  sampai dengan  $\pm 30^\circ$  dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.

Berdasarkan komponen penggunaan lahan, 25.991 Ha (17,33%) dimanfaatkan untuk areal persawahan, 28.003 Ha (17,34 %) untuk tegalan dan kebun, 29.733 Ha (19,82%) merupakan hutan negara, 24.042 Ha (16,03%) merupakan hutan rakyat, dan selebihnya digunakan untuk lahan perkebunan, ladang, perumahan, jalanan, dan sebagainya. Secara rinci, pola penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Sawah	: 25.991 Ha
2. Tegalan/kebun	: 26.003 Ha
3. Ladang/huma	: 4.359 Ha
4. Perkebunan	: 10.780 Ha
5. Hutan rakyat	: 27.087 Ha
6. Kolam/tebat/tambak	: 48 Ha
7. Tanah gembala/padang rumput	: 1.117 Ha
8. Lahan sementara tdk diusahakan	: 2.669Ha
9. Lainnya (pekarangan yang tidak ditanami pertanian)	: 8.758 Ha
10. Hutan negara	: 29.733 Ha
11. Rumah/pekarangan	: 4.307 Ha

12. Rawa-rawa yang tidak ditanami : 70 Ha  
 13. Lainnya (jalan, sungai, danau) : 9.977 Ha

**Tabel 5.19 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2007 – 2012.**

Tahun	Jumlah Penduduk
2008	217.933 jiwa
2009	230.658 jiwa
2010	257.813 jiwa
2011	261.403 jiwa
2012	255.499 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans, kab. Soppeng 2013

### 5.5.2. Ketahanan Pangan

Capaian kinerja ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan pangan utama menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Soppeng cukup baik dengan cakupan 150.385 persen di tahun 2012. Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun per jumlah penduduk. Capaian kinerja ini tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah menetapkan regulasi ketahanan pangan dalam empat tahun terakhir.

### 5.5.3. Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat sektor Pertanian merupakan kontributor utama pada PDRB Kabupaten. Pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan produksi pertanian dalam menopang ketahanan pangan dan menjaga momentum surplus beras yang menjadi target provinsi. Sekaitan dengan fokus tersebut, capaian kinerja bidang pertanian tahun 2010 - 2012 sebagai berikut :

**Tabel 5.23 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2010 – 2012**

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,87	6,09	5,89
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	45,37	42,46	41,25

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2013

Tabel 5.23 diatas menunjukkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di bidang pertanian dengan indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami penurunan dari 6,09 persen pada tahun 2011 menjadi 5,89 persen pada tahun 2012. Capaian ini ternyata tidak berimplikasi terhadap capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dimana pada tahun 2010 sebesar 45,37 persen turun menjadi 42,46 persen pada tahun 2011 serta pada tahun 2012 juga mengalami penurunan menjadi 41,25. Olehnya itu di tahun - tahun berikutnya kedua indikator ini perlu lebih ditingkatkan.

## **5.6. Gambaran Umum Kabupaten Wajo**

### **5.6.1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah**

Kabupaten wajo terletak pada posisi 3039'-4016' Lintang Selatan dan 119053'-120027 Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat.

Luas Wilayahnya adalah 2.506,19 Km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 87.975 ha (35,10%) dan lahan kering 162.644 ha (64,90%). Sampai dengan akhir tahun 2011 wilayah Kabupaten Wajo tidak mengalami pemekaran, yaitunya tetap terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan. Selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan tersebut, wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah - wilayah yang lebih kecil yang disebut desa atau kelurahan. Tetap sama dengan kondisi pada tahun 2008, wilayah Kabupaten Wajo terbentuk dari 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 176 desa/kelurahan. Masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

**Tabel 5.24 Jumlah penduduk Kabupaten Wajo dan kepadatannya Tahun 2012**

No	Kecamatan	Penduduk	KK	Tingkat Pertumbuhan	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
1	Sabbangparu	26.159	6.874	0,55	197,05
2	Tempe	61.581	13.684	0,81	1.609,12
3	Pammana	31.640	8.794	1,31	195,19
4	Bola	19.640	4.676	0,70	89,22
5	Takkalalla	21.034	5.181	1,20	117,01
6	Sajoanging	18.960	4.915	0,63	113,53
7	Penrang	15.898	4.026	1,00	102,63
8	Majauleng	32.062	8.431	1,73	141,92

9	Tanasitolo	40.340	10.057	1,81	260,93
10	Belawa	32.154	7.892	0,36	186,62
11	Maniangpajo	16.306	3.987	0,81	92,67
12	Gilireng	11.490	3.022	3,66	78,16
13	Keera	22.693	5.785	2,71	61,61
14	Pitumpanua	42.694	9.948	0,61	206,12
<b>Total</b>		<b>392.651</b>	<b>97.272</b>	<b>17,85</b>	<b>3.452</b>

Sumber : BPS Wajo Tahun 2010 - 2013

## 5.7. Karakteristik Rumah Tangga Petani

### 5.7.1. Umur dan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Variabel umur dan tingkat pendidikan dari kepala keluarga memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan usahatani padi. Tabel 5.25 menunjukkan bahwa petani yang telah berumur lebih dari 55 tahun rata-rata sebesar 46.4, sedangkan yang di bawah 55 tahun secara rata-rata sebesar 33.6. Dari keseluruhan responden di 5 kabupaten, jumlah tertinggi ada di Kabupaten Bone, yaitu 102 orang yang berusia lebih dari 55 tahun. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 5.25 berikut ini.

**Tabel 5.25 Rata-Rata Distribusi Umur Kepala Keluarga (KK) Petani**

No	Kabupaten	Persentase Distribusi Umur KK Petani Contoh		Total
		20 - 55 tahun	> 55 tahun	
1	Bone	50	102	152
2	Soppeng	23	25	48
3	Wajo	42	45	87
4	Sidrap	12	40	52
5	Pinrang	41	20	61
rata - rata		33.6	46.4	

sumber: data primer, diolah 2013

Variabel penting lainnya dalam menganalisis kegiatan ekonomi masyarakat petani dalam usahatani padi sawah adalah tingkat

pendidikannya. Berdasarkan tingkat pendidikannya nampak bahwa petani yang menjadi subjek penelitian lebih dari 75% adalah tidak tamat SD atau sudah tamat SD, sedangkan yang lebih dari sekolah SD sebesar 17.30%, 6.6% dari petani dalam penelitian ini adalah petani yang tidak sekolah.

**Tabel 5.26. Rata-Rata Distribusi Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga (KK) Petani**

No	Kabupaten	Persentase Distribusi Tingkat Pendidikan KK		
		TS	TTSD-SD	>SD
1	Bone	1.6	65.6	32.8
2	Soppeng	0	83.2	16.8
3	Wajo	2.6	84.1	13.3
4	Sidrap	13.5	76.4	10.1
5	Pinrang	5.5	88.8	5.7
Rata-Rata		6.6	76.1	17.3

sumber: data primer, diolah 2013

Keterangan :

TS : Tidak sekolah

TTSD - SD : Tidak tamat SD sampai tamat SD

### 5.8. Keragaman Usaha Tani Padi Sawah

Data yang diperoleh dari hasil survei mendalam (in-depth interview) usaha tani padi pada dua tipologi lahan sawah yaitu sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan pada lima kabupaten lokasi penelitian, ditampilkan pada Tabel 5.27 berikut :

**Tabel 5.27 Hasil analisis usaha tani padi pada dua topologi lahan sawah di lima kabupaten wilayah penelitian (ha tahun-1) Tahun 2013**

Keterangan Tipologi	Kabupaten					Rata-rata
	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang	
<b>Irigasi Teknis</b>						
- Produksi (ton)	7,1	6,8	7,3	7,2	7,1	7,1
- Nilai Produksi (Rp)	22.720.000	21.760.000	23.360.000	23.040.000	22.720.000	22720000
- Biaya Usaha Tani (Rp)	9.200.000	9.400.000	9.120.000	9.220.000	9.310.000	9250000
- Pendapatan (Rp)	13.520.000	12.360.000	14.240.000	13.820.000	13.410.000	13470000
- R/C	2,5	2,3	2,6	2,5	2,4	2,5
<b>Tadah hujan</b>						
- Produksi (ton)	5,1	5,1	5,2	5,12	5,1	5,124
- Nilai Produksi (Rp)	16.320.000	16.320.000	16.640.000	16.384.000	16.320.000	16396800
- Biaya Usaha Tani (Rp)	9.200.000	9.400.000	9.120.000	9.220.000	9.310.000	9250000
- Pendapatan (Rp)	7.120.000	6.920.000	7.520.000	7.164.000	7.010.000	7146800
- R/C	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Rata-rata Lokasi</b>						
- Produksi (ton)	6,1	5,95	6,25	6,16	6,1	6,1
- Nilai Produksi (Rp)	19.520.000	19.040.000	20.000.000	19.712.000	19.520.000	19.558.400
- Biaya Usaha Tani (Rp)	9.200.000	9.400.000	9.120.000	9.220.000	9.310.000	9.250.000
- Pendapatan (Rp)	10.320.000	9.640.000	10.880.000	10.492.000	10.210.000	10.308.400
- R/C	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1

sumber : data primer, diolah 2013

Tabel 5.27 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan usaha tani padi di lima Kabupaten di Sulsel berturut-turut adalah Rp.19.520.000, Rp.19.040.000, Rp. 20.000.000, Rp. 19.712.000 dan Rp.19.520.000 ha-1 tahun-1 atau rata-rata Rp.19.558.400 ha-1 tahun-1. Perbedaan pendapatan tampak disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah produksi per hektar dan biaya tenaga kerja di masing masing kabupaten. Hasil produksi rata-rata tertinggi berada di Kabupaten Wajo dengan nilai produksi sampai 6.25 ton per ha, sedangkan terendah berada di Kabupaten Soppeng dengan nilai produksi rata-rata hanya 5.95 ton per ha. Adapun biaya produksi tertinggi rata-rata berada di kabupaten

Soppeng dengan besaran Rp. 9.400.000, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Wajo dengan besaran Rp. 9.120.000.

Nilai R/C tertinggi rata-rata berada di Kabupaten Wajo dengan nilai 2.2, disusul empat kabupaten lainnya yaitu Bone, Sidrap dan Pinrang dengan nilai 2.1 sedangkan terendah berada di Kabupaten Soppeng dengan nilai 2.0 Nilai R/C lebih dari 1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan usaha tani lebih besar dari biaya yang dikeluarkan atau memperoleh keuntungan sehingga layak untuk diusahakan. Perbedaan pendapatan dan nilai R/C antar lokasi terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat produktivitas, nilai penerimaan dan biaya usaha tani.

Keterbatasan luas lahan sawah dan terkendalanya peningkatan IP padi pada lahan sawah beririgasi teknis dan tadah hujan menjadi kendala utama pencapaian target produksi di wilayah beriklim kering, sehingga kebutuhan konsumsi seringkali harus dipenuhi dari impor. Hal senada juga dikemukakan oleh Sumaryanto (2009), bahwa salah satu faktor penyebab masih terjadinya impor beras Indonesia adalah karena luas lahan garapan usaha tani padi sawah tergolong sempit.

**Tabel 5. 28 Rasio Lahan Terhadap Petani Dan Penduduk**

Keterangan	Kabupaten					Rata-rata
	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang	
1 Luas Lahan (Ha)	89.018	24.922	85.026	44.689	48.778	58.487
2 Populasi Petani padi (org)	39.324	11.287	22.286	13.161	16.732	20.558
3 Populasi Penduduk (org)	724.905	226.079	388.985	274.648	354.652	393.854
4 Rasio luas lahan/petani	2,264	2,208	3,815	3,396	2,915	2,920
5 Rasio luas lahan/pddk	0,123	0,110	0,219	0,163	0,138	0,150

Sumber : Data sekunder, diolah 2013

Berdasarkan Tabel 5.28 di atas tampak bahwa rasio antara luas lahan sawah dengan jumlah petani di daerah penelitian di Sulsel adalah 2.920 Ha per petani. Hasil ini memberikan interpretasi bahwa lahan yang tersedia masih cukup luas untuk dilakukan ekspansi atau ekstensifikasi. Sedangkan rasio luas lahan dengan jumlah penduduk adalah 0.150 Ha kapita-1 atau sekitar 1500 m<sup>2</sup> kapita<sup>-1</sup> atau berada di atas rata-rata nasional seluas 646 m<sup>2</sup> kapita-1, lebih tinggi atau hampir sama dengan jika dibandingkan dengan rata-rata luas lahan sawah di negara penghasil beras dunia, seperti China (1.120 m<sup>2</sup> kapita-1) dan India (1.590 m<sup>2</sup> kapita-1) (Pasaribu, 2009).

Biaya usaha tani padi sawah menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar wilayah terutama biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik sosial ekonomi petani pada tipologi lahan sawah yang berbeda, secara lebih rinci disajikan pada Tabel 5.29 berikut:

**Tabel 5.29 Rincian biaya rata-rata usaha tani pada lima kabupaten di Sulawesi Selatan**

Keterangan	Kabupaten					Rata-rata	%
	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang		
<b>1. Biaya tenaga kerja</b>							
Pengolahan tanah	1.653.639	1.539.267	1.462.304	1.447.681	1.812.500	1.583.078	17,11
Tanam	1.394.311	1.567.117	1.158.582	1.141.203	1.080.285	1.268.300	13,71
Penyiangan	684.637	656.372	648.167	628.722	609.861	645.552	6,98
Pemeliharaan	708.519	721.980	830.277	954.819	964.367	835.992	9,04
Panen	1.374.685	1.366.493	1.345.996	1.305.616	1.292.560	1.337.070	14,45
Pasca panen	563.248	475.664	547.014	629.066	681.379	579.274	6,26
<b>Total Biaya Tenaga Kerja</b>	<b>6.379.039</b>	<b>6.326.893</b>	<b>5.992.339</b>	<b>6.107.106</b>	<b>6.440.951</b>	<b>6.249.266</b>	<b>67,56</b>
<b>2. Biaya Sarana Produksi</b>							
Benih	703.556	750.880	764.275	753.104	972.491	788.861	8,53
Pupuk	1.773.584	1.873.269	1.919.684	1.851.143	1.619.544	1.807.445	19,54
Urea	725.938	756.636	745.938	726.637	726.636	736.357	7,96
ZA	163.992	-	160.992	101.765	-	85.350	0,92
SP-36	309.234	386.796	369.234	356.796	286.796	341.771	3,69
NPK	419.094	566.625	489.094	466.733	466.900	481.689	5,21
Pupuk Organik	155.326	163.212	154.426	199.212	139.212	162.278	1,75
Obat-obatan:	343.821	448.958	443.702	508.647	277.014	404.428	4,37
Obat Padat	190.714	137.479	190.545	187.265	-	141.201	1,53
Obat Cair	153.107	311.479	253.157	321.382	277.014	263.228	2,85
<b>Total Biaya Sarana Prduksi</b>	<b>2.820.961</b>	<b>3.073.107</b>	<b>3.127.661</b>	<b>3.112.894</b>	<b>2.869.049</b>	<b>3.000.734</b>	<b>32,44</b>
<b>Total Biaya Tani</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>9.120.000</b>	<b>9.220.000</b>	<b>9.310.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data primer, diolah 2013

Dari Tabel 5.29 di atas tampak bahwa sebagian besar (67.56 %) biaya usaha tani adalah untuk membiayai tenaga kerja, sedangkan pengeluaran untuk sarana produksi berturut-turut untuk pembelian pupuk sebesar 19.54%, benih 8.53% dan obat-obatan 4.37%. Pengeluaran biaya tenaga kerja terbesar berturut-turut dipergunakan untuk pengolahan tanah (17.11 %), disusul biaya panen (14.45 %), tanam (13.71%), pemeliharaan (9.04 %), penyiangan (6.98%), dan pasca panen (6.26%). Biasanya model sistem pengupahan pada biaya tenaga kerja menggunakan gabah hasil panen.

Pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan menggunakan hand traktor, sedangkan penggunaan tenaga ternak sudah mulai berkurang. Tenaga manusia biasa digunakan untuk perbaikan pematang atau pengolahan tanah yang tidak dapat dijangkau traktor. Biaya traktor relatif masih mahal karena ketersediaan traktor masih terbatas dan tidak sebanding dengan luas lahan.

Porsi biaya pemeliharaan relatif kecil, karena umumnya kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh tenaga keluarga dan hanya sebagian kecil yang menggunakan tenaga kerja upahan. Kegiatan pemeliharaan mencakup kegiatan pemupukan dan penyemprotan. Biaya pasca panen yang dimaksud adalah biaya pengangkutan dari lahan sawah ke rumah petani atau tempat yang ditentukan misalnya pinggir jalan. Sebagian petani memberikan upah angkut termasuk dalam upah panen, sebagian memberikan upah yang terpisah dari upah panen, dan sebagian lagi upah angkut dibebankan kepada pembeli, apabila petani langsung menjual hasil panen di lahan sawah.

Pengeluaran biaya sarana produksi terbesar berturut-turut adalah untuk benih sebesar 8.53%, pembelian pupuk urea 7.96%, NPK 5.21%, pengeluaran untuk pembelian obat-obatan 4.37 %, SP-36 3.69%, pupuk organik 1.75% dan ZA 0.92 %.

### 5.9. Analisis Konsumsi Petani di Sulsel

Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah agraris, dengan sebagian besar penduduknya di daerah masih didominasi bekerja di sektor pertanian tentunya menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Lahan pertanian sebagai tempat beraktifitas bagi petani semakin mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktifitas pembangunan yang dilakukan telah banyak menyita fungsi lahan pertanian untuk menghasilkan bahan makanan yang diganti dengan pemanfaatan lain, seperti pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Akibatnya keadaan ini menyebabkan kemampuan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi penduduk semakin berkurang.

Keadaan ini sangatlah kontradiktif, karena penambahan penduduk membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan bahan makanan dan ketersediaan bahan pangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan melalui penetapan luas optimum usaha tani padi sawah utamanya di Sulsel.

Berdasarkan hasil survei pada lima kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian didapatkan informasi konsumsi petani sebagai berikut :

**Tabel 5.30 Konsumsi Petani Padi Sawah Dalam Kilogram Beras**

Keterangan	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang
<b>Konsumsi Petani</b>					
kebutuhan fisik min (KFM)	321	321	320	319	321
Kesehatan dan rekreasi (50% *KFM)	160.5	160.5	160	159.5	160.5
Pendidikan dan keglatan sosial (50% *KFM)	160.5	160.5	160	159.5	160.5
Asuransi dan Tabungan (50% *KFM)	160.5	160.5	160	159.5	160.5
Tingkat hidup layak (kg/tahun) (250% *KFM)	802.5	802.5	800	797.5	802.5
pengeluaran minimum (Rp)	6,821,250	6,821,250	6,800,000	6,778,750	6,821,250

sumber : data primer, diolah 2013

Berdasarkan Tabel 5.30 di atas tampak bahwa kebutuhan konsumsi di lima kabupaten tersebut hampir sama yaitu berkisar 800 kg. Kebutuhan fisik minimum terbesar berada di 3 kabupaten yaitu Bone, Soppeng dan Pinrang yaitu sebesar 321 kg perkapita sedangkan terendah pada kabupaten Sidrap dengan jumlah 319 kg perkapita. Adapun pengeluaran minimum untuk kabupaten Bone, Soppeng dan Pinrang adalah sama yaitu Rp. 6.821.250. untuk wajo sebesar Rp. 6.800.000 sedangkan Sidrap sebesar Rp. 6.778.750.

Jika dibandingkan dengan pendapatan petani dapat jelaskan pada Tabel 5.31 di bawah. Berdasarkan Tabel 5.31 tersebut tampak bahwa pendapatan petani dibagi menjadi 3 bagian dengan 2 jenis topolog yaitu sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan. Sedangkan pendapatan dibagi 3 yaitu pemilik dan penggarap sekaligus, pemilik dan penggarap saja dan buruh tani.

**Tabel. 5.31 Rata – Rata Pendapatan dan Konsumsi Petani Padi Di Sulawesi Selatan**

Keterangan	Kabupaten				
	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang
Pendapatan bersih pemilik dan penggarap					
Intasi Teknis	13,520,000	12,360,000	14,240,000	34,550,000	33,525,000
Tadah Hujan	7,120,000	6,920,000	7,520,000	7,164,000	7,010,000
Pendapatan bersih pemilik saja/penggarap saja					
Intasi Teknis	6,760,000	6,180,000	7,120,000	17,275,000	16,762,500
Tadah Hujan	3,560,000	3,460,000	3,760,000	3,582,000	3,505,000
Pendapatan Buruh Tani	6,379,039	6,326,893	5,992,339	6,107,106	6,440,951
Pengeluaran minimum (Rp)	6,821,250	6,821,250	6,800,000	6,778,750	6,821,250
Saving Pemilik dan penggarap					
Intasi Teknis	6,400,000	5,440,000	6,720,000	27,386,000	26,515,000
Tadah Hujan	6,698,750	5,538,750	7,440,000	27,771,250	26,703,750
Saving pemilik saja atau penggarap saja					
Intasi Teknis	380,961	(146,893)	1,127,661	11,167,894	10,321,549
Tadah Hujan	(3,261,250)	(3,361,250)	(3,040,000)	(3,196,750)	(3,316,250)
Buruh tani	(442,211)	(494,357)	(807,661)	(671,644)	(380,299)

sumber : data primer, 2013

Berdasarkan Tabel 5.31 di atas tampak bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan bersih petani pemilik sekaligus penggarap dengan kedua jenis petani lainnya seperti pemilik saja atau penggarap saja dan buruh tani. Atas perbedaan tersebut sehingga memberikan dampak pada jumlah saving setelah dikurangi pengeluaran minimum.

Untuk pemilik dan penggarap masih mendapatkan surplus dana minimum 5 juta, sedangkan untuk pemilik saja atau penggarap minimum Rp. 380.961 bahkan terdapat defisit di daerah Kabupaten Soppeng sebesar Rp. (146.893). Sedangkan untuk buruh tani semua kabupaten mengalami defisit anggaran.

### 5.10. Penetapan Luas Lahan Minimum

Penetapan luas minimum usaha padi sawah pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu petani penggarap, petani pemilik dan pemilik sekaligus penggarap. Perhitungan luas optimum usaha padi sawah ini menggunakan nilai z score dengan membandingkan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk hidup layak oleh sebuah keluarga atau rumah tangga dengan nilai bersih yang diperoleh pada setiap 1 hektar tanah pertanian selama 1 tahun.

Adapun hasil perhitungan luas minimum usaha padi sawah di tampilkan pada Tabel 5.32 berikut

**Tabel 5.32 Perhitungan Z score di Lima kabupaten di Sulawesi Selatan**

Nilai Z (luas lahan optimum)	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang
Pemilik dan penggarap					
Irigasi teknis (ha/org)	0,50	0,55	0,48	0,20	0,20
Tadah Hujan (ha/org)	0,96	0,99	0,90	0,95	0,97
Pemilik saja atau penggarap saja					
Irigasi teknis (ha/org)	1,01	1,10	0,96	0,39	0,41
Tadah Hujan (ha/org)	1,92	1,97	1,81	1,89	1,95

sumber : data primer, 2013

Berdasarkan hasil Tabel 5.32 di atas tampak bahwa dari lima kabupaten yang dijadikan sampel untuk jenis pemilik dan penggarap irigasi teknis tertinggi berada di Kabupaten Soppeng dengan nilai 0.55 sedangkan terendah berada di Kabupaten Sidrap dan Pinrang yaitu sebesar 0.20. Untuk jenis sawah tadah hujan, terendah berada di Kabupaten Wajo dan tertinggi 0.99 yang berada di Kabupaten Soppeng. Hasil ini memberikan interpretasi bahwa luas lahan minimum yang harus dikerjakan oleh petani penggarap sekaligus pemilik agar hidup



layak adalah 0.50 Ha untuk jenis sawah irigasi teknis, sedangkan untuk sawah tadah hujan adalah sebesar 0.99 Ha.

Untuk jenis petani sebagai pemilik atau penggarap saja, nilai z score untuk semua kabupaten yang tertinggi berada di 1.10 yaitu di Kabupaten Soppeng dan terendah berada 0.39 di Kabupaten Sidrap khusus untuk sawah irigasi teknis. Sedangkan untuk sawah jenis tadah hujan tertinggi berada di 1.97 yaitu di Kabupaten Soppeng sedangkan terendah berada di 1.81 yaitu di Kabupaten Wajo.

#### **5.11. Penetapan Man Ekuivalen Unit Petani Padi Miskin**

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani yang tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehigga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usaha tani keluarga (*family farms*), khususnya tenaga kerja petani bersama anggota keluarganya. Rumah tangga tani yang umumnya sangat terbatas kemampuannya dari segi modal, peranan tenaga kerja keluarga sangat menentukan. Jika masih dapat diselesaikan oleh tenaga kerja keluarga sendiri maka tidak perlu mengupah tenaga luar, yang berarti menghemat biaya.

Baik dalam usahatani keluarga maupun perusahaan pertanian peranan tenaga kerja belum sepenuhnya diatasi dengan teknologi yang menghemat tenaga (teknologi mekanis). Hal ini dikarenakan selain

mahal juga ada hal-hal tertentu yang memang tenaga kerja manusia tidak dapat digantikan.

Peranan anggota keluarga yang lain adalah sebagai tenaga kerja di samping juga tenaga luar yang diupah. Banyak sedikitnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usahatani berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman yang diusahakan.

Ada beberapa hal yang membedakan antara tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar antara lain adalah komposisi menurut umur, jenis kelamin, kualitas, dan kegiatan kerja (prestasi kerja). Kegiatan kerja tenaga luar sangat dipengaruhi sistem upah, lamanya waktu kerja, kehidupan sehari-hari, kecakapan, dan umur tenaga kerja.

### **1. Sistem upah**

Sistem upah dibedakan menjadi 3 yaitu upah borongan, upah waktu, dan upah premi. Masing-masing sistem tersebut akan mempengaruhi prestasi seorang tenaga luar.

- a. Upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat mengerjakan pekerjaan borongan lainnya. Contohnya borongan menggarap lahan sawah sebesar Rp. 150.000 per petak sawah

Pada penelitian ini upah borongan untuk buruh tani dirinci sebagai berikut :

- 1) Persiapan lahan dilaksanakan oleh 1 orang dengan tarif 1 juta rupiah/ha
- 2) Penanaman biasanya dilaksanakan sebanyak 6 orang yang kesemuanya tenaga kerja keluarga dengan tarif borongan 1 juta rupiah /ha.
- 3) Perawatan dilaksanakan 1 orang dengan tarif borongan Rp. 900,000
- 4) Potong padi dilaksanakan 9 orang dengan tarif 1 juta rupiah
- 5) Angkut hasil gabah dari sawah ke pinggir dilakukan 1 orang dengan tarif Rp. 200,000.

Sehingga total pendapatan yang diterima sebagai buruh tani atas penggarapan sawah adalah Rp. 2,377,778 /Ha persekali panen.

- b. Upah waktu adalah upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu kerja. Sistem upah waktu kerja ini cenderung membuat pekerja untuk memperlama waktu kerja dengan harapan mendapat upah yang semakin besar. Jika dikonversi biaya upah borongan ke upah sistem waktu maka rinciannya adalah sebagai berikut.
- Umumnya lama kerja antara 8 – 12 jam perorang perhari, dan yang membedakan antara lahan dibawah 1 Ha, 1 – 2 Ha dan lebih dari 2 Ha adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengolahan tersebut.

Sehingga besarnya upah jika perjam adalah :

- 1) untuk petani pemilik dan penggarap sekaligus, rata-rata pendapatan bersih untuk irigasi teknis di semua kabupaten adalah Rp.13,470,000/tahun atau sepadan dengan Rp. 36,904.11 HKO atau Rp. 4,613.01/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

Untuk tadah hujan rata-rata pendapatan bersih di semua kabupaten adalah Rp. 7,146,800 atau sepadan dengan Rp. 19,580.27 HKO atau Rp. 2,447.53/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari

- 2) untuk petani pemilik saja atau penggarap saja, rata-rata pendapatan bersih untuk irigasi teknis di semua kabupaten adalah Rp. 6,735,000/tahun atau sepadan dengan Rp. 18,452.05 HKO atau Rp. 2,306/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

Untuk tadah hujan rata-rata pendapatan bersih di semua kabupaten adalah Rp. 3,593,333 atau sepadan dengan Rp. 9,844.75 HKO atau Rp. 1,230.59 /jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

- 3) Untuk buruh tani rata-rata pendapatan bersih di semua kabupaten adalah Rp. 2,377,778 /tahun atau sepadan dengan Rp. 6.514.HKO atau Rp. 814/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

## 2. Lamanya waktu kerja

Lamanya waktu kerja seseorang dipengaruhi oleh seseorang tersebut. Seseorang yang tidak dalam keadaan cacat atau sakit secara normal mempunyai kemampuan untuk bekerja. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keadaan iklim suatu tempat tertentu. Misalnya, wilayah tropis seperti Indonesia, untuk melakukan aktivitas lapangan seperti petani tidak dapat bertahan lama karena cuaca panas.

Umumnya memang petani di semua kabupaten melaksanakan aktivitasnya sekitar 8 – 12 jam sehari selama seminggu. Kecuali jumat hanya setengah hari.

### 5.12. Penyusunan Rekomendasi Untuk Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah

Penetapan luas lahan optimum usahatani padi sawah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pengeluaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) petani. Optimasi usaha tani pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan biaya serta mendapatkan informasi tentang perubahan alokasi sumber daya yang diperlukan. Informasi tersebut sangat berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang intervensi apa yang diperlukan untuk mencapai kondisi optimal yang diharapkan.

Guna memudahkan perumusan model matematis pada penyelesaian optimasi usaha tani padi sawah di Sulsel, terlebih dahulu hasil penelitian disusun dalam suatu matriks input-output yang

menunjukkan variabel keputusan, tujuandan kendala sasaran yang dihadapi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.33.

**Tabel 5.33. Matriks input-output program linier usaha tani padi sawah irigasi teknis**

Variabel ke-i tujuan	Baris J Z	lokasi ke-j dan parameter ke-i				
		Bone x1	Soppeng x2	Wajo x3	Sidrap x4	Pinrang x5
Maks pendapatan	1	13,520,000	12,360,000	14,240,000	13,820,000	13,410,000
fungsi kendala		koefisien peubah				
biaya tenaga kerja	2	6,379,039	6,326,893	5,992,339	6,107,106	6,440,951
biaya sarana produksi	3	2,477,140	2,624,149	2,683,959	2,604,247	2,592,035
biaya obat-obatan	4	343,821	448,958	443,702	508,647	277,014

sumber : data primer, diolah 2013

**Tabel 5.34 Matriks input-output program linier usaha tani padi sawah irigasi tadah hujan**

Variabel ke-i tujuan	Baris J Z	lokasi ke-j dan parameter ke-i				
		Bone x1	Soppeng x2	Wajo x3	Sidrap x4	Pinrang x5
Maks pendapatan	1	7,120,000	6,920,000	7,520,000	7,164,000	7,010,000
fungsi kendala		koefisien peubah				
biaya tenaga kerja	2	6,379,039	6,326,893	5,992,339	6,107,106	6,440,951
biaya sarana produksi	3	2,477,140	2,624,149	2,683,959	2,604,247	2,592,035
biaya obat-obatan	4	343,821	448,958	443,702	508,647	277,014

sumber : data primer, diolah 2013

Berdasarkan Tabel 5.33 dan Tabel 5.34 di atas menjelaskan variabel keputusan ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $x_4$  dan  $x_5$ ) masing-masing dengan parameternya. Fungsi tujuan adalah memaksimumkan pendapatan usaha tani padi sawah terhadap pengelolaan  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  dan  $X_5$  masing-masing mewakili aktivitas/ pengelolaan usaha tani di lima kabupaten, yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap dan Pinrang. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat tiga kendala pembatas, yaitu kendala biaya tenaga kerja, biaya sarana produksi dan biaya obat-obatan.

Ukuran performansi kritis terhadap permasalahan tersebut bahwa biaya tenaga kerja, biaya sarana produksi dan total biaya usaha

tani harus diminimumkan atau lebih rendah dari biaya rata-rata yang dikeluarkan petani saat ini.

Penyelesaian optimasi model linier programming berdasarkan matriks (Tabel 5.33 dan 5.34) dengan persamaan (3) dilakukan dengan menggunakan program *POM for windows*.

**Fungsi tujuan untuk irigasi teknis:**

$$\text{MAX } 13.520 X_1 + 12.360 X_2 + 14.240 X_3 + 13.820 X_4 + 13.410 X_5$$

Fungsi kendala:

$$6.379 X_1 + 6.326 X_2 + 5.992 X_3 + 6.107 X_4 + 6.440 X_5 \leq 6.500$$

$$2.477 X_1 + 2.624 X_2 + 2.683 X_3 + 2.604 X_4 + 2.592 X_5 \leq 2.700$$

$$343 X_1 + 448 X_2 + 443 X_3 + 508 X_4 + 277 X_5 \leq 510$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

**Fungsi tujuan untuk tadah hujan:**

$$\text{MAX } 7.120 X_1 + 6.920 X_2 + 7.520 X_3 + 7.164 X_4 + 7.010 X_5$$

Fungsi kendala:

$$6.379 X_1 + 6.326 X_2 + 5.992 X_3 + 6.107 X_4 + 6.440 X_5 \leq 6.500$$

$$2.477 X_1 + 2.624 X_2 + 2.683 X_3 + 2.604 X_4 + 2.592 X_5 \leq 2.700$$

$$343 X_1 + 448 X_2 + 443 X_3 + 508 X_4 + 277 X_5 \leq 510$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan program *POM for windows*

didapatkan hasil sebagai berikut

Untuk irigasi teknis						RHS	Dual	
	x1	x2	x3	x4	x5			
Maximize		13520	12360	14240	13820	13410	<=	6500 .4407
Constraint 1	6379	6326	5992	6107	6440		<=	2700 4.3232
Constraint 2	2477	2624	2683	2604	2592		<=	510 0
Constraint 3	383	448	443	508	277		<=	14537.39
Solution->	.5549	0	.494	0	0			

### Untuk tadah hujan

	x1	x2	x3	x4	x5		RHS	Dual
Maximize		7120	6920	7520	7164	7010		
Constraint 1	6379	6326	5992	6107	6440	<=	6500	.2094
Constraint 2	2477	2624	2683	2604	2592	<=	2700	2.3352
Constraint 3	383	448	443	508	277	<=	510	0
Solution->	.5549	0	.494	0	0			7666.078

Berdasarkan hasil output di atas tampak bahwa solusi feasible untuk memaksimalkan pendapatan petani di Sulsel baik bagi petani irigasi teknis dan petani sawah tadah hujan adalah X1 sebesar 0.5549 dan X3 sebesar 0.494. Untuk irigasi teknis menggunakan formulasi tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 14.537.000 sedangkan untuk sawah tadah hujan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 7.666.000 berarti terjadi peningkatan dari pendapatan sebelumnya.

Hasil dari interpretasi tersebut memberikan interpretasi bahwa kabupaten yang masih bisa ditingkatkan kapasitas produksinya adalah Bone sebesar 0.5549 dan Wajo sebesar 0.494. Sedangkan kabupaten lainnya Soppeng, Sidrap dan Pinrang sudah mencapai kapasitas maksimum dan tidak bisa lagi ditingkatkan kapasitas produksinya.

Untuk tujuan meminimumkan biaya usaha tani dalam rangka memaksimalkan produktivitas dan pendapatan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tipologi Irigasi Teknis

Fungsi tujuan untuk irigasi teknis:

$$\text{Min . } 9200000 X1 + 9400000 X2 + 9120000 X3 + 9220000 X4 + 9310000 X5$$

Fungsi kendala Max:

$$22720 X_1 + 21760 X_2 + 23360 X_3 + 23040 X_4 + 22720 X_5 \geq 21760$$

$$794952 X_1 + 299367 X_2 + 709605 X_3 + 463213 X_4 + 546748 X_5 \geq 299367$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

	X1	X2	X3	X4	X5	RHS	Dual
Minimize	9200000	9400000	9120000	9220000	9310000		
Constraint 1	22720000	21760000	23360000	23040000	22720000	>= 21760000	-7896
Constraint 2	794952	299367	709605	463213	546748	>= 299367	0
Solution-->	0	0	0.9315	0	0		8495342

Berdasarkan hasil output POM for Windows terhadap efisiensi biaya usaha tani maka kabupaten yang masih bisa mendapatkan perlakuan efisiensi adalah daerah Wajo yaitu sebesar 0.9315 sehingga menghasilkan biaya usaha tani yang minimum di tingkat provinsi sebesar Rp. 8.495.342.

Untuk empat kabupaten lainnya selain Wajo sudah berada ditingkat efisiensi optimum sehingga tidak bisa lagi dilakukan efisiensi secara maksimal.

## 2. Topologi Sawah Tadah Hujan

### Fungsi tujuan untuk tadah hujan:

$$\text{Min} . 9200000 X_1 + 9400000 X_2 + 9120000 X_3 + 9220000 X_4 + 9310000 X_5$$

### Fungsi kendala Max:

$$16320 X_1 + 16320 X_2 + 16640 X_3 + 16384 X_4 + 16320 X_5 \geq 16320$$

$$794952 X_1 + 299367 X_2 + 709605 X_3 + 463213 X_4 + 546748 X_5 \geq 299367$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

Solve

	X1	X2	X3	X4	X5	RHS	Dual
Minimize	9200000	9400000	9120000	9220000	9310000		
Constraint 1	16320000	16320000	16640000	16384000	16320000	>= 16320000	-1.0108
Constraint 2	794952	299367	709605	463213	546748	>= 299367	0
Solution->	0	0	.9808	0	0		8944615

Berdasarkan hasil output *POM for Windows* terhadap efisiensi biaya usaha tani untuk topologi sawah tadah hujan, maka kabupaten yang masih bisa mendapatkan perlakuan efisiensi adalah daerah Wajo yaitu sebesar 0.9808 sehingga menghasilkan biaya usaha tani yang minimum di tingkat provinsi sebesar Rp. 8.494.615.

Untuk empat kabupaten lainnya selain Wajo sudah berada ditingkat efisiensi optimum sehingga tidak bisa lagi dilakukan efisiensi secara maksimal.

### 5.13. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani sering diukur dengan nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam

prosentase). NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Menurunnya angka indeks NTP ini antara lain disebabkan petani tanggap terhadap perkembangan teknologi yang lebih cepat di bandingkan perkembangan harga sehingga perkembangan produksi meningkat cepat melebihi kemampuan "pasar" untuk menyerap.

Perubahan nilai tukar petani (NTP) dalam kenyataannya lebih merugikan daripada menguntungkan petani, artinya di dalam berusaha tani, pendapatan yang diterima petani lebih kecil daripada biaya produksi atau perubahan rasio pendapatan di sector pertanian terhadap pendapatan di sektor non-pertanian lebih sering negatif dari pada positif, oleh karena itu NTP ini mempunyai kolerasi dengan kemiskinan. Untuk melihat tingkat kesejahteraan petani (khususnya padi sawah) secara utuh perlu dilihat sisi yang lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi.

Adapun hasil perhitungan terhadap NTP petani di lima kabupaten ditampilkan pada Tabel 5.35 Berikut

**Tabel 5.35 Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Selatan**

Keterangan	Kabupaten				
	Bone	Soppeng	Wajo	Sidrap	Pinrang
NTP (pemilik dan penggarap)					
Irigasi teknis (ha/org)	141.81	134.15	146.54	192.83	188.73
Tadah Hujan (ha/org)	101.86	100.61	104.38	102.14	101.17
NTP (pemilik saja atau penggarap saja)					
Irigasi teknis (ha/org)	99.46	94.43	102.62	156.98	153.86
Tadah Hujan (ha/org)	71.45	70.83	73.10	71.66	71.10

sumber : Data Primer, diolah 2013

Berdasarkan Tabel 5.35 di atas tampak bahwa secara rata-rata nilai tukar petani untuk pemilik dan penggarap, baik untuk irigasi teknis maupun tadah hujan berada di atas 100% untuk semua kabupaten. Ini memberikan indikasi bahwa  $NTP > 100$  berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga masih dikategorikan sejahtera.

Untuk petani yang bekerja sebagai penggarap saja, terdapat 2 kabupaten yang memiliki nilai  $NTP < 100$  yaitu Kabupaten Bone dan Soppeng, baik yang penggarap sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Untuk kabupaten lain seperti Wajo, Sidrap dan Pinrang yang memiliki nilai  $NTP < 100$  hanya petani dengan garapan sawah tadah hujan. Sedangkan untuk penggarap irigasi teknis memiliki nilai tukar ( $NTP$ )  $> 100$ . Ini mengindikasikan bahwa  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit, ini dikarenakan memang pendapatannya rendah, karena produksinya relatif kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Hasil ini memberikan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar petaninya memiliki perbedaan antara pemilik sekaligus penggarap dengan penggarap saja atau pemilik saja. Untuk

pemilik sekaligus penggarap mendapatkan kesejahteraan lebih dibanding penggarap saja tau pemilik saja.

Hasil survei pendapatan di tingkat buruh tani lebih memprihatinkan dimana pendapatan bersihnya sebagai buruh tani selama setahun hanya sekitar Rp. 2.300.000 atau setara dengan Rp.198.000 sebulan.

#### **6.4 Hasil Penelitian Garis Batas Kemiskinan dan *Land Operation* Rumah Tangga Petani Padi**

Batasan pengertian Petani kecil dan petani miskin masih sulit dibedakan dan kabur dari beberapa ahli dan hasil penelitian tentang petani (Valders et al., 1979, Wharton 1969). Di Indonesia batasan petani kecil adalah petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 240 kg beras dan petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil 0,25 hektar di pulau jawa dan 0,50 hektar diluar pulau Jawa, petani yang kekurangan modal, tabungan terbatas dan pengetahuan yang kurang dinamik (BPLPP, 1979). Sedangkan batas pengertian petani miskin dengan batasan garis kemiskinan (GK) yaitu petani yang mengelola luas lahan 0,86 ha (BPLPP,2009). Untuk batasan pengeluaran dan konsumsi untuk standar hidup layak setara dengan 800 kg beras (Sayogyo, 2007, Sinukaban, 2009, Nizam, 2010). Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan garis batas kemiskinan (GBK) dengan tingkat pendapatan petani minimal **Rp 600.00/bulan**.

Dalam penelitian ini penulis memfokus pada standar garis kemiskinan petani padi dengan tingkat pendapatan sesuai dengan standar Biro Pusat Statistik.

Tabel 6.4 dibawah ini merupakan hasil tabulasi rata – rata luas lahan yang di kelola oleh rumah tangga petani padi miskin di wilayah sampel penelitian ini (Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap dan Pinrang) dapat di gambarkan pada tabel 6.1. dibawah ini :

Daerah	Land Operation RTPP Miskin		KET (Are)
	Milik Sendiri (Are)	Milik Orang Lain (Sakap/Bagi Hasil) Are	
Bone	6,30	44,83	
Soppeng	12,00	29,00	
Wajo	9,00	28,00	
Sidrap	14,05	24,99	
Pinrang	6,30	35,29	
	9,53 (0,095 ha)	32,42 (0,32 ha)	(41 are) 0,41 ha

Sumber : data diolah, 2013

Tabel 6.4. diatas menjelaskan bahwa rata – rata luas lahan yang dikelola oleh rumah tangga petani miskin di Sulawesi Selatan hanya seluas 0, 41 ha, mendekati hasil sensus pertanian secara nasional bahwa tahun 2013 rata – rata luas lahan yang digarap oleh rumah tangga petani padi miskin di bawah 0, 50 ha atau hanya berkisar 0,30 ha.

Tabel 6.4. analisis pendapatan ekonomi rumah tangga petani padi miskin dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Analisis Pendapatan Petani Padi Miskin**

No	Daerah/Kabupaten	Rata - Rata Luas lahan RTPPM		Rata-rata produksi (ton)		Standar luas Lahan Optimum		Rata - rata Kekurangan Luas Lahan utk keluar dari GK terhadap std luas lahan optimum		Rata - rata Pendapatan Rp.	
		Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Sawah Milik Sendiri	Lahan garapan milik org Lain	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil
1	BONE	5,03	35,77	0,25	1,84	0,958	1,92	0,908	1,56	7,120,000	3,560,000
2	SOPPENG	9,58	23,14	0,49	1,17	0,986	1,97	0,890	1,74	9,186,667	3,460,000
3	WAJO	7,31	22,34	0,39	1,16	0,904	1,81	0,833	1,59	3,876,364	3,817,465
4	SIDRAP	11,21	19,94	1,03	1,12	0,946	1,89	0,834	1,69	3,322,012	4,121,178
5	PINRANG	5,03	28,16	1,03	1,10	0,973	1,95	0,923	1,66	3,572,503	3,386,861
Rata-rata		7,63	25,87	0,64	1,28	0,95	1,91	0,88	1,65	5,415,509	3,669,101

No	Daerah/Kabupaten	Rata - Rata Luas lahan RTPPM		Rata-rata produksi (ton)		Standar Luas Lahan Optimum		Rata - rata Kekurangan Luas Lahan utk keluar dari GK (gatis kemiskinan per orang		Rata - rata Pendapatan Rp.	
		Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Sawah Milik Sendiri	Lahan garapan milik org Lain	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil
1	BONE	1,27	9,06	0,10	0,63	0,505	1,01	0,492	0,92	5,280,241	2,806,708
2	SOPPENG	2,42	5,86	0,16	0,40	0,552	1,10	0,528	1,05	3,433,654	1,996,718
3	WAJO	1,85	5,68	0,10	0,39	0,478	0,96	0,459	0,90	3,720,000	4,809,975
4	SIDRAP	2,84	5,05	0,27	0,42	0,196	0,39	0,168	0,34	3,658,988	7,120,000
5	PINRANG	1,27	7,13	0,39	0,10	0,203	0,41	0,191	0,34	3,706,962	6,490,667
Rata-rata		1,93	6,55	0,20	0,39	0,39	0,77	0,37	0,71	3,559,969	4,644,813

Berdasarkan hasil output perhitungan pada Tabel 6.4. di atas didapatkan informasi sebagai berikut :

1. Untuk tadah hujan, rata-rata luas lahan garapan petani untuk jenis milik sendiri dari adalah 0.076. Sedangkan luas garapan milik orang lain (sakap) sebesar 0.26 hektar. Standar luas lahan yang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar Lahan Optimum (z skore) adalah 0.95 ha/orang sehingga kekurangan luas garapan yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak bagi petani pemilik adalah 0.88 ha/orang untuk jenis milik sendiri sedangkan untuk garapan milik orang lain adalah 1.65 ha/orang.
2. Untuk pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan milik sendiri adalah sebesar Rp. 5.415.509 sehingga perbulannya hanya Rp. 451,292.42. pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan yang bukan milik sendiri adalah sebesar Rp. 3.669.101 sehingga perbulannya hanya Rp. 305,758.41. dengan menggunakan standar pengukuran GK pedesaan senilai 320 kg/kapita/tahun atau senilai Rp. 226.666,/kapita/tahun (harga beras Rp. 8500/kg) : (sayogyo, 1977, Asra, 1992) atau pendapatan sekitar Rp.144.680 kapita/th. Atau sebesar rata-rata keluarga) 4 orang sehingga diperoleh pendapatan petani hanya sekitar Rp. 36,170./petani . memang petani kita masih tergolong petani miskin.
3. Untuk sawah irigasi teknis, rata-rata luas lahan garapan petani untuk jenis milik sendiri dari adalah 0.019. Sedangkan luas garapan milik orang lain (sakap) sebesar 0.065 hektar. Standar luas lahanyang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar Lahan Optimum (z skore) adalah 0.387 Ha/orang sehingga kekurangan luas garapan yang dibutuhkan agar

terpenuhi kebutuhan hidup layak adalah 0.37 ha/orang untuk jenis milik sendiri sedangkan untuk garapan milik orang lain adalah 0.71 ha/orang.

4. Jika menggunakan standar KHL yaitu 0.860 Ha/orang, maka kekurangan luas garapan yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak adalah 0.841 Ha/orang untuk jenis milik sendiri sedangkan untuk garapan milik orang lain adalah 0.79 Ha/orang.
5. Untuk pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan milik sendiri adalah sebesar Rp. 3.559.969. pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan yang bukan milik sendiri adalah sebesar Rp. 4.4644.813 per sekali panen dan untuk irigasi teknis frekuensi panen mencapai 2 – 2.5 kali dalam setahun.

## BAB VI

### PEMBAHASAN

Di tengah semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan khususnya pangan yang beragam dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, regional maupun nasional, tampak mulai terjadi gejala-gejala kejenuhan dari peningkatan produktivitas pangan khususnya padi. Hal ini salah satu disebabkan karena semakin menyusutnya sumberdaya lahan sawah produktif yang cukup luas dari tahun ke tahun sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan dari lahan sawah ke bukan lahan sawah.

Sempitnya penguasaan lahan mengakibatkan penghasilan dari usahatani tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumahtangga petani, apalagi harga-harga barang konsumsi melambung tinggi tidak sebanding dengan kenaikan harga komoditas pertanian. Jadi keputusan produksi pada tanaman pangan seperti beras merupakan unit rumahtangga pertanian yang berperan ganda sebagai produsen dan konsumen.

Jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik (BPS), tampak jelas bahwa, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2011, meningkat menjadi 835.910 orang atau meningkat 0,31 persen dari Maret 2011. Meskipun peningkatannya relatif kecil, namun peningkatan tersebut telah memberi citra dan persepsi kurang baik bagi efektifitas penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peningkatan ini juga berpotensi memunculkan kesangsian atas berbagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah (Agussalim, 2012).

Jika angka kemiskinan di Sulawesi Selatan dikomparasikan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di



Sulawesi Selatan menempati urutan teratas, meskipun dari segi persentase menempati urutan kedua sesudah Sulawesi Utara. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dua kali lipat lebih besar dari Sulawesi Tengah dan empat kali lipat dari Sulawesi Utara dan Gorontalo. Namun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan hanya setengah dari Gorontalo, dimana Gorontalo merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi. (Agussalim, 2012).

Dalam penanggulangan kemiskinan, jalan pengembangan yang harus ditempuh perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: (a) rasionalisasi dan optimasi pemanfaatan sumber daya dalam pengembangan dan peningkatan produksi; (b) peningkatan produktivitas melalui perubahan cara pandang (mind set) petani terhadap palawija dengan reorientasi sebagai komoditas komersial; (c) peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk (agroindustri) dengan mengintegrasikan usaha produksi - pengolahan - dan pemasaran; (d) implementasi pendekatan partisipatif terhadap rantai pasar sebagai model pembelajaran 'learning by doing' antara petani - penyuluh - peneliti untuk membantu petani menjadi pengusaha - pengolah - pelaku pemasaran produk pertanian. (Rasusastra, dkk, 2007). Tingkat rasional petani diukur berdasarkan 8 variabel, yakni: (1) penggunaan pupuk (Urea, TSP, dan KCI), (2) tenaga kerja dalam keluarga (TKDK), (3) tenaga kerja keluarga yang bekerja di luar usahatani, (4) Tenaga kerja luar keluarga (TKLK), (5) intensitas penyuluhan, (6) modal, (7) produksi padi, dan (8) pendapatan rumahtangga tani. (Antara, 2004).

Pertanian provinsi Sulawesi Selatan adalah pertanian tropika karena sebagian besar wilayah di kabupaten berada di daerah tropis. Salah

satu komoditas utama tanaman pangan di Sulawesi Selatan adalah padi dimana hasil produksinya masih menjadi bahan makanan pokok.

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukimo (2000), pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. Soekartawi (2002), menyatakan penerimaan adalah hasil kali antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Mubyarto (1995); Pangandaheng (2012), menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan.

Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan perjam yang diterima.

Pada penelitian ini dibuat 2 model topologi sawah dengan 3 cara sistem pendapatan. Model 1 adalah topologi sawah dengan irigasi teknis, model 2 adalah topologi sawah dengan tadah hujan sedangkan sistem pendapatannya adalah petani pemilik dan penggarap, petani pemilik tapi bukan penggarap dan buruh tani.

## 6.1 Pendapatan Usahatani Padi Sawah

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanam. Sementara pendapatan merupakan pemasukan bagi petani responden untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata - rata pendapatan usaha tani padi di lima Kabupaten di Sulawesi Selatan berturut - turut adalah Rp.19.520.000, Rp.19.040.000, Rp. 20.000.000, Rp. 19.712.000 dan Rp.19.520.000 ha-1 tahun-1 atau rata - rata Rp.19.558.400 ha-1 tahun-1. Perbedaan pendapatan tampak disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah produksi per hektar dan biaya tenaga kerja di masing masing kabupaten. Hasil produksi rata - rata tertinggi berada di Kabupaten Wajo dengan nilai produksi sampai 6.25 ton per ha, sedangkan terendah berada di Kabupaten Soppeng dengan nilai produksi rata - rata hanya 5.95 ton per ha.

Adapun biaya produksi tertinggi rata-rata berada di kabupaten Soppeng sebesar Rp. 9.400.000, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Wajo dengan besaran Rp. 9.120.000. Nilai R/C tertinggi rata-rata berada di Kabupaten Wajo dengan nilai 2.2, disusul empat kabupaten lainnya yaitu Bone, Sidrap dan Pinrang dengan nilai 2.1 sedangkan terendah berada di Kabupaten Soppeng dengan nilai 2.0. Nilai R/C lebih dari 1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan usaha tani lebih besar dari biaya yang dikeluarkan atau memperoleh keuntungan sehingga layak untuk diusahakan. Perbedaan pendapatan dan nilai R/C antar lokasi terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat produktivitas, nilai penerimaan dan biaya usaha tani.

Luas lahan sawah memegang peranan sangat penting dalam sistem penyediaan beras, terutama di wilayah SulSel yang sebagian besar beriklim

kering. Luas panen juga dipengaruhi oleh Indeks Pertanaman (IP) padi. Akan tetapi perluasan areal panen padi melalui peningkatan IP menghadapi kendala ketersediaan air dan rendahnya tingkat pendapatan.

Keterbatasan luas lahan sawah dan terkendalanya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi pada lahan sawah beririgasi teknis dan tadah hujan menjadi kendala utama pencapaian target produksi di wilayah beriklim kering, sehingga kebutuhan konsumsi seringkali harus dipenuhi dari impor. Hal senada juga dikemukakan oleh Sumaryanto (2009), bahwa salah satu faktor penyebab masih terjadinya impor beras Indonesia adalah karena luas lahan garapan usaha tani padi sawah tergolong sempit.

## 6.2 Pembahasan Luas Lahan Minimum

Sumberdaya lahan keberadaannya tidak kalah penting dengan sumberdaya lainnya. Sumberdaya lahan merupakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari lahan untuk menopang kegiatan dan kehidupan manusia. Pemanfaatan sumberdaya lahan ini dapat dilihat dari segi penggunaan lahan yang dilakukan. Penggunaan lahan diartikan sebagai setiap bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil dan spirituil (Arsyad, 1989).

Dari lima kabupaten yang dijadikan sampel untuk jenis pemilik dan penggarap irigasi teknis tertinggi berada di Kabupaten Soppeng dengan nilai 0.55 sedangkan terendah berada di Kabupaten Sidrap dan Pinrang yaitu sebesar 0.20. Hasil ini memberikan interpretasi bahwa batas minimum petani sawah padi dengan irigasi teknis agar dapat hidup layak adalah 0.55 hektar.

Kabupaten Soppeng mendapatkan nilai z skor 0.55 dikarenakan memiliki rata-rata nilai produksi paling minimum dari empat kabupaten lainnya yaitu

sebesar 6.8 ton persekali panen itupun frekuensinya hanya sekali dalam setahun. Adapun penyebab nilai produksi dibawah dari kabupaten lainnya adalah karena irigasi yang ada hanya mampu melayani sampai pada dua kecamatan yaitu kecamatan Takkalala dan Marioriwawo, untuk lima kecamatan lainnya belum mampu terlayani dengan baik sehingga masih mengandalkan hujan sebagai sumber air bagi sawah.

Pada daerah Sidrap dan Pinrang dengan nilai z skor terendah adalah karena memiliki frekuensi panen melebihi kabupaten lainnya yaitu 2.5 kali dengan kapasitas produksi yang hampir sama persekali panen yaitu sekitar 7 ton. Karena kemampuan frekuensi panen di dua kabupaten ini (Sidrap dan Pinrang) mencapai 2.5 kali sehingga dalam setahun hasil produksi beras mencapai rata-rata 17 – 18 ton atau sekitar Rp. 57.000.000 an.

Untuk jenis sawah tadah hujan, terendah berada di 0.90 yaitu di kabupaten Wajo dan tertinggi 0.99 yang berada di Kabupaten Soppeng. Hasil ini memberikan interpretasi bahwa luas lahan minimum yang harus dikerjakan oleh petani penggarap sekaligus pemilik agar hidup layak adalah 0.99 Ha per orang untuk jenis sawah tadah hujan. Kondisi ini berlaku hampir di semua kabupaten yang menjadi lokasi penelitian. Ini dikarenakan frekuensi panen untuk sawah tadah hujan hanya sekali dalam setahun.

Untuk jenis petani sebagai pemilik atau penggarap saja, nilai z score untuk semua kabupaten yang tertinggi berada di 1.10 yaitu di Kabupaten Soppeng dan terendah berada 0.39 di Kabupaten Sidrap khusus untuk sawah irigasi teknis. Sedangkan untuk sawah jenis tadah hujan tertinggi berada di 1.97 yaitu di Kabupaten Soppeng sedangkan terendah berada di 1.81 yaitu di Kabupaten Wajo. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan hidup

layak petani sawah padi yang menggarap sawah irigasi teknis bagi penggarap saja atau pemilik saja adalah 1.10. ha/orang sedangkan untuk tadah hujan minimum menggarap 1.97 ha/orang.

Faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar keluar dari kemiskinan dengan demikian adalah melalui peningkatan akses penguasaan lahan petani dan insentif berusaha tani melalui jaminan harga produk yang layak, jaminan pasar, kemudahan sarana produksi dengan harga yang layak menurut imbangan harga produk, serta pengembangan kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan yang mendukung kegiatan usahatani

### 6.3. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Keluarga petani padi dinyatakan hidup layak jika telah memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) meliputi pangan, papan, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi, kegiatan sosial dan tabungan. Menurut Sinukaban (2007), jumlah pendapatan bersih yang harus diperoleh keluarga tani untuk dapat hidup layak minimal setara beras 800 kg kapita<sup>-1</sup> tahun<sup>-1</sup> yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimal (KFM) 320 kg, kebutuhan kesehatan dan rekreasi 160 kg; kebutuhan pendidikan 160 kg, dan kebutuhan sosial, asuransi, dan lain-lain 160 kg. Hasil perhitungan KHL petani di Sulawesi Selatan, disajikan pada Tabel 6.1

Besarnya pendapatan usaha tani padi sawah berdasarkan hasil analisis tersebut apabila dihubungkan dengan rata-rata luas pemilikan lahan sawah saat ini menunjukkan bahwa lebih dari 95% petani tidak dapat memenuhi KHLnya, terdiri atas 85% petani pada lahan sawah irigasi teknis, dan seluruh petani pada lahan sawah tadah hujan.

Jika pendapatan usaha tani selain pendapatan dari pertanianpadi dimasukkan dalam perhitungan pendapatan usaha tani, maka jumlah pendapatan usaha tani akan bertambahmeningkat sehingga kontribusi pendapatan usaha tani terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) petani meningkat pula.

#### **6.4. Man Ekuivalen Unit Petani Padi Miskin**

Menurut Syukur (1988), waktu sebagai sumberdaya ekonomi rumah tangga petanidapat dialokasikan pada kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. kegiatan yang menghasilkan pendapatan 2. kegiatan yang tidak menghasilkan pendapatan, 3. santai (leisure) dan 4. waktu yang dicurahkan untuk mendapat ketrampilan.

Jumlah jam kerja yang dicurahkan pada suatu kegiatan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja pada kegiatan tersebut, artinya semakin tinggi produktivitas tenaga kerja mendorong orang untuk mencurahkan waktu kerja lebih lama. Namun dalam kenyataannya, perilaku pekerja dalam mengalokasikan waktu kerja tidak hanya dipengaruhi produktivitas tenaga kerja, tetapi dipengaruhi juga oleh peubah-peubah sosial ekonomi antara lain : struktur pasar tenaga kerja, ketersediaan kesempatan kerja, karakteristik demografi rumah tangga, tingkat keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan/pemilikan atas faktor - faktor produksi.

Sumaryanto (1988), mengemukakan bahwa curahan waktu kerja dari rumahtangga petani dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata dalam penawaran tenaga kerja ke usahatani padi dipengaruhi oleh luas lahan garapan, tingkat upah riil, pendapatan luar usaha tani, status garapan, faktor kelembagaan hubungan kerja dan kondisi agroekosistem. Sementara itu curahan waktu kerja rumah tangga ke sektor luar pertanian dipengaruhi oleh tingkat upah pada kegiatan luar pertanian, dan pendapatan bersih dari sektor pertanian.

Menurut Baruwadi (2008), Alokasi waktu kerja merupakan curahan waktu kerja oleh petani dan keluarga dalam kegiatan produktif pada sebuah usahatani, yaitu usahatani tahunan, usaha tani tanaman pangan, beternak, buruh tani dan kegiatan lain di luar sektor pertanian. Sedangkan menurut Chamdi (2004), dalam Mastuti (2009), alokasi waktu kerja adalah proporsi kerja yang dilakukan tenaga kerja baik untuk rumah tangga, sosial, maupun untuk urusan mencari nafkah, yang dianalisis melalui nilai waktu dan dihitung dengan melihat banyaknya waktu yang dicurahkan. Curahan waktu kerja pada usahatani padi menurut Fahmi (2009), merupakan jumlah jam kerja yang dicurahkan anggota rumah tangga pada usahatani padi. Curahan kerja pada usahatani padi dibagi menjadi curahan kerja suami dan curahan kerja istri. Curahan kerja suami pada usahatani padi dipengaruhi oleh curahan kerja suami pada non usahatani, tenaga kerja luar keluarga, luas lahan, dan pendidikan suami. Curahan kerja istri

pada usahatani padi dipengaruhi oleh curahan kerja istri pada non usahatani yang meliputi, tenaga kerja luar keluarga, luas lahan, jumlah anak balita. Alokasi waktu kerja untuk usahatani padi sawah berhubungan dengan kegiatan yang dimulai dari pengolahan tanah sampai panen. Jumlah alokasi waktu kerja yang dicurahkan pada setiap kegiatan pada usaha tani padi sawah maupun luar usaha tani padi sawah dapat dilakukan perbandingan dengan potensi tenaga kerja produktif yang tersedia pada setiap kepala keluarga. Waktu kerja itu sendiri berkaitan dengan tenaga kerja baik itu tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga.

Menurut Sitorus (2008), curahan tenaga kerja yang diberikan pada usahatani keluarga adalah curahan waktu untuk kegiatan penyemaian, persiapan lahan, penanaman, pengaturan air, pemeliharaan dan panen. Tahapan kegiatan bercocok tanam yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan produksi yang sesuai dengan harapan. Curahan tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dikatakan oleh Suratijah (2006), faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor alam yang meliputi curah hujan, iklim, kesuburan, jenis tanah, dan topografi. Faktor jenis lahan yang meliputi sawah, tegal, dan pekarangan, serta luas, letak dan penyebarannya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya perbedaan kesibukan tenaga kerja, misalnya yang terjadi pada usahatani lahan kering yang benar-benar hanya pada musim hujan. Sebaliknya pada musim kemarau akan mempunyai waktu luang sangat banyak karena

lahannya tidak dapat ditanami. Pada lahan sawah beririgasi, petani akan sibuk sepanjang tahun karena air bukan merupakan kendala bagi usahatannya. Pada dasarnya peningkatan tenaga kerja dapat dikategorikan dalam dua bentuk, pernyataan ini dikemukakan oleh Simanjuntak dalam Kaslan (1982), yaitu: 1. Intensitas tenaga kerja yang tidak mempengaruhi produksi, justru mengurangi hasil bersih. 2. Peningkatan intensitas penggunaan tenaga kerja yang sejajar dengan peningkatan produksi. Lamanya waktu kerja dipengaruhi oleh seseorang tersebut. Seseorang yang tidak dalam keadaan cacat atau sakit secara normal mempunyai kemampuan untuk bekerja. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keadaan iklim suatu tempat tertentu. Misalnya, wilayah tropis seperti Indonesia, untuk melakukan aktivitas lapangan seperti petani tidak dapat bertahan lama karena cuaca panas.

Pada penelitian ini total pendapatan yang diterima sebagai buruh tani atas penggarapan sawah adalah Rp. 2,377,778 /Ha persekali panen. Upah waktu adalah upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu kerja. Sistem upah waktu kerja ini cenderung membuat pekerja untuk memperlama waktu kerja dengan harapan mendapat upah yang semakin besar. Jika dikonversi biaya upah borongan ke upah sistem waktu maka rinciannya adalah sebagai berikut.

Umumnya lama kerja antara 8 – 12 jam perorang perhari, dan yang

membedakan antara lahan dibawah 1 Ha, 1 – 2 Ha dan lebih dari 2 Ha adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengolahan tersebut. Sehingga besarnya upah jika perjam adalah :

a. Untuk petani pemilik dan penggarap sekaligus, rata-rata pendapatan bersih untuk irigasi teknis di semua kabupaten adalah Rp.13,470,000/tahun atau sepadan dengan Rp. 36,904.11 HKO atau Rp. 4,613.01/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

Untuk tadah hujan rata-rata pendapatan bersih di semua kabupaten adalah Rp. 7,146,800 atau sepadan dengan Rp. 19,580.27 HKO atau Rp. 2,447.53/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari

b. Untuk petani pemilik saja atau penggarap saja, rata-rata pendapatan bersih untuk irigasi teknis di semua kabupaten adalah Rp. 6,735,000/tahun atau sepadan dengan Rp. 18,452.05 HKO atau Rp. 2,306/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

Untuk tadah hujan rata-rata pendapatan bersih di semua kabupaten adalah Rp. 3,593,333 atau sepadan dengan Rp. 9,844.75 HKO atau Rp. 1,230.59 /jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

c. Untuk buruh tani rata-rata pendapatan bersih di semua kabupaten adalah Rp. 2,377,778 /tahun atau sepadan dengan Rp. 6.514.HKO atau Rp. 814/jam dengan asumsi waktu kerja 8 jam perhari.

#### **6.5 Pembahasan Untuk Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah**

Berdasarkan hasil output pada penelitian ini tampak bahwa solusi feasible untuk memaksimalkan pendapatan petani padi sawah di Sulawesi

Selatan baik bagi petani irigasi teknis dan petani sawah tadah hujan adalah X1 sebesar 0.5549 dan X3 sebesar 0.494. Untuk irigasi teknis menggunakan formulasi tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 14.537.000 sedangkan untuk sawah tadah hujan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 7.666.000 berarti terjadi peningkatan dari pendapatan sebelumnya.

Hasil dari interpretasi tersebut memberikan interpretasi bahwa kabupaten yang masih bisa ditingkatkan kapasitas produksinya adalah Bone sebesar 0.5549 dan Wajo sebesar 0.494. Sedangkan kabupaten lainnya Soppeng, Sidrap dan Pinrang sudah mencapai kapasitas maksimum dan tidak bisa lagi ditingkatkan kapasitas produksinya.

Hal ini disebabkan karena potensi untuk pengembangan lahan sawah di Kabupaten Bone dan Wajo masih tersedia meskipun hanya sawah tadah hujan. Akan tetapi jika ditunjang dengan bendungan hasil yang diperoleh akan semakin besar.

Untuk efisiensi biaya usaha tani untuk topologi sawah tadah hujan, maka kabupaten yang masih bisa mendapatkan perlakuan efisiensi adalah daerah Wajo yaitu sebesar 0.9808 sehingga menghasilkan biaya usaha tani yang minimum di tingkat provinsi sebesar Rp. 8.494.615.

Untuk empat kabupaten lainnya selain kabupaten Wajo telah mencapai atau berada ditingkat efisiensi optimum sehingga tidak bisa lagi dilakukan efisiensi secara maksimal.

## 6.6 Pembahasan Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi

Tingkat kesejahteraan petani sering diukur dengan nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam prosentase). NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Menurunnya angka indeks NTP ini antara lain disebabkan petani tanggap terhadap perkembangan teknologi yang lebih cepat di bandingkan perkembangan harga sehingga perkembangan produksi meningkat cepat melebihi kemampuan "pasar" untuk menyerap.

Perubahan nilai tukar petani (NTP) dalam kenyataannya lebih merugikan daripada menguntungkan petani, artinya di dalam berusahatani, pendapatan yang diterima petani lebih kecil daripada biaya produksi atau perubahan rasio pendapatan di sektor pertanian terhadap pendapatan di sektor non-pertanian lebih sering negatif dari pada positif, oleh karena itu NTP ini mempunyai korelasi dengan kemiskinan.

Nilai tukar petani sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan petani karena apabila nilai tukar petani rendah maka petani tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi jika nilai tukar petani tersebut tinggi maka petani akan mengalami hal sebaliknya. Jadi tinggi rendahnya rasio (nilai tukar petani) sekaligus digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani, meskipun belum seluruhnya benar. Sebab



kesejahteraan petani bersifat kualitatif sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan ukuran kuantitatif.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan petani (khususnya padi sawah) secara utuh perlu dilihat sisi yang lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil secara rata-rata nilai tukar petani untuk pemilik dan penggarap, baik untuk irigasi teknis maupun tadah hujan berada di atas 100% untuk semua kabupaten. Ini memberikan indikasi bahwa nilai tukar petani (NTP) > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga masih dikategorikan sejahterah.

Untuk petani yang bekerja sebagai penggarap saja, terdapat 2 kabupaten yang memiliki nilai nilai tukar petani (NTP) < 100 yaitu Kabupaten Bone dan Soppeng, baik petani yang penggarap pada lahan sawah irigasi teknis maupun petani pada lahan sawah tadah hujan. Untuk kabupaten lain seperti Wajo, Sidrap dan Pinrang yang memiliki nilai NTP < 100 hanya petani dengan garapan sawah tadah hujan. Sedangkan untuk penggarap irigasi teknis memiliki nilai tukar (NTP) > 100. Ini mengindikasikan bahwa  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit, ini dikarenakan memang pendapatannya rendah, karena produksinya relatif kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Hasil ini memberikan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar petaninya memiliki perbedaan antara pemilik sekaligus penggarap dengan penggarap saja atau pemilik saja. Untuk pemilik sekaligus penggarap mendapatkan kesejahteraan lebih dibanding penggarap saja tau pemilik saja.

Hasil survei pendapatan di tingkat buruh tani lebih memprihatinkan dimana pendapatan bersihnya sebagai buruh tani selama setahun hanya sekitar Rp. 2.300.000 atau setara dengan Rp.198.000 sebulan.

Komoditas padi atau beras secara regional Sulawesi Selatan dan nasional merupakan komoditas strategis dengan jumlah rumahtangga petani padi paling dominan diantara komoditas pangan lain. Jumlah rumahtangga padi sekitar 65 persen dari total rumahtangga usahatani sehingga program dan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan petani padi juga berdampak terhadap rumahtangga umum.

Potensi kenaikan Keuntungan usahatani RTPP dapat berasal dari pengadopsian teknologi baru, perbaikan dan pengembangan sistem irigasi, dan tersedianya pupuk dengan harga terjangkau. Kenaikan produktivitas merupakan kunci utama untuk meningkatkan produksi. Peningkatan efisiensi dengan penggunaan input produksi yang lebih rasional dan penanganan pasca panen yang baik merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk peningkatan produksi dan menentukan biaya produksi dan pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan

usahatani. Kebijakan harga produk yang menarik dan stabil juga sangat penting dalam memperbaiki posisi tawar petani padi yang umumnya lemah.

Sumber penyebab utama kemiskinan penduduk pedesaan yang sebagian besar berpenghasilan utama sebagai petani adalah karena sebagian besar petani tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Jumlah petani kecil secara nasional menurut Sensus Pertanian 2003 mencapai 56,4 persen. Walaupun kebijakan tersebut telah diimplementasikan, namun terdapat faktor sumberdaya lahan khususnya lahan sawah yang dikelola petani terbatas dan sempit juga menjadi faktor penyebab keluarga petani banyak yang tergolong miskin.

Kurang berhasilnya Pemerintah dalam mengintroduksi usahatani padi tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di Negara lain terjadi. Faktor utama kesalahan dalam mengadopsi teknologi dan kebijakan dalam usahatani, dimana pemerintah menggunakan instrumen kebijakan yang didasarkan pada pengaruhnya dalam aspek produksi saja, tanpa memperhatikan aspek konsumsi rumah tangga petani. Padahal umumnya kegiatan usaha pertanian di negara berkembang dilakukan oleh petani secara **semi sub-sisten** yang memiliki ciri tidak terpisahnya antara kegiatan produksi dengan keputusan konsumsi rumah tangga petani, sehingga pendekatan yang tepat harus melalui perilaku ekonomi rumahtangga (Ellis, 1986). Kajian Briere (2001) di Republik Dominika

dengan menggunakan household model untuk mengetahui praktek rumah tangga dalam mengadopsi usaha tani, menemukan bahwa kebijakan subsidi konsumsi bahan pangan mampu membantu rumah tangga petani miskin untuk melakukan usaha taninya, oleh karena itu hasil temuan Briere (2001) ini sangat perlu untuk dikembangkan yaitu kebijakan subsidi konsumsi non pangan.

Berdasarkan kenyataan bahwa harga pangan di Indonesia sangat murah dan apabila dilakukan kebijakan subsidi pangan akan menjadi *dis-incentive* bagi petani untuk menaikkan produktivitas dan profit dari usaha taninya, dengan demikian maka adopsi teknologi usahatani padi dengan subsidi konsumsi non pangan (listrik, energy/BBM, pendidikan dan kesehatan) patut dipertimbangan sebagai instrumen kebijakan pemerintah karena konsumsi non pangan tersebut telah menjadi beban masyarakat pedesaan khususnya petani padi yang miskin.

Sedangkan Bardhan dan Quilky (1985) mengemukakan beberapa hasil penelitian menemukan implikasi kebijakan dari pembuatan model keputusan rumah tangga pertanian untuk petani padi di India ; penawaran dan permintaan modal diantara rumahtangga petani miskin (RTPPM) menemukan bahwa tingkat bunga berpengaruh terhadap jumlah pinjaman dan mempengaruhi utang rumah tangga petani.

Mencermati perilaku ekonomi rumahtangga petani padi Sulawesi Selatan adalah umumnya rasional, yaitu memaksimalkan kepuasan dengan sejumlah kendala, selanjutnya perilaku petani padi

secara agregat akan menurunkan fungsi permintaan rumahtangga. Alokasi sumberdaya ekonomi petani padi dikelompokkan dalam keputusan produksi, sedangkan penggunaan barang dan jasa dikelompokkan dalam keputusan konsumsi..

Pada aspek praktis, terdapat beberapa ide tentang kebijakan untuk menekan kemiskinan rumahtangga pertanian. Menurut Eskola (2004) bahwa perlu penerapakan kebijakan komersialisasi pertanian, Sedangkan de Janvry dan Sadoulet (1996) mengemukakan hasil kajiannya bahwa program transfer kekayaan masing-masing untuk mengurangi kemiskinan. Eskola (2004) menemukan bahwa pembangunan fasilitas pasar yang dekat dengan kegiatan pertanian serta kemudahan fasilitas petani untuk mengakses informasi pasar dapat meningkatkan derajat ekonomi dan komersialisasi rumahtangga pertanian. Partisipasi pasar akan terbuka lebar bagi petani, dan dengan cara demikian hambatan penjualan produk pertanian menjadi mengecil dimana pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga petani.

Pendapat dan hasil studi empiris diatas didasarkan pada analisa yang berbasis pada kerangka kerja ekonomi rumahtangga pertanian secara simultan. Kerangka kerja tersebut telah menjadi benchmark atau model dasar dalam menganalisis ekonomi rumahtangga (Becker (1965), Singh et al., (1986), Taylor dan Adelman (2002).

Dengan asumsi bahwa pendapatan total petani hanya dari usaha tani padi selama dua musim dalam setahun, maka agar petani dapat

dikatakan sejahtera atau keluar dari kemiskinan atau dengan kata lain pendapatan mereka setara atau diatas garis diatas kemiskinan BPS maka luasan lahan yang dibutuhkan per rumah tangga tani minimal seluas 0,65 hektar.

Kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat petani khususnya petani padi di Sulawesi Selatan selain akibat sempitnya lahan garapan sawahnya untuk bertanam padi, juga kemampuan bertani sumberdaya manusianya (tenaga kerja keluarga) yang masih rendah. Kenyataan ini terlihat sebagaimana yang dialami masyarakat petani padi di kawasan sentra produksi padi Bosowa Sipilu.

#### **6.7 Pembahasan *Land Operation* Petani Padi Miskin**

Batasan pengertian Petani kecil (peasant) dan petani miskin (poor farmer) agak rumit dibedakan dan masih kabur beberapa ahli dan beberapa hasil kajian tentang petani miskin (Valders et al., 1979, Wharton 1969). Batasan petani kecil di Indonesia yaitu petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 240 kg beras dan petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil 0,25 hektar di pulau Jawa dan 0,50 hektar diluar pulau Jawa, petani yang kekurangan modal, tabungan terbatas dan pengetahuan yang kurang dinamik (BPLPP, 1979). Sedangkan batas pengertian petani miskin dengan batasan garis kemiskinan (GK) yaitu petani yang mengelola luas lahan 0,86 ha (BPLPP, 2009). Untuk batasan pengeluaran dan konsumsi untuk standar hidup layak setara dengan 800 kg beras (Sayogyo, 2007, Sinukaban,

2009, Nizam, 2010). Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan garis batas kemiskinan (GBK) dengan tingkat pendapatan petani minimal **Rp 600.00/bulan**. Ini merupakan batas kemiskinan petani padi diperdesasaan.

Dalam penelitian ini penulis menfokus pada standar garis kemiskinan petani padi dengan tingkat pendapatan sesuai dengan standar Biro Pusat Statistik.

Tabel 6. diatas menjelaskan bahwa rata – rata luas lahan yang dikelola oleh rumah tangga petani miskin di Sulawesi Selatan hanya seluas 0, 41 ha, mendekati hasil sensus pertanian secara nasional bahwa tahun 2013 rata – rata luas lahan yang digarap oleh rumah tangga petani padi miskin di bawah 0, 50 ha atau hanya berkisar 0,30 ha.

#### **6.8. Kapasitas Produksi Padi dan Kebutuhan Konsumsi**

Kapasitas produksi padi dan kebutuhan konsumsi merupakan dua sisi yang utama menjadi determinan mengukur kemampuan ekonomi petani padi yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau (Syahyuti, 2006; Simatupang, 2007; UU No. 41 Tahun 2009).

Ketersediaan bahan pangan RT diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga dengan bertumpu pada

kemampuan produksi domestik melalui pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha tani, teknologi produksi, sarana dan prasarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Produksi padi dalam negeri menunjukkan seberapa besar produksi pangan menyumbang atau dapat memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Tingkat produksi padi domestik untuk memenuhi kebutuhan pangan, sangat tergantung pada kapasitas produksi padi. Kapasitas produksi padi sawah diproyeksikan dari luas baku sawah, produktivitas dan indeks pertanaman padi. Ukuran utama produksi padi domestik adalah luas panen dan produktivitas. Sebaliknya, kebutuhan pangan dapat diukur dari penjumlahan antara kebutuhan konsumsi penduduk, kebutuhan agroindustri, stock/cadangan pemerintah, penggunaan bibit dan kebutuhan untuk ekspor atau transfer ke wilayah lain (Rachman *et al.*, 2004; Badan Litbang Pertanian, 2005, Nazam, 2010).

Produksi padi di Sulawesi Selatan sebagian besar atau lebih dari 92 persen (92%) bersumber dari produksi padi sawah baik irigasi teknis maupun tadah hujan sehingga dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada sistem produksi padi sawah yang mempengaruhi lebih 92% produksi padi Sulawesi Selatan. Luas baku sawah sangat

dimanis, dipengaruhi oleh laju perluasan ( pencetakan sawah baru) dan laju konversinya (perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian Laju pencetakan sawah baru tergantung dari ketersediaan dana pemerintah dan potensi lahan yang tersedia, sedangkan laju konversi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan dan perkembangan industri dan infrastruktur. Produktivitas lahan dipengaruhi oleh tingkat penerapan teknologi pengelolaan, seperti penggunaan varietas unggul, tingkat kesuburan lahan, kecukupan air dan pengelolaan organisme pengganggu, sedangkan indeks pertanaman padi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan usaha tani padi, ketersediaan jaringan irigasi dan air serta besarnya insentif yang diterima petani dari usaha tani padi bila dibandingkan dengan insentif dari usaha tani komoditas lainnya. Keputusan petani untuk beralih mengusahakan komoditas lain, banyak ditentukan oleh besaran insentif yang diterima dibandingkan faktor resikonya.

Perkiraan kebutuhan padi didasarkan pada jumlah penduduk, konsumsi kapita<sup>1</sup> tahun<sup>1</sup>, kebutuhan agroindustri, jumlah cadangan pemerintah, kebutuhan benih padi dan jumlah ekspor atau transfer. Kebutuhan konsumsi beras penduduk Indonesia rata-rata adalah sebesar 139,15 kg kapita<sup>1</sup>tahun<sup>1</sup> (Nainggolan, 2008, Firdaus *et al.*, 2008, BKP, 2009). Sedangkan kebutuhan agroindustri diperkirakan 23,5% dari kebutuhan konsumsi penduduk, cadangan/stock pemerintah 10% dari total kebutuhan konsumsi,

kebutuhan benih padi sawah 25-50 kg ha<sup>-1</sup> serta kebutuhan untuk ekspor atau transfer ke daerah lain yang terdekat. Kelebihan stock beras Sulawesi Selatan biasanya ditransfers atau diantar pulaukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras wilayah yang terdekat seperti Kalimantan, Ambon dan Papua serta Jakarta,

### **6.9. Pembahasan Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Padi Miskin**

Prospek sistem produksi padi sawah sangat ditentukan oleh keberhasilan memberdayakan petani skala kecil karena lebih dari 60% petani menguasai lahan sempit kurang dari 0,3 ha KK<sup>-1</sup>. Dengan kondisi seperti ini, petani hanya mampu menghasilkan output untuk sekedar dapat bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan fisik minimalnya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak minimalnya, diperlukan strategi peningkatan pendapatan petani yang dapat ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain:

#### **6.9.1. Peningkatan Efisiensi Usaha Tani**

Peningkatan efisiensi usaha tani dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu (1) optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dan (2) menekan kehilangan hasil. Meningkatkan efisiensi usaha tani melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dapat ditempuh melalui pengurangan penggunaa input yang berasal dari luar usaha tani (*off - farm resources*), seperti pupuk kimia, obat -

obatan dan mengoptimalkan pengelolaan dan input produksi dari dalam usaha tani (*on-farm resources*) dengan menerapkan sistem pertanian LEISA (*Low External Input and Sustainable Agricultura*). Dalam sistem ini input produksi seperti peningkatan pemanfaatan tenaga kerja keluarga, pergiriran varietas, pendauran ulang limbah pertanian, pemanfaatan pupuk organik dari sisa tanaman dan kotoran ternak. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik atau kompos selain dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga mampu menekan biaya produksi juga dapat memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas lahan.

Perbaikan teknologi panen dan pasca panen sangat penting untuk menekan kehilangan hasil akibat tercecer. Berdasarkan data BPS (1996) kehilangan hasil panen di Indonesia mencapai 20,42%, dengan rincian: kehilangan saat panen 9,5%, perontokan 4,8%, penggilingan 2,2%, pengeringan 2,1%, penyimpanan 1,6% dan pengangkutan 0,2%. Hasil penelitian Balai Besar Pasca Panen tahun 2006 menunjukkan angka kehilangan hasil pascapanen padi di lahan irigasi dan tadah hujan berkisar 10,93% - 13,04% (Anonim, 2006). Kehilangan hasil panen dapat ditekan melalui penerapan model pengelolaan tanaman padi terpadu (PTT), dapat menekan kehilangan hasil rata-rata 2,4% tahun<sup>-1</sup>. Sedangkan penerapan panen beregu dapat menekan kehilangan hasil panen

sekitar 13,1% - 18,6% menjadi 3,8% (Badan Litbang Pertanian, 2005a).

### 6.9.2. Pemberian Insentif dan Penguatan Kelembagaan

Kebijakan pemberian insentif dalam bentuk subsidi, bantuan langsung maupun skim kredit dengan bunga rendah sangat strategis untuk mengurangi beban petani dalam menekan biaya usaha tani. Disamping itu upaya meminimumkan biaya transaksi melalui penguatan kelembagaan tani (kelompok tani). Perubahan pendapatan petani dari berbagai kebijakan insentif memberikan dampak langsung pada kontribusi pendapatan petani terhadap KHLnya, memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah secara langsung memberpengaruhi besarnya kontribusi pendapatan usaha tani padi terhadap KHLnya. Jika subsidi pupuk dicabut, maka kontribusi pendapatan terhadap KHL akan menurun 13%. Jika bantuan benih disediakan pemerintah, maka kontribusi pendapatan terhadap KHL akan meningkat sekitar 3%. Selanjutnya apabila subsidi pupuk tetap dilanjutkan dan harga gabah dinaikkan 10%, maka kontribusi pendapatan terhadap KHL petani akan meningkat sebesar 16%. Kebijakan harga dasar (*floor price*) bertujuan meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani melalui jaminan harga gabah yang wajar. Pendekatan yang demikian juga ditempuh negara-negara lain, termasuk yang sudah maju.

Kebijakan dalam pemberdayaan pertanian skala kecil (gurem)

sangat membutuhkan adanya pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan yang kondusif untuk memperlancar arus distribusi, komunikasi, penyebaran informasi, dan akses pasar. Berbagai studi menyatakan bahwa kelemahan utama pertanian skala kecil adalah tingginya biaya transaksi "*transaction cost*" dalam pemasaran input dan produksi (output) pertanian padi khususnya. Peningkatan akses petani kecil (gurem) terhadap lembaga keuangan dan perbankan sangat diperlukan. Selama ini kapasitas petani kecil untuk melakukan inovasi maupun mengadopsi teknologi yang lebih maju sangat rendah disebabkan keterbatasan kemampuan modal. Kebijakan dan stigma kalangan perbankan komersial terhadap pertanian skala kecil sebagai unit usaha penuh risiko dan kurang layak sebagai nasabah penerima kredit harus diubah dan pemerintah memiliki kewajiban dan kepedulian menetapkan kebijakan dan program yang dapat mengubah kondisi tersebut sehingga kemiskinan petani secara cepat dan tepat dapat dikurangi. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dalam sistem produksi padi dapat dilakukan antara lain melalui penjualan hasil dalam bentuk beras bukan dalam bentuk gabah, seperti yang banyak dilakukan oleh petani di kabupaten Sidrap dan Pinrang. Petani juga dapat melakukan tunda jual, yakni tidak menjual gabah pada saat sedang panen raya untuk menjaga kestabilan harga, sehingga petani dapat memperoleh harga jual yang wajar dengan memanfaatkan resi gudang yang ada.

#### 6.10. Pembahasan kebutuhan Lahan Petani Padi Miskin

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata – rata luas lahan yang dikelola oleh rumah tangga petani miskin di Sulawesi Selatan hanya seluas 0, 41 ha, mendekati hasil sensus pertanian secara nasional bahwa tahun 2013 rata – rata luas lahan yang digarap oleh rumah tangga petani padi miskin di bawah 0, 50 ha atau hanya berkisar 0,30 ha.

Untuk tadah hujan, rata-rata luas lahan garapan petani untuk jenis milik sendiri dari adalah 0.076. Sedangkan luas garapan milik orang lain (sakap) sebesar 0.26 hektar. Standar luas lahan yang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar Lahan Optimum (z skore) adalah 0.95 ha/orang sehingga kekurangan luas garapan yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak bagi petani pemilik adalah 0.88 ha/orang untuk jenis milik sendiri sedangkan untuk garapan milik orang lain adalah 1.65 ha/orang.

Untuk pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan milik sendiri adalah sebesar Rp. 5.415.509 sehingga perbulannya hanya Rp. 451,292.42. pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan yang bukan milik sendiri adalah sebesar Rp. 3.669.101 sehingga perbulannya hanya Rp. 305,758.41. dengan menggunakan standar pengukuran GK pedesaan senilai 320 kg/kapita/tahun atau senilai Rp. 226.666,/kapita/tahun (harga beras Rp. 8500/kg) : (sayogyo, 1977, Asra, 1992) atau pendapatan sekitar Rp.144.680 kapita/th. Atau sebesar rata-rata keluarga) 4 orang sehingga diperoleh pendapatan petani hanya

padi untuk kabupaten Bone dan Wajo masih dapat ditingkatkan baik produksi maupun pendapatan petani padi dengan melakukan efisiensi dan ekstensifikasi. Sedangkan kabupaten lainnya Soppeng, Sidrap dan Pinrang sudah mencapai kapasitas maksimum dan tidak bisa lagi ditingkatkan kapasitas produksinya.

4. Untuk lahan sawah tadah hujan, rata-rata luas lahan garapan petani padi miskin untuk jenis milik sendiri adalah 0.095 Ha. Sedangkan luas garapan petani sawah milik orang lain (sakap/bagi hasil) sebesar 0.32 hektar. Standar luas lahan yang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar Lahan Optimum (Z skor) adalah 0.95 ha/orang sehingga kekurangan luas lahan garapan yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak adalah 0.858 ha/orang untuk jenis lahan sawah milik sendiri sedangkan untuk petani yang menggarap milik orang lain adalah 0.53 ha/orang.
5. Untuk petani sawah irigasi teknis, rata-rata luas lahan garapan petani untuk jenis milik sendiri adalah 0.095 ha. Sedangkan luas garapan milik orang lain (sakap) sebesar 0,32 hektar. Standar luas lahan yang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar lahan Optimum (z skor) adalah 0.387 ha/orang sehingga kekurangan luas garapan yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak adalah 0.291 ha/orang untuk jenis milik sendiri sedangkan untuk garapan milik orang lain adalah 0.07 ha/orang.

6. Untuk pendapatan bersih yang diperoleh dari petani yang menggarap lahan sawah milik sendiri mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Sedangkan pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil garapan dengan yang bukan milik sendiri adalah rendah sehingga tidak mampu memenuhi KHLnya sehingga perlu perluasan lahan yang digarapnya sehingga pendapatan petani dari usaha tani padi bertambah. Dengan menggunakan standar pengukuran Garis Kemiskinan (GK) KHL standar beras setara dengan harga beras prkg (Sayogyo, 1977; Asra, 1992; Nizam, 2011)
7. Penetapan luas lahan optimum dilakukan dengan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup layak minimal petani dan pendekatan produksi dan konsumsi padi untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum penduduk. Dalam implementasinya kedua pendekatan tersebut harus sinergis dan merupakan satu kesatuan sistem dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
8. Untuk petani padi miskin agar kapasitas produksi dapat mencapai kebutuhan hidup layak dibutuhkan penambahan luas lahan baik milik sendiri maupun milik orang lain yang di garap pada lahan sawah irigasi teknis maupun sawah tadah hujan.

## **7.2 Implikasi Teoritis dan Empiris Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu

## BAB. VII

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian, hipotesis penelitian serta hasil analisa data dan pembahasan hasil analisa, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Standar minimum luas lahan optimum (*Land Operation*) petani padi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak adalah untuk petani penggarap sekaligus pemilik agar hidup layak adalah 0.50 ha untuk jenis sawah irigasi teknis, sedangkan untuk sawah tadah hujan adalah sebesar 0.99 ha.

Untuk jenis petani sebagai pemilik saja atau penggarap saja, nilai z skor yaitu di 1.10 ha/orang untuk sawah irigasi teknis. Sedangkan untuk sawah jenis tadah hujan yaitu seluas 1.97 ha/orang.

2. Kontribusi pendapatan usaha tani terhadap kebutuhan hidup layak petani di Sulawesi Selatan tergantung dari jenis petani serta jenis garapan yang dikerjakan. Pendapatan usaha tani yang dapat memberikan kebutuhan hidup layak petani hanya pada jenis petani sekaligus penggarap dan pemilik saja atau penggarap saja berjenis irigasi teknis. Untuk pemilik saja atau penggarap saja berjenis tadah hujan mengalami defisit begitupula dengan buruh tani saja.
3. Berdasarkan hasil perhitungan *linear programming* dengan aplikasi POM for windows didapatkan kondisi kapasitas produksi usaha tani

padi untuk kabupaten Bone dan Wajo masih dapat ditingkatkan baik produksi maupun pendapatan petani padi dengan melakukan efisiensi dan ekstensifikasi. Sedangkan kabupaten lainnya Soppeng, Sidrap dan Pinrang sudah mencapai kapasitas maksimum dan tidak bisa lagi ditingkatkan kapasitas produksinya.

4. Untuk lahan sawah tadah hujan, rata-rata luas lahan garapan petani padi miskin untuk jenis milik sendiri adalah 0.095 ha. Sedangkan luas garapan petani sawah milik orang lain (sakap/bagi hasil) sebesar 0.32 hektar. Standar luas lahan yang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar Lahan Optimum (Z skor) adalah 0.95 ha/orang sehingga kekurangan luas lahan garapan petani padi yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak adalah 0.858 ha/orang untuk jenis lahan sawah milik sendiri sedangkan untuk petani yang menggarap milik orang lain adalah 0.53 ha/orang.
5. Untuk petani sawah irigasi teknis, rata-rata luas lahan garapan petani untuk jenis milik sendiri adalah 0.095 ha. Sedangkan luas garapan milik orang lain (sakap) sebesar 0,32 hektar. Standar luas lahan yang seharusnya di garap agar lepas dari kemiskinan untuk standar lahan Optimum (z skor) adalah 0.387 ha/orang sehingga kekurangan luas garapan yang dibutuhkan agar terpenuhi kebutuhan hidup layak adalah 0.291 ha/orang untuk jenis milik sendiri sedangkan untuk garapan milik orang lain adalah 0.07 ha/orang.

## **7.2 Implikasi Teoritis dan Empiris Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi sebagai sebuah temuan empirik dapat dideskripsikan sebagai berikut, Implikasi teori yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini bahwa untuk mendapatkan petani yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan layak minimumnya adalah dengan meningkatkan luas lahan yang digarapnya. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani tidak bisa disamaratakan untuk semua kabupaten, perlu diadakan perhitungan dan analisis tersendiri karena ada daerah yang saat kapasitas produksinya di tambah bahkan mengalami penurunan.

## **7.3 Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini belum memisahkan antara petani dengan jenis tanaman padi yang ditanam. Karena pendapatan petani berdasarkan jenis bibit yang digunakan pada akhirnya terdapat perbedaan harga . Untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memisahkan petani berdasarkan jenis bibit yang digunakan. Selain itu pada penelitian ini mumi pendapatan petani adalah dari hasil pertanian padi semata dan belum memasukkan pendapatan lain - lain selain pendapatan dari bertani padi. Padahal alasan kenapa petani yang berjenis buruh tani yang defisit anggaran masih bisa bertahan adalah karena masih ada kegiatan lain yang bisa dikerjakan sehingga mendapatkan pendapatan selain menjadi buruh tani.

#### 7.4 Saran

Adapun saran – saran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan peningkatan pendapatan petani secara berkesinambungan diperlukan upaya pemerintah untuk menyediakan biaya sarana tani yang murah, terjangkau, berkualitas sehingga terjadi penghematan dan peningkatan produksi.
2. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan harga output yang layak bagi petani padi.
3. Hasil penelitian ini perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi.
4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi pendapatan usaha tani berdasarkan pola tanam yang berlaku di setiap wilayah terhadap kebutuhan hidup layak petani di wilayah tersebut.
5. Terdapat beberapa variabel belum diakomodir pada penelitian ini seperti jenis padi, pekerjaan tambahan petani selain menjadi petani padi dan lain-lain bisa dijadikan pertimbangan dalam menganalisis rumah tangga petani sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel tersebut guna memperkaya khasanah keilmuan utamanya ilmu ekonomi.

#### 7.4. Rekomendasi dan Kebijakan

Dari hasil penelitian hal – hal yang direkomendasikan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi agar terpenuhi standar luas minimum dan petani padi keluar dari garis kemiskinan agar meningkatkan akses penguasaan lahan petani, insentifisasi berusaha tani melalui jaminan harga yang layak, jaminan pasar, sarana produksi dengan harga yang layak menurut imbangan harga produk (Padi/Beras) serta pengembangan kegiatan ekonomi pertanian padi di perdesaan yang mendukung usaha tani padi.
2. Agar kebijakan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan petani padi agar tepat sasaran, diperlukan data dan informasi terkini pendapatan petani padi (pendapatan padi dan non padi).
3. Dengan kondisi lahan yang sempit dan given serta sulit untuk ditingkatkan dalam jangka pendek karena membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang besar maka **kebijakan output (harga) padi/beras**, menjadi faktor penentu untuk meningkatkan pendapatan petani padi miskin.
- 5..Pemerintah harus segera menetapkan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan kawasan peruntukan pertanian harus ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan

mematuhi ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah ke non pertanian sesuai arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang juga harus didukung dengan peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisarwanto, T. dan Suyamto. 1997. *Penelitian Pengembangan Teknologi Produksi Kedelai*. Balitkabi. Departemen Pertanian. Malang.
- Adnyana, M.O. dan K. Kariyasa. 1997. *Pengalaman Penelitian Pengembangan Kedelai di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung*. Puslit-Sosek Pertanian Bogor.
- Agussalim, 2012. *Penanganan Kemiskinan di Sulawesi Selatan: Pendekatan dan Agenda Kebijakan*. Policy Paper. ini dibuat sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun dan mendesain kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- Algifari, 2003. *Statistik Induktif*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Amang, B., M.H. Sawit dan A. Rachman. 1996. *Ekonomi Kedelai di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
- Ambarsari, D.N. 2005. *Analisis Ekonomi Rumahtangga Petani Pekebun Kakao di Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ananto, E.E. 1990. *Simulasi Model untuk Mengevaluasi Penerapan Teknologi Mekanis pada Sistem Produksi Padi Sawah: Kasus di Kabupaten Krawang*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Anderson, G.K. 1994. *Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Industri Komoditi Kedelai di Indonesia*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Andriati. 2003. *Perilaku Rumahtangga Petani Padi Dalam Kegiatan Ekonomi di Jawa Barat*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Anwar, K. 2005. *Analisis Respon Produksi dan Konsumsi Pangan Rumahtangga Petani: Simulasi Perubahan Kebijakan Harga*. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Ariyanto, A. 2003. *Alokasi Waktu dan Ekonomi Rumahtangga Pekerja pada Sektor Industri Formal Berdasarkan Gender*. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Arsyad, D.M. dan M. Syam. 1998. *Kedelai: Sumber Pertumbuhan Produksi dan Teknik Budidaya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Bogor.
- Aryani, F. 1994. *Analisis Curahan Kerja dan Kontribusi Penerimaan Keluarga Nelayan dalam Kegiatan Ekonomi di Desa Pantai*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Askari, Hosein and J.T. Olinings (1976). *Agricultural Supply Response: A Survey 01 the Econometrics Evidence*. New York: Prager Publisher.
- Asmarantaka, R.W. 2006. *Analisis Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani di Tiga Desa Pangan dan Perkebunan di Provinsi Lampung*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Litbang Pertanian, 2003, " *Ekonomi Beras Indonesia*, badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian, 2012, " *Indikator Kesejahteraan Petani*, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Bappeda SulSel, " *Laporan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan*, Bappeda SulSel, Makassar.
- Bappeda Kabupaten Bone, 2012, *Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Bone*, Bappeda Bone. Wattlepone.
- Bapped kabupaten Bone, 2013, " *Laporan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone*, Bappeda Kab. Bone, Wattlepone.
- Bappeda Kabupaen Soppeng, 2013. " *Daya Saing Ekonomi Kabupaten Soppeng*, Bappeda Soppeng, Wattlepoppeng.
- Bappeda kabupaten Soppeng, 2013, : *Laporan tahunan penanggulangan Kemiskinan kabupaten Soppeng*, Bappeda Soppeng. Wattlepoppeng"

- Bappeda kabupaten Wajo, 2013 "Identifikasi dan Strategi Ketahanan Pangan Perdesaan di Kabupaten Wajo, Bappeda Wajo, Sengkang.
- Bappeda Kabupaten Sidrap, 2013 " Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Bappeda Sidrap, Pangkajene Sidrap.
- Bappeda kabupaten Sidrap , 2013, "Laporan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Sidrap, bappeda kabupaten Sidrap. Pangkajene Sidrap.
- Bappeda Kabupaten Pinrang, 2010 " Daya saing Produk Unggulan dan Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Pinrang. Bappeda, Pinrang.
- Bappeda kabupetan Pinrang, 2013 " Laporan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang, bappeda Kabupaten Pinrang. Pinrang.
- Bagi, F.S. and I.J. Singh. 1974. *A Microeconomic Model of Farm Decisions in an LDC: A Simultaneous Equation Approach. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology. The Ohio State University, Paper No 207, Columbus.*
- Bakir, L.H. 2007. *Kinerja Perusahaan Inti Rakyat Kelapa Sawit di Sumatera Selatan: Analisis Kemitraan dan Ekonomi Rumahtangga Petani.* Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Barnum, H.N. and L. Squire. 1979. *An Econometric Application of The Theory of The Farm Household.* Journal of Development Economics, No. 6. 1979.
- Barnum, H.W. and L. Squire. 1978. *An Econometric Application of the Theory of the Farm Household.* Journal of Development Economics. 6 (1): 79-102.
- Barry, P.J. 1994. *Financial Management of Family Farms: Modeling and Empirical Research.* In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics.* Elsevier Science BV, Amsterdam.
- Barthez, A. 1994. *Family Business Relationships in Agriculture: The Double Game.* In: Caillavet, F, H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics.* Elsevier Science BV, Amsterdam.

- Basit. A. 1995. *Analisis Ekonomi Penerapan Teknologi Usahatani Konservasi pada Lahan Kering Berlereng di Wilayah Hulu DAS Jratunseluna, Jawa Tengah*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Bateman, M.J., "Aggregate and Regional Supply Function for Ghanaian Cocoa 1946- 1962", *Journal of African Economics*, 47 (1965), pp. 384-401.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2013 " Sulawesi Selatan dalam Angka, BPS Sulawesi Selatan. Makassar.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2012 " Sulawesi Selatan dalam Angka, BPS Sulawesi Selatan. Makassar.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2011 " Sulawesi Selatan dalam Angka, BPS Sulawesi Selatan. Makassar.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2013 " Statistik Pertanian" Jakarta.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2012 " Hasil Susenas tahun 2012" Jakarta.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2008 " Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007" Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2013 " Kabupaten Bone dalam Angka, BPS kab. Bone.Wattampone.
- Becker, G.S. 1965. *A Theory of the Allocation of Time*. *The Economic Journal*. 75 (2): 493-517.
- Becker, G.S. 1979. *The Economic Approach to Human Behavior*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Becker, H. 1994. *A Linear Programming Approach to the Subjective Equilibrium Theory of the Farm Household within Traditional Agricultural Societies in Mali*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifrán. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.
- Behrman JR., "Monopolistic Cocoa Pricing", *Journal of Farm Economics*, 47(1965) , pp. 702-719.
- Benjamin, C. and H. Guyomard. 1994. *Off-Farm Work Decisions of French Agricultural Households*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R.

- Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.
- Benu FL. 1996. Analisis Struktur Produksi, Konsumsi dan Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Tesis]. Bogor. Program Pasca Sarjana IPB. 161 hal.
- Bourguignon, F. and P.A. Chiappori. 1994. *Collective Models of Household Behavior*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.
- BPS, 2012, " Sulawesi Selatan dalam Angka, BPS, Makassar
- Braverman, A. and J.S. Hammer. 1986. *Multimarket Analysis of Agricultural Pricing Policies in Senegal*. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Brossollet, C. 1994. *Household's Rationality and Labour Decisions: A Strategic Rationality Approach*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.
- Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. 1994. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.
- Chavas, J.P, R. Petrie and M. Roth. 2005. *Farm Household Production Efficiency: Evidence from the Gambia*. *American Journal of Agricultural Economics*. 87 (1): 160-179.
- Chiappori, P.A. 1988. Rational Household Labor Supply. *Econometrica*, 56:63-89.
- Chiappori, P.A. 1992. Collective Labor Supply and Welfare. *Journal of Political Economy*, 100: 437-67.
- Corsi, A. 1994. *Imperfect Labour Markets, Preferences, and Minimum Income as Determinants of Pluriactivity Choices*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.

- Coyle, B.T. 1994. *Duality Approaches to the Specification of Agriculture Household Models*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifrán. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV, Amsterdam.
- Daris, E. 1993. *Analisis Penawaran dan Permintaan Kedele di Indonesia*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Deliarnov, 2003, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultur Prov. Sulawesi Selatan. 2013 " Laporan Perkembangan Produksi padi di Sulawesi Selatan, Makassar.
- Departemen Pertanian, 2012, *Rencana Strategis Departemen Pertanian 2009 – 2015*. Jakarta.
- Departemen / Kementerian Pertanian, 2013 " *Basis Data Pertanian 2007 - 2013* " Kementerian Pertanian, Jakarta
- Elistiawaty. 2005. *Ekonomi Rumahtangga Pengusaha Industri Kecil Tenun Sutura di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ellis, F. 1988. *Peasant Economics: Farm Household and Agrarian Development*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Evenson, R.E. 1978. *On the New Household Economics*. *Journal of Agricultural Economics and Development*. 17 (1): 87-107.
- Fariyanti, A. 2007. *Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Sayuran dalam Menghadapi Resiko Produksi dan Harga Produk di Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Gronau, R. 1980. *Leisure, Home Production and Work: The Theory of the Allocation of Time Revisited*. In: Binswanger, HP., RE. Evenson, CA. Florencio and BNF. White. *Rural Household Studies in Asia*. Singapore University Press, Singapore.
- Gujarati, D. 1979. *Ekonometrika Dasar*. McGraw-Hill.Inc., Singapore. Alih Bahasa Sumarno Zain. 1991. PT Glora Aksara Pratama.

- Haddad L. 1997. Intra-household Resource Allocation in Developing Countries: Models, Methods, and Policies. Food Policy Statement no. 24.
- Haddad, L., R. Kanbur and H. Bouis. 1994. *Intra-Household Inequity and Average Household Well-Being: Evidence on Calorie Intakes and Energy Expenditures from the Philippines*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV., Amsterdam.
- Hardaker, J.B., T.G. McAulay, M. Soedjono and C.K.G. Darkey. 1985. *A Model of Paddy Farming Household in Central Java*. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 21 (3): 30-50. Jakarta
- Haryono, D. 1991. *Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan pada Produksi Kedelai, Jagung, dan Ubikayu di Propinsi Lampung*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Heady, E.O. and J.L. Dillon. 1972. *Agricultural Production Function*. Iowa State University Press. Ames-Iowa.
- Henderson, J.M, and R.E. Quandt. 1980. *Microeconomic Theory: A Mathematical Approach*. McGraw-Hill Book Company, Singapore
- Hendratno, S. 2006. *Kompromi Kooperatif dan Alokasi Sumberdaya Intra Rumahtangga Petani Karet di Sumatera Selatan*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hill, B. 1994. *The Concept of the Agricultural Household and the Measurement of Household Income: Application in the Common Agricultural Policy*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV., Amsterdam.
- Iqbal, F. 1986. *The Demand and Supply of Funds among Agricultural Households in India*. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Irawan, B., 2009. *Konversi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Ketahanan Pangan dan Lingkungan*. <http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/wr276054.pdf>

- Jatileksono, T. 1986. *Equity Implication of Technology Changes and Government Policy in the Indonesian Rice Economy*. Ph.D. Dissertation. University of Philippines, Los Banos.
- Joesron dan Fathorrozi, 2003, *Teori Ekonomi Mikro*, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Kasryono, S, 1979. Analisis Linear Programming Sektor Pertanian di Indonesia. *Agro Ekonomika* Tahun 10
- Khimaidi, M. 1997. *Beras Sebagai Pangan Pokok Utama Bangsa Indonesia, Keunikan dan Tantangannya*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kuntjoro, S.U., N. Kusnadi dan Sayogyo. 1989. *Demand for Corn, Cassava and Soybean in Human Consumption: A Case Study of Java*. Indonesia. CGPRT-Centre, Bogor.
- Kuntjoro. 1983. *Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi: Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat*. Disertasi Doktor. Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kusnadi, N. 2005. *Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kuznets, S. 1964. *Economic Growth and Contribution of Agriculture*. In Eicher, C.K. and Witt, L.W. (eds). *Agriculture in Economic Development*. McGraw Hill. New York.
- Lambert, S. and T. Magnac. 1994. *Measurement of Implicit Prices of Family Labour in Agriculture: An Application to Cote D'Ivoire*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV., Amsterdam.
- Lifran, R. 1994. *Credit Constraints in a Life-Cycle Model with Self-Employment: Empirical Evidence for France*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV., Amsterdam.
- Lim Lin Shu, David (1975). *Supply Responses of Primary Produur*. Kuala Lumpur: Penerbit university Malaya.

- Lim, E. 1997. *Pola Kemitraan Menuju Swasembada Kedelai*. Jakarta: Argo Manunggal.
- Lipsey, R. 1993. *Pengantar Mikroekonomi*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Lopez, R.E. 1986. *Structural Models of the Farm Household that Allow for Interdependent Utility and Profit-Maximization Decisions*. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- LIPI P2E, 2012, "Pengurangan Kemiskinan dan ketahanan Pangan, LIPI. Jakarta.
- Mangkuprawira. S. 1985. *Alokasi Waktu dan Kontribusi Kerja Anggota Keluarga dalam Kegiatan Ekonomi Rumah tangga: Studi Kasus di Dua Tipe Desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Maipita, 2013. "Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad. S. 2002. *Ekonomi Rumah tangga Nelayan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Jawa Timur: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Muller, C. 1994. *The Role of Production Decisions in Modelling the Consumption Patterns of Rural Households*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV., Amsterdam.
- Mulyana, A. 1998. *Keragaan Penawaran dan Permintaan Beras Indonesia dan Prospek Swasembada Menuju Era Perdagangan Bebas: Suatu Analisis Simulasi*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nazam, M. 2010. "Penyusunan Model Untuk Penetapan Lahan Optimum Usaha Tani Padi sawah Wilayah Beriklim kering Mendukung Ketahanan pangan (Studi kasus provinsi Nusa Tenggara Barat), Disertasi Doktor, IPB. Bogor.
- Negoro, N.B. 2003. *Ekonomi Rumah tangga Pengusaha dan Pekerja Industri Kecil Gerabah di Sentra Industri Gerabah Kasongan*

- Kabupaten Bantul. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nicholson Walter, 1995. *Microeconomic Theory : Basic Principles and Extensions*. The Dryden Press. Hinsdale. Illionis.
- Nitisastro, Widjojo, 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia, Kumpulan Tulisan dan Uraian*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Nugraha, U.S., Y.R. Hidayat dan S. Kartaatmadja. 1997. *Sistem Perbenihan Kedelai Bebas Virus*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Nugroho, I dan R. Dahur, 2004, "Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan, LP3ES. Jakarta.
- Pakasi, C.B.D. 1998. *Ekonomi Rumahtangga dan Pengembangan Industri Kecil Alkohol Nira Aren di Kabupaten Minahasa*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Phimister, E. 1994. *The Impact of Inter-Generational Farm Asset Transfer Mechanisms: An Application of a Life-Cycle Model with Borrowing Constraints and Adjustment Costs*. In: Caillavet, F., H. Guyomard and R. Lifran. *Agricultural Household Modelling and Family Economics*. Elsevier Science BV., Amsterdam.
- Pitt, M.M. and M.R. Rosenzweig. 1986. *Agricultural Prices. Food Consumption. and the Health and Productivity of Indonesian Farmers*. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Pradhan, J. and J.J. Quilkey. 1985. *Some Policy Implications from Modelling Household / Farm Decisions for Rice Farmers in Orissa, India*. Australian Agricultural Economics Society. UNE-Armidale, NSW.
- Purwantini TB, Ariani M. 2008. *Pola Pengeluaran dan Konsumsi Pangan pada Rumah Tangga Petani Padi*. Makalah. Dalam: *Seminar Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi di Bogor*, 19 November 2008.
- Putong, I. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Edisi 2)*. Ghalia Indonesia, Jakarta



- Rachmina, D. 1994. Analisis Permintaan Kredit pada Industri Kecil: Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Reniaty. 1998. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Keterkaitan Keputusan Kerja, Produksi dan Pengeluaran Rumah tangga Nelayan. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Roe, T. and T.G. Tomasi. 1986. Yield Risk in a Dynamic Model of the Agricultural Household. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Sadoulet, E. and A. De Janvry. 1995. *Household Models in Quantitative Development Policy Analysis*. John Hopkins University Press, Baltimore.
- Saleh, Karim H.A., 2008., " Model – Model Ekonomi Mempertajam Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan. Makassar Bimer Press. Makassar.
- Salman, M. 1993. Analisis Ekonomi Komoditas Kapas Indonesia: Pendekatan Simulasi Kebijakan dengan Model Ekonometrika. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Salvatore, Dominick. 2001. *Managerial Economics dalam Perekonomian Global*. Erlangga, Jakarta.
- Sawit, M.H. 1993. *A Farm Household Model for Rural Household of West Java, Indonesia*. Ph.D. Dissertation. The University of Wollongong. Wollongong-NSW.
- Sawit, M.H. and D.T. O'Brien. 1991. *Applying Agricultural Household Theory to the Analysis of Income and Employment: A Preliminary Study for Rural Java*. The University of Wollongong, Wollongong-NSW.
- Schultz, T.P. 1999. *Women's Role in the Agricultural Household: Bargaining and Human Capital*. Paper No 803. Economic Growth Center, The Yale University, New Heaven.
- Sicular, T. 1986. Using a Farm-Household Model to Analyze Labor Allocation on a Chinese Collective Farm. In: Singh, I., L. Squire

- and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Singh, I., and J. Subramanian. 1986. *Agricultural Household Modeling in a Multicorp Environment: Case Studies in Korea and Nigeria*. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models : Extensions, Applications, and Policy*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Situmorang, MT. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan impor beras Indonesia*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Skoufias, E. 1994. *Seasonal Labor Utilition in Agriculture: Theory and Evidence from Agrarian Households in India*. *American Journal of Agricultural Economics*. 75 (1): 20-32.
- Smith, V.E. and J. Strauss. 1986. *Simulating the Rural Economy in a Subsistence Environment: Sierra-Leone*. In: Singh, I., L. Squire and J. Strauss. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Soekartawi. 1994. *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok bahasan Analisis Fungsi Produksi Cob-Dougllass*. Rajawali. Jakarta.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian (Teori dan Aplikasi)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonoda, T, and Y. Maruyama. 1999. *Effects of the Internal Wage on Output Supply: A Structural Estimation for Japanese Rice Farmers*. *American Journal of Agricultural Economics*. 81 (1): 131-143.
- Strauss, J. 1984. *Marketed Surpluses of Agricultural Households in Sierra-Leone*. *American Journal of Agricultural Economics*. 80 (2): 321-331.
- Sudaryanto, T.B. Rahman dan S. Bachri. 2000. *Arah Kebijakan Disttribusi/Perdagangan Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan: Aspek Perdagangan Luar Negeri*. Sinar Harapan, Jakarta.

- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarno, F. Dauphin, A. Rachim, N. Sunarlim, B. Santoso, Harnoto dan H. Kuntastyuti. 1989. *Analisis Kesenjangan Hasil Kedelai di Jawa*. Pusat Palawija, Bogor.
- Suryana, A., Mardianto, S dan M. Ikhsan. 2001. *Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional. Sebuah Pengantar. Dalam Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM FEUI, Jakarta
- Susetyanto. 1994. *Analisis Dampak Alternatif Kebijakan terhadap Produksi, Pendapatan, dan Konsumsi Rumahtangga Petani Kedelai di Kabupaten Subang, Jawa Barat*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tabor, S.R. 1988. *Supply of and Demand for Food Crops in Indonesia*. Department of Agriculture, Jakarta.
- Taylor, J.E. and I. Adelman. 2002. *Agricultural Household Models: Genesis, Evolution, and Extensions. Review of Economics of the Household*. University of California. Davis, California.
- Tomek, W.G. and K.L. Robinson. 1990. *Agricultural Product Prices*. Cornell University Press, Ithaca.
- Umar, Husein. 2004, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Weiss, J. H, 2010, " *Program Opertaion Management (POM) for windows, : Sofrware For Decision Science Quantitative Methode, Production and Operation Management*. IP. Download 12 Januari 2013.
- Yoo, K. and J. Giles. 2002. *Precautionary Behavior and Household Consumption and Savings Decisions: An Empirical Analysis Using Household Panel Data from Rural China*. The Michigan State University, Michigan.
- Yotopoulos, P.A. and L.J. Lau. 1974. *On Modelling the Agricultural Sector in Developing Economies: An Integrated Approach of Micro and Macro-economics*. *Journal of Development Economics*. 1 (1): 105-127.
- Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia)*, Grasindo, Jakarta.

## JURNAL – JURNAL

Alderman, Hoddinnott, Haddad, ... " Intrahousehold Resource Allocation in Development Country : Model, Methods and Policy. IFPRI, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

A.V. Chayanov., 1920., " The Theory of Household Utility Maximisation".

—————, 1966, " The Theory of the Peasant Economy, Irwin, Homewood, Illinois.

Bardhan, cs. 2006., " Wealth Inequality and Collective Action, Berkeley. University of California,

Bardhan, , 2007, " Land Reform and farm Productivity in West Bengal". University of California, Berkeley.

—————, 2003, Globalization and the Limits to Poverty Alleviation. University of California at Berkeley. USA

————— and Udry 1999 "Development Microeconomics, Oxford University Press. USA.

Barnum, 1979, " An Econometric Application Of the Theory Of The Farm Household, CRED University Michigan, Ann Arbor. USA.

Becker. Gary. B.A. (1965)., "Theory of the Allocation of Time ". Economics Journal. Vol. 76 no. 293. (Beckerber 1968), 491 – 517.

Besly, 1994, " How Do Market Failures Justify Interventions in Rural Credit Markets. World Bank. Oxford Journals,

Cattia, and Benoit, 2003... " Supply Response Within The Farming System Context : Farm Household Representative, CCIRAD. France.

Dwayne Benjamin, 1992, " Household Composition, labor Markets, and Labor Demand : Testing For Separation in Agriculture household models. *Economica*, 60.

Davis, 2009, Cross Country Comparison of Rural Income Generating Activities, Rome.

Doss, 1996, Testing among Models of Intrahousehold Resource Allocation, *World Development* Vol.24 No. 10 pp 1597 – 1609, 1996.

Hayami, and Marciano, 1978 : " Anatomy of Peasant Economy : Rice

- Village in the Philippines IRRI, Los Banos, Laguna, Phiphines.
- H.G.Jacoby. 2003. " Shadow Wages and Peasant family Labour Supply : an Econometrics Application to the Peruvian sierara : The review of Eoconomics Stuides, 71 (1) : 71 – 95.
- Kawamura dan Arsyad, 2009. " A Poverty Causal Model Of Cacao Smallholders in Indonesia : Some initial Finding From South Sulawesi, Ryukoku University, Kyoto. Jepang. Edition October.
- Omilola, 2009, ""Rural Non Farm Income and Inequality in Nigeria, IFPRI. September Sadoulet, and Janvry, 1995. "Quantitative Development Policy Analysis, " The Johns Hopkins University Press Baltimore and London.
- Ligon, 2011, " Notes on the Farm Household Model,
- Mat, Abu Bakar, nd Jalil, 2011, " Non Farm Income and Poverty in Kedah, Malaysia, IPER Vo; 10 2011. IACSIT Press Singapore.
- Munardi and Sundaya, 2011. "Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin Tanaman Pangan di Jawa Barat : Analisis dan Simulasi Kebijakan , Mimbar Vol. XXVII No. 1 Juni 2011.
- Makion, 2012, " Extending Becker's Time Allocation Theory Model Continous Time Blocks: Evidence From Daylight Saving Time, IZA, Bonn, Germany.
- Qaim and Babantude, 2007 "Poverty and Income Inequality in Rural Nigeria : The role of off Farm Income, University Illorin, PMB, Kwara, Nigeria.
- Russell L, Lamb, 2010., "inverse Productivity : Land Quality, labor Markets, and Measurement Error, Journal Of Agriculture Economics, 92 (5) : 1420 –1431,
- Sigh, L, Squire, and J. Starauss, 1986. " Agriculture Household Models; Axtensions, Applications and policy, John Hopkins University Press, Baltimore.
- Taylor, and Adelman, 2002, "Agriculture Household Models : Genesis, Evolution, and Extensions" University of California, Davis and Berkeley, Forthcoming in Review of Economics of the Household.

- Timmer, C Peter, 1988, " The Agricultural Transformation" Harvard University. USA.
- Wanda, 2009, " Production Risk and Input Use in Banana Production in Uganda, Makerere University.
- Wiro – Mattila, 1999. " Economic Theories of the Household : A Critical Review. Working Paper April 1999. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER) , Helsinki Canada.
- Wolff, 2012. "Extending Becker's Time Allocation Theory to Model Continuous Time Blocks : Evidence From Daylight Saving Time. University Washington. USA.
- Zhu, and Lou, 2001" Impact of non-farm on inequality and Poverty : the case of rural China.
- Zhu, Sadoulet, and Janvary, March 2005, "The Role Of Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequality in Cina., INRS – UCS, University of Quebec, Canada.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI UNTUK PENDAPATAN USAHA TANI PADI MISKIN

### I. Identitas Responden

1. Nama : .....
  2. Umur : tahun
  3. Jumlah Anggota keluarga : orang
  4. Jenis usahatani/Topologi : Irigasi Teknis/Tadah Hujan \*).
  5. Lama Bertani : tahun
  6. Jumlah Konsumsi Beras : ..... kg/bulan
  7. Alamat : - Kabupaten :  
- Kecamatan :  
- Desa :
- Status miskin : Penerima BLT/BLSM/Jamkesma/Keterangan Miskin \*)
8. No. HP. :

### II. Penggunaan Input Produksi

1. Lahan
  - a. Luas lahan : ha
  - b. Status Penguasaan : - Pemilik ( )  
- Pemilik dan penggarap ( )  
- Penyewa ( )  
- Penggarap ( )  
- Buruh Tani ( )
  - c. Sewa lahan : Rp /ha

### 2. Tenaga kerja

- |                    |      |     |
|--------------------|------|-----|
| a. Persiapan lahan | :Rp  | HOK |
| b. Penanaman       | :Rp  | HOK |
| c. Pemeliharaan    | :Rp. | HOK |
| d. Panen           | :Rp. | HOK |
| e. Pascapanen      | :Rp. | HOK |
| f. Upah            | :Rp. | HOK |

### 3. Benih

- a. Jumlah : kg
- b. Harga : Rp kg

### 4. Pupuk

- a. Urea : kg  
 Harga : Rp. /kg  
           : zak/kg
- b. ZA : /kg  
 Harga : Rp. Zak/kg
- c. TSP : /kg  
 Harga : kg
- d. KCL :Rp. /kg  
 Harga : zak/kg
- e. Pupuk Kandang : /kg  
 Harga : Rp.

### 5. Obat-obatan

- a. Pestidi : botol

	Harga		
b.	Herbisida	: Rp.	/botol
	Harga	:	boto/liter
c.	Lainnya	: Rp.	/litr
	Harga	:	zak/kg/unit/btl
6.	Peralatan-peralatan	: Rp.	.....
a.	Pacul	:	
	Harga	:	unit
b.	Linggis	:Rp.	/unit
	Harga	:	unit
c.	Parang/pisau	:Rp.	/unit
	Harga	:	unit
d.	Sabit	:Rp.	/unit
	Harga	:	unit
e.	Hand-Sprayer	:Rp.	/unit
	Harga	:	unit
f.	Lainnya	:Rp.	/unit
	Harga	:	unit
		:Rp.	/unit

III. Biaya-biaya Lain Dalam Kegiatan Usahatani padi

1.	Pajak Bumi dan Bangunan	: Rp.	
2.	Retribusi	: Rp.	
3.	Pungutan-pungutan	:	
a.	Resmi	: Rp.	
b.	Tidak resmi	: Rp.	
4.	Biaya Transportasi	: Rp.	/kg/kwtl/ton

IV. OUTPUT

1.	Jumlah produksi	: Rp.	/kg/kwtl/ton
2.	Produksi dijual kepada	(a) KUD	
		(b) Pedagang pengumpul	
		(c) Pedagang Besar	
		(d) Pasar Bebas	
3.	Harga	: Rp.	Kg/kwtl/ton
4.	Mengapa dijual kepada point ( ), bukan kepada yang lainnya :		
			.....

V. Catatan Lain :

..... 2013  
 Enumerator

\*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran : Frekwensi petani padi miskin responden pada Lima kabupaten

1. Kabupaten Bone

No	Klasifikasi Petani	Topoligi Sawah	
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan
1	Petani Pemilik Sekaligus Penggarap Lahannya	25	25
2	Pemilik Saja atau Penggarap Saja	27	25
3	Buruh Tani	25	25
Total			152

2. Kabupaten Soppeng

No	Klasifikasi Petani	Topoligi Sawah	
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan
1	Petani Pemilik Sekaligus Penggarap Lahannya	4	7
2	Pemilik Saja atau Penggarap Saja	4	12
3	Buruh Tani	21	-
Total			48

3. Kabupaten Wajo

No	Klasifikasi Petani	Topoligi Sawah	
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan
1	Petani Pemilik Sekaligus Penggarap Lahannya	8	8
2	Pemilik Saja atau Penggarap Saja	8	40
3	Buruh Tani	17	3
Total			87

#### 4. Kabupaten Sidrap

No	Klasifikasi Petani	Topoligi Sawah	
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan
1	Petani Pemilik Sekaligus Penggarap Lahannya	7	5
2	Pemilik Saja atau Penggarap Saja	9	15
3	Buruh Tani	6	10
Total			52

#### 5. Kabupaten Pinrang

No	Klasifikasi Petani	Topoligi Sawah	
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan
1	Petani Pemilik Sekaligus Penggarap Lahannya	3	-
2	Pemilik Saja atau Penggarap Saja	9	42
3	Buruh Tani	6	1
Total			61

65	Adnan B	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.526.400	3.834.108,11	3.642.292	19.980.000	4,9	2,35	8.091,8 92	3.794.054
66	Abd Wahab	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	6.758.400	4.545.729,73	2.212.670	14.080.000	4,4	2,11	9.470,2 70	2.304.865
67	Ranjani	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.372.800	4.784.234,23	2.578.566	15.360.000	4,8	2,30	9.987,9 88	2.685.006
68	Hasan	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.971.200	4.036.918,92	3.934.281	16.960.000	5,3	2,49	8.589,1 89	4.185.405
69	Hamma as	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.971.200	4.036.918,92	3.934.281	16.960.000	5,3	2,49	8.589,1 89	4.185.405
70	Bora	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.670.400	4.390.054,05	3.280.346	16.320.000	5,1	2,40	9.340,5 41	3.489.730
71	Kaco M	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.369.600	3.803.189,19	3.566.411	15.680.000	4,9	2,30	8.091,8 92	3.794.054
72	Paslar	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.369.600	3.803.189,19	3.566.411	15.680.000	4,9	2,30	8.091,8 92	3.794.054
73	Call	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.068.800	4.626.324,32	2.442.476	15.040.000	4,7	2,21	9.843,2 43	2.598.378
74	Hasri	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.520.000	3.862.562,56	3.657.437	16.000.000	5	2,35	8.218,2 18	3.890.891
75	Susa	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.820.800	4.462.647,65	3.358.152	16.640.000	5,2	2,44	9.494,9 95	3.572.503
76	Rahman	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.219.200	4.694.354,35	2.324.846	15.360.000	4,8	2,26	9.987,9 88	2.685.006
77	M Saleh	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.219.200	4.694.354,35	2.524.846	15.360.000	4,8	2,26	9.987,9 88	2.685.006
78	Burhan	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,47	7.971.200	4.036.918,92	3.934.281	16.960.000	5,3	2,49	8.589,1 89	4.185.405
79	Mustafa	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.987.200	4.557.597,60	3.429.602	16.640.000	5,2	2,50	9.494,9 95	3.572.503

80	Kasman	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.526.400	3.884.108,11	3.642.292	15.680.000	4,9	2,35	8.091,8 92	3.794.054
81	Sugiono	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.680.000	3.944.744,74	3.735.255	16.000.000	5	2,40	8.218,2 18	3.890.891
82	Sirajuddin	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.140.800	6.042.810,81	2.097.989	16.960.000	5,3	2,54	12.589, 189	2.185.405
83	Zainuddin	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
84	Syaripuddin	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	6.912.000	4.797.597,60	2.114.402	14.400.000	4,5	2,16	9.994,9 95	2.702.503
85	Masdar	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
86	M.Saling	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.987.200	4.557.597,60	3.429.602	16.640.000	5,2	2,50	9.494,9 95	3.572.503
87	Hamma Nu	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.833.600	4.483.459,46	3.350.141	16.320.000	5,1	2,45	9.340,5 41	3.489.730
88	Rahman	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.219.200	4.724.756,76	2.494.443	15.040.000	4,7	2,26	9.843,2 43	2.598.378
89	Syaripud	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.372.800	4.794.234,23	2.578.566	15.360.000	4,8	2,30	9.987,9 88	2.686.006
90	Syamsudd	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
91	A Baso Aqil Nasaruddin	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
92	A. Mursidah B	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
93	Abd. Malik	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	7.526.400	3.894.108,11	3.842.292	15.680.000	4,9	2,35	8.091,8 92	3.794.054
94	Abd. Raup	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,48	8.448.000	4.242.162,15	4.205.838	17.600.000	5,5	2,64	8.837,8 38	4.381.081

95	Abdul Aziz	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.140.800	4.122.810,81	4.017.989	16.960.000	5,3	2,54	8.589,1 89	4.185.405
96	Abdul Haris	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.987.200	4.557.597,60	3.429.602	16.640.000	5,2	2,50	9.494,9 95	3.572.503
97	Abdul Rahman Abdul Rahman Ganling	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.448.000	4.242.162,16	4.205.838	17.500.000	5,5	2,64	8.637,8 38	4.381.081
98		Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.140.800	4.122.810,81	4.017.989	16.960.000	5,3	2,54	8.589,1 89	4.185.405
99	Abdul Sukur	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.372.800	4.794.234,23	2.578.566	15.360.000	4,8	2,30	9.987,9 88	2.686.006
100	Abidin Laento	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.987.200	4.557.597,60	3.429.602	16.640.000	5,2	2,50	9.494,9 95	3.572.503
101	Abu Naim 5	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
102	Adnan	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.294.400	4.662.486,49	3.631.914	17.280.000	5,4	2,59	9.713,5 14	3.783.243
103	Allmuddin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.448.000	4.242.162,16	4.205.838	17.500.000	5,5	2,64	8.637,8 38	4.381.081
104	Aliyas	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.140.800	4.122.810,81	4.017.989	16.960.000	5,3	2,54	8.589,1 89	4.185.405
105	Alia Fajain	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.140.800	4.122.810,81	4.017.989	16.960.000	5,3	2,54	8.589,1 89	4.185.405
106	Ambo Tang	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.833.600	4.483.459,46	3.350.141	16.320.000	5,1	2,45	9.340,5 41	3.489.730
107	Ambo Upe	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	7.123.200	3.607.459,46	3.515.741	16.960.000	5,3	2,23	8.589,1 89	4.185.405
108	Amruddin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	6.585.600	3.398.594,59	3.187.005	15.680.000	4,9	2,06	8.091,8 92	3.794.054
109	Amrudi.	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	6.316.800	4.134.162,16	2.182.638	15.040.000	4,7	1,97	9.843,2 43	2.598.378

110	Andi Arpinas	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	7.123.200	3.607.459,45	3.515.741	16.960.000	5,3	2,23	8.589,1 89	4.185.405
111	Andi Bakti Tantu Andi Baso Maddukkelle ng A	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	6.585.600	3.398.594,59	3.187.005	15.680.000	4,9	2,06	8.091,8 92	3.794.054
112	Andi Dala T	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	6.854.400	3.923.027,03	2.931.373	16.320.000	5,1	2,14	9.340,5 41	3.489.730
113	Andi Farladi Zubair	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.372.800	4.794.234,23	2.578.566	15.360.000	4,8	2,30	9.987,9 88	2.606.006
114	Andi Nasmawati	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.526.400	3.884.108,11	3.642.292	15.680.000	4,9	2,35	8.091,8 92	3.794.054
115	Andi Tatta	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.987.200	4.072.744,74	3.914.455	16.640.000	5,2	2,50	8.484,8 85	4.077.558
116	Andi Tenri Angka	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	7.987.200	4.557.597,60	3.429.602	16.640.000	5,2	2,50	9.494,9 95	3.572.503
117	Andi Ganti	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,44	8.140.800	4.122.810,81	4.017.989	16.960.000	5,3	2,54	8.589,1 89	4.185.405
118	Andi Samuri Alle	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,44	7.462.400	3.779.243,24	3.683.157	16.960.000	5,3	2,33	8.589,1 89	4.185.405
119	Aniswardi	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,44	7.180.800	4.109.837,84	3.070.962	16.320.000	5,1	2,24	9.340,5 41	3.489.730
120	Aniswardi	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,44	7.462.400	3.779.243,24	3.683.157	16.960.000	5,3	2,33	8.589,1 89	4.185.405
121	Aniswari Syam	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,48	8.140.800	4.122.810,81	4.017.989	16.960.000	5,3	2,54	8.589,1 89	4.185.405
122	Arifin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,42	5.913.600	3.977.513,51	1.936.086	14.080.000	4,4	1,85	9.470,2 70	2.304.865
123	Arifuddin	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,06	5.913.600	573.729,84	5.339.870	22.080.000	6,9	0,41	9.562,1 64	12.517.836
124	Arzal Syam	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,06	5.913.600	552.000,00	5.361.600	23.680.000	7,4	0,44	9.200,0 00	14.480.000

125	Arshi Ismail	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,05	5.913.600	447.567,55	5.466.032	23.040.000	7,2	0,36	8.951,3	14.088.649
126	Asrullah	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,07	5.913.600	622.594,57	5.291.005	22.080.000	6,9	0,45	9.578,3	12.501.622
127	Asse	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,08	5.913.600	736.000,00	5.177.600	23.680.000	7,4	0,59	9.200,0	14.480.000
128	Baco Lolo	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,10	5.913.600	850.378,35	5.063.222	23.040.000	7,2	0,68	8.951,3	14.088.649
129	Baharuddin	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,06	5.913.600	578.443,20	5.335.157	21.440.000	6,7	0,42	9.329,7	12.110.271
130	Basir	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,08	5.913.600	706.162,16	5.207.438	22.720.000	7,1	0,57	8.827,0	13.892.973
131	Baso Alam	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,06	5.913.600	542.043,93	5.371.556	15.360.000	4,8	0,30	8.742,6	6.617.356
132	Darma	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	5.913.600	778.589,59	5.135.010	16.640.000	5,2	0,43	9.494,9	7.145.005
133	Darmawan	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,06	5.913.600	594.529,72	5.319.070	16.960.000	5,3	0,33	9.589,1	7.370.811
134	Dartono	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,06	5.913.600	563.697,24	5.349.903	15.680.000	4,9	0,30	9.091,8	6.588.109
135	Elyasman	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,07	5.913.600	653.817,80	5.259.762	16.320.000	5,1	0,36	9.340,5	6.979.460
136	Firman Abbas	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,07	5.913.600	663.941,88	5.248.658	16.640.000	5,2	0,36	9.484,8	7.155.116
137	Galatung	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	5.913.600	695.760,57	5.217.839	16.640.000	5,2	0,43	8.484,8	8.155.115
138	Gunur Mas'ud	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	5.913.600	765.924,36	5.147.676	16.320.000	5,1	0,42	9.340,5	6.979.459
139	H. M. Zaid Ahmad	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	469.135,14	5.504.465	15.680.000	4,9	0,22	9.091,8	6.588.108

140	Hadirman	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	431.513,51	5.482.086	16.960.000	5,3	0,24	9.589,1 89	7.370.811
141	Haeruddin	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	449.459,46	5.464.141	15.360.000	4,8	0,22	9.587,9 88	5.372.012
142	Hallilantar	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	426.819,83	5.486.780	16.540.000	5,2	0,23	9.484,8 85	7.155.115
143	Hamzah	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	449.459,46	5.464.141	15.360.000	4,8	0,22	9.987,9 88	5.372.012
144	Hasan	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,06	5.913.600	560.432,46	5.153.168	16.320.000	5,1	0,31	9.340,5 41	6.979.459
145	Hattase	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	431.513,51	5.482.086	16.960.000	5,3	0,24	9.589,1 89	7.370.811
146	Herman D	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	385.513,51	5.527.086	16.960.000	5,3	0,24	8.589,1 89	8.370.811
147	Idham	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	364.135,14	5.549.465	15.680.000	4,9	0,22	8.091,8 92	7.588.108
148	Mendra	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,06	5.913.600	553.093,08	5.360.507	16.000.000	5	0,30	9.218,2 18	6.781.782
149	Islamuddin	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	5.913.600	687.135,12	5.226.465	16.960.000	5,3	0,42	8.589,1 89	8.370.811
150	Kamarla	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	5.913.600	747.243,28	5.166.357	16.320.000	5,1	0,41	9.340,5 41	6.979.459
151	Kamarling	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	5.913.600	687.135,12	5.226.465	16.960.000	5,3	0,42	8.589,1 89	8.370.811
152	Karni	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,05	5.913.600	487.027,05	5.446.573	16.320.000	5,1	0,26	9.340,5 41	6.979.459

No	Nama	Status pekerjaan	Topologi	Luas garapan (ha)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) perluas garapan	Biaya usaha petani Perluas garapan	pendapatan bersih perluas garapan (net Income)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) untuk 1 Ha	Produksi per panan (ton/ha)	Produksi rill (ton)	Biaya usaha tani (ha)	pendapatan bersih (ha)
1	La Kati	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,30	1.865.400	-	1.865.400	6.218.000	6,8	2,04	-	6.218.000
2	M Idris	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,30	1.845.000	-	1.845.000	6.150.000	6,8	2,04	-	6.150.000
3	M. Ali	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,28	1.750.000	-	1.750.000	6.250.000	6,9	1,93	-	6.250.000
4	Mada Ali	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,28	1.722.000	-	1.722.000	6.150.000	7	1,96	-	6.150.000
5	Mahmud	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,28	1.713.572	-	1.713.572	6.119.900	6,8	1,90	-	6.119.900
6	Marhawa	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.743.347	-	1.743.347	6.011.540	6,4	1,86	-	6.011.540
7	Marwing	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.757.110	-	1.757.110	6.059.000	6,9	2,00	-	6.059.000
8	Marzuki	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.885.412	-	1.885.412	6.501.420	6,7	1,94	-	6.501.420
9	Mas'ati	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.986.500	-	1.986.500	6.850.000	6,5	1,89	-	6.850.000
10	Mas'huda Potorol	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,32	2.033.568	-	2.033.568	6.354.900	6,6	2,11	-	6.354.900
11	Masli	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.885.000	-	1.885.000	6.500.000	6,7	1,94	-	6.500.000
12	Muh Amir	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.827.000	-	1.827.000	6.300.000	6,7	1,94	-	6.300.000
13	Muh Nurman	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.740.000	-	1.740.000	6.000.000	6,6	1,91	-	6.000.000
14	Muh Rals	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,28	1.764.000	-	1.764.000	6.300.000	6,6	1,85	-	6.300.000
15	Muh Tahir	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.885.000	-	1.885.000	6.500.000	6,6	1,91	-	6.500.000
16	Muh. Arsyad Muh. Basri	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,31	1.984.000	-	1.984.000	6.400.000	6,7	2,08	-	6.400.000
17	Cinda	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.827.000	-	1.827.000	6.300.000	6,7	1,94	-	6.300.000

18	Muh. Kasim	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.914.000	-	1.914.000	6.600.000	6,7	1,94	-	5.600.000
19	Muh. Ridwan Rauf	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.856.000	-	1.856.000	6.400.000	6,7	1,94	-	6.400.000
20	Muh. Tamrin	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.856.000	-	1.856.000	6.400.000	7	2,03	-	6.400.000
21	Muh. Yunus Pannecce	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	1.885.000	-	1.885.000	6.500.000	7,3	2,12	-	6.500.000
22	Muhamad Hasbi Amin	Penggarap/pemilik s)	Irigasi Teknis	0,30	6.528.000	2.820.000	3.708.000	21.760.000	6,8	2,04	9.400.000	6.180.000
23	Muhamad Akhsan	Penggarap/pemilik s)	Irigasi Teknis	0,29	6.217.600	2.726.000	3.491.600	21.440.000	6,7	1,94	9.400.000	6.020.000
24	Muhamad Araf	Penggarap/pemilik s)	Irigasi Teknis	0,28	6.182.400	2.632.000	3.550.400	22.080.000	6,9	1,93	9.400.000	6.340.000
25	Muhamad Hamzah	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	4.300.800	2.598.639	1.702.161	15.360.000	4,8	1,34	9.280.852	3.039.574
26	Muhamad Sofyan	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	4.300.800	2.526.014	1.774.786	15.360.000	4,8	1,34	9.021.479	3.169.261
27	Tang	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	4.211.200	2.711.768	1.499.432	15.040.000	4,7	1,32	9.684.884	2.677.558
28	Muhamad Taufiq	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	4.300.800	2.703.368	1.597.432	15.360.000	4,8	1,34	9.654.884	2.852.558
29	Muhamad Yunus	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	5.017.600	2.676.455	2.341.145	17.920.000	5,6	1,57	9.558.767	4.180.617
30	Muhamadong	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	5.356.800	3.023.899	2.332.901	17.280.000	5,4	1,67	9.754.513	3.762.744
31	Muharimi	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,29	4.918.400	2.780.865	2.137.535	16.960.000	5,3	1,54	9.589.189	3.685.406
32	Muharram	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,29	4.918.400	2.490.865	2.427.535	16.960.000	5,3	1,54	8.589.189	4.185.406
33	Mukarramah	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,29	4.732.800	2.870.964	1.861.836	15.320.000	5,1	1,48	9.899.876	3.210.062
34	Mulladi	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	5.257.600	2.848.649	2.408.951	16.960.000	5,3	1,64	9.189.189	3.885.406
35	Mustajuddin	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	4.748.800	2.404.373	2.343.827	16.960.000	5,3	1,48	8.589.189	4.185.405
36	Mustatin	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	4.300.800	2.795.637	1.504.163	15.360.000	4,8	1,34	9.987.988	2.686.006
37	Nudi	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,12	2.496.000	1.127.351	1.368.649	20.800.000	6,5	0,78	9.394.595	11.405.405
38	Nurdin	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,13	2.912.000	1.246.595	1.665.405	22.400.000	7,0	0,91	9.589.189	12.810.811
39	Nurfa	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,11	2.428.800	944.811	1.483.989	22.080.000	6,9	0,76	8.589.189	13.490.811

40	Pacelahn Samude	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,11	2.393.600	944.811	1.448.789	21.760.000	6,8	0,75	8.589.189	13.170.811
41	Panguriseng	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,11	2.393.600	1.191.162	1.201.438	21.760.000	6,8	0,75	10.837.838	10.922.162
42	Rahman	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,11	2.076.800	1.042.071	1.034.729	18.880.000	5,9	0,65	9.473.377	9.406.623
43	Ramil Jum	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,09	1.497.600	854.550	643.050	16.640.000	5,2	0,47	9.494.995	7.145.005
44	Rukasmih	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,13	2.121.600	1.214.270	907.330	16.320.000	5,1	0,66	9.340.540	6.979.460
45	Rustan	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,12	1.035.200	1.150.703	884.497	16.960.000	5,3	0,64	9.589.189	7.370.811
46	Saharuddin	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,16	2.611.200	1.502.078	1.109.122	16.320.000	5,1	0,82	9.387.987	6.932.013
47	Sahlan	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	1.152.000	743.600	408.400	14.400.000	4,5	0,36	9.294.994	5.105.006
48	Suardi	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,16	2.355.200	1.475.027	880.173	14.720.000	4,6	0,74	9.218.918	5.501.082

No	Nama	Status pekerjaan	Topologi	Luas garapan (ha)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) perluas garapan	Biaya usaha tani Perluas garapan	pendapatan bersih perluas garapan (net income)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) untuk 1 Ha	Produksi per panen (ton/Ha)	Produksi rill (ton)	Biaya usaha tani (ha)	pendapatan bersih (ha)
1	Ambo Ups	Buruh tani	Tadah Hujan	0,23	1.326.066	-	1.326.066	5.765.504	7,4	1,70	-	5.765.504
2	La Gani	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.624.000	-	1.624.000	5.800.000	7,2	2,02	-	5.800.000
3	La Sulo	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.596.000	-	1.596.000	5.700.000	7,2	2,02	-	5.700.000
4	La Bolong	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.792.000	-	1.792.000	6.400.000	7	1,96	-	6.400.000
5	Sangaji	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.512.000	-	1.512.000	5.400.000	7,3	2,04	-	5.400.000
6	Mide	Buruh tani	Tadah Hujan	0,31	1.736.000	-	1.736.000	5.600.000	7,3	2,26	-	5.600.000
7	Pelaliol	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.827.000	-	1.827.000	6.300.000	7,1	2,06	-	6.300.000
8	La Sibe	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.885.000	-	1.885.000	6.500.000	7,1	2,06	-	6.500.000
9	La Sabbara	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	4,6	1,33	-	6.150.075
10	La Muise	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	5,3	1,84	-	3.075.038
11	Mustaring	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	5,2	1,51	-	3.075.038
12	Sulolipu	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,25	5.840.000	2.232.367	3.607.634	23.360.000	7,3	1,83	8.929.466	7.215.267
13	La Sudi	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	7.705.600	2.609.642	5.095.958	24.320.000	7,6	2,20	8.998.767	7.660.617
14	Yusuf	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	7.430.400	2.816.919	4.613.481	22.720.000	7,1	2,06	9.713.513	6.503.244
15	La Baco	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.953.600	2.780.865	4.172.735	23.040.000	7,2	2,09	9.589.189	6.725.406
16	La Palu	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.953.600	2.780.865	4.172.735	23.680.000	7,4	2,15	9.589.189	7.045.406
17	Ummareng	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.691.200	2.290.964	4.400.236	23.040.000	7,2	2,09	7.899.876	7.570.062
18	Ambo Mal	Penggarap/pemilik	Irigasi Teknis	0,30	7.292.800	2.643.970	4.648.830	23.360.000	7,3	2,19	8.813.233	7.273.383

19	Sedaruddin	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,29	8.140.800	2.490.865	5.649.935	24.320.000	7,6	2,20	8.589.189	7.865.405
20	Baso Sade	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,29	6.144.000	2.896.517	3.247.483	22.720.000	7,1	2,06	9.987.988	6.366.006
21	Baso Sarjan	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,28	7.462.400	2.404.973	5.057.427	23.040.000	7,2	2,02	8.589.189	7.225.405
22	A. Rahman	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,27	7.462.400	2.319.081	5.143.319	23.680.000	7,4	2,00	8.589.189	7.545.405
23	Mattawwape	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,28	7.971.200	2.404.973	5.566.227	23.040.000	7,2	2,02	8.589.189	7.225.405
24	Ambo Nure	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,24	7.292.800	2.061.405	5.231.395	16.960.000	5,3	1,27	8.589.189	4.185.405
25	Makkulawu	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,28	7.568.000	3.034.595	4.533.405	17.600.000	5,5	1,54	10.837.838	3.381.081
26	Ismail	Penggarap/pemilik s/	Irigasi Teknis	0,31	7.155.200	2.943.448	4.211.752	16.640.000	5,2	1,61	9.494.995	3.572.503
27	Maassungens	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,30	7.987.200	2.602.365	5.384.835	16.640.000	5,2	1,56	8.674.549	3.982.725
28	Abbate	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,29	7.833.600	2.708.757	5.124.843	16.320.000	5,1	1,48	9.340.541	3.489.730
29	Ambo Riu	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,29	8.140.800	2.780.865	5.359.935	16.960.000	5,3	1,54	9.589.189	3.685.405
30	Ambo Tang	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.372.800	2.768.636	4.604.164	15.360.000	4,8	1,34	9.887.987	2.736.007
31	Naling	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,27	5.760.000	2.482.648	3.277.352	14.400.000	4,5	1,22	9.194.994	2.602.503
32	Muhammading	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.055.600	2.526.297	4.540.303	14.720.000	4,6	1,29	9.018.918	2.850.541
33	Semrang	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.272.000	2.230.054	4.041.946	15.680.000	4,9	1,18	9.291.891	3.194.055
34	Umar	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.784.000	2.684.973	4.099.027	16.960.000	5,3	1,48	9.589.189	3.685.405
35	Iskandar	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,31	5.248.000	2.820.162	2.427.838	13.120.000	4,1	1,27	9.097.297	2.011.351
36	Saing	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.912.000	2.523.784	4.388.216	17.280.000	5,4	1,51	9.013.513	4.133.244
37	Lamba	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.656.000	2.278.799	4.377.201	16.640.000	5,2	1,25	9.494.995	3.572.503
38	Massul	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.016.000	2.756.108	3.259.892	15.040.000	4,7	1,32	9.843.243	2.598.378
39	Asse	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	5.504.000	2.617.986	2.886.014	13.760.000	4,3	1,20	9.349.950	2.205.025
40	Lammade	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	5.632.000	2.176.865	3.455.135	14.080.000	4,4	1,06	9.070.270	2.504.855

41	Ambo Mai	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	6.912.000	2.523.784	4.388.216	17.280.000	5,4	1,51	9.013.513	4.133.244
42	Kuraga	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,24	6.656.000	2.182.799	4.473.201	16.640.000	5,2	1,25	9.094.994	3.772.503
43	Madong	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	6.656.000	2.546.598	4.109.402	16.640.000	5,2	1,46	9.094.994	3.772.503
44	Ambo Sitti	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040.540	3.639.730
45	P. Senni	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,24	6.528.000	2.241.730	4.286.270	16.320.000	5,1	1,22	9.340.541	3.489.730
46	La Bandu	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040.540	3.639.730
47	La Sodding	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	6.528.000	2.169.730	4.358.270	16.320.000	5,1	1,22	9.040.540	3.639.730
48	La Nukung	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	7.526.400	2.517.729	5.008.671	15.680.000	4,9	1,37	8.991.891	3.364.055
49	La Upe	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	6.758.400	2.539.676	4.218.724	14.080.000	4,4	1,23	9.070.270	2.504.865
50	La Unde	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	7.372.800	2.181.117	5.191.683	15.360.000	4,8	1,15	9.087.987	3.136.007
51	La Caco	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	7.971.200	2.516.973	5.454.227	16.960.000	5,3	1,48	8.989.189	3.985.406
52	Dahlian	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	7.971.200	2.796.649	5.184.551	16.960.000	5,3	1,64	8.999.189	3.985.406
53	AmboE	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	7.670.400	2.802.567	4.867.833	16.320.000	5,1	1,58	9.040.540	3.639.730
54	La Usseng	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	7.369.600	2.508.485	4.861.114	15.680.000	4,9	1,52	8.091.892	3.794.054
55	Basri	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	7.369.600	2.508.486	4.861.114	15.680.000	4,9	1,52	8.091.892	3.794.054
56	Ude'E	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,31	7.369.600	2.508.486	4.861.114	15.680.000	4,9	1,52	8.091.892	3.794.054
57	Abbase	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,26	7.068.800	2.559.243	4.509.557	15.040.000	4,7	1,22	9.843.243	2.598.378
58	Baso S	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,26	7.520.000	2.136.737	5.383.263	16.000.000	5	1,30	8.218.218	3.890.891
59	Mangkonna	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,26	7.820.800	2.468.699	5.352.101	16.640.000	5,2	1,35	9.494.995	3.572.503
60	La Ramang	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,26	7.219.200	2.388.877	4.830.323	15.360.000	4,8	1,25	9.187.987	3.086.007
61	La Maddi	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,28	7.219.200	2.544.636	4.674.564	15.360.000	4,8	1,34	9.087.987	3.136.007
62	Serlan	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,30	7.971.200	2.576.757	5.394.443	16.960.000	5,3	1,59	8.989.189	4.185.405

63	Baso Alie	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,32	7.987.200	3.038.388	4.948.802	16.640.000	5,2	1,56	9.494.995	3.572.503
64	Arifin	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,25	7.526.400	2.022.973	5.503.427	15.680.000	4,9	1,23	8.091.892	3.794.054
65	Bandu	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,27	7.690.000	2.218.919	5.461.081	16.000.000	5	1,35	8.218.218	3.890.891
66	La Beddu	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,29	8.140.800	2.780.865	5.359.935	16.960.000	5,3	1,54	9.589.189	3.685.406
67	La Yani	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,27	8.294.400	2.672.649	5.671.751	17.280.000	5,4	1,46	9.713.514	3.783.243
68	Basari	Penggarap/pemilik s)	Tadah Hujan	0,25	6.912.000	2.498.749	4.413.251	14.400.000	4,5	1,13	9.994.995	2.202.503
69	Pauliangi	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,09	8.294.400	849.382	7.445.018	17.280.000	5,4	0,50	9.162.693	4.058.654
70	La Palla	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,10	7.987.200	949.499	7.037.701	16.640.000	5,2	0,52	9.494.995	3.572.503
71	Arifin	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,08	7.833.600	747.243	7.086.357	16.320.000	5,1	0,41	9.340.541	3.489.730
72	Summase	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,09	7.219.200	847.579	6.371.621	15.040.000	4,7	0,44	9.143.243	2.948.378
73	Agu	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,10	7.372.800	898.799	6.474.001	15.360.000	4,8	0,48	8.987.988	3.186.006
74	Antong	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,08	8.294.400	697.081	7.597.319	17.280.000	5,4	0,43	8.713.514	4.283.243
75	Paliwarukka	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,09	8.294.400	843.896	7.450.504	17.280.000	5,4	0,50	9.103.514	4.088.243
76	Baharuddin	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,10	8.294.400	901.351	7.393.049	17.280.000	5,4	0,54	9.013.514	4.133.243
77	Ambo Akka	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,09	7.526.400	742.282	6.764.118	15.680.000	4,9	0,45	8.223.103	3.728.448
78	Ambo Asse	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,10	8.448.000	883.784	7.564.216	17.600.000	5,5	0,55	8.837.838	4.381.081
79	Saini	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	8.140.800	687.135	7.453.665	16.960.000	5,3	0,42	8.589.189	4.185.405
80	La Tang	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,09	7.987.200	880.186	7.107.014	16.640.000	5,2	0,48	9.494.995	3.572.503
81	Nure	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,10	8.448.000	883.784	7.564.216	17.600.000	5,5	0,55	8.837.838	4.381.081
82	Muhammadong	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	8.140.800	687.135	7.453.665	16.960.000	5,3	0,42	8.589.189	4.185.405
83	Ujman	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,09	7.372.800	925.886	6.446.914	15.360.000	4,8	0,44	9.587.988	2.686.006
84	Genda	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,10	7.987.200	949.499	7.037.701	16.640.000	5,2	0,52	9.494.995	3.572.503

85	La Puris	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,08	8.294.400	777.081	7.517.319	17.280.000	5,4	0,43	9.713.514	3.783.243
86	La Poding	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,09	8.294.400	900.443	7.393.957	17.280.000	5,4	0,50	9.713.514	3.783.243
87	Ambo Tuwo	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,10	8.448.000	883.784	7.564.216	17.600.000	5,5	0,55	8.837.838	4.381.081

19	Tajuddin	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,29	8.140.800	2.490.865	5.649.935	23.680.000	7,4	2,15	8.589,1 89	7.545.405
20	Abide	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,29	6.144.000	2.896.517	3.247.483	23.360.000	7,3	2,12	9.987,9 88	6.586.006
21	P. Landu	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,28	7.462.400	2.404.973	5.057.427	23.360.000	7,3	2,04	8.589,1 89	7.385.405
22	Syamsuddin	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,27	7.462.400	2.319.081	5.143.319	24.000.000	7,5	2,03	8.589,1 89	7.705.405
23	Maknuring	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,28	7.971.200	2.404.973	5.566.227	23.040.000	7,2	2,02	8.589,1 89	7.225.405
24	Bakkareng	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,24	7.292.800	2.061.405	5.231.395	23.360.000	7,3	1,75	8.589,1 89	7.385.405
25	P. Remmaning	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,28	7.566.000	3.034.595	4.533.405	23.360.000	7,3	2,04	10.837, 838	6.261.081
26	Syahrudin	Penggarap/pe milik sj	Irigasi Teknis	0,31	7.155.200	2.943.448	4.211.752	23.360.000	7,3	2,26	9.494,9 95	6.932.503
27	Bazara	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,30	7.987.200	2.602.365	5.384.835	16.640.000	5,2	1,56	8.674,5 49	3.982.725
28	Ummareng	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,29	7.833.600	2.708.757	5.124.843	16.320.000	5,1	1,48	9.340,5 41	3.489.730
29	Abdul Aziz	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,29	8.140.800	2.780.865	5.359.935	16.960.000	5,3	1,54	9.589,1 89	3.665.406
30	La Dalle	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	7.372.800	2.768.636	4.604.164	15.360.000	4,8	1,34	9.887,9 87	2.796.007
31	Dafri	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,27	5.760.000	2.482.648	3.277.352	14.400.000	4,5	1,22	9.194,9 94	2.602.503
32	La Mai	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	7.965.600	2.525.297	4.540.303	14.720.000	4,6	1,29	9.018,9 18	2.850.541
33	La Tang	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,24	6.272.000	2.230.054	4.041.946	15.680.000	4,9	1,18	9.291,8 91	3.194.055



34	Thamrin	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	6.784.000	2.684.973	4.099.027	16.960.000	5,3	1,48	9.589,1 89	3.685.405
35	Ambo Upe	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,31	5.248.000	2.820.162	2.427.838	13.120.000	4,1	1,27	9.097,2 97	2.011.351
36	Sahibu	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	6.912.000	2.523.784	4.388.216	17.280.000	5,4	1,51	9.013,5 13	4.133.244
37	Wa' Laikki	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,24	6.656.000	2.278.799	4.377.201	16.640.000	5,2	1,25	9.494,9 95	3.572.503
38	Rasyid	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	6.016.000	2.756.108	3.259.892	15.040.000	4,7	1,32	9.843,2 43	2.598.378
39	P. Nawf	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	5.504.000	2.617.985	2.886.014	13.760.000	4,3	1,20	9.349,9 50	2.205.025
40	La Sakka	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,24	5.632.000	2.176.865	3.455.135	14.080.000	4,4	1,06	9.070,2 70	2.504.865
41	Hamide	Penggarap/pe milik sj	Tadah Hujan	0,28	6.912.000	2.523.784	4.388.216	17.280.000	5,4	1,51	9.013,5 13	4.133.244
42	P. Mannawi	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,24	6.656.000	2.182.799	4.473.201	16.640.000	5,2	1,25	9.094,9 94	3.772.503
43	Abdul kadir	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,28	6.656.000	2.546.598	4.109.402	16.640.000	5,2	1,46	9.094,9 94	3.772.503
44	Abdul Thalib	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040,5 40	3.639.730
45	A. Rahman	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,24	6.528.000	2.241.730	4.286.270	16.320.000	5,1	1,22	9.340,5 41	3.489.730
46	Ismail	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040,5 40	3.639.730
47	Bahanuddin	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040,5 40	3.639.730
48	Lahi	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,24	6.528.000	2.169.730	4.358.270	16.320.000	5,1	1,22	9.040,5 40	3.639.730

no	La Sahibu	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,28	7.526.400	2.517.729	5.008.671	33.680.000	4,9	1,27	6.993,23	3.344.000
50	Nasir	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,28	6.758.400	2.539.676	4.218.724	14.080.000	4,4	1,23	9.070,270	2.504.865
51	La Sumaryo	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,24	7.372.800	2.181.117	5.191.683	15.360.000	4,8	1,15	9.087,987	3.136.007
52	P. Ngulla	Pemilik & penggarap	Tadah Hujan	0,28	7.971.200	2.516.973	5.454.227	16.960.000	5,3	1,48	8.989,189	3.985.406

No	Nama	Status pekerjaan	Topologi	Luas garapan (ha)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) perluas garapan	Blaya usaha tani Perluas garapan	pendapatan bersih perluas garapan (net income)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) untuk 1 Ha	Produksi per panen (ton/ha)	Produksi rill (ton)	Blaya usaha tani (ha)	pendapatan bersih (ha)
1	Laseng	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	5,2	1,51	-	3.075.038
2	La Suki	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,25	5.840.000	2.232.367	3.607.634	23.360.000	7,3	1,83	8.929.466	7.215.267
3	Nurdin Langsa	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	7.705.600	2.609.642	5.095.958	24.320.000	7,6	2,20	8.998.767	7.660.617
4	La Miasse	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	7.430.400	2.816.919	4.613.481	22.720.000	7,1	2,06	9.713.513	6.503.244
5	Rusdi	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.953.600	2.780.865	4.172.735	23.040.000	7,2	2,09	9.589.189	6.725.406
6	La Tolleng	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.953.600	2.780.865	4.172.735	23.680.000	7,4	2,15	9.589.189	7.045.406
7	Parman	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.691.200	2.290.964	4.400.236	23.040.000	7,2	2,09	7.899.876	7.570.062
8	Aksan	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,30	7.292.800	2.643.970	4.648.830	23.360.000	7,3	2,19	8.813.233	7.273.383
9	M. Rusli	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,29	8.140.800	2.490.865	5.649.935	24.320.000	7,6	2,20	8.589.189	7.865.405
10	La Poddling	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,29	6.144.000	2.896.517	3.247.483	22.720.000	7,1	2,06	9.987.988	6.366.006
11	Arfin	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,28	7.462.400	2.404.973	5.057.427	23.040.000	7,2	2,02	8.589.189	7.545.405
12	M Tahang	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,27	7.462.400	2.319.081	5.143.319	23.680.000	7,4	2,00	8.589.189	7.545.405
13	P. Rodding	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,26	7.971.200	2.404.973	5.566.227	23.040.000	7,2	2,02	8.589.189	7.225.405
14	Samalla	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,24	7.292.800	2.061.405	5.231.395	16.960.000	5,3	1,27	8.589.189	4.185.405
15	La Riri	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,28	7.568.000	3.034.595	4.533.405	17.600.000	5,5	1,54	10.837.838	3.381.081
16	La Eja	Penggarap/pemilik sj	Irigasi Teknis	0,31	7.155.200	2.943.448	4.211.752	16.640.000	5,2	1,61	9.494.995	3.572.503
17	La Nawil	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,30	7.987.200	2.602.365	5.384.835	16.640.000	5,2	1,56	8.674.549	3.982.725
18	Raufong	Penggarap/pemilik sj	Tadah Hujan	0,29	7.833.600	2.708.757	5.124.843	16.320.000	5,1	1,48	9.340.541	3.489.730

19	Ammaninggi	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	8.140.800	2.780.865	5.359.935	16.960.000	5,3	1,34	9.589.189	3.685.406
20	La Summasse	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.372.800	2.768.636	4.604.164	15.360.000	4,8	1,34	9.887.987	2.736.007
21	Hamzah	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,27	5.760.000	2.482.648	3.277.352	14.400.000	4,5	1,22	9.194.994	2.602.508
22	Landuke	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.065.600	2.525.297	4.540.303	14.720.000	4,6	1,29	9.018.918	2.850.541
23	Abdu Majid	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.272.000	2.230.054	4.041.946	15.880.000	4,9	1,18	9.291.891	3.194.055
24	Thamrin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.784.000	2.694.973	4.099.027	16.960.000	5,3	1,48	9.589.189	3.685.405
25	Anhar	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,31	5.248.000	2.820.162	2.427.838	13.120.000	4,1	1,27	9.097.297	2.011.351
26	Sabarauddin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.912.000	2.523.784	4.388.216	17.280.000	5,4	1,51	9.013.513	4.133.244
27	Amliruddin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.656.000	2.278.799	4.377.201	16.640.000	5,2	1,25	9.494.995	3.572.503
28	La Slide	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.016.000	2.756.108	3.259.892	15.040.000	4,7	1,32	9.843.243	2.598.378
29	Syafri	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	5.504.000	2.617.986	2.886.014	13.760.000	4,3	1,20	9.349.950	2.205.025
30	Endeng	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	5.632.000	2.176.865	3.455.135	14.080.000	4,4	1,06	9.070.270	2.504.865
31	La Kasau	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.912.000	2.523.784	4.388.216	17.280.000	5,4	1,51	9.013.513	4.133.244
32	La Ilde	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.656.000	2.182.799	4.473.201	16.640.000	5,2	1,25	9.094.994	3.772.503
33	La Wawi	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.656.000	2.546.598	4.109.402	16.640.000	5,2	1,46	9.094.994	3.772.503
34	La Kasau	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040.540	3.639.730
35	La Mude	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.528.000	2.241.730	4.286.270	16.320.000	5,1	1,22	9.340.541	3.489.730
36	Bahrum	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040.540	3.639.730
37	La Miamung	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.528.000	2.531.351	3.996.649	16.320.000	5,1	1,43	9.040.540	3.639.730
38	Abdul Rahman	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	6.528.000	2.169.730	4.358.270	16.320.000	5,1	1,22	9.040.540	3.639.730
39	La Hari	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.526.400	2.517.729	5.008.671	15.680.000	4,9	1,37	8.991.891	3.344.055
40	Aeri	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	6.758.400	2.539.676	4.218.724	14.080.000	4,4	1,23	9.070.270	2.504.865

42	La Co	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,24	7.872.800	2.181.317	8.191.683	15.360.000	4,8	1,15	9.087.987	3.336.007
43	Wa Mensa	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.971.200	2.516.973	5.454.227	16.960.000	5,3	1,48	8.989.189	3.985.406
44	La Kamaruddin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,31	7.971.200	2.786.649	5.184.551	16.960.000	5,3	1,64	8.989.189	3.985.406
45	La Tadi	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,31	7.670.400	2.802.567	4.867.833	16.320.000	5,1	1,58	9.040.540	3.639.730
46	Eliang	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,31	7.369.600	2.508.486	4.861.114	15.680.000	4,9	1,52	8.091.892	3.794.054
47	Sise	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,31	7.369.600	2.508.486	4.861.114	15.680.000	4,9	1,52	8.091.892	3.794.054
48	La Dawi	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,26	7.068.800	2.559.243	4.509.557	15.040.000	4,7	1,22	9.843.243	2.598.378
49	La Sini	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,26	7.520.000	2.136.737	5.383.263	16.000.000	5	1,30	8.218.218	3.890.891
50	La Ungke	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,26	7.820.800	2.468.699	5.352.101	16.640.000	5,2	1,35	9.494.995	3.572.503
51	La Basri	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,26	7.219.200	2.388.877	4.830.323	15.360.000	4,8	1,25	9.187.987	3.085.007
52	La Baba	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,28	7.219.200	2.544.636	4.674.564	15.360.000	4,8	1,34	9.087.987	3.136.007
53	Kaharuddin	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,30	7.571.200	2.576.757	5.394.443	16.960.000	5,3	1,59	8.589.189	4.185.405
54	Karte Gani	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,32	7.987.200	3.038.398	4.948.802	16.640.000	5,2	1,66	9.494.995	3.572.503
55	Damma	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,25	7.526.400	2.022.973	5.503.427	15.680.000	4,9	1,23	8.091.892	3.794.054
56	AcinggE	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,27	7.680.000	2.218.919	5.461.081	16.000.000	5	1,35	8.218.218	3.890.891
57	M. Bakri	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,29	8.140.800	2.780.865	5.359.935	16.960.000	5,3	1,54	9.589.189	3.685.406
58	Anto	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,27	8.294.400	2.622.649	5.671.751	17.280.000	5,4	1,46	9.713.514	3.783.243
59	La Dulla	Penggarap/pemilik s/	Tadah Hujan	0,25	6.912.000	2.498.749	4.413.251	14.400.000	4,5	1,13	9.994.995	2.202.503
60	Lambasong	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,09	8.294.400	849.382	7.445.018	17.280.000	5,4	0,50	9.162.693	4.058.654
61	P. Azis R	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,10	7.987.200	949.499	7.037.701	16.640.000	5,2	0,52	9.494.995	3.572.503
62	La Siering	Pemilik & penggarap	Irigasi Teknis	0,08	7.833.600	747.243	7.086.357	16.320.000	5,1	0,41	9.340.541	3.489.730

No	Nama	Status pekerjaan	Topologi	Luas garapan (ha)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) perluas garapan	Biaya usaha tani Perluas garapan	pendapatan bersih perluas garapan (net income)	Pendapatan Kotor petani (Gross Profit) untuk 1 Ha	Produkasi per panen (ton/ha)	Produkasi (ton)	Biaya usaha tani (ha)	pendapatan bersih (ha)
1	La Pitu	Buruh tani	Tadah Hujan	0,23	1.326.066	-	1.326.066	5.785.504	5,3	1,22	-	5.785.504
2	Juhanl	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.624.000	-	1.624.000	5.800.000	5,2	1,46	-	5.800.000
3	Nurdin	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.596.000	-	1.596.000	5.700.000	5,1	1,43	-	5.700.000
4	P.Site	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.792.000	-	1.792.000	6.400.000	5,1	1,43	-	6.400.000
5	Rusli	Buruh tani	Tadah Hujan	0,28	1.512.000	-	1.512.000	5.400.000	5,3	1,48	-	5.400.000
6	Sase	Buruh tani	Tadah Hujan	0,31	1.736.000	-	1.736.000	5.600.000	5,3	1,64	-	5.600.000
7	Alle	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.827.000	-	1.827.000	6.300.000	5,1	1,48	-	6.300.000
8	Ibrahim	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.885.000	-	1.885.000	6.500.000	5,1	1,48	-	6.500.000
9	P. Maside	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	5,2	1,51	-	6.150.075
10	La Condong	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	5,3	1,54	-	6.150.075
11	P Laco	Buruh tani	Tadah Hujan	0,29	1.783.522	-	1.783.522	6.150.075	5,2	1,51	-	6.150.075
12	La Seleng	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,25	5.840.000	-	5.840.000	23.360.000	7,3	1,83	-	11.680.000
13	La Sarodding	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	7.705.600	-	7.705.600	24.320.000	7,6	2,20	-	12.160.000
14	Laupong	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	7.430.400	-	7.430.400	22.720.000	7,1	2,06	-	11.360.000
15	Adama	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.953.600	-	6.953.600	23.040.000	7,2	2,09	-	11.520.000
16	La Tipu	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.953.600	-	6.953.600	23.680.000	7,4	2,15	-	11.840.000
17	La Kama	Buruh tani	Irigasi Teknis	0,29	6.691.200	-	6.691.200	23.040.000	7,2	2,09	-	11.520.000
18	P. Bongbeng	Penggarap/pe milik s	Irigasi Teknis	0,30	7.292.800	2.643.970	4.648.830	22.720.000	7,1	2,13	8.813,2 33	6.953.383

PERKEMBANGAN LUAS PANEN TAHUN 2007 - 2014

Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Komoditi : Padi (Sawah dan Ladang)

No.	Kabupaten / Kota	T a h u n										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
1	Luwu	51.523	52.555	63.628	58.238	40.951	52.744	64.906				
2	Luwu Utara	29.269	29.177	31.311	32.889	31.784	35.968	38.550				
3	Luwu Timur	27.716	18.444	26.994	27.206	29.539	29.245	37.225				
4	Palopo	4.806	5.140	5.611	5.121	3.892	4.739	5.034				
5	Tator	20.053	27.250	33.790	17.730	19.856	20.600	15.390				
6	Toraja Utara	-	-	-	16.629	14.835	26.731	18.776				
7	Soppeng	36.745	41.013	43.914	43.796	45.080	45.786	48.059				
8	Wajo	92.966	113.434	94.216	96.219	118.491	142.342	124.490				
9	Bone	113.315	130.434	139.242	141.656	140.355	152.634	130.162				
10	Sinjai	20.173	19.993	20.782	23.005	23.670	24.036	24.856				
11	Bulukumba	39.792	43.462	42.372	41.699	43.088	142	43.748				
12	Selayar	2.670	3.072	2.183	3.999	4.076	4.505	5.537				
13	Bantaeng	12.964	14.780	13.921	15.271	16.216	15.601	17.049				
14	Jeneponto	16.022	18.493	16.192	20.081	20.196	21.214	24.200				
15	Takalar	23.478	24.344	24.065	27.420	26.229	26.150	26.770				
16	Gowa	42.784	48.106	47.331	51.998	50.339	57.275	62.665				
17	Makassar	3.419	2.983	3.208	3.113	3.410	3.170	3.203				
18	Maros	38.145	37.341	41.785	44.571	43.339	46.710	48.042				
19	Pangkajene	20.740	21.807	22.783	24.551	24.058	26.568	29.185				
20	Barru	16.332	17.126	17.957	18.480	18.508	18.863	21.503				
21	Parepare	932	951	902	892	902	895	1.210				
22	Sidrap	66.741	72.742	75.104	69.013	80.331	80.880	83.686				
23	Enrekang	7.059	12.362	12.054	12.422	11.739	12.216	14.782				
24	Pinrang	83.089	82.708	82.670	90.355	78.348	90.380	94.079				
	SULSEL	770.733	836.298	862.017	886.354	889.232	981.394	983.107				

PERKEMBANGAN PRODUKSI TAHUN 2007 - 2014

( ton)

Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Komoditi : Padi (Sawah dan Ladang)

No.	Kabupaten / Kota	Tahun										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	Luwu	253.791	262.403	325.003	261.753	196.437	245.876	306.969	339.440			
2	Luwu Utara	109.507	120.223	133.548	140.189	149.660	158.534	185.383	228.472			
3	Luwu Timur	129.106	83.494	144.326	117.649	142.508	141.574	187.667	186.212			
4	Palopo	20.589	22.828	23.880	21.807	21.222	26.118	28.364	18.894			
5	Tator	84.536	120.000	151.634	79.736	89.029	92.310	67.620	95.249			
6	Toraja Utara	-	-	-	83.409	70.764	129.816	80.756	117.995			
7	Soppeng	219.109	251.861	284.452	252.564	260.220	269.763	275.164	299.367			
8	Wajo	322.343	525.647	449.359	423.085	601.928	706.876	653.077	709.605			
9	Bone	504.664	588.523	597.808	688.871	644.279	728.176	643.568	794.952			
10	Sinjai	93.695	98.465	100.773	129.427	114.143	115.965	120.222	118.510			
11	Bulukumba	185.544	203.241	189.577	199.053	228.956	224.373	222.291	225.290			
12	Selayar	7.671	111.331	9.201	17.280	20.653	22.186	26.635	26.480			
13	Bantaeng	65.004	65.471	72.282	72.299	87.685	83.774	95.275	84.102			
14	Jeneponto	71.822	96.981	84.602	113.482	126.474	118.686	127.556	120.174			
15	Takalar	113.273	112.215	121.814	134.943	120.375	125.232	122.544	134.378			
16	Gowa	203.546	217.991	248.912	267.744	222.037	272.173	317.158	334.366			
17	Makassar	14.455	13.733	13.781	13.492	11.871	15.784	13.993	14.525			
18	Maros	202.718	201.346	218.135	250.280	258.581	245.178	249.659	258.789			
19	Pangkep	177.344	123.246	129.607	130.777	119.664	138.221	144.797	155.644			
20	Baru	85.453	87.721	97.346	100.168	92.124	100.402	109.057	109.542			
21	Parepare	3.884	4.283	4.514	4.243	4.046	4.937	6.112	5.282			
22	Sidrap	339.123	375.981	384.224	327.280	427.028	457.986	461.617	463.213			
23	Enrekang	26.087	54.765	59.215	54.141	53.224	47.271	63.438	50.802			
24	Pinrang	461.276	441.755	480.185	498.769	448.795	531.799	526.910	546.748			
	SULSEL	3.635.140	4.083.354	4.324.178	4.382.442	4.511.703	5.003.010	5.035.832	5.438.031			

LUAS PENGGUNAAN LAHAN SAWAH MENURUT KABUPATEN/KOTA (Hektar)

Provinsi : 73. Sulawesi Selatan  
 Keterangan : Lahan Sawah (Total)  
 Tahun : 2014

: 02/04/2015

Kabupaten/Kota	Realisasi Dalam Satu Tahun						Jumlah
	Ditanami Padi			Tidak ditanami Padi		Jumlah	
	Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	ditanami tanaman lainnya	tidak ditanami apapun		
2	3	4	5	6	7		
01 Selayar	2.366	1.206	0	0	0	3.572	
02 Bulukumba	401	21.503	540	0	11	22.455	
03 Bantaeng	1.069	4.891	1.869	0	0	7.829	
04 Jeneponto	12.588	4.235	0	30	0	16.853	
05 Takalar	9.327	5.693	1.242	0	0	16.262	
06 Gowa	9.938	24.355	576	450	0	35.319	
07 Sinjai	4.781	10.707	0	56	319	15.863	
08 Maros	6.394	13.502	6.106	0	0	26.002	
09 Pangkajene Kepulauan	6.639	9.866	177	0	0	16.682	
10 Barru	6.682	7.584	0	340	212	14.818	
11 Bone	50.952	37.391	12.288	10.129	0	110.760	
12 Soppeng	8.532	18.166	1.268	178	0	28.144	
13 Wajo	47.014	47.548	130	0	126	94.818	
14 Sidenreng	5.787	39.867	1.435	182	112	47.383	
15 Pinrang	4.558	46.459	1	0	0	51.018	
16 Enrekang	10.109	706	0	46	0	10.861	
17 Luwu	5.813	32.113	0	172	1.506	39.604	
18 Tana Toraja	5.479	5.039	203	33	7	10.761	
19 Luwu Utara	7.510	17.744	1.057	1.222	287	27.820	
20 Luwu Timur	2.617	19.660	0	772	2.460	25.509	
21 Toaraja Utara	7.091	7.148	553	233	232	15.257	
22 Makassar	1.693	830	0	84	29	2.636	
23 Parepare	693	53	86	0	2	834	
24 Palopo	182	2.159	0	212	125	2.678	
<b>JUMLAH</b>	<b>218.215</b>	<b>378.425</b>	<b>27.531</b>	<b>14.139</b>	<b>5.428</b>	<b>643.738</b>	

PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS TAHUN 2007 - 2014

Provinsi : Sulawesi Selatan  
Kabupaten / Kota : Padi ( Sawah dan Ladang )

	Tahun													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Kota	49,26	49,93	51,08	44,95	47,97	46,62	47,29	49,77						
Luwu	37,41	41,20	42,65	42,62	47,09	44,08	48,09	51,02						
Luwu Utara	46,58	45,27	53,47	43,24	48,24	48,41	50,41	50,78						
Luwu Timur	42,84	44,41	42,56	42,58	54,53	55,11	56,34	54,28						
Palopo	42,16	44,04	44,88	44,97	44,84	44,81	43,94	47,11						
Tator	-	-	-	50,16	47,7	48,56	43,01	44,18						
Toraja Utara	59,63	61,41	64,77	57,67	57,72	58,92	57,26	58,86						
Soppeng	34,67	46,34	47,69	43,97	50,80	49,66	52,46	52,96						
Wajo	44,54	45,27	42,93	48,63	45,90	47,71	49,44	51,90						
Bone	46,45	49,25	48,49	56,26	48,22	48,25	48,37	48,12						
Sinjai	46,63	46,76	44,74	47,74	53,14	53,24	50,81	52,77						
Bulukumba	28,73	36,23	42,15	43,21	50,67	49,25	48,10	45,50						
Selayar	50,14	44,30	51,92	47,34	54,07	53,7	55,88	53,27						
Bantaeng	44,83	52,44	52,25	56,51	62,62	55,95	52,71	54,22						
Jeneponto	48,25	46,10	50,62	49,21	45,89	47,89	45,78	48,64						
Takalar	47,58	45,31	52,59	51,49	44,11	47,52	50,61	49,69						
Gowa	42,28	46,21	42,96	43,34	34,81	49,79	43,69	49,05						
Makassar	53,14	55,40	52,20	56,15	59,66	52,49	51,97	51,60						
Maros	56,58	56,52	56,89	53,27	49,74	52,03	49,61	51,02						
Pangkep	52,32	51,22	54,21	54,2	49,78	53,23	50,72	50,74						
Barru	41,67	45,04	50,04	47,57	44,86	55,16	50,51	52,14						
Parepare	50,81	51,59	51,16	47,42	53,16	56,63	55,16	53,64						
Sidrap	37,81	44,30	49,12	43,58	45,34	38,70	42,92	47,79						
Enrekang	55,52	53,41	58,08	55,20	57,28	58,84	56,01	57,62						
Pinrang	47,16	48,83	50,16	49,44	50,74	50,98	51,22	52,18						
SULSEL														

Legenda : Data kosong ( - ) karena Kabupaten tersebut pada saat itu belum terbentuk

**LUAS LAHAN SAWAH BERDASARKAN PENGURAIANNYA  
PADA SETIAP KABUPATEN/KOTA**

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Dalam Satu Tahun										Jumlah Luas lahan	Jumlah Luas tanam
		Ditanami Padi					Tidak ditanami padi						
		Satu Kali	Dua kali	≥ Tiga kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Tanaman Lainnya	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Tanaman Lainnya	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Tanaman Lainnya			
1	Selayar	2.439	1.146	0	0	56	3.641	4731					
2	Bulukumba	577	20.370	1.479	0	11	22.437	45754					
3	Bantaeng	1.442	5.005	1.382	0	0	7.829	15598					
4	Jeneponto	12.914	3.767	63	88	65	16.897	20637					
5	Takalar	8.495	7.468	746	0	0	16.709	25669					
6	Gowa	10.053	19.784	429	632	0	30.898	50908					
7	Sinjai	3.703	11.053	0	0	0	14.766	25829					
8	Maros	9.567	13.423	2.812	200	0	26.002	44849					
9	Pangkep	6.186	10.266	180	50	0	16.682	27258					
10	Barru	0	7.730	5.481	600	7	13.818	31903					
11	Bone	35.594	49.699	3.725	0	0	89.018	146167					
12	Soppeng	10.537	15.836	0	226	968	27.567	42209					
13	Wajo	40.927	46.123	471	0	454	87.975	134586					
14	Sidrap	3.525	40.750	476	122	240	45.113	86453					
15	Pinrang	5.682	44.162	1	0	0	49.845	94009					
16	Enrekang	5.654	3.778	1.068	412	30	10.942	16414					
17	Luwu	7.368	31.170	0	314	785	39.637	69708					
18	Tana Toraja	3.244	7.252	213	35	17	10.761	18387					
19	Luwu Utara	6.925	16.782	1.050	1.750	1.250	27.757	43639					
20	Luwu Timur	2.827	18.316	0	1.286	659	23.088	39459					
21	Toraja Utara	3.611	8.589	370	100	104	12.774	21899					
22	Makassar	1.693	830	0	84	29	2.623	3353					
23	Parepare	922	0	0	1	0	923	922					
24	Palopo	190	2.288	0	200	0	2.678	4766					

RATA - RATA LUAS LAHAN SAWAH PER RT USAHA PERTANIAN

KAB	LUAS LAHAN (m <sup>2</sup> )	KET
BONE	5.689,88 (M2)	
SOPPENG	4.341,70	
WAJO	10.641,07	
SIDRAP	8.774,09	
PINRANG	9.488,18	
SULSEL	4.164,51	

LUAS LAHAN SAWAH BELUM BERIGASI (TADAH HUJAN) tahun 2012

KAB	LUAS LAHAN (Ha)	KET
BONE	5.525 Ha	
SOPPENG	488 Ha	
WAJO	1.620, Ha	
SIDRAP	6.227 ha	
PINRANG	876 ha	
SULSEL		

LUAS LAHAN SAWAH BERIGASI TEKNIS, th 2012

KAB	LUAS LAHAN (Ha)	KET
BONE	14.623 Ha	
SOPPENG	10.411 ha	
WAJO	7.439 ha	
SIDRAP	28.985 ha	
PINRANG	37.632 ha	
SULSEL		

Jumlah RT USAHA PERTANIAN padi

KAB	JUMLAH RT	KET
BONE	86.033 RT	
SOPPENG	18.455 RT	
WAJO	39.038 RT	
SIDRAP	26.004 RT	
PINRANG	32.063 RT	

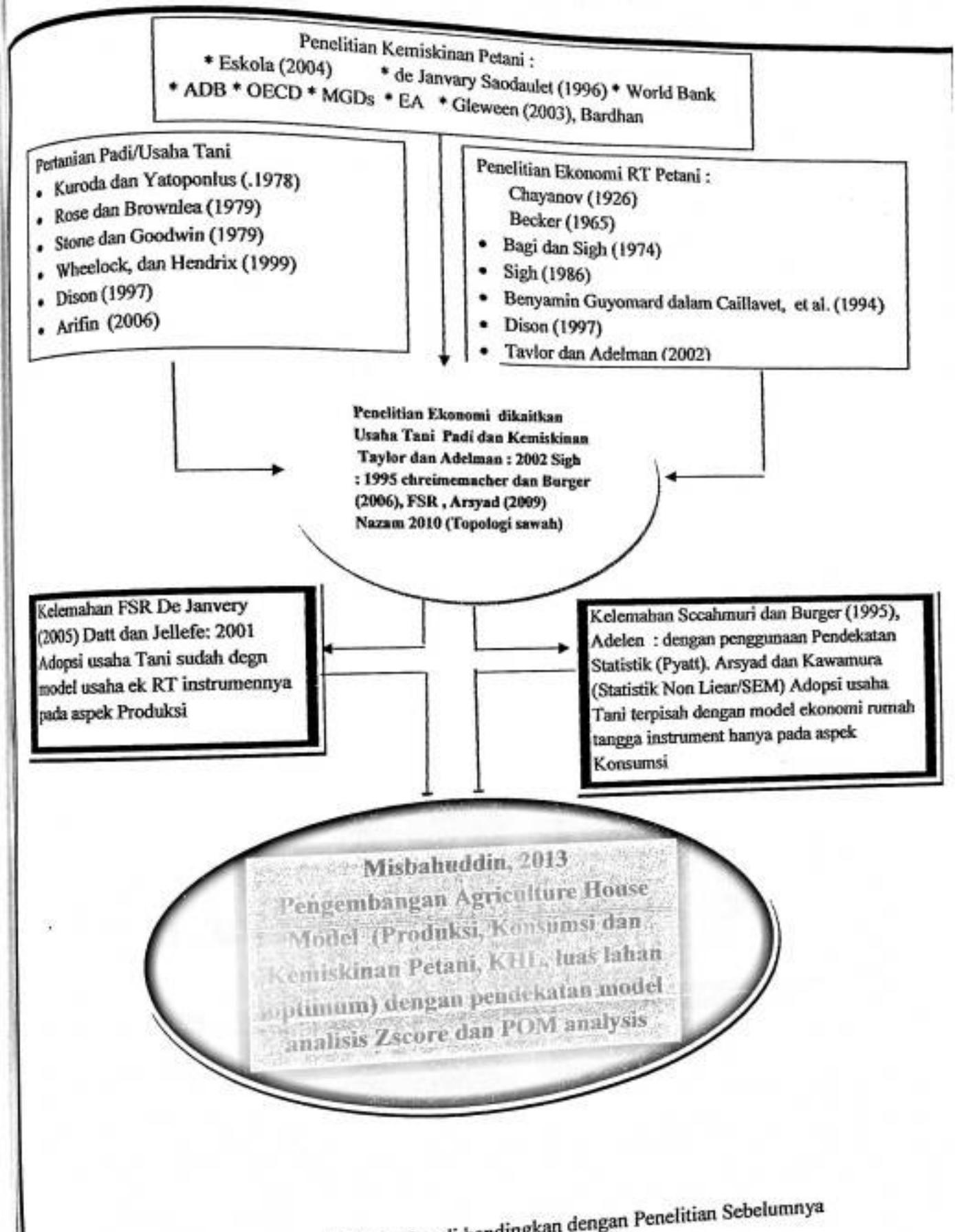


Tabel 6.1 Analisis Pendapatan Petani Padi Miskin

No	Daerah/Kabupaten	Rata - Rata Luas lahan RTPPM		Rata-rata produksi (ton)		Standar luas Lahan Optimum		Rata - rata Kekurangan Luas Lahan utk keluar dari GK terhadap std luas lahan optimum		Rata - rata Pendapatan Rp.	
		Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Sawah Milik Sendiri	Lahan garapan milik org Lain	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil
1	BONE	5,03	35,77	0,25	1,84	0,958	1,92	0,908	1,56	7,120,000	3,560,000
2	SOPPENG	9,58	23,14	0,49	1,17	0,986	1,97	0,890	1,74	9,186,667	3,460,000
3	WAJO	7,31	22,34	0,39	1,16	0,904	1,81	0,831	1,59	3,876,364	3,817,465
4	SIDRAP	11,21	19,94	1,03	1,12	0,946	1,89	0,834	1,69	3,322,012	4,121,178
5	PINRANG	5,03	28,16	1,03	1,10	0,973	1,95	0,923	1,66	3,572,503	3,386,861
	Rata-rata	7,63	25,87	0,64	1,28	0,95	1,91	0,88	1,65	5,415,509	3,669,103

Irigasi teknis

No	Daerah/Kabupaten	Rata - Rata Luas lahan RTPPM		Rata-rata produksi (ton)		Standar luas Lahan Optimum		Rata - rata Kekurangan Luas Lahan utk keluar dari GK (garis kemiskinan per orang)		Rata - rata Pendapatan Rp.	
		Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Sawah Milik Sendiri	Lahan garapan milik org Lain	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil	Lahan Milik Sendiri (are)	Lahan garapan Miliki Org lain/sakap/bagi hasil
1	BONE	1,27	9,06	0,10	0,63	0,505	1,01	0,492	0,92	5,280,241	2,806,708
2	SOPPENG	2,42	5,86	0,16	0,40	0,552	1,10	0,528	1,05	2,433,654	1,996,718
3	WAJO	1,85	5,66	0,10	0,39	0,478	0,96	0,459	0,90	3,720,000	4,809,975
4	SIDRAP	2,84	5,05	0,27	0,42	0,196	0,39	0,168	0,34	3,658,988	7,120,000
5	PINRANG	1,27	7,13	0,39	0,10	0,203	0,41	0,191	0,34	3,706,962	6,490,667
	Rata-rata	1,93	6,55	0,20	0,39	0,39	0,77	0,37	0,71	3,559,969	4,644,813



**Penelitian Kemiskinan Petani :**  
 \* Eskola (2004) \* de Janvary Saodaulet (1996) \* World Bank  
 \* ADB \* OECD \* MGDs \* EA \* Gleween (2003), Bardhan

**Pertanian Padi/Usaha Tani**  
 • Kuroda dan Yatoponlus (.1978)  
 • Rose dan Brownlea (1979)  
 • Stone dan Goodwin (1979)  
 • Wheelock, dan Hendrix (1999)  
 • Dison (1997)  
 • Arifin (2006)

**Penelitian Ekonomi RT Petani :**  
 Chayanov (1926)  
 Becker (1965)  
 • Bagi dan Sigh (1974)  
 • Sigh (1986)  
 • Benyamin Guyomard dalam Caillavet, et al. (1994)  
 • Dison (1997)  
 • Tavlör dan Adelman (2002)

**Penelitian Ekonomi dikaitkan Usaha Tani Padi dan Kemiskinan**  
 Taylor dan Adelman : 2002 Sigh : 1995 chreinemacher dan Burger (2006), FSR , Arsyad (2009) Nazam 2010 (Topologi sawah)

**Kelemahan FSR De Janvery (2005) Datt dan Jellefe: 2001 Adopsi usaha Tani sudah degn model usaha ek RT instrumennya pada aspek Produksi**

**Kelemahan Socahmuri dan Burger (1995), Adelen : dengan penggunaan Pendekatan Statistik (Pyatt). Arsyad dan Kawamura (Statistik Non Liar/SEM) Adopsi usaha Tani terpisah dengan model ekonomi rumah tangga instrument hanya pada aspek Konsumsi**

**Misbahuddin, 2013**  
**Pengembangan Agriculture House Model (Produksi, Konsumsi dan Kemiskinan Petani, KHL, luas lahan optimum) dengan pendekatan model analisis Zscore dan POM analysis**

Gambar . Posisi Penelitian di bandingkan dengan Penelitian Sebelumnya



**Misbahuddin, SE, M.Si**, lahir di Rappang Sulawesi Selatan, 08 Oktober 1971 penulis tamat SD 9 Baranti dan SMP Negeri Baranti Sidrap dan jurusan fisika pada SMA negeri 157 Rappang Kabupaten Sidrap tammat tahun 1990, menyelesaikan studi S1 di STIM- LPI Makassar, Magister Agribisnis pada Tahun 2000 di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. S3 Ilmu Ekonomi pada program Doktor UNHAS selesai 21 Januari 2016. Pekerjaan Tetap : Dosen PPS STIM - LPI Makassar, Jabatan Fungsional Lektor, Pangkat/Golongan : IIIc.(Maret 2010). Alamat : Jln. Toddopuli Raya Timur, Ilma Green Residence Dahlia 1 No. 43 Kota Makassar. ..

Istri : Nashriah A.Akil, SE,M.Si, lahir di Sengkang, 03 Januari 1974,  
Anak : 1). Ainun Mubin Misbah, N, (kelas VIII.B SMP Negeri 8 Makassar 2).  
Ahmad Qaafi Mulyan (kelas II SD Negeri IKIP 1 Makassar).

Orang Tua : Ayah : Drs. Mahmuddin Razak, (Pekerjaan mantan Anggota DPRD kab. Sidrap/Pensiunan PNS), Ibu :Syamsiah Salimeng. Saudara –  
Saudara : 1). Khairunasrillah, M. SE,M.Si 2). Naziruddin, MS, S.Pt, 3). Amrillah, M, SE 4). Alauddin, M. SE 5). Hamiduddin, SE,

Selain pendidikan formal, penulis juga aktif mengikuti kursus singkat yang berhubungan dengan bidang ilmu yang didalami di antaranya Kursus Pengembangan Agribisnis, Model Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, Inovasi, UKM dan Koperasi, LPB/BDS - BTC Sulawesi Selatan dan Sistem Rcsigudang, Kewirausahaan, Klinik Restrukturisasi Usaha, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), Pendirian Konsultan UMKM, kursus dan pelatihan model – model bisnis, Ekonomi Kreatif, dll.

Di bidang penelitian, penulis aktif dalam berbagai penelitian yang menyangkut ( Perencanaan Pembangunan, Kemiskinan, Ekonomi Wilayah, Manajemen UKM dan Koperasi, Kewirausahaan, Agribisnis, Pertanian, dan Ketahanan pangan).

Di bidang lain penulis juga aktif memimpin beberapa lembaga dan NGO, diantaranya ketua dewan Pendiri Yayasan Pemuda Mandiri Indonesia (samudra), Ketua LBH Yayasan Patriot Indonesia (YPI) Sulawesi Selatan dan Ketua Yayasan Makassar Manajemen Consulting (MMC). Dibidang Konsultan UKM dan Bisnis penulis juga tercatat sebagai Konsultan UKM dan Koperasi Kementerian Koperasi, Kemenristek, BPPT dan Kementerian Perindustrian.

Penulis juga trainer Kewirausahaan Pemuda, Pemuda Pelopor, Tim Ahli Klinik Bisnis Terpadu (KBT) Kota Makassar dan Tim Ahli Ekonomi KAPET Pare – Pare dan Salah satu deklator “ Gerakan Mahasiswa Menulis Buku” GMBB” di Kampus UNHAS tahun 2012.

Penulis juga aktif di organisasi Pemuda Sosial dan Kemasyarakatan antara lain : Pemuda Panca Marga (PPM) Sulawesi Selatan, Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, mantan Pengurus KNPI Kota Makassar. Ketua umum forum Konsultan KUMKM seluruh Indonesia, Forum Konsultan Pengembangan Ekonomi Daerah tertinggal dan Sistem Resi gudang Regional 2 Sulawesi. Karang Taruna Kota Makassar, Ikatan Sarjana Asal (ISA) Kabupaten Sidrap. Mantan pengurus Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Mantan Pengurus Forum Macasar (Forum Mahasiswa Pascasarjana) UNHAS.

Selain sebagai **Dosen Tetap Program Magister Manajemen STIM LPI Makassar**, juga mengajar di beberapa kampus antara lain : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, STIE Nobel Indonesia Makassar dan Akademi Manajemen Perpajakan (AMP - API) Makassar. Selama 5 tahun (1998 -2013) sebagai dosen tetap Program Pasca Sarjana (S2) Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Pare – Pare (UMPAR). Selain aktif sebagai pengajar, bersama dengan teman-teman saat ini penulis merintis Perguruan **Akademi Komunitas “Entrepreneur” Instruktur penciptaan Wirausaha Baru Perdesaan, dan Instruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Coaching dan Mentoring TOT Kewirausahaan.**

Buku yang telah di susun/dikarang : **Analisis Data Penelitian Dengan Statisk, Penerbit Bhumi Aksara, Jakarta (2013). Kewirausahaan (Teori dan Aplikasinya (2014), Metodologi Penelitian Sumberdaya Manusia (2016).** Telah menulis jurnal sebanyak 13 lokal, nasional dan internasional.

Makassar, Januari 2016  
Hormat Saya

**MISBAHUDDIN, SE,M.Si**